



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

2. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah kawasan yang mencakup wilayah administrasi Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang, baik yang merupakan KPBPB maupun non-KPBPB.
3. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Dewan KPBPB BBK adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengoordinasikan dalam kegiatan Badan Pengusahaan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun.
4. Badan Pengusahaan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun.
5. Rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah rencana yang disusun sebagai arah kebijakan strategis dalam rangka pengintegrasian pengembangan, pengelolaan, dan pembangunan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun untuk peningkatan daya saing Kawasan, termasuk rencana rinci pembangunan di kawasan strategis Batam, Bintan, dan Karimun.
6. Kawasan Strategis Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan BBK sebagaimana dimuat dalam Rencana Induk.
7. Rencana Rinci Pembangunan adalah rencana pembangunan yang disusun pada Kawasan Strategis sebagai operasionalisasi Rencana Induk untuk menetapkan peruntukan ruang dan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan potensi dan kegiatan investasi yang diperlukan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk berfungsi sebagai:
 - a. pedoman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terkait pengembangan Kawasan BBK;
 - b. acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang di Kawasan BBK;
 - c. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Pengusahaan sesuai kewenangan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan BBK; dan
 - d. acuan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan investasi, usaha dan/atau kegiatan di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Induk terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Strategi Utama Pengembangan Kawasan BBK;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan BBK;
 - d. Program/Proyek Prioritas Kawasan BBK;
 - e. Kawasan Strategis; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan BBK.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- (2) Peninjauan kembali terhadap Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri selaku Ketua Dewan KPBPB BBK.
- (3) Dalam hal hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu ditindaklanjuti dengan revisi Rencana Induk, Menteri selaku Ketua Dewan KPBPB BBK melakukan revisi Rencana Induk setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (4) Revisi Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Dewan KPBPB BBK.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka operasionalisasi Rencana Induk, Badan Pengusahaan menyusun dan menetapkan Rencana Rinci Pembangunan di Kawasan Strategis BBK setelah mendapatkan persetujuan Menteri selaku Ketua Dewan KPBPB BBK.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan yang memperluas deliniasi Kawasan Strategis di luar deliniasi KPBPB BBK, baik di wilayah perairan maupun kawasan reklamasi yang terintegrasi dengan wilayah daratan KPBPB BBK maka dilakukan pengintegrasian ke dalam Rencana Rinci Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Rinci Pembangunan paling sedikit memuat:
 - a. deliniasi Kawasan Strategis;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Strategis;

c. kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi;
 - d. rencana pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. rencana dan ketentuan peruntukan ruang;
 - f. indikasi program; dan
 - g. pengendalian pengembangan Kawasan Strategis.
- (4) Peruntukan ruang dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan potensi dan kegiatan investasi yang termuat di dalam Rencana Rinci Pembangunan sinergi dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional Batam, Bintan, dan Karimun, rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.
- (5) Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan mengacu pada pedoman penyusunan Rencana Rinci Pembangunan yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Masa berlaku Rencana Rinci Pembangunan mengikuti masa berlaku Rencana Induk.

Pasal 5

Rencana Rinci Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pembangunan dan pengembangan investasi di Kawasan Strategis;
- b. pendetailan untuk operasionalisasi Rencana Induk;
- c. acuan Badan Pengusahaan dalam perolehan hak pengelolaan;
- d. acuan dalam alokasi ruang dan pemanfaatan lahan;
- e. bahan evaluasi pemanfaatan ruang dan lahan;
- f. acuan Badan Pengusahaan dalam menerbitkan penetapan alokasi lahan;
- g. acuan Badan Pengusahaan dalam mengeluarkan konfirmasi kesesuaian perencanaan kegiatan pemanfaatan ruang untuk proses pemberian KKPR; dan
- h. panduan rancang bangun dan lingkungan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal Rencana Rinci Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum ditetapkan, dasar penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mengacu pada rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan dan investasi yang sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana Rinci Pembangunan, Badan Pengusahaan diberikan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan Badan Pengusahaan.
- (3) Dalam hal di atas areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat penguasaan dan pemilikan masyarakat, Badan Pengusahaan wajib menyelesaikan penguasaan dan pemilikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mencakup wilayah darat dan wilayah perairan dan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang mengacu pada Rencana Rinci Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau dalam hal Rencana Rinci Pembangunan belum ditetapkan maka mengacu pada rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha di Kawasan Strategis oleh Badan Pengusahaan mencakup wilayah darat dan wilayah perairan dan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

- (1) Program/proyek Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperlakukan sebagai proyek strategis nasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai proyek strategis nasional berlaku serta merta terhadap Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

- (1) Dewan KPBPB BBK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi serta kegiatan berusaha di KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan BBK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Menteri selaku Ketua Dewan KPBPB BBK kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan/atau
 - c. pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 12

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam pelaksanaan Rencana Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di KPBPB BBK yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
2. permohonan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diajukan sebelum terbitnya Peraturan Presiden ini namun belum diterbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maka pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan BBK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yuda Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK) secara geostrategis merupakan suatu kawasan yang berada di Selat Malaka sebagai jalur logistik dan perdagangan internasional sekaligus jalur utama untuk masuknya investasi, barang, dan jasa serta pusat pertumbuhan dan penyaluran barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, pada masa yang akan datang Kawasan BBK ini juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan industri yang *high and valuable technology* dengan penciptaan nilai tambah tinggi. Hal inilah yang membuat Kawasan BBK dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan menjanjikan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional.

Pada rentang tahun 1991–1997, Kawasan BBK khususnya Batam, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu rata-rata mencapai 17% (tujuh belas persen). Namun dengan adanya perubahan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2011–2015, pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sekitar 3,87% (tiga koma delapan tujuh persen), lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,98% (satu koma sembilan delapan persen), namun di tahun 2018–2019 mengalami penurunan kembali.

Beberapa kendala yang dihadapi di Kawasan BBK di antaranya belum terbentuknya model pengembangan bisnis yang andal; belum kokohnya rantai pasok yang terintegrasi; tumpang tindih regulasi dan kepentingan antarpemangku kepentingan; simpul transportasi, konektivitas, dan sistem logistik yang belum optimal; serta hambatan lainnya dalam bidang mekanisme perizinan dan kepabeanaan. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK tidak pernah kembali pada angka pertumbuhan 17% (tujuh belas persen).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan BBK, maka perlu dilakukan pengintegrasian Kawasan BBK secara terpadu dan sinergi. Pengintegrasian yang dimaksud mencakup pengembangan sektor industri dan jasa strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur BBK. Selain itu diperlukan adanya terobosan perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan kemudahan investasi.

Pengintegrasian Kawasan BBK diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi; penguatan konektivitas dan sistem logistik; peningkatan arus barang dan penumpang; peningkatan kunjungan wisatawan; serta penguatan tata kelola pengembangan Kawasan BBK. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan Kawasan BBK yang komprehensif, terintegrasi, dan terpadu yang selanjutnya disebut dengan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dimaksudkan untuk dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan program/proyek prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK.

I.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK bertujuan untuk menyusun arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pengembangan Kawasan BBK. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, beberapa sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

1. Teridentifikasinya kebijakan terkait pengembangan Kawasan BBK;
2. Teridentifikasinya potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan Kawasan BBK;
3. Terumuskannya strategi utama (*grand strategy*) dan rencana pengembangan Kawasan BBK;
4. Terumuskannya indikasi program/proyek prioritas dan kawasan strategis; dan
5. Terumuskannya mekanisme monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

I.3 Ruang Lingkup dan Dimensi Waktu Perencanaan

I.3.1 Wilayah Perencanaan

Lingkup wilayah dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK mencakup 38 kecamatan di 4 kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Kota Batam, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sungai Beduk, dan Kecamatan Batu Aji.
2. Kabupaten Bintan, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Toapaya.
3. Kabupaten Karimun, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Ungar.
4. Kota Tanjungpinang, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Gambar 1.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

1.3.2 Kedudukan Rencana Induk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang pada tingkat nasional dan daerah. Rencana Induk tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada, namun menjadi dokumen yang komplementer dengan dokumen perencanaan.

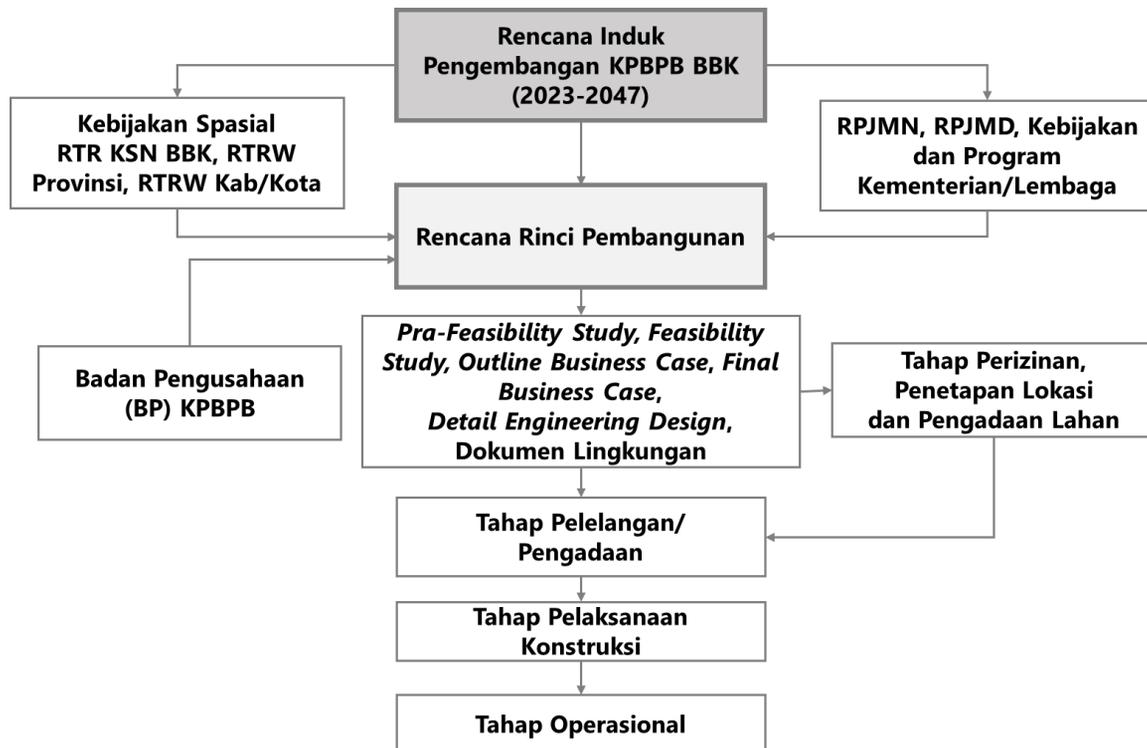
Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi maupun RPJMD Kabupaten/Kota, kebijakan sektoral kementerian/lembaga, dan kebijakan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai tugas dan kewenangannya untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun Kawasan BBK. Selain itu, Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK juga menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Gambar 1.2 Kedudukan Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



I.3.3 Dimensi Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

BAB II STRATEGI UTAMA PENGEMBANGAN KAWASAN BBK

II.1 Visi Pembangunan Kawasan BBK Tahun 2023–2047

Visi pembangunan Kawasan BBK Tahun 2023–2047 adalah menjadikan **Kawasan BBK sebagai hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.**

Misi pembangunan Kawasan BBK Tahun 2023–2047 adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi kebijakan yang sinergi dan optimal;
2. Struktur ekonomi yang terpadu dan berdaya saing;
3. Percepatan pembangunan yang merata dan terintegrasi;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kawasan BBK;
5. Perwujudan lingkungan dan ekosistem yang berkelanjutan; dan
6. Pemasaran dan promosi Kawasan BBK yang berorientasi global.

Visi dan misi pembangunan Kawasan BBK sebagaimana dimaksud kemudian diterjemahkan dalam pengembangan sektor bisnis utama di masing-masing wilayah terkait. Adapun sektor bisnis utama yang dikembangkan yaitu:

1. Kota Batam diarahkan menjadi hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tinggi, industri digital dan kreatif, pusat perdagangan internasional dan keuangan, dan pariwisata kesehatan yang terintegrasi.
2. Kabupaten Bintan diarahkan menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional, industri *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO), industri alumina, industri pengolahan makanan, industri pertahanan kedirgantaraan, dan industri olahraga. Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang diarahkan sebagai pusat wisata warisan budaya Melayu-Tiongkok, industri halal, industri perikanan, dan pusat bisnis.
3. Kabupaten Karimun diarahkan menjadi pusat kegiatan industri maritim, industri penampungan minyak, industri teknologi pertanian, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

II.2 Skenario Arah Pengembangan dan Pengintegrasian Kawasan BBK

Skenario arah pengembangan Kawasan BBK meliputi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi ke dalam 3 (tiga) skenario utama. Pertama, Skenario Pesimis dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara historis pada Kawasan BBK. Kedua, Skenario Moderat dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota di Kawasan BBK. Ketiga, Skenario Optimis dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga skenario tersebut membedakan derajat ekspansi ekonomi Kawasan BBK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

di mana Skenario Pesimis memiliki asumsi pengembangan paling konservatif, sementara Skenario Optimis memiliki asumsi pengembangan ekonomi paling progresif.

Berdasarkan pertimbangan tren pertumbuhan ekonomi saat ini, atas kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada KPBPB, maka dipilih Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2022–2046. Pemilihan Skenario Optimis tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kebijakan nasional melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang menata ulang pelaksanaan KPBPB BBK mulai dari perencanaan dan pengembangan kawasan yang terintegrasi, penataan kelembagaan, pengaturan kebijakan perizinan dan investasi, hingga pengaturan terkait fasilitas dan kemudahan di KPBPB BBK. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pemilihan Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2022–2046 menjadi acuan dasar dalam penentuan proyeksi data perekonomian lainnya. Adapun rincian proyeksi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Target Kebutuhan Investasi

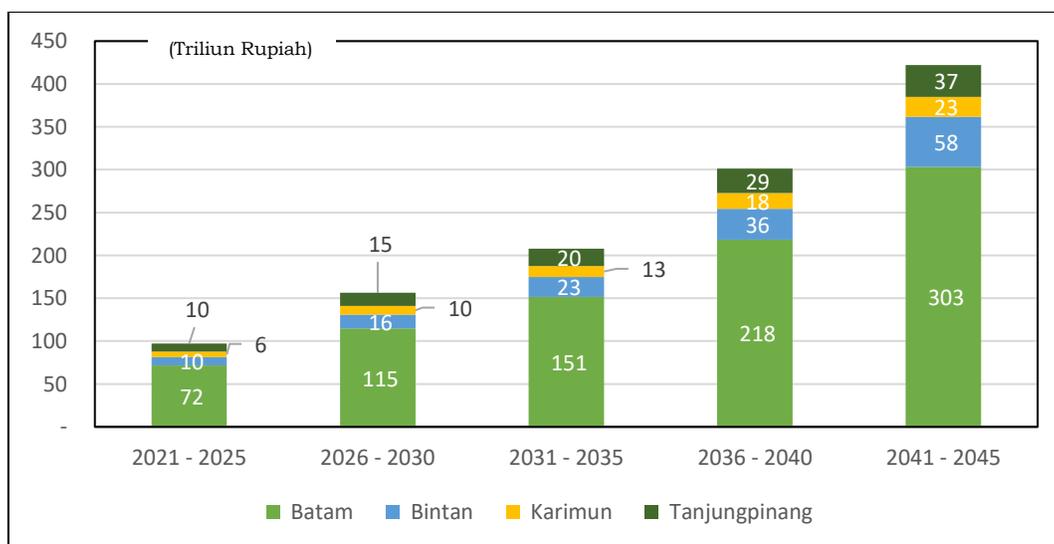
Kebutuhan investasi di Kawasan BBK pada Skenario Optimis ditargetkan rata-rata sebesar Rp97,2 triliun per tahun pada tahun 2022–2026 dan mencapai rata-rata sebesar Rp422,2 triliun per tahun pada tahun 2042–2046. Kebutuhan investasi tersebut kemudian dirinci berdasarkan kawasan, di mana pada tahun 2022–2026, target rata-rata kebutuhan investasi terbesar terdapat di Batam yaitu sebesar Rp71,8 triliun diikuti secara berurutan oleh Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Adapun pada tahun 2042–2046, target rata-rata kebutuhan investasi tahunan di Batam sebesar Rp303,3 triliun, Bintan sebesar Rp58,4 triliun, Karimun sebesar Rp23 triliun, dan Tanjungpinang sebesar Rp37,4 triliun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Gambar 2.1 Target Rata-Rata Kebutuhan Investasi Tahunan Kawasan BBK Tahun 2021-2045



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Target rata-rata kebutuhan investasi tahunan Kawasan BBK tahun 2022-2026 sebesar Rp97,2 triliun pada prinsipnya tidak hanya berasal dari kebutuhan investasi baru, melainkan juga berasal dari pengembangan investasi yang telah ada. Target rata-rata kebutuhan investasi baru tahunan Kawasan BBK tahun 2022-2026 adalah sebesar Rp28,2 triliun per tahun, sedangkan sisanya berasal dari pengembangan investasi eksisting. Secara rinci, target rata-rata pengembangan investasi baru tahunan sebagaimana dimaksud terdapat di Batam sebesar Rp17,9 triliun, di Bintan sebesar Rp8 triliun, di Karimun sebesar Rp2,1 triliun, dan di Tanjungpinang sebesar Rp0,2 triliun.

b. Target Ekspor dan Impor

Pertumbuhan ekspor Kawasan BBK ditargetkan mencapai 5,4% (lima koma empat persen) atau sebesar USD 69,34 miliar sepanjang tahun 2021-2025. Pertumbuhan ekspor tersebut ditargetkan akan terus meningkat secara bertahap mencapai 7,7% (tujuh koma tujuh persen) atau sebesar USD 252,14 miliar di tahun 2041-2045.

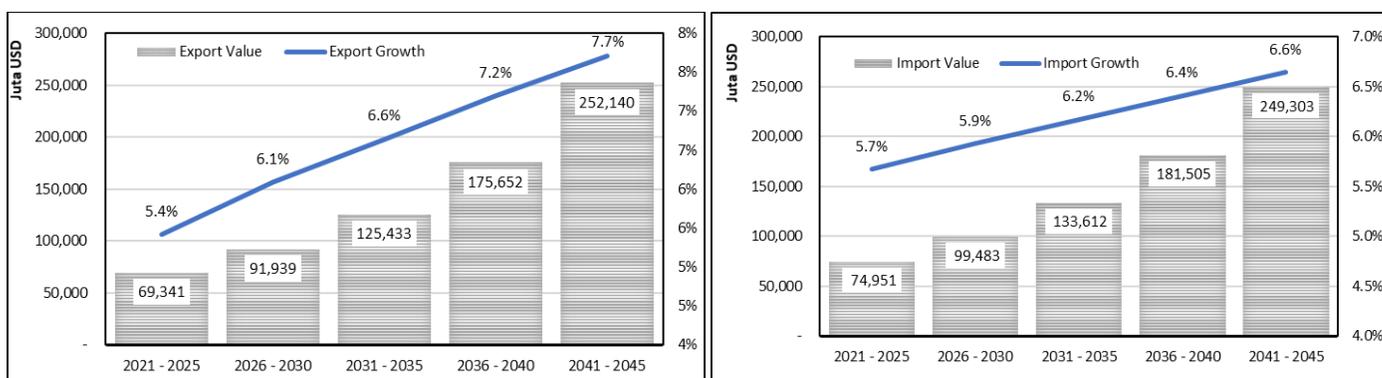
Sementara itu, pertumbuhan impor ditargetkan akan tumbuh lebih lambat dari 5,7% (lima koma tujuh persen) di tahun 2021-2025 atau sebesar USD 74,95 miliar menjadi 6,6% (enam koma enam persen) atau USD 249,3 miliar di tahun 2041-2045. Pertumbuhan impor yang lebih lambat diharapkan dapat mendorong penguatan rantai nilai global dan peningkatan insentif untuk industri berorientasi ekspor dan komoditas ekspor unggulan di Kawasan BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

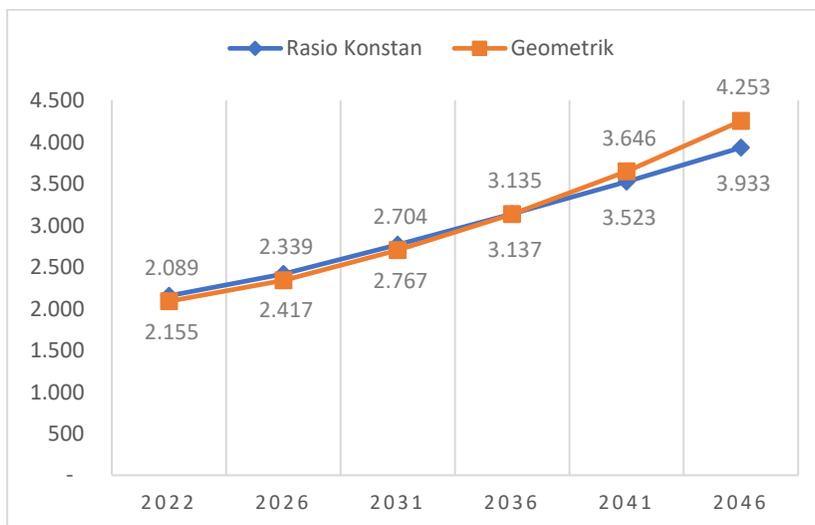
Gambar 2.2 Target Ekspor Kawasan BBK 2021–2045 (kiri) Target Impor Kawasan BBK 2021–2045 (kanan)



c. **Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan Kerja**

Total penduduk Kawasan BBK pada tahun 2022 mencapai sekitar 2 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK, maka jumlah penduduk diperkirakan akan bertambah. Berdasarkan proyeksi dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Kawasan BBK akan terus meningkat dari 2 juta penduduk di tahun 2022 menjadi 3,1 juta penduduk di tahun 2036 dan mencapai 4 juta penduduk di tahun 2046.

Gambar 2.3 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan BBK 2022–2046



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Dari proyeksi pertumbuhan penduduk tersebut, maka dapat dilakukan estimasi lapangan kerja yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan elastisitas pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan tercipta 1-1,2 juta lapangan kerja di tahun 2045.



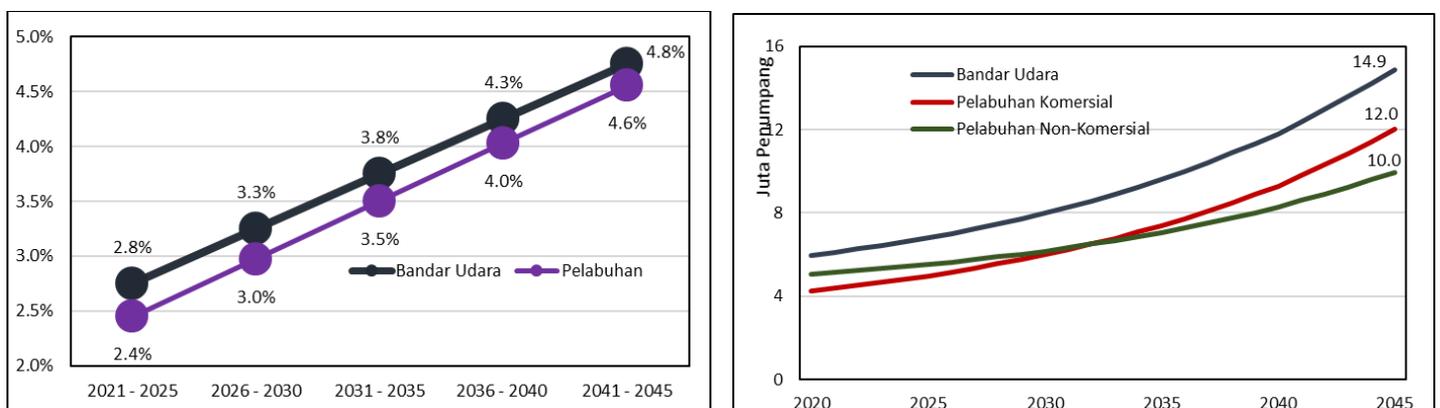
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

d. **Proyeksi Pertumbuhan Penumpang**

Sebagai langkah untuk mengestimasi kebutuhan infrastruktur logistik dan transportasi di Kawasan BBK, maka dilakukan estimasi terhadap pertumbuhan penumpang, baik di pelabuhan maupun bandar udara di Kawasan BBK. Proyeksi pertumbuhan penumpang angkutan udara meliputi bandar udara Hang Nadim di Batam dan bandar udara Haji Fisabilillah di Tanjungpinang. Adapun proyeksi penumpang angkutan laut meliputi pelabuhan komersial dan non-komersial.

Gambar 2.4 Proyeksi Pertumbuhan Penumpang Kawasan BBK 2021-2045 (kiri) Proyeksi Penumpang Pelabuhan dan Bandar Udara Kawasan BBK 2020-2045 (kanan)



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Peningkatan pertumbuhan penumpang angkutan laut diproyeksikan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penumpang angkutan udara. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata tahunan penumpang melalui bandar udara diperkirakan tetap lebih tinggi seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK. Pada tahun 2045, jumlah penumpang angkutan udara diperkirakan mencapai 14,9 juta penumpang per tahun, sementara pertumbuhan penumpang angkutan laut mencapai 22 juta penumpang per tahun.

e. **Kebutuhan Pemanfaatan Ruang dan Alur Pelayaran**

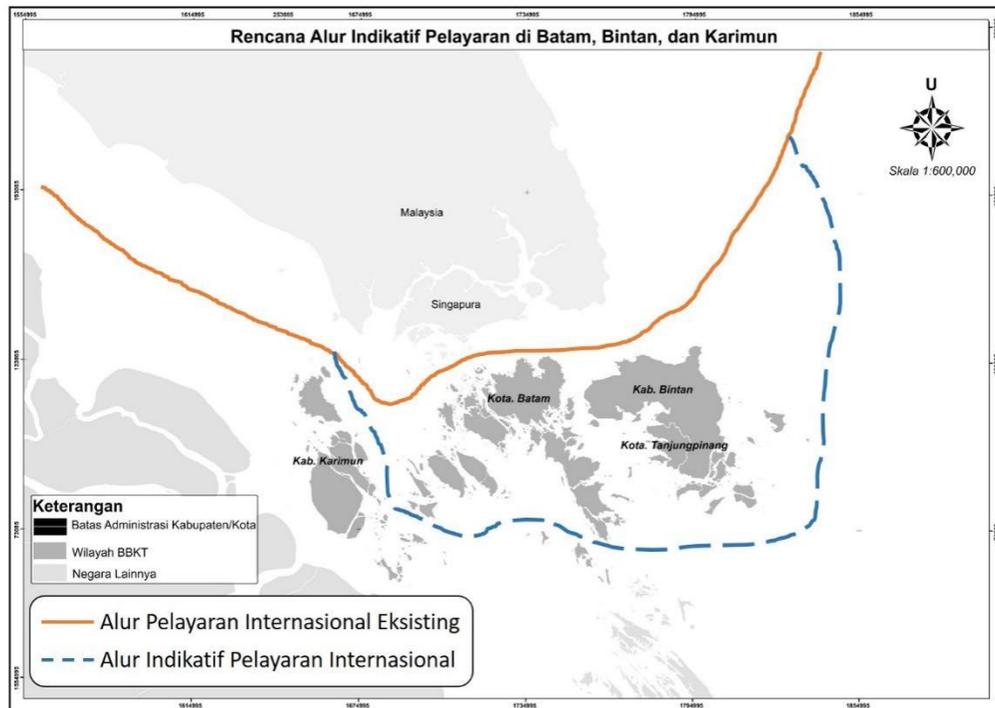
Untuk mencapai visi pembangunan Kawasan BBK 2023–2047, wilayah perairan dan laut sebagai potensi utama dari Kawasan BBK akan dioptimalkan secara menyeluruh untuk mendukung peran sebagai hub logistik internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Gambar 2.5 Alur Pelayaran Eksisting dan Rencana Alur Indikatif di Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Pengembangan alur pelayaran internasional dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi limpahan kargo dan kepadatan lalu lintas kapal pada alur pelayaran Selat Malaka. Rencana alur pelayaran indikatif yang dapat dilihat pada Gambar 2.5 berada pada koridor *East-West* yang melewati wilayah perairan laut bagian selatan Kawasan BBK dan dapat menjadi alternatif penghematan TCH (*Time Charter Hire*) dan biaya bahan bakar bagi perusahaan pelayaran. Alur pelayaran alternatif diperlukan pada saat alur pelayaran eksisting di Selat Malaka dalam kondisi padat.

Pengembangan alur pelayaran internasional diawali dengan melakukan pembaharuan data kelautan di Kawasan BBK. Pembaharuan data kelautan secara komprehensif dapat dilakukan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut untuk memenuhi standar persyaratan alur pelayaran internasional. Selanjutnya untuk dapat digunakan oleh seluruh pengguna laut secara Internasional maka alur tersebut harus ditetapkan oleh *International Maritime Organization* (IMO).



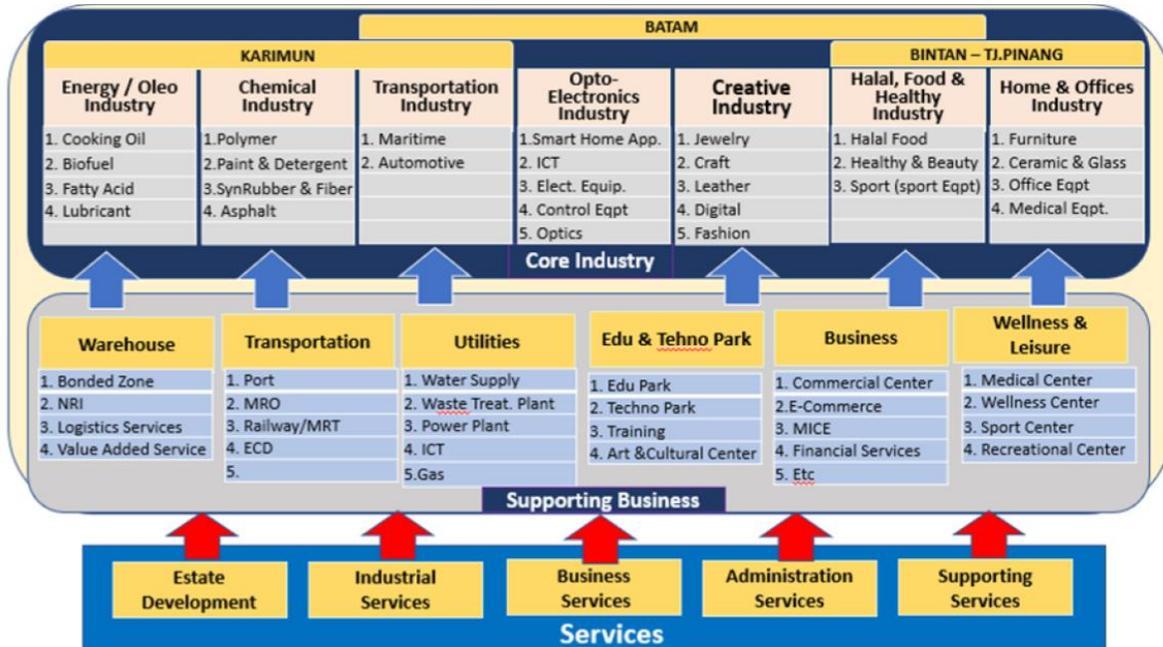
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

f. Strategi Pengembangan Klaster Industri

Pengembangan klaster industri di Kawasan BBK adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Pengembangan Klaster Industri di Kawasan BBK



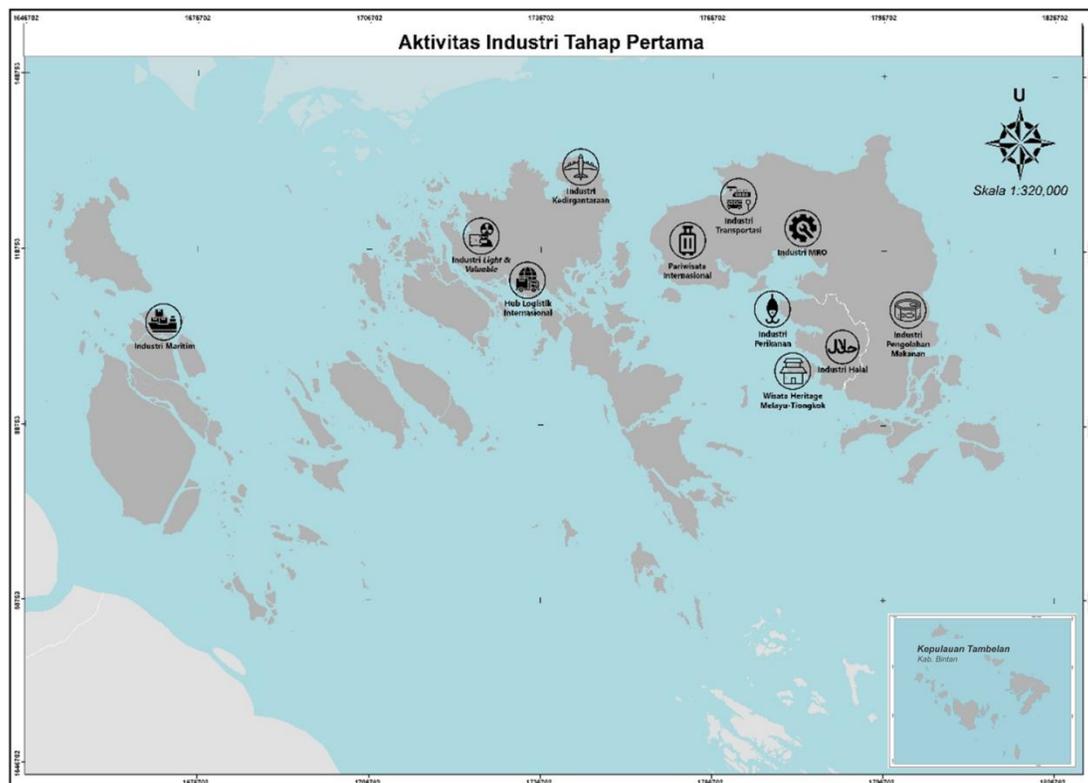
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Gambar 2.7 Pengembangan Kluster Industri Tahap Pertama



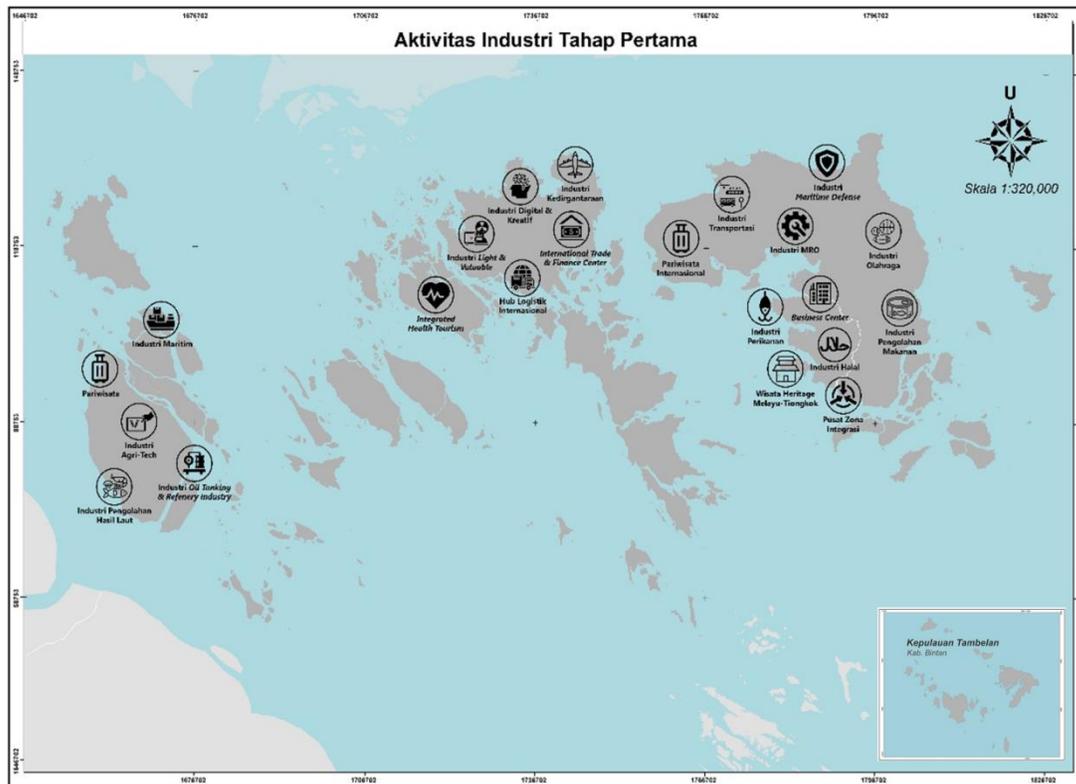
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Gambar 2.8 Pengembangan Klaster Industri Tahap Akhir



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Untuk mencapai visi pembangunan Kawasan BBK 2023-2047, maka dalam pelaksanaan pengembangan klaster industri perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama akan lebih difokuskan pada pengembangan klaster industri yang sudah berkembang. Kemudian pada tahap akhir, seluruh klaster industri diharapkan dapat berjalan sesuai arahan lokasi dan bisnis unggulan pengembangan Kawasan BBK. Adapun tahapan pengembangan klaster industri di Kawasan BBK dapat dilihat pada Gambar 2.6.

II.3 Strategi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi

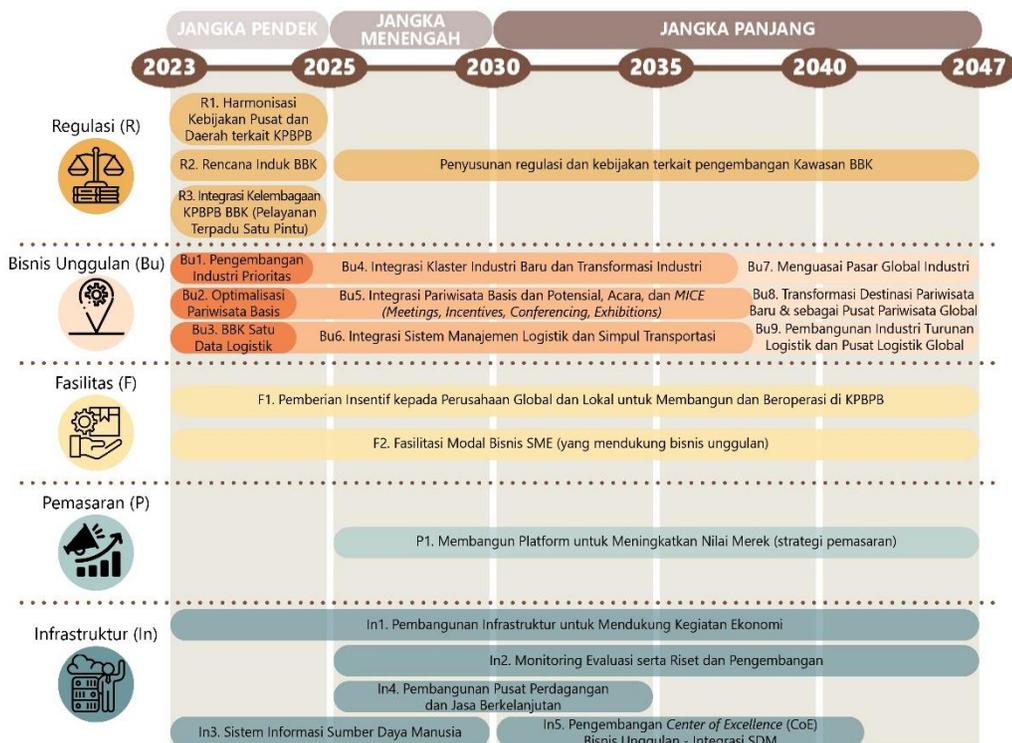
Berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi berdasarkan skenario optimis di Kawasan BBK pada tahun 2046 adalah sebesar 9,8% (sembilan koma delapan persen), sebagaimana terdapat pada Gambar 2.9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Gambar 2.9 Target Pengembangan Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Pengembangan Kawasan BBK terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, meliputi:

1. Tahap Pertama: Tahap ini merupakan tahap fundamental dimana kerangka kerja dan inisiatif perencanaan pembangunan akan diimplementasikan. Tahap ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dan Rencana Rinci Pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait KPBPB, integrasi kelembagaan KPBPB BBK, optimalisasi kegiatan industri dan pariwisata eksisting, serta pengembangan sistem logistik, rantai pasok, dan ketenagakerjaan. Tahapan ini dimulai pada tahun 2023-2025. Inisiatif dalam tahap ini akan memberikan dasar untuk prakarsa selanjutnya yang akan diwujudkan pada tahap kedua.
2. Tahap Kedua: Tahap ini merupakan tahap pertumbuhan dan pengembangan, dimana aktivitas kunci dilaksanakan untuk mengembangkan komponen untuk memperkuat bisnis unggulan. Inisiatif yang diusulkan dalam tahap ini akan menentukan pergeseran paradigma untuk Kawasan BBK dari model pengembangan yang bersifat parsial dan sektoral menjadi pengembangan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Tahapan ini akan diwujudkan dari 2025-2030.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

3. Tahap Ketiga: Tahap ini akan menjadi tahap stabilisasi dan pengembangan peran Kawasan BBK di tingkat global dimana dilakukan penilaian dan penataan kembali dari tahap sebelumnya. Inisiatif yang dilaksanakan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang. Tahapan terakhir akan diwujudkan dari 2031 hingga 2047.

Program/proyek yang diusulkan akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai target yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Implementasi program/proyek pada setiap tahapan akan sangat tergantung pada hasil dan capaian dari setiap program/proyek sebelumnya. Harmonisasi kebijakan dan regulasi merupakan tahap yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kegiatan dan tata kelola kelembagaan Kawasan BBK. Dengan mendorong implementasi dari setiap tahapan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perlu melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, serta melakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan terhadap program/proyek pada setiap tahapan pengembangan secara berkala.

II.3.1 Proyeksi Kebutuhan Ruang untuk Pengembangan Kawasan BBK

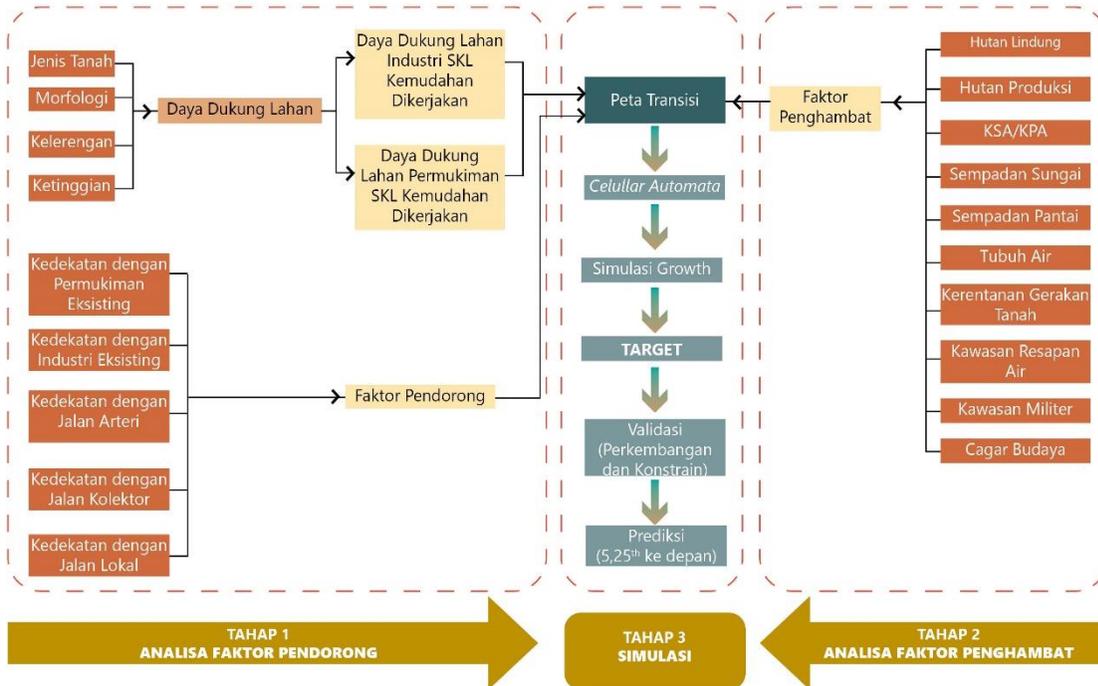
Proyeksi kebutuhan ruang Kawasan BBK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendorong, faktor penghambat, serta prediksi perkembangan lahan. Berdasarkan hal tersebut, luas lahan konstrain Kawasan BBK mencapai 59.380 hektare, sehingga pada wilayah tersebut tidak diproyeksikan untuk berkembang. Namun demikian, dapat dilakukan pengembangan apabila terdapat kebijakan yang mendasari pengembangan wilayah tersebut dan telah dilakukan proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan atau proses penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kemampuan lahan, Kawasan BBK dapat dikembangkan hingga mencapai 110.996,75 hektare. Sedangkan luas lahan permukiman dan industri eksisting adalah sebesar 57.475,25 hektare, sehingga Kawasan BBK dapat dikembangkan lagi mencapai 53.521,50 hektare.



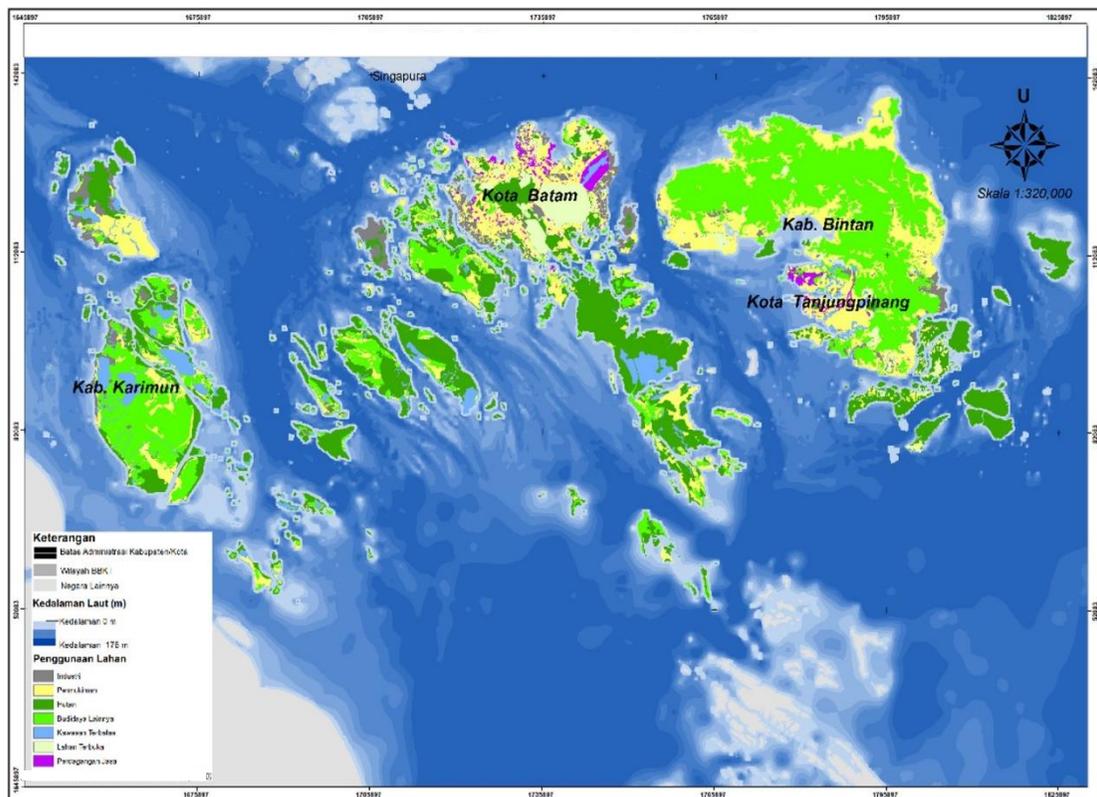
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Gambar 2.10 Alur Pikir Model Perkembangan Ruang Kawasan BBK



Gambar 2.11 Proyeksi Penggunaan Lahan Kawasan BBK Tahun 2047



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Kawasan BBK (hektare)

	Kota Batam		Kabupaten Bintan		Kabupaten Karimun		Kota Tanjungpinang	
	2023- 2030	2031- 2047	2023- 2030	2031- 2047	2023- 2030	2031- 2047	2023- 2030	2031- 2047
Industri	7.241,2	3.708,7	6.324,9	2.188,6	4.365,4	3.783,2	868,4	32,9
Permukiman	15.974,3	7.558,4	6.231,9	13.622,6	9.162,5	9.853,2	6.019,7	2.035,3
Pariwisata	9.601,2		28.626,8		1.006,2		175,4	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

1. Pola perubahan penggunaan lahan yang akan berkembang berada di:
 - a. Pesisir Utara Kota Batam;
 - b. Pesisir Selatan Pulau Karimun Besar;
 - c. Pesisir Barat Pulau Bintan;
 - d. Pesisir Timur Pulau Bintan; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Tanjungpinang.
2. Luas lahan rencana kawasan permukiman adalah sebesar 76.360 hektare dan Luas Lahan Rencana Kawasan Industri adalah sebesar 18.837 hektare.
3. Luas kawasan konstrain adalah sebesar 59.380 hektare, sehingga yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya sebesar 273.747 hektare.

Selain luasan di atas, kawasan hutan juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan BBK, setelah melalui proses pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.3.2 Strategi Pengembangan Industri Strategis Kawasan BBK

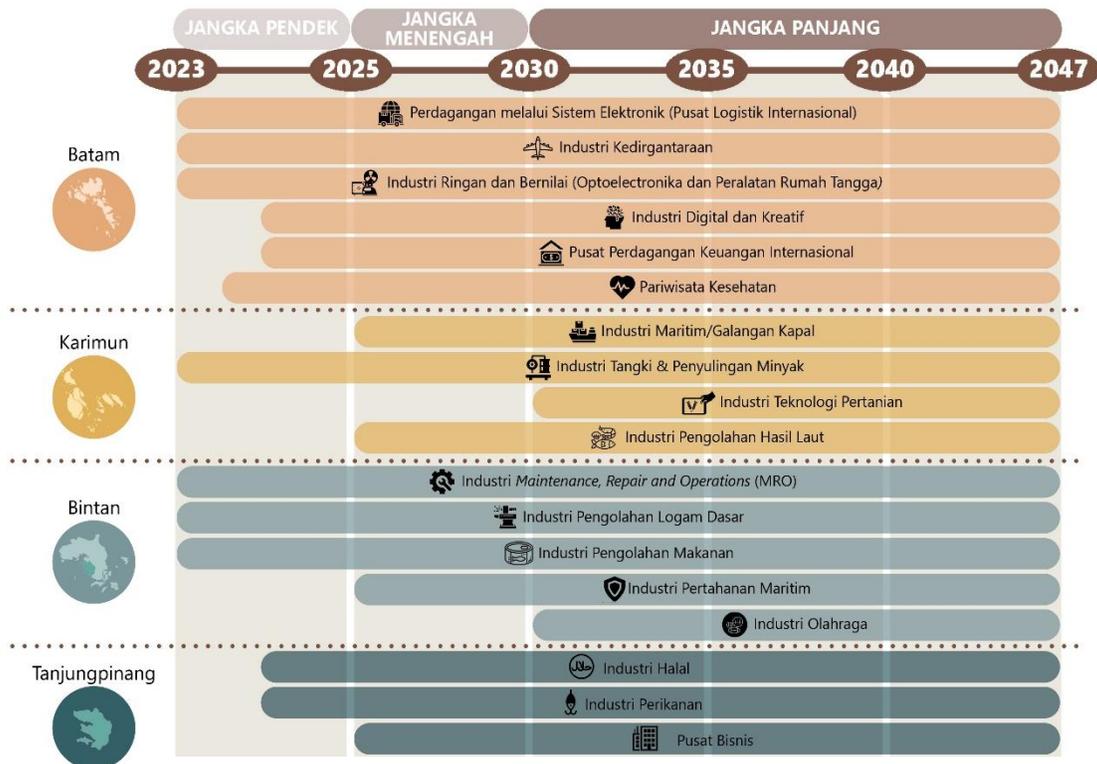
Strategi pentahapan bisnis unggulan dalam rencana induk ini dapat dilihat pada Gambar 2.12. Sejalan dengan pentahapan bisnis unggulan tersebut, maka untuk strategi pengembangan industri pada setiap tahapan dibagi berdasarkan kawasan. Pada tahap jangka pendek, Kawasan Batam akan dikembangkan industri perdagangan melalui sistem elektronik, industri kedirgantaraan, serta industri ringan dan bernilai (*light and valuable industry*). Kawasan Karimun akan dibangun industri maritim atau galangan kapal. Adapun Kawasan Bintan dan Tanjungpinang akan dikembangkan industri kedirgantaraan/MRO, industri transportasi, industri pengolahan makanan, industri halal dan industri perikanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Gambar 2.12 Strategi Pentahapan Pengembangan Bisnis Unggulan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Setelah dilakukan pentahapan jangka pendek, terdapat pentahapan untuk jangka menengah dan panjang yang dimulai sejak tahun 2025. Pada periode tahun 2025 hingga 2030 akan dikembangkan industri kreatif digital di Kawasan Batam, industri pengolahan hasil laut di Kawasan Karimun, industri pertahanan maritim dan industri olahraga di Kawasan Bintan, serta industri pusat bisnis di Kawasan Tanjungpinang. Dalam jangka yang lebih panjang akan dikembangkan pusat keuangan dan perdagangan internasional dan pariwisata kesehatan di Kawasan Batam. Sementara di Kawasan Karimun akan dikembangkan industri penampungan dan pengolahan minyak serta industri teknologi pertanian.

Program percepatan terhadap pengembangan sektor unggulan yang diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kawasan BBK, di antaranya:

1. Sektor teknologi informasi yang memiliki tingkat resiliensi ekonomi yang baik. Sektor ini akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur digital di jangka pendek;
2. Sektor jasa strategis berupa jasa kesehatan yang memiliki kecenderungan tumbuh di tengah pandemi dan perlu dipersiapkan untuk jangka pendek;



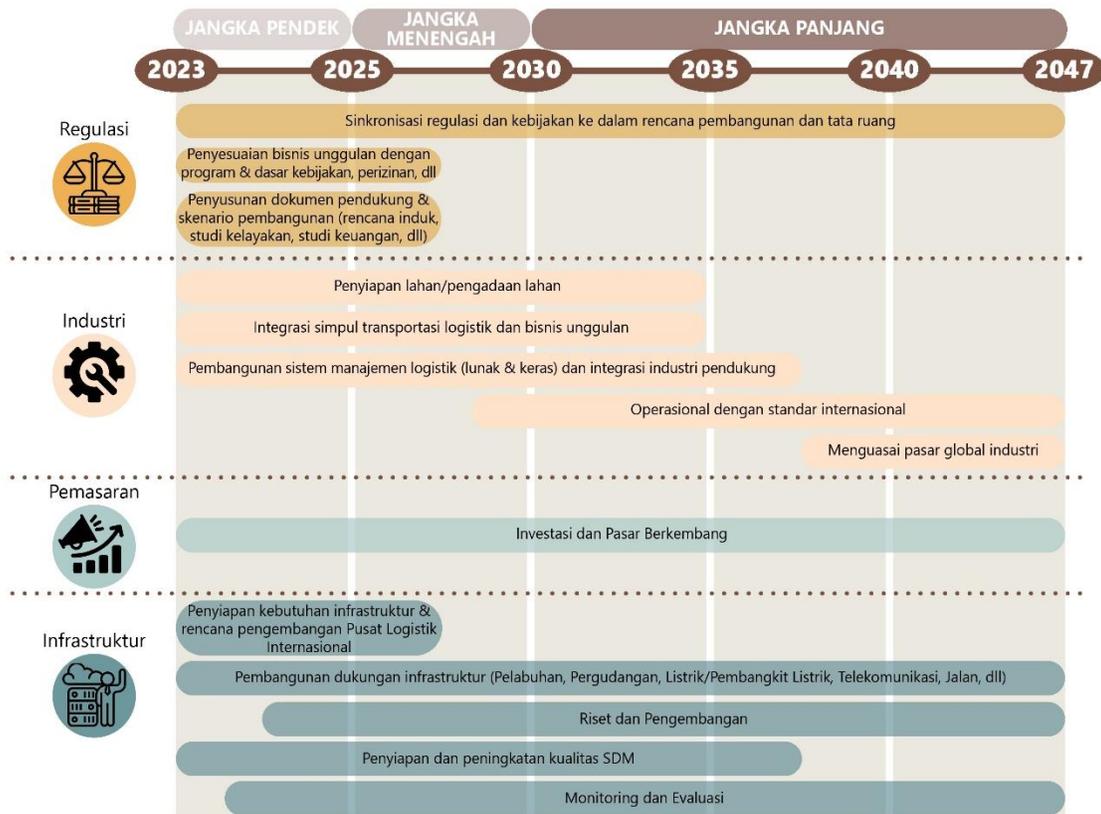
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

3. Sektor perdagangan melalui sistem elektronik yang dinilai tumbuh tinggi sehingga dikembangkan dengan mengalihkan sektor perdagangan menjadi berorientasi digital guna mempersiapkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik;
4. Sektor perikanan juga perlu didukung melalui investasi baru dan transformasi menjadi industri pengolahan, sehingga dibutuhkan promosi investasi untuk jangka menengah dan panjang.

Pentahapan pada sektor industri dijabarkan dalam bidang regulasi, pengembangan industri, pemasaran dan infrastruktur yang dikembangkan secara bertahap dengan konsep industri terpadu untuk mencapai BBK sebagai kawasan pasar global industri dan mendukung hub logistik internasional.

Gambar 2.13 Strategi Pentahapan Pengembangan Industri



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

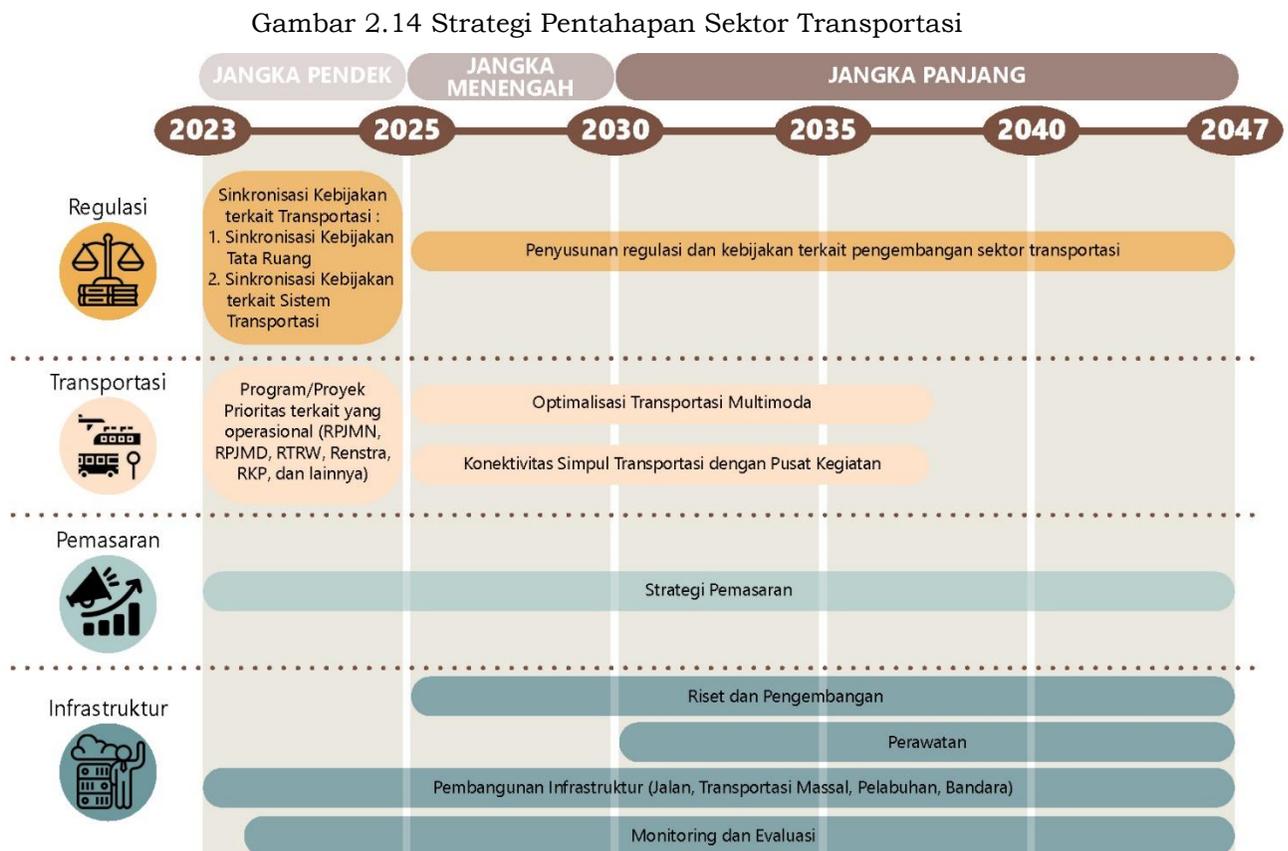


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

II.3.3 Strategi Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi

Strategi pentahapan sektor transportasi dalam rencana induk ini dapat dilihat pada Gambar 2.14. Strategi pengembangan sektor transportasi berpusat kepada peningkatan konektivitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum massal, pelabuhan, bandara, dan lainnya, serta peningkatan layanan. Rencana pengembangan konektivitas antarsimpul transportasi dengan pusat kegiatan ekonomi dilakukan melalui tahapan inventarisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi serta penelitian dan pengembangan rute dan moda transportasi pendukung.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

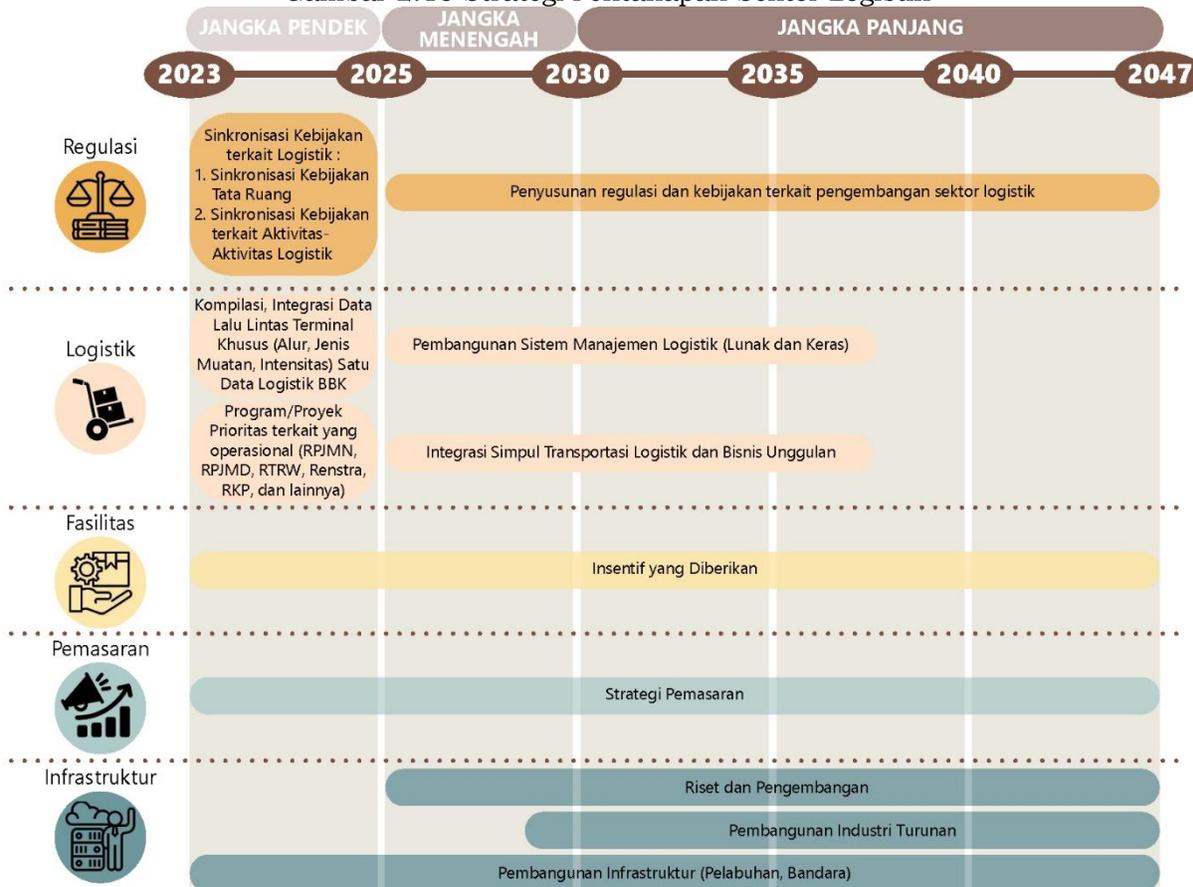
Target pengembangan sektor logistik di Kawasan BBK ditujukan untuk mewujudkan Kawasan BBK sebagai hub logistik internasional dengan penguatan sistem logistik dan rantai pasok. Pada tahap jangka pendek berfokus pada sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan logistik, Satu Data Logistik, dan program/proyek prioritas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Gambar 2.15 Strategi Pentahapan Sektor Logistik



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Satu Data Logistik Kawasan BBK merupakan kegiatan kompilasi dan integrasi data logistik. Data yang dikumpulkan diutamakan pada alur, jenis muatan, dan intensitas barang. Adanya kompilasi dan integrasi ini diharapkan Badan Pengusahaan di KPBPB BBK dapat memiliki platform untuk monitoring terhadap kegiatan logistik dan rantai pasok yang lebih akurat dan komprehensif.

II.3.4 Strategi Pengembangan Pariwisata

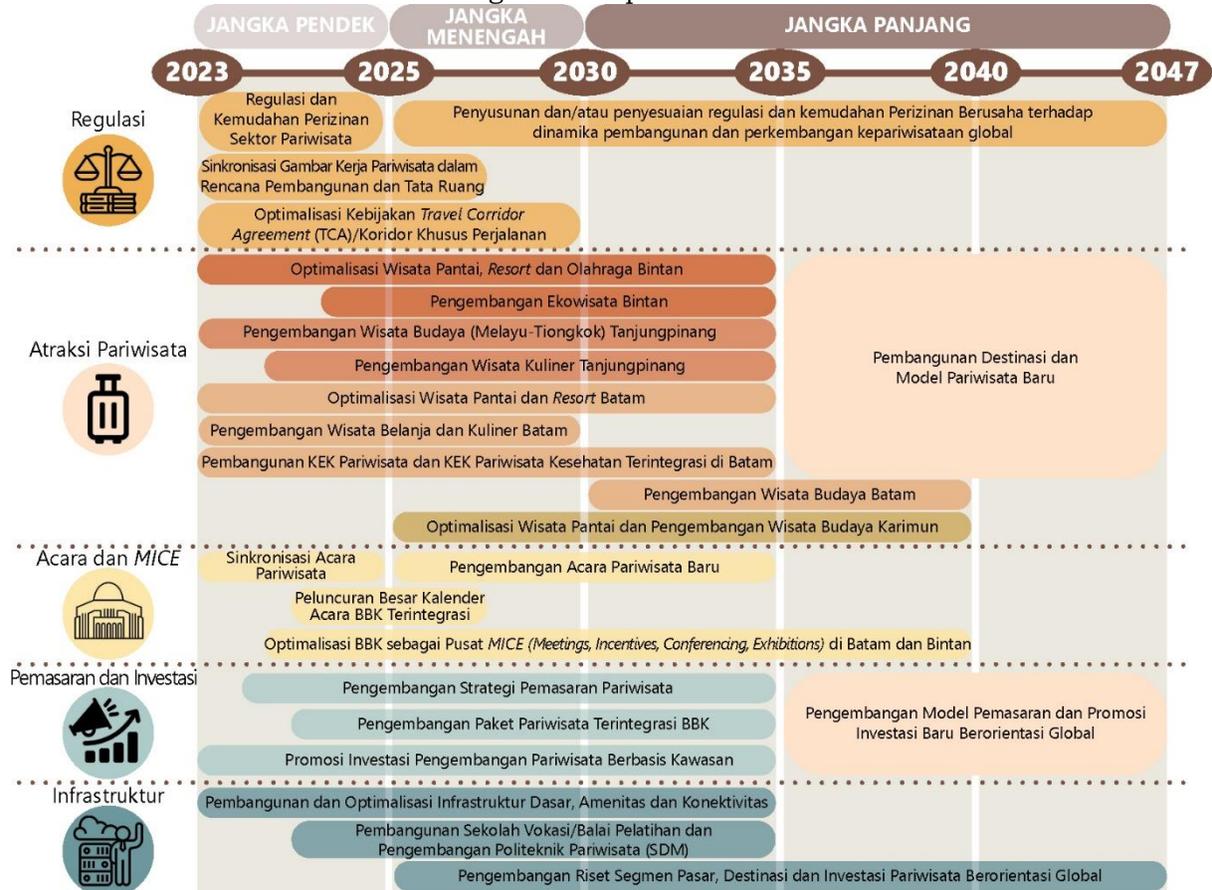
Penentuan strategi digunakan sebagai dasar penentuan pentahapan pengembangan pariwisata Kawasan BBK secara periodik dalam Gambar 2.16. Pentahapan berfokus pada lima kluster strategi yang secara berkesinambungan melakukan transformasi pengembangan pariwisata Kawasan BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Gambar 2.16 Strategi Pentahapan Transformasi Pariwisata



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

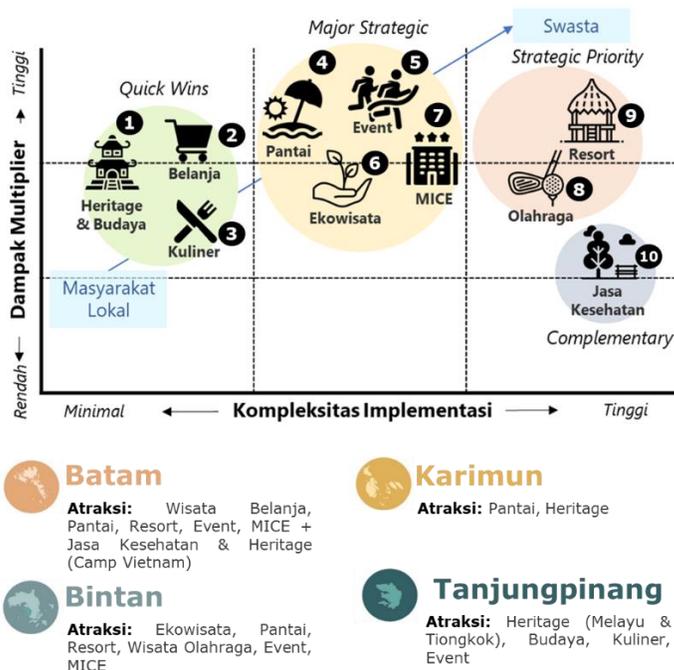
Klasterisasi tema pariwisata ditentukan berdasarkan dampak penganda dan kompleksitas pengembangan destinasi. Kawasan Batam dan Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan pariwisata berskala internasional yang didukung oleh Tanjungpinang dan Karimun. Beberapa tema kepariwisataan ditetapkan sebagai strategi prioritas dan strategi utama karena memiliki bangkitan ekonomi tinggi. Dalam pengembangannya dipersiapkan pula perencanaan terkait infrastruktur penunjang, SDM, dan investasi. Hal ini digambarkan pada Gambar 2.17.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Gambar 2.17 Klasterisasi Tema Pariwisata BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

II.3.5 Strategi Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

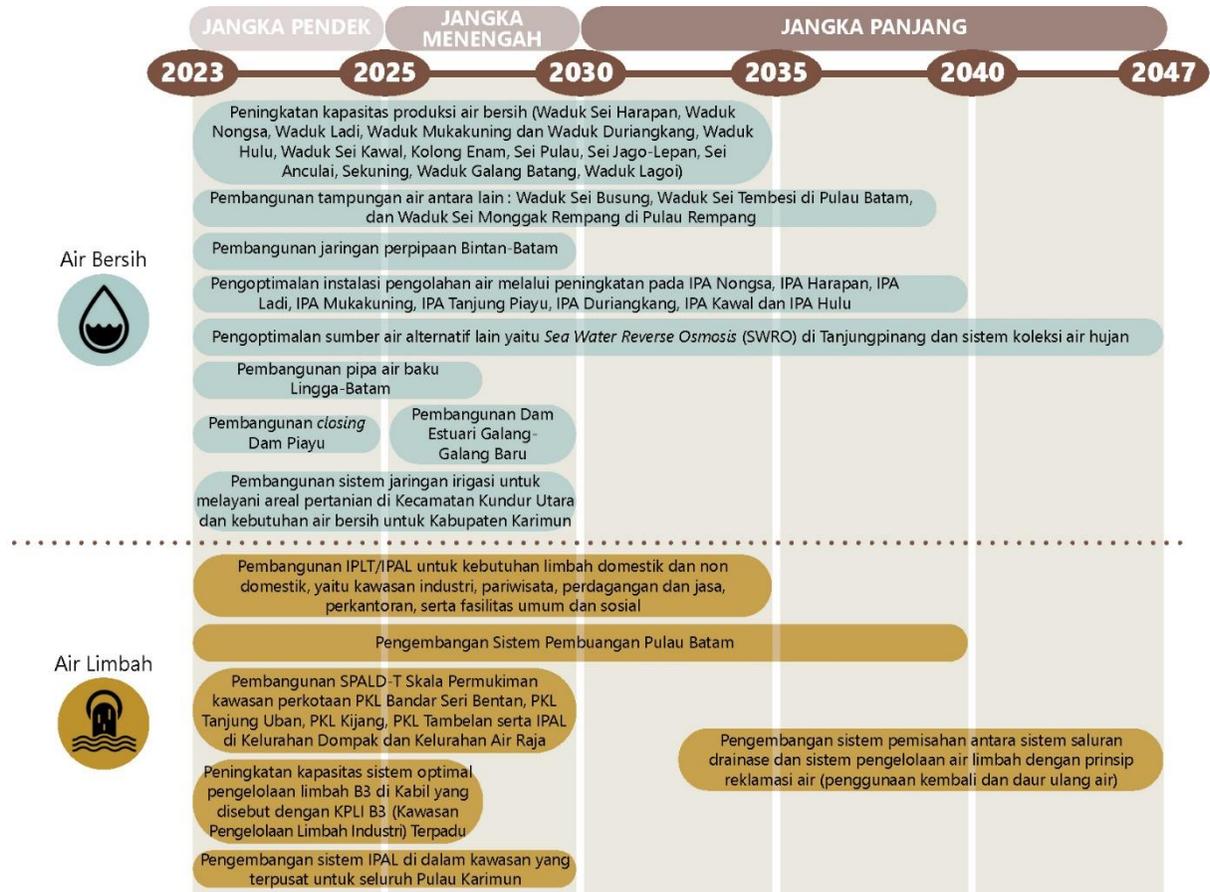
Strategi pelaksanaan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terdiri dari rencana pengembangan air bersih, limbah cair, persampahan atau limbah padat, drainase, listrik, dan energi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Gambar 2.18 Strategi Pentahapan Pengembangan Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

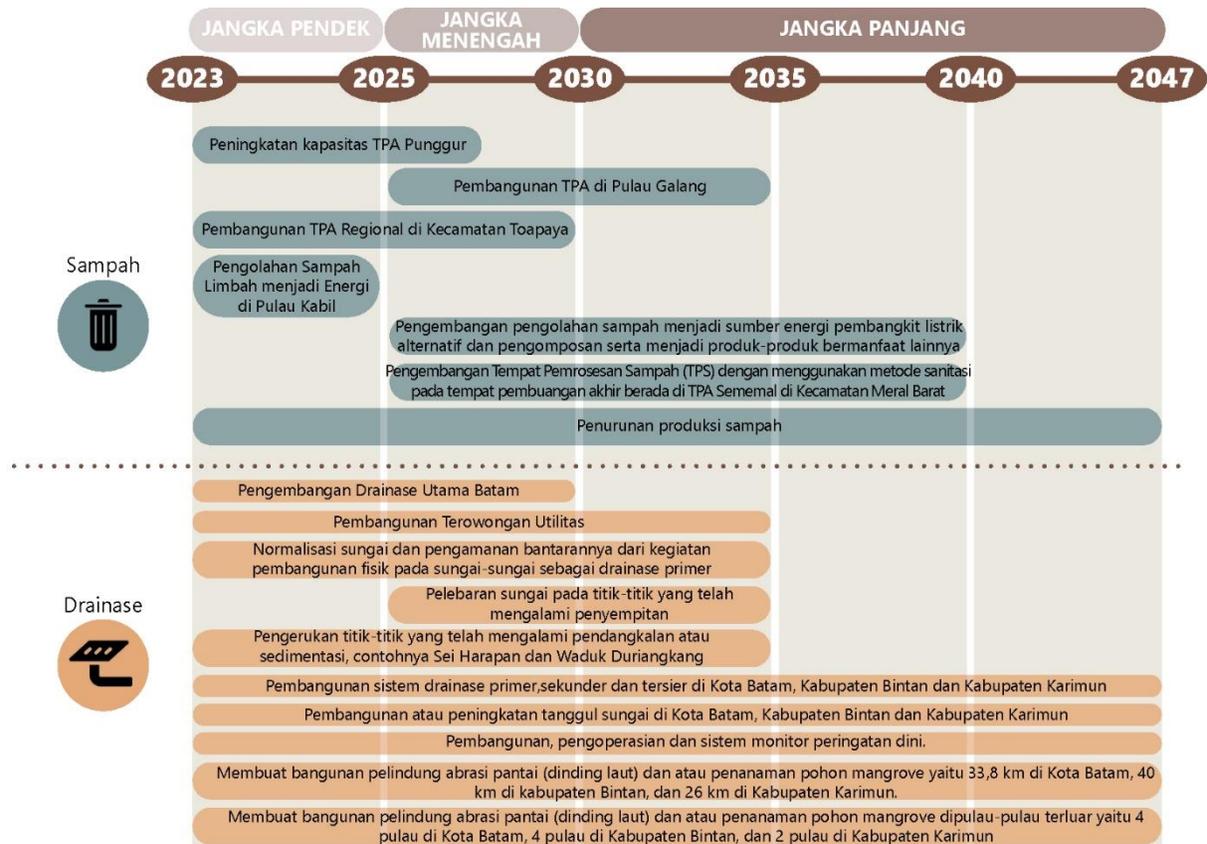
Strategi pengembangan prasarana air bersih dan pengolahan air limbah disesuaikan dengan usulan program/proyek dan pertumbuhan penduduk Kawasan BBK. Pembangunan bendungan, dam estuari, dan fasilitas pengolahan air serta Instalasi Pengolahan Air Limbah dilakukan pada setiap kawasan menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Gambar 2.19 Strategi Pentahapan Pengembangan Persampahan dan Drainase



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Strategi pengelolaan sampah jangka pendek hingga jangka menengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sementara pada tahap jangka panjang akan dilakukan pembangunan TPA baru. Pembangunan sarana persampahan diarahkan menjadi fasilitas pengelolaan limbah terintegrasi. Proyek ini menjadi solusi inovatif untuk memaksimalkan pemulihan energi dan sumber daya dari limbah padat.

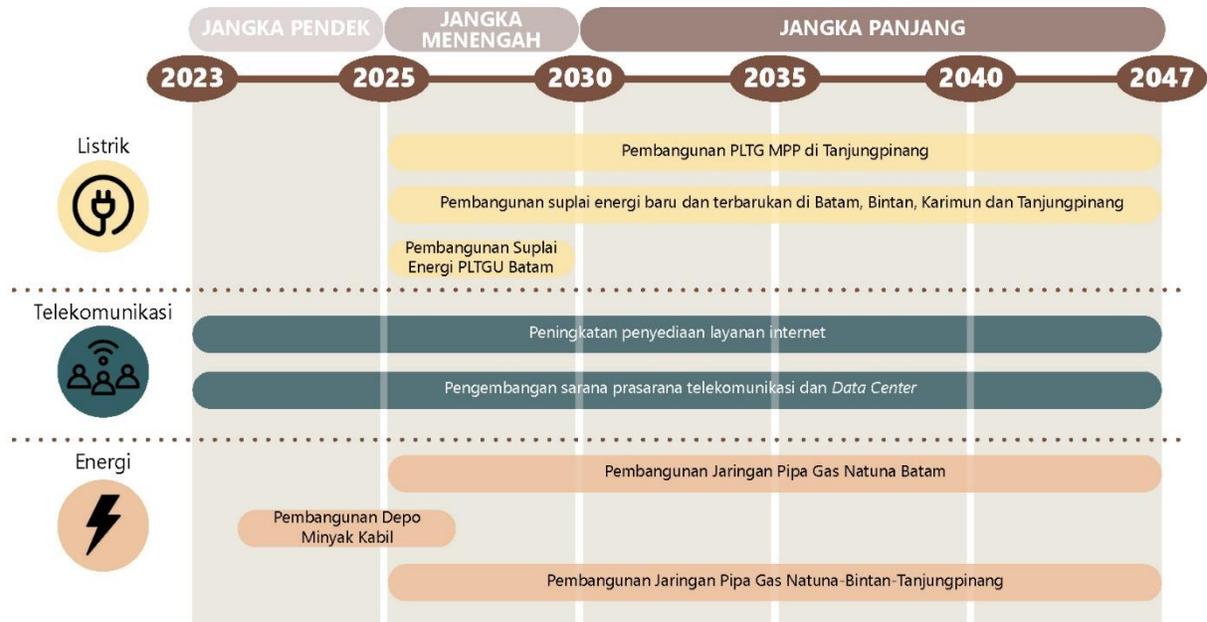
Strategi pengembangan drainase pada jangka pendek hingga jangka menengah dilakukan melalui pengembangan drainase utama. Pada jangka pendek hingga jangka panjang juga secara bertahap dilakukan konservasi badan air dan sempadan saluran drainase, pengerukan titik-titik saluran drainase yang mengalami sedimentasi, serta pembangunan *utility box*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Gambar 2.20 Strategi Pentahapan Pengembangan Listrik, Energi, dan Telekomunikasi



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Strategi pentahapan prasarana listrik dan energi diarahkan untuk pengembangan pembangkit dan jaringan listrik, termasuk yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Pada tahap jangka menengah, program yang dilakukan adalah pembangunan suplai energi PLTGU. Selanjutnya, pada tahap jangka menengah hingga jangka panjang dilakukan pembangunan pembangkit listrik dari suplai energi baru dan terbarukan di Kawasan BBK.

Strategi pentahapan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan sektor digital, antara lain peningkatan penyediaan layanan internet cepat dan stabil, pembangunan pusat data (*data center*), pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*), dan penanaman serat optik.

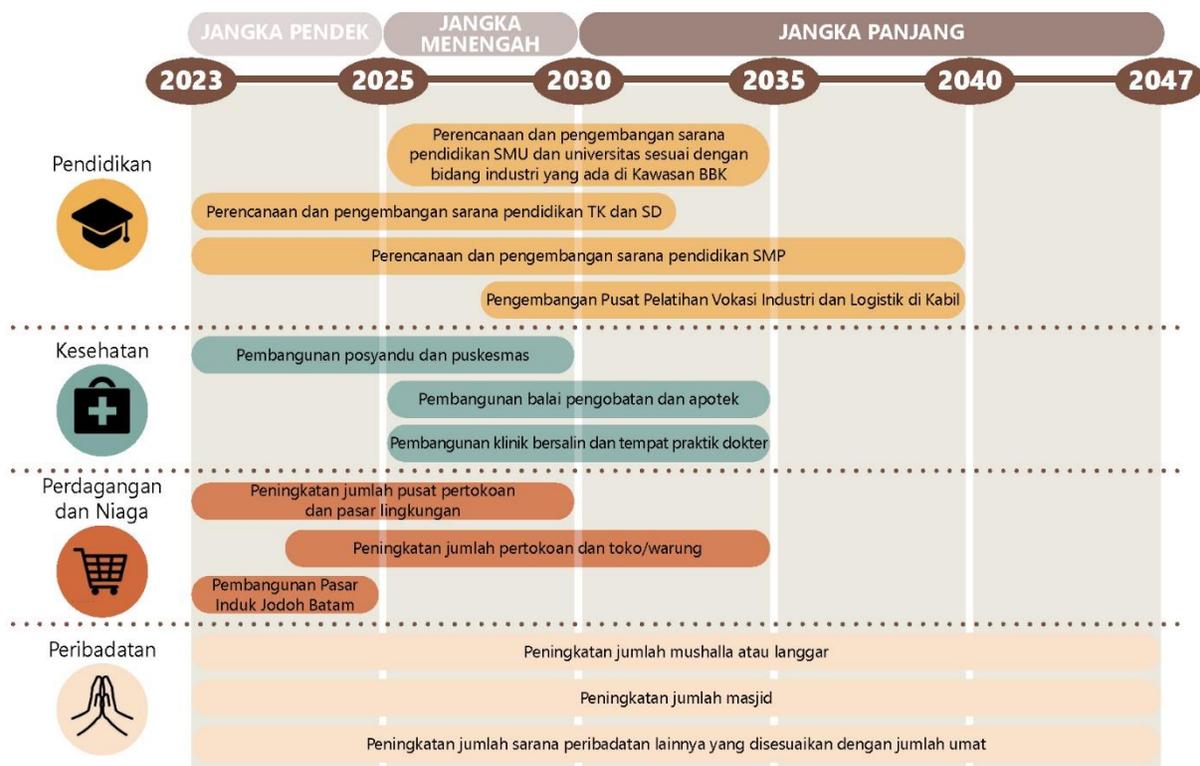
Strategi pentahapan pengembangan sarana seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan peribadatan diperlukan untuk melayani kebutuhan penduduk di Kawasan BBK. Sarana pendidikan diarahkan untuk pengembangan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi bertaraf internasional. Sarana kesehatan disiapkan untuk mendukung Kawasan BBK yang resiliensi terhadap wabah penyakit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Gambar 2.21 Strategi Pentahapan Pengembangan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Niaga, dan Peribadatan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

II.3.6 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kawasan BBK

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan peluang investasi Kawasan BBK, pengembangan SDM dan IPTEK perlu menjadi prioritas utama sebagai faktor utama seluruh kegiatan transformasi ekonomi. Kawasan BBK masih didominasi tenaga kerja terampil, sehingga dituntut meningkatkan jumlah tenaga kerja profesional untuk mengelola sektor bisnis unggulan. Pengembangan SDM harus terintegrasi dengan konsep *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA)*.

Strategi pengembangan SDM dan IPTEK memerlukan pendekatan holistik guna menyelesaikan permasalahan penyediaan SDM andal di Kawasan BBK. Penentuan strategi ditujukan untuk menyediakan SDM andal dengan produktivitas tinggi yang mampu merespons kebutuhan pasar kerja, mendukung pengintegrasian pendidikan dan industri serta penciptaan ekosistem inovasi. Gambar 2.22 menunjukkan strategi pengembangan SDM dan IPTEK berdasarkan pertimbangan strategi dasar dan strategi inovatif. Strategi dasar adalah kepastian regulasi pengembangan SDM dan IPTEK, sedangkan strategi inovatif meliputi penyediaan SDM andal melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas IPTEK di era disrupsi teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Gambar 2.22 Strategi Pengembangan SDM dan IPTEK Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Melalui pemetaan penentuan strategi maka ditetapkan pentahapan pengembangan SDM dan IPTEK secara berkelanjutan. Berdasarkan Gambar 2.23 terdapat tiga pengembangan utama yang berfokus pada perbaikan aspek regulasi, pengembangan infrastruktur IPTEK dan pengembangan pendidikan. Sinergitas ketiga elemen tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya *link and match* penyediaan tenaga kerja melalui pendidikan dengan permintaan tenaga kerja di pasar. Sinergitas juga memastikan adanya payung regulasi yang mendukung dan kesiapan infrastruktur IPTEK.

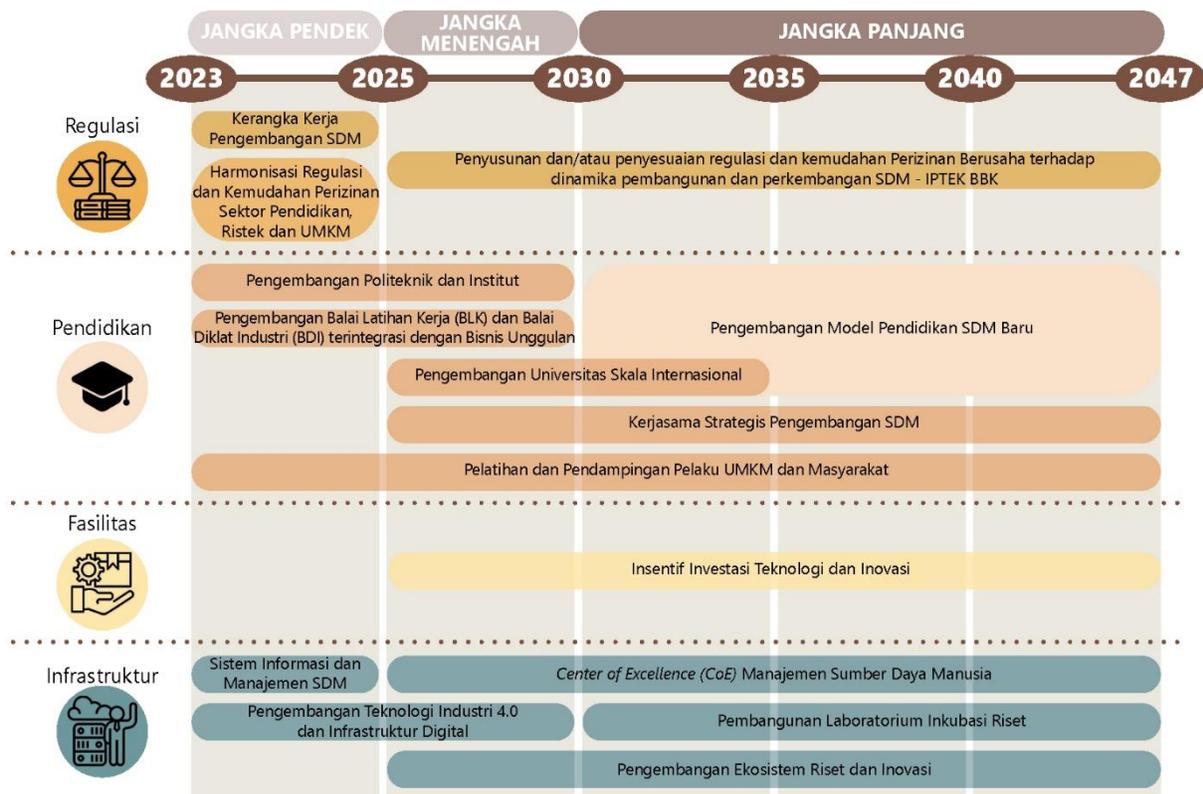


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pada tahap jangka pendek dilakukan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data SDM ke dalam portal sistem informasi yang dalam hal ini pembentukannya didorong melalui investasi teknologi secara profesional. Pada tahap selanjutnya, Sistem Informasi dan Manajemen SDM di Kawasan BBK harus terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat pusat yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Gambar 2.23 Strategi Pentahapan Transformasi SDM dan IPTEK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Pembangunan *Center of Excellence* (CoE) Manajemen SDM dilakukan di tahap jangka menengah hingga jangka panjang dengan memastikan bahwa Sistem Informasi dan Manajemen SDM sudah terbentuk. CoE diharapkan dapat didorong melalui kemitraan strategis dan investasi swasta untuk memastikan adanya pengembangan ekosistem riset dan inovasi berkelanjutan. Paralel dengan pembangunan sistem informasi dan CoE, juga dilakukan pengembangan teknologi industri dan infrastruktur digital untuk terus mendukung tercipta Industri 4.0 dan Industri 5.0 di Kawasan BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

II.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Pentahapan pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan dapat dilihat pada Gambar 2.24. Pada tahap jangka pendek akan berfokus pada penyelesaian sinkronisasi kebijakan terkait wilayah pertahanan dan keamanan antara kebijakan tata ruang dan kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Strategi pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan dilakukan melalui pengendalian wilayah pertahanan di Kawasan BBK, pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, pembangunan ekonomi pulau terluar berbasis pertahanan di Kawasan BBK khususnya Pulau Nipa, serta peningkatan hubungan kerja sama pertahanan dan keamanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Gambar 2.24 Strategi Pentahapan Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan



II.4 Sinergitas KPBPB dengan KEK

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Sedangkan KPBPB merupakan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

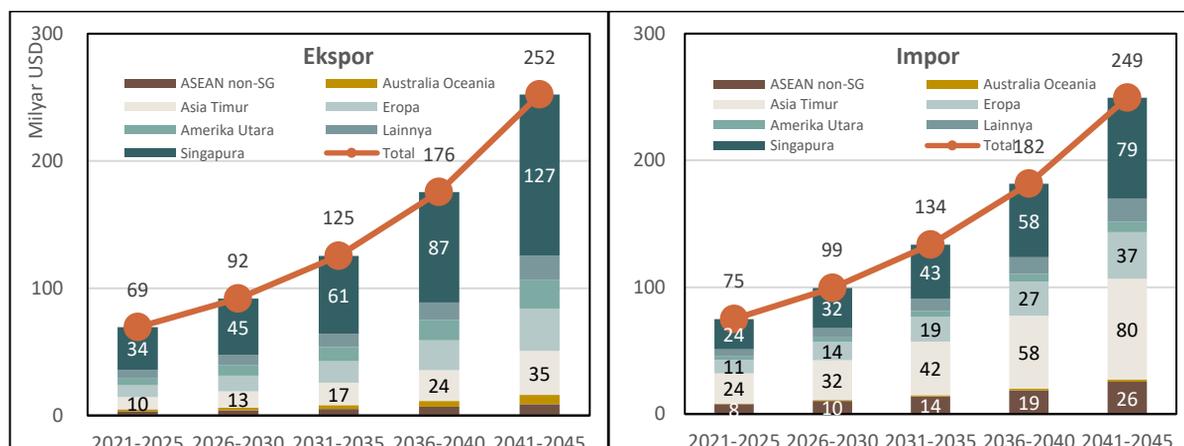
Seluruh atau sebagian wilayah KPBPB BBK dapat ditetapkan menjadi KEK sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Penetapan seluruh atau sebagian wilayah KPBPB menjadi KEK merupakan salah satu langkah sinergi yang dilakukan untuk mendorong optimalisasi pengembangan ekonomi melalui sumber daya yang tersedia sehingga mendukung adanya nilai tambah atau dampak perekonomian yang maksimal. Proses penetapan seluruh atau sebagian wilayah KPBPB menjadi KEK membutuhkan beberapa pedoman serta tahapan untuk menunjang keberhasilan transisi tersebut.

II.5 Penguatan Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR) Kawasan BBK dengan Asia Pasifik

Strategi penguatan kerja sama ekonomi diukur berdasarkan proyeksi ekspor dan impor dari dan menuju Kawasan BBK berdasarkan negara tujuan ekspor dan impor. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Kawasan BBK masih tidak lepas dari interaksi perdagangan yang tinggi dengan Singapura. Sebagai strategi di masa yang akan datang, pemanfaatan kerja sama yang telah dibangun dengan Singapura dapat terus dilakukan dengan penyusunan arah yang sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan BBK.

Selain itu, perlu dibangun kerja sama baru dengan negara potensial yang berpengalaman dalam penyelenggaraan KPBPB seperti Korea Selatan (Incheon), Amerika Serikat (Los Angeles, New York), Inggris (London), Belanda (Amsterdam), Swedia (Stockholm), Denmark (Copenhagen), dan Cina (Hong Kong).

Gambar 2.25 Proyeksi Ekspor Kawasan BBK Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

II.6 Strategi Persaingan Ekonomi dan Bisnis Sesama Kawasan KPBPB di Luar Negeri

Kawasan Asia Pasifik merupakan area dengan perkembangan KPBPB yang pesat, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara antara lain di Malaysia, Vietnam, Cina, dan Kamboja. Untuk dapat unggul dengan KPBPB berbagai negara, diperlukan strategi khusus yang dapat diterapkan di Kawasan BBK, di antaranya adalah:

1. Perlu adanya spesifikasi komoditas yang menjadi unggulan KPBPB dibandingkan dengan KPBPB lainnya di luar negeri;
2. Kelengkapan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran kegiatan di KPBPB;
3. Kemudahan perizinan dan jaminan keberlangsungan kegiatan ekonomi menjadi faktor penarik investor agar dapat berinvestasi di KPBPB dibandingkan dengan lokasi lainnya; dan
4. Strategi pemasaran yang menarik dan tepat sasaran menjadi penentu keberhasilan KPBPB BBK untuk dapat unggul dengan KPBPB negara lainnya.

II.7 Insentif dan Regulasi Pengembangan Kawasan BBK

Investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan usaha dan penurunan komponen biaya produksi. Sementara, stimulus terhadap biaya produksi dapat berupa stimulus fiskal maupun non-fiskal bagi perusahaan.

Dalam usaha melakukan pengembangan Kawasan BBK, terdapat beberapa opsi insentif yang dapat dikaji untuk menstimulasi pertumbuhan sektor unggulan, jasa unggulan, serta komoditas unggulan, di antaranya:

1. Reformasi kebijakan pertanahan dan penggunaan lahan, dengan memberikan pembagian kewenangan terkait penggunaan lahan antara Badan Pengusahaan dan Pemerintah Daerah;
2. Melakukan perampingan perizinan dengan melakukan inovasi pengurusan perizinan satu pintu, melalui Badan Pengusahaan di KPBPB sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
3. Memberikan insentif pajak bagi komoditas unggulan dan sektor unggulan yang memiliki orientasi ekspor maupun memiliki kandungan bahan baku dalam negeri yang tinggi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pengembangan Kawasan BBK, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KPBPB diberikan fasilitas dan kemudahan berupa pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta fasilitas dan kemudahan lainnya.

Pengeluaran barang dari wilayah KPBPB ke wilayah KPBPB lainnya diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut pajak pengeluaran barang dari KPBPB, dan/atau dilunasi cukainya. Pengusaha di KPBPB dapat diberikan perlakuan tertentu di bidang kepabeanan berdasarkan permohonan pengusaha dengan mempertimbangkan manajemen risiko.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BBK

Pengembangan Kawasan BBK akan diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan dan bisnis unggulan pada setiap kawasan prioritas. Kawasan prioritas merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian bisnis unggulan pengembangan Kawasan BBK.

III.1 Kawasan Batam

III.1.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Batam

Tema pengembangan Kawasan Batam diposisikan sebagai hub logistik internasional perdagangan melalui sistem elektronik, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai (peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga), industri digital dan kreatif, pusat perdagangan dan keuangan internasional, dan wisata kesehatan terpadu.

III.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Rencana pengembangan kawasan prioritas di Batam dibagi dalam beberapa klaster wilayah pengembangan yang akan dikembangkan. Kawasan Batam belum memiliki sektor dan komoditas unggulan yang tumbuh pesat. Beberapa sektor basis masuk dalam kategori sektor dan komoditas tertekan hingga potensial dan berkembang. Dengan demikian, Kawasan Batam membutuhkan inovasi pengembangan bisnis pada sektor-sektor inovatif.

Tabel 3.1 Kuadran Sektor Basis dan Non Basis Kawasan Batam-Rempang-Galang

	Sektor Non-Basis	Sektor Basis
High Growth	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan• Perdagangan• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum• Informasi dan Komunikasi	
Low Growth	<ul style="list-style-type: none">• Pertambangan dan Penggalian• Transportasi dan Pergudangan• Jasa Keuangan dan Asuransi• Real Estate• Jasa Perusahaan• Administrasi Pemerintahan• Jasa Pendidikan• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial• Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Industri Pengolahan• Pengadaan Listrik dan Gas• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang• Konstruksi

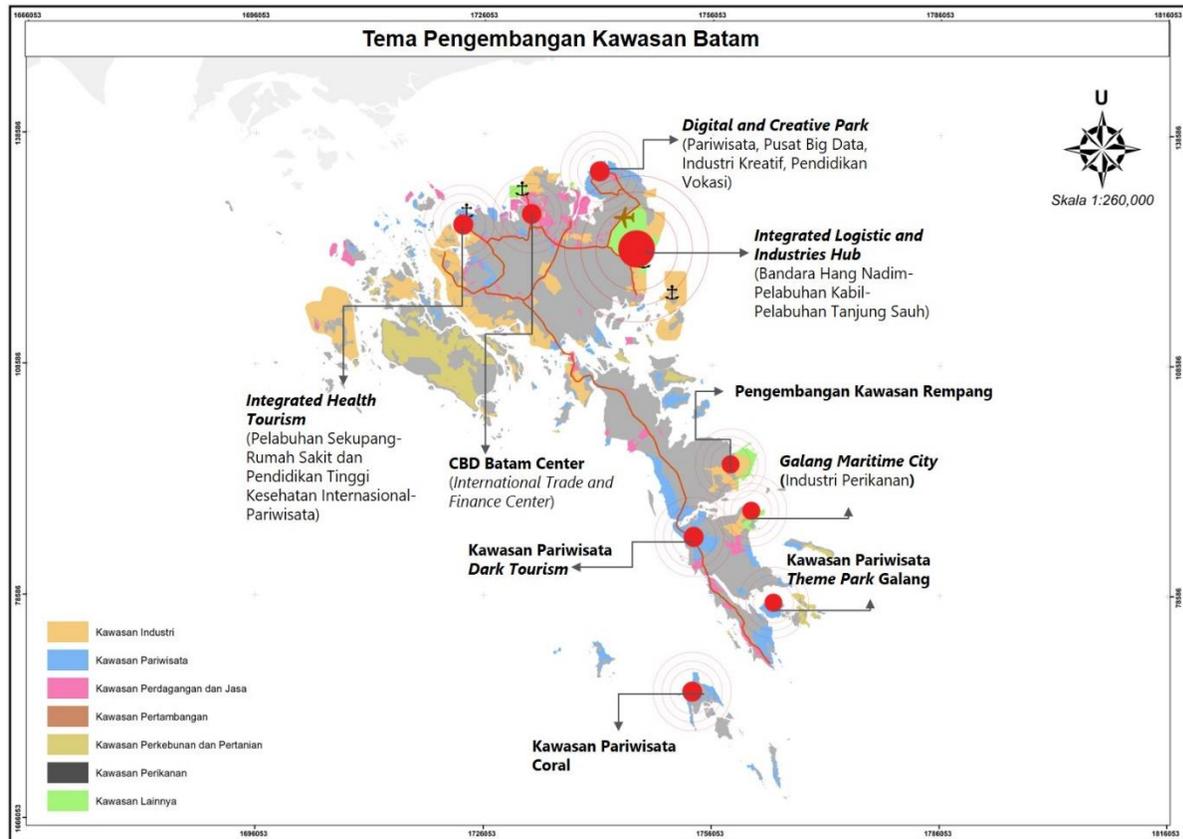
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Gambar 3.1 Tema Pengembangan Kawasan Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Pentahapan pengembangan bisnis unggulan terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hal ini dilakukan berdasarkan kesiapan lahan, nilai investasi, dan tingkat proyeksi permintaan serta perannya dalam peningkatan investasi di Kawasan Batam.

Gambar 3.2 Rencana Pengembangan Bisnis Unggulan di Kawasan Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Arah pengembangan Kawasan Batam tidak terlepas dari dokumen rencana tata ruang, RPJMN, rencana strategis kementerian/lembaga, maupun RPJMD. Berikut merupakan arahan pengembangan kegiatan di Kawasan Batam:

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas Batam

No.	Kawasan Prioritas	Arah Pengembangan
1	Nongsa, Kabil, dan Hang Nadim	<ul style="list-style-type: none">• Pusat logistik dan industri terpadu• Industri digital dan kreatif• Industri kedirgantaraan• <i>Aerocity</i>, MRO, dan pergudangan perdagangan melalui sistem elektronik
2	Batam Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pusat perdagangan dan keuangan internasional• Pusat Perdagangan dan Jasa Batam Center
3	Batu Ampar	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan logistik internasional• Revitalisasi industri eksisting
4	Tanjung Uncang-Batu Aji	<ul style="list-style-type: none">• Industri maritim (transformasi industri galangan kapal)• Industri ringan dan bernilai
5	Sekupang	<ul style="list-style-type: none">• Wisata kesehatan terpadu• Revitalisasi kawasan industri eksisting• Pelabuhan penumpang Sekupang
6	Rempang	<ul style="list-style-type: none">• Industri perikanan dan pengolahan• Industri <i>petrochemical</i>• Wisata pantai dan agrowisata• Ruang terbuka hijau
7	Galang dan Galang Baru	<ul style="list-style-type: none">• Kota maritim• Industri pengolahan• Pariwisata (taman hiburan, wisata sejarah, wisata alam)• Dam Estuari Galang-Galang Baru
8	Piayu	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan industri• Pasokan energi baru dan terbarukan
9	Setokok	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan industri• Pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)
10	Duriangkang	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan konservasi sumber air baku• Pembangkit listrik tenaga surya

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

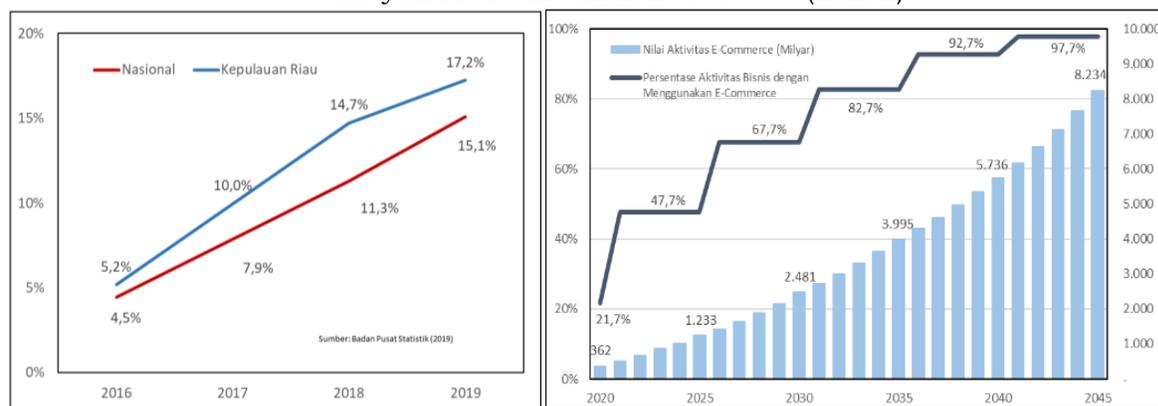
A. Rencana Pengembangan Industri

1. Industri Hub Logistik Internasional

Kawasan Batam memiliki posisi geostrategis yang baik dalam konteks nasional maupun internasional. Terletak di perairan Selat Malaka, Kawasan Batam akan dikembangkan sebagai Hub Logistik Internasional yang memiliki peran strategis dalam perdagangan dan rantai suplai global. Salah satu pendekatan dalam pengembangan bisnis unggulan di Kawasan Batam adalah dengan mengembangkan Batam sebagai kawasan logistik. Kawasan tersebut akan berperan sebagai penghantar barang masuk dan keluar yang diperlukan bagi kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Untuk barang yang bervolume besar dan berat akan memanfaatkan pelabuhan laut, sedangkan untuk barang yang ringan dan bernilai tinggi dan penghantaran cepat akan memanfaatkan bandara internasional.

Peluang yang dimiliki Kawasan Batam di antaranya berupa kesepakatan global (WTO dan APEC) dan kesepakatan regional (*ASEAN Economic Community*, *ASEAN Common Production Base*, *Trans Pacific Agreement*). Hub logistik internasional berkorelasi kuat dengan perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik. Kontribusi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap penjualan pasar ritel baru mencapai 1% (satu persen) dan diprediksi pertumbuhan *E-Commerce* sesuai dengan Gambar 3.3 (kanan). Kawasan Batam diproyeksikan menjadi pusat pergudangan bagi barang keperluan industri dalam negeri yang didukung dengan adanya kluster industri terintegrasi.

Gambar 3.3 Presentasi Aktivitas Bisnis menggunakan *E-Commerce* (kiri) dan Proyeksi Pertumbuhan *E-commerce* (kanan)



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Persaingan penyedia jasa industri logistik antarnegara di sekitar Selat Malaka dan dinamika perekonomian global menjadi tantangan terbesar dari industri ini untuk berkembang. Hambatan dalam industri hub logistik di antaranya aturan kepabeanan, skema ekspor impor, kesiapan infrastruktur fisik dan non-fisik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Kawasan Batam memiliki 5 (lima) aktivitas logistik, meliputi (1) pusat transportasi di Pelabuhan Sekupang, (2) *port city hub* di Pelabuhan Batu Ampar, (3) hub logistik internasional di Pelabuhan Tanjung Sauh, (4) pelabuhan berbasis pasok di Pelabuhan Kabil, dan (5) *aerocity* di Bandara Hang Nadim. Berikut ini aktivitas bisnis pada setiap pelabuhan di Kawasan Batam.

Tabel 3.3 Aktivitas Bisnis Logistik pada Setiap Pelabuhan di Kawasan Batam

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
1	Batu Ampar	Dom	V	-	-	-	Peralatan dan Mesin, Galangan Kapal
		Int	V	-	-	-	
2	Sekupang	Dom	V	-	-	V	Transportasi
		Int	V	-	-	V	
3	Kabil	Dom	-	V	V	V	<i>Oleochemical</i>
		Int	-	V	V	V	Kimia
4	Tanjung Sauh	Dom	-	-	-	-	Peralatan Rumah Tangga, Optoelektronik
		Int	V	-	-	-	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

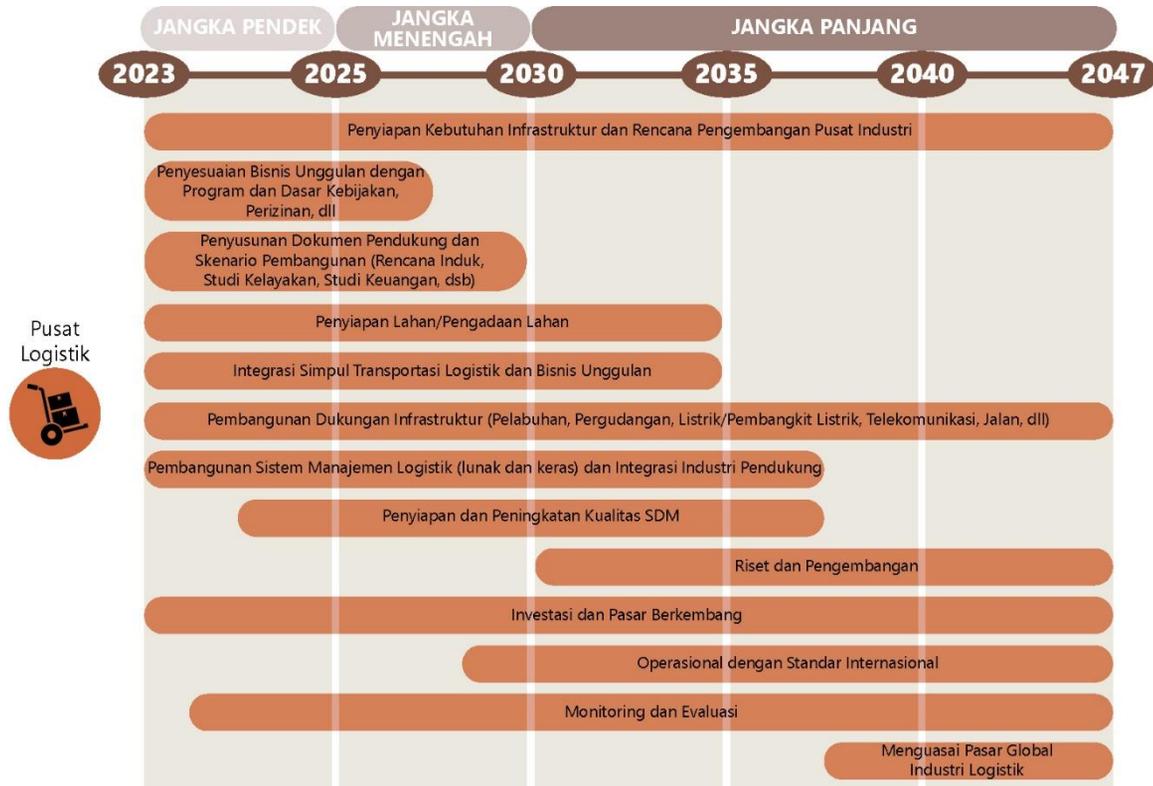
Industri dan pelabuhan di Kawasan Batam dikembangkan dengan mengusung konsep industri hijau generasi 4.0 serta *smart logistics center*, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan nilai tambah produk, efisiensi biaya, serta berkelanjutan. Pengembangan industri tersebut diarahkan untuk terintegrasi antara hulu dan hilir melalui rantai pasok produk yang dihasilkan oleh tiap industri serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu TIK juga memungkinkan untuk memproduksi sesuai permintaan pasar tanpa meningkatkan biaya produksi, juga lebih fleksibel dan ramah lingkungan. TIK juga akan menghubungkan industri di kawasan industri dan pelabuhan kargo dengan pasar global secara cepat, sehingga daya saing Kawasan Batam akan meningkat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Gambar 3.4 Rencana Pengembangan Industri Hub Logistik



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

2. Industri Kedirgantaraan

Industri kedirgantaraan, termasuk industri MRO, merupakan sektor yang saat ini berkembang pesat di dunia. Perkembangan pasar MRO diproyeksikan terus tumbuh di beberapa bagian negara, salah satunya Asia Pasifik. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi industri kedirgantaraan di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam industri kedirgantaraan di Kawasan Batam antara lain diperlukan lahan dan infrastruktur pendukung serta penyediaan landasan pacu bandara yang mendukung perkembangan industri kedirgantaraan. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain kerja sama antara pemerintah dan sektor privat dalam pendanaan riset dan teknologi, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan pabrik vulkanisir ban, penjualan dan pemasaran, penyediaan layanan berbasis satelit, dan manajemen rantai pasok.

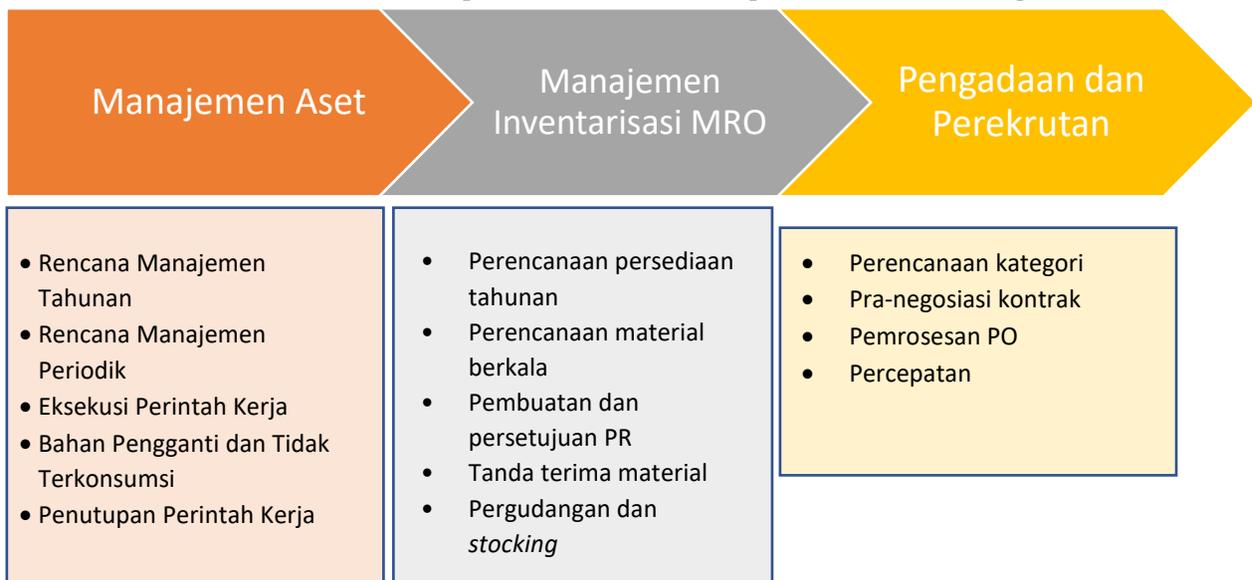


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Aktivitas bisnis industri kedirgantaraan di Kawasan Batam dapat dikembangkan sebagai berikut:

Gambar 3.5 Aktivitas bisnis pada Industri Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Beberapa strategi untuk mendukung pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Kawasan Batam, antara lain:

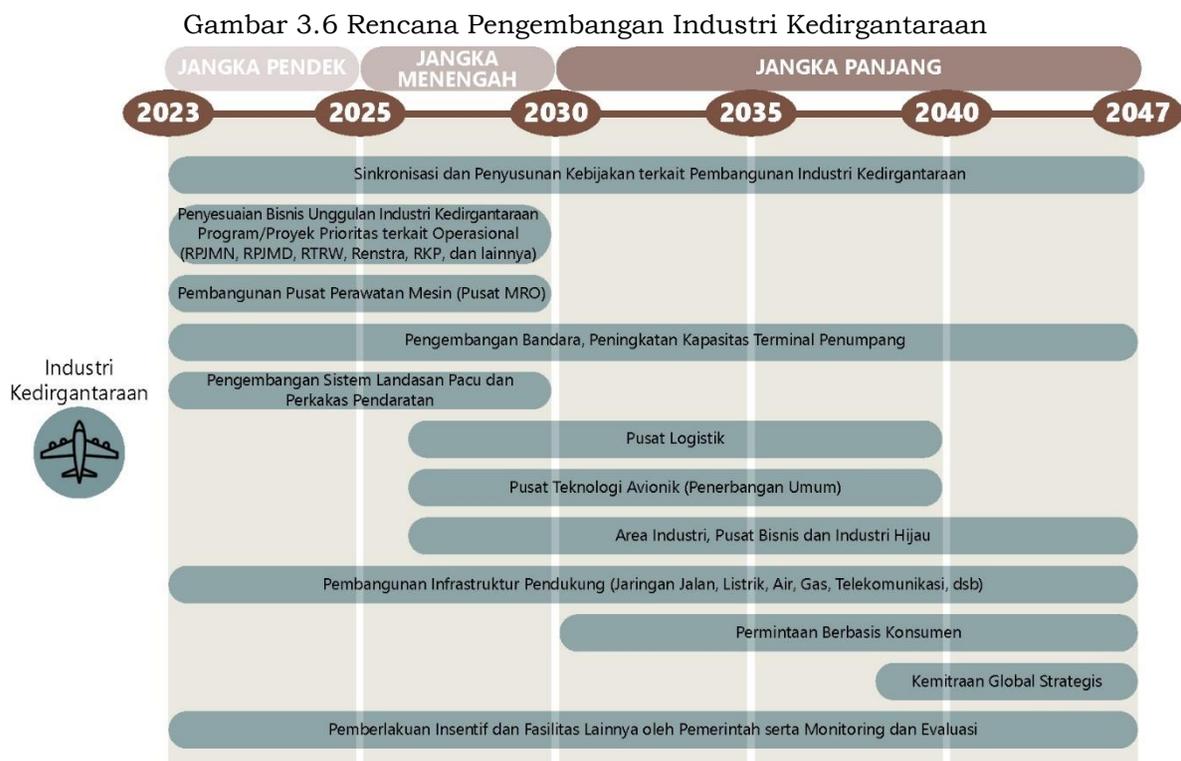
- 1) Penyediaan infrastruktur utama dan pendukung di antaranya dengan adanya *aerospace park* yang terintegrasi;
- 2) Pengembangan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM andal dan bersertifikat yang dibutuhkan dalam industri kedirgantaraan;
- 3) Penyediaan berbagai keistimewaan dalam hal insentif dan perpajakan seperti fasilitas yang diberikan KEK akan membuat industri kedirgantaraan dapat bersaing;
- 4) Penguatan jejaring dengan industri hulu dan pendukung di antaranya dengan industri yang menghasilkan komponen pesawat;
- 5) Peningkatan kualitas jasa dan sertifikasi internasional;
- 6) Peningkatan kecepatan jaringan dan sarana TIK; dan
- 7) Peningkatan akses pasar regional maupun internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Berikut tahapan pengembangan industri kedirgantaraan di Kawasan Batam:



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

3. Industri Ringan dan Bernilai (Optoelektronik, Peralatan Rumah Tangga)

Industri ringan dan bernilai merupakan industri yang dianggap paling sesuai untuk dikembangkan di Kawasan Batam. Industri ini membutuhkan lebih sedikit bahan mentah, ruang, dan tenaga. Jenis industri ringan dan bernilai yang akan dikembangkan di Kawasan Batam di antaranya adalah optoelektronik. Industri ini berkembang sangat pesat terutama pada sebagian barang elektronik menggunakan optoelektronik sebagai material utamanya. Industri optoelektronik mengalami peningkatan permintaan yang besar di skala global di mana saat ini elektronik menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup, sehingga permintaannya di pasar diproyeksikan terus meningkat.

Industri elektronik di dalam negeri terus didorong untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Pada tahun 2019, nilai ekspor kelompok produk komputer, barang elektronik, dan optik mencapai USD 1,1 miliar atau naik dibanding perolehan tahun 2018 sebesar USD 1 miliar. Diproyeksikan permintaan akan semakin bertumbuh pesat dengan adanya teknologi canggih yang berkembang. Selain itu, tujuan ekspor potensial untuk produk industri ini antara lain Eropa, Turki, Iran, India, Brasil, dan Rusia.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Industri ringan dan bernilai dalam pengembangannya di Kawasan Batam memiliki beberapa hambatan dan tantangan, di antaranya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan terhadap pengembangan dan diversifikasi produk yang masih terbatas, dan peningkatan teknologi. Penyediaan komponen elektronik dan rantai pasok yang terintegrasi dapat mengurangi impor komponen elektronik dan dapat disediakan oleh industri domestik. Kelengkapan infrastruktur dan bahan baku yang ada di Kawasan Batam akan menciptakan ekosistem industri ringan dan bernilai yang dapat menarik investor besar khususnya sektor hulu dan sektor antara.

Aktivitas yang dikembangkan dalam industri ringan dan bernilai di antaranya industri yang berhubungan dengan teknologi canggih, misalnya industri alat fotografi, industri alat ukur, industri komputer, industri *smart card*, industri peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Strategi pembangunan industri berbasis ringan dan bernilai agar memiliki daya saing tinggi di antaranya:

- 1) Peningkatan teknologi melalui riset dan pengembangan untuk mendukung peningkatan nilai tambah produk peralatan rumah tangga dan optoelektronik;
- 2) Penyiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung berupa jaringan energi yang mencukupi;
- 3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan insentif fiskal agar industri ringan dan bernilai dapat menghadapi persaingan dengan produk impor;
- 4) Penyediaan tenaga terampil dalam industri ringan dan bernilai;
- 5) Dukungan implementasi model bisnis yang canggih untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk industri yang inovatif;
- 6) Pengembangan spesialisasi produk Kawasan Batam, sehingga mampu menguatkan peran dalam konstelasi global; dan
- 7) Pengembangan pemasaran dan integrasinya dengan industri perdagangan melalui sistem elektronik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Industri ini dapat dikembangkan melalui beberapa tahap di antaranya sebagai berikut:

Gambar 3.7 Rencana Pengembangan Industri Ringan dan Bernilai



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

4. Industri Digital dan Kreatif

Industri digital dan kreatif merupakan industri yang memiliki potensi sangat tinggi, mengingat kemajuan teknologi dan globalisasi yang membentuk jenis industri baru. Industri kreatif memberikan kontribusi besar terhadap PDB yang mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 2018. Teknologi yang terus berkembang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Kompetensi teknis seperti pemrograman, data sains, keamanan dunia maya, pengintegrasian sistem, serta desain dan pemodelan animasi menjadi modal utama para pelaku industri kreatif digital.

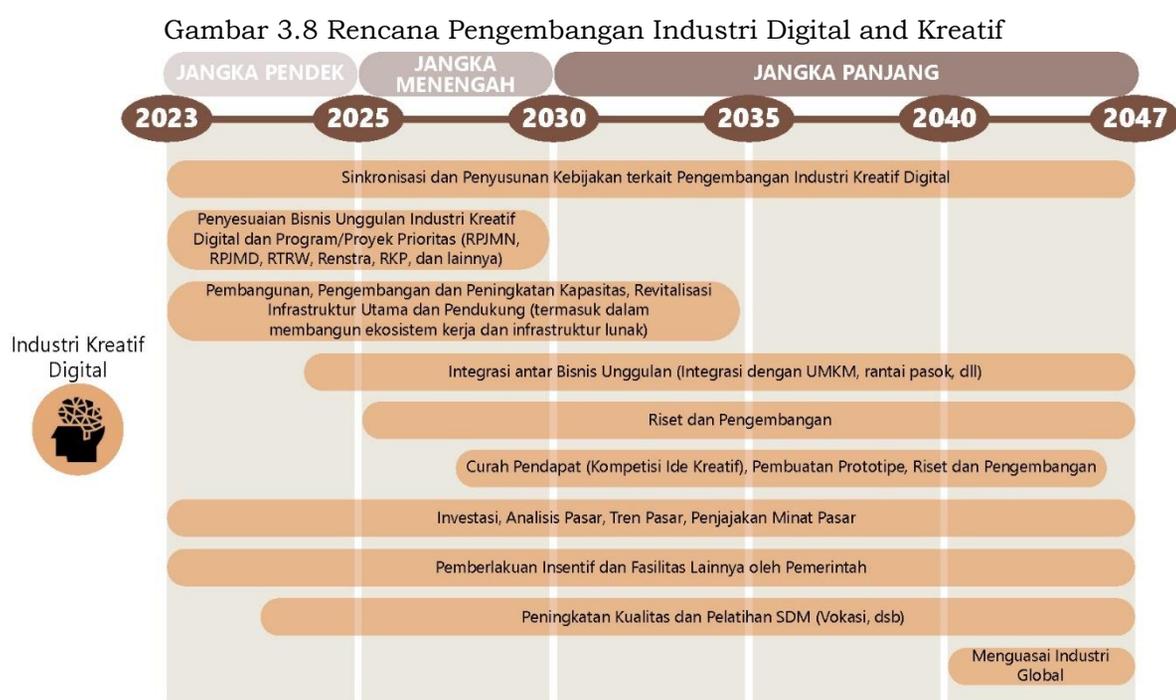
Perkembangan teknologi digital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri digital kreatif. Beberapa bentuk dari industri digital kreatif adalah budaya kreatif digital (menulis, pemasaran, dan perdagangan), konten budaya digital, dan jasa desain. Industri ini merupakan industri yang memiliki prospek untuk bertahan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari industri digital, rendahnya konsumsi energi, dan rendahnya polusi. Industri digital kreatif memberikan peluang dalam menciptakan lapangan kerja baru. Berbagai ide kreatif seperti karya seni, arsitektur, buku, gim, media sosial, layanan jasa daring, inovasi teknologi, dan animasi dapat mendorong tumbuhnya industri digital kreatif.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Keamanan data menjadi komponen terpenting dalam menjalankan industri digital kreatif, sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan keamanan data di dunia maya. Pengembangan industri digital kreatif dapat dilakukan dalam beberapa tahap di antaranya sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Kawasan industri digital kreatif di Kawasan Batam akan difokuskan di Nongsa yang memiliki lokasi strategis dengan didukung oleh infrastruktur digital dan insentif Pemerintah. Strategi pengembangan industri digital kreatif ini antara lain:

- Peningkatan produktivitas dan kualitas industri digital kreatif untuk menjadi produk ekspor unggulan;
- Penciptaan ekosistem yang nyaman bagi para kreator dengan menyediakan infrastruktur pendukung dan teknologi;
- Pendampingan industri kreatif digital baru di kelas mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan industrinya;
- Peningkatan iklim kewirausahaan bagi masyarakat dalam peningkatan kompetisi ide kreatif di bidang digital kreatif, sehingga tercipta inovasi mutakhir dan kompetitif di tingkat global;
- Pemberian berbagai kemudahan dan insentif dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- f. Penjaminan keamanan serta ketahanan infrastruktur dalam meningkatkan keamanan siber.

5. Kegiatan Industri Lainnya

Kebutuhan investasi untuk Kawasan Batam didukung oleh industri lainnya yang dapat menciptakan peluang dan melengkapi ekosistem pertumbuhan ekonomi di Kawasan Batam. Industri lain yang akan dikembangkan, antara lain industri galangan kapal dan *cold storage*, industri pengolahan, dan industri *aquaculture*/industri perikanan serta industri pendukung lainnya.

a. Industri Galangan Kapal dan *Cold Storage*

Industri galangan kapal, suku cadang kapal, jasa servis, dan reparasi kapal di Kawasan Batam terletak di daerah Tanjung Uncang-Batu Aji. Dalam pengembangan industri galangan kapal ke depan, secara bertahap akan dipindahkan ke Kawasan Bintan dan Karimun. Sedangkan untuk pengembangan industri galangan kapal di Kawasan Batam hanya untuk industri yang telah memiliki izin operasional hingga masa berlakunya berakhir.

Industri galangan kapal akan berkembang dengan tingginya permintaan kapal-kapal *feeder* berukuran kecil hingga sedang dan kapal feri. Kebijakan smelter akan mendorong industri pengelolaan besi dan baja berkembang dan menjadi bagian penting dari industri galangan kapal. Selain itu, adanya arah sistem logistik nasional kepada transportasi maritim dan berkembangnya riset dan pengembangan dalam bidang perkapalan dapat mendorong laju investasi industri galangan kapal.

Segmentasi dari kegiatan industri galangan kapal ini di antaranya industri pengolahan skala besar dengan teknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen kapal berstandar internasional. Industri galangan kapal Kawasan Batam difokuskan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor komponen industri perkapalan. Pengembangan pasar dalam negeri difokuskan untuk mengurangi ketergantungan impor komponen-komponen kapal pada industri sejenis di Indonesia serta mendukung berkembangnya industri perbaikan kapal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Gambar 3.9 Pentahapan Pengembangan Industri Galangan Kapal



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

b. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan dampak besar pada perekonomian Kawasan Batam. Industri ini akan berkorelasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penyerapan tenaga kerja. Beberapa contoh industri pengolahan antara lain industri makanan-minuman, plastik, kimia, farmasi, dan barang konsumen kemasan. Sektor industri makanan dan minuman memiliki potensi yang baik dan permintaannya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, sejumlah produsen optimis untuk meningkatkan investasi dan berekspansi guna memenuhi permintaan pasar, baik di domestik maupun ekspor.

c. Industri Akuakultur

Industri akuakultur atau perikanan budidaya merupakan kegiatan industri budidaya yang memiliki potensi tinggi. Laporan Bank Dunia memproyeksikan konsumsi ikan dunia pada 2030 mencapai 151.771.000 ton yang terdiri atas ikan tangkapan sebesar 58.159.000 ton dan ikan budidaya sebesar 93.612.000 ton. Strategi pengembangan industri akuakultur ini diharapkan dapat disinergikan dengan beberapa strategi di antaranya:

- 1) Pembangunan mata rantai sistem produksi akuakultur berbasis teknologi informasi;
- 2) Penciptaan sistem logistik yang efisien dan terbuka;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- 3) Pemanfaatan teknologi informasi digital dan *Internet of Things* (IoT) dalam proses produksi maupun distribusi yang efisien, cepat dan terukur; dan
- 4) Peningkatan produktivitas melalui teknologi, rantai sistem produksi, dan sumber daya manusia ataupun mesin yang efisien, serta mutu produk yang terjamin.

d. Industri Alat Kesehatan (Alkes)

Potensi pertumbuhan industri Alkes terus mengalami peningkatan. Kebutuhan Alkes meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kondisi krisis kesehatan. Pasar Alkes saat ini masih didominasi oleh produk asing sebesar 92% (sembilan puluh dua persen). Hanya sekitar 8% (delapan persen) Alkes untuk rumah sakit kelas A dari industri Alkes Indonesia. Produk Alkes impor banyak didatangkan dari negara-negara Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Produk Alkes produksi Indonesia didominasi oleh produk perabot rumah sakit yang harganya rendah dibandingkan dengan produk teknologi tinggi. Ekspor produk Alkes buatan Indonesia dalam periode Januari-Juni 2018 adalah senilai 85,41 juta USD atau meningkat 1,68% (satu koma enam delapan persen) secara tahunan ke tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 83,99 juta USD.

Pasar Alkes diperkirakan melampaui 1 miliar USD, setara 13,5 triliun rupiah, sehingga Kawasan Batam ditargetkan dapat mengoptimalkan peluang ini. Produk Alkes yang akan dikembangkan di Kawasan Batam yaitu *imaging*, *consumable*, *patient aids*, dental, ortopedi, dan jenis lainnya. Untuk produk *imaging* berteknologi tinggi, seperti CT scan dan MRI, yang saat ini merupakan produk impor, ditargetkan akan dikembangkan di Kawasan Batam.

e. Industri Mode (*Fashion*) dan Perhiasan

Industri mode (*fashion*) termasuk salah satu dari 16 kelompok industri kreatif yang menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76% (tiga koma tujuh enam persen) pada 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri mode mencapai 13,29 miliar USD atau meningkat 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai pengeksport mode muslim terbesar di dunia, setelah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Industri perhiasan di Indonesia merupakan salah satu produk yang terkenal di dunia karena memiliki keunikan yang berasal dari budaya yang beragam dan menghasilkan perhiasan dengan tampilan yang artistik. Hal ini menyebabkan nilai ekspor perhiasan Indonesia meningkat. Pada awal tahun 2018 nilai ekspor perhiasan di Indonesia adalah sebesar 577 juta USD, meningkat sebanyak 141,11% (seratus empat puluh satu koma satu satu persen) dibandingkan nilai ekspor pada awal tahun 2017 yaitu sebesar 239 juta USD.

Pengembangan industri mode dan perhiasan di Kawasan Batam didorong untuk mendukung Batam sebagai Kawasan Pusat Perdagangan, dengan strategi pengembangan seperti di bawah ini.

Gambar 3.10 Rencana Pengembangan Industri Lainnya



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

f. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM di Kawasan Batam ditargetkan menjadi pendukung kegiatan bisnis unggulan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perputaran roda ekonomi di Kawasan Batam. Arah kebijakan dalam pengembangan UMKM diprioritaskan pada pemberdayaan pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan klaster berdasarkan sentra produksi dan wilayah. Terdapat beberapa strategi pengembangan UMKM di Kawasan Batam di antaranya:

- 1) UMKM diberikan peran serta dalam rantai pasok global dengan memperluas akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) UMKM diinisiasi untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi serta pemasaran yang dapat bersaing di pasar global;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- 3) UMKM ditingkatkan kualitasnya, inovasi, kreasi dan produksinya dengan menempatkan UMKM pada rantai pasok global;
- 4) Pemerintah didorong untuk dapat menggunakan produk-produk UMKM dalam negeri;
- 5) Pengembangan kapasitas manajemen SDM; dan
- 6) Pemberian kesempatan, kemudahan berusaha dan pendampingan kepada UMKM agar dapat meningkatkan daya saing.

Tahap pengembangan UMKM di Kawasan Batam dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar 3.11 Rencana Pengembangan UMKM Pendukung Bisnis Unggulan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

B. Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional

Kawasan pusat bisnis/ *central business district* (CBD) merupakan kawasan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas publik dengan kegiatan keuangan seperti bandara internasional, pariwisata, bisnis, wilayah perkantoran, ritel atau mall, apartemen, kawasan hunian elit, dan hotel bintang enam, serta adanya ruang publik yang memadai dan ramah lingkungan. Salah satu yang akan dikembangkan dalam CBD adalah Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional. Kawasan Batam memungkinkan untuk dikembangkan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang memberikan ruang dan pelayanan berkelas internasional untuk dapat menarik investor dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang berada dalam CBD menjadi daya tarik tersendiri dengan kelengkapan fasilitasnya yang modern, terintegrasi, dan kegiatan bisnis yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

heterogen. Kawasan Batam yang direncanakan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yaitu CBD Pantai Barat dan CBD Teluk Tering Batam Center.

Gambar 3.12 Ilustrasi rencana CBD Batam Center



Sumber : Badan Pengusahaan Batam, 2019

Tantangan dalam membentuk suatu ekosistem bisnis berkelas internasional di antaranya dalam bidang investasi, ketenagakerjaan, bidang UMKM, dan kelengkapan infrastruktur. Dalam kawasan pusat perdagangan internasional perlu adanya integrasi antar-infrastruktur dan menciptakan efektivitas, efisien, modernisasi, kecanggihan teknologi, penyiapan jaringan internet, *fintech*, dan keamanan.

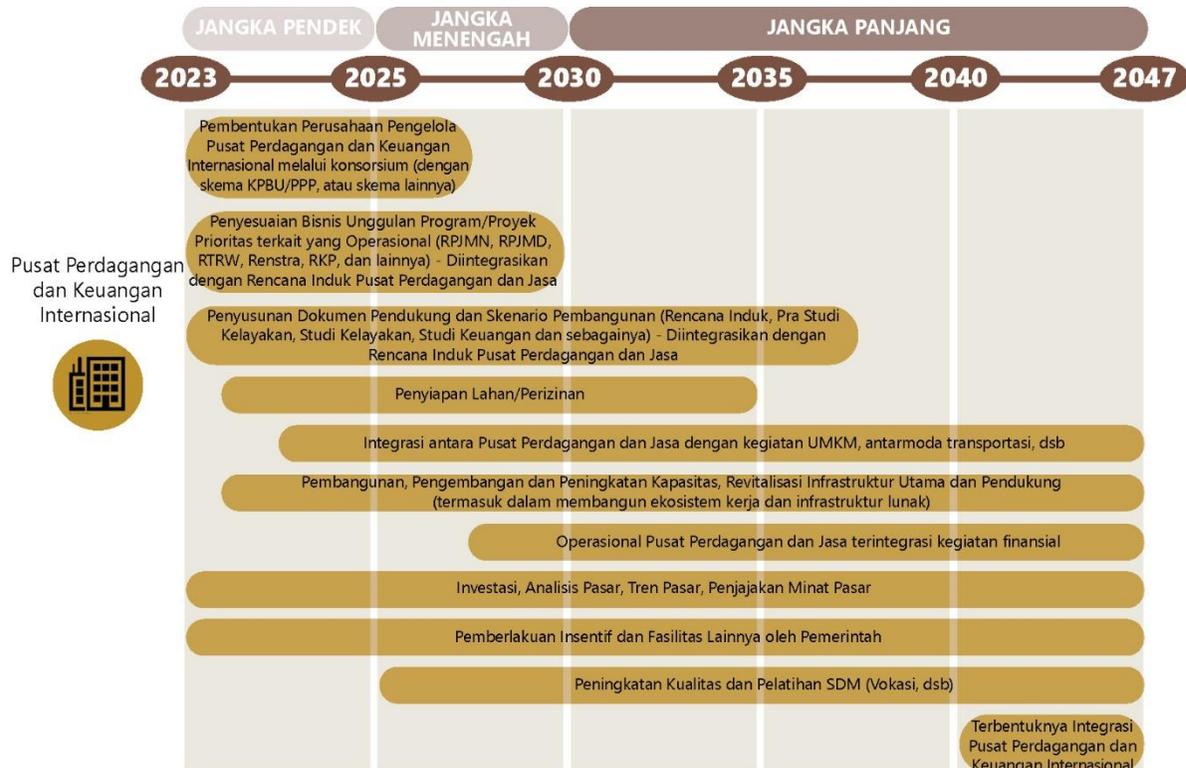
Aktivitas yang dapat dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pusat keuangan, dan pusat transportasi terpadu. Berikut merupakan strategi pentahapan pengembangan Kawasan Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Gambar 3.13 Rencana pengembangan Kawasan Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

C. Pariwisata Kesehatan Internasional

Kawasan Pariwisata menjadi salah satu daya tarik investasi di Kawasan Batam. Kawasan Batam memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kawasan BBK. Sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan berkualitas internasional akan memiliki potensi besar. Rumah Sakit BP Batam dan sekitarnya memiliki keunggulan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan jasa kesehatan internasional terintegrasi.

Pariwisata kesehatan merupakan suatu pilihan perjalanan untuk mendatangi pusat kebugaran atau rumah sakit di negara lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pariwisata kesehatan kini didominasi oleh turis internasional dengan tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun kebugaran. Negara di kawasan Asia-Pasifik kini memiliki potensi yang lebih karena biaya pelayanan kesehatan yang lebih rendah daripada beberapa negara di wilayah Amerika dan Eropa, namun memiliki kualitas kesehatan yang sama.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Peluang besar bagi kegiatan pariwisata jasa kesehatan dapat dilihat dari besaran pengeluaran pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri. Data menunjukkan bahwa hal tersebut terus meningkat dari 100 triliun rupiah (2015) menjadi 160 triliun rupiah (2019). Selain itu, sektor industri Alkes juga meningkat dari 32 triliun rupiah (2016) menjadi 49 triliun rupiah (2018). Sejalan dengan hal tersebut, industri farmasi juga meningkat dari 34 triliun rupiah (2019) menjadi 110 triliun rupiah (2021).

Tantangan dan hambatan terkait pengembangan kawasan jasa kesehatan internasional di Batam antara lain:

- 1) fasilitas dan kemudahan praktek kedokteran Warga Negara Asing (WNA);
- 2) fasilitas kemudahan rumah sakit terkait akreditasi rumah sakit, penamaan rumah sakit, kepemilikan modal asing;
- 3) fasilitas impor obat terkait pengecekan obat impor; dan
- 4) fasilitas KEK terkait kemudahan imigrasi WNA, lalu lintas barang keluar masuk KEK, dan fasilitas perpajakan di dalam KEK.

Berikut rencana pengembangan Pariwisata Kesehatan Internasional.

Gambar 3.14 Pentahapan Pariwisata Kesehatan Internasional



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

D. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi adalah terbentuknya pengembangan kawasan ekonomi di Kawasan Batam. Sampai dengan tahun 2022, sudah terdapat 2 (dua) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Batam yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 dan KEK Batam Aero Technic (BAT) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Selain itu, terdapat 7 (tujuh) potensi kawasan ekonomi baru yang berlokasi di Batam di antaranya Kawasan Kesehatan Sekupang, Kawasan Aerocity Hang Nadim, Kawasan Pariwisata Pulau Pengelap, Kawasan Pariwisata Pulau Ranoh, Kawasan Pariwisata Pulau Abang Besar, Kawasan Industri di Tanjung Sauh dan Ngenang, serta Kawasan Industri Pulau Kepala Jeri.

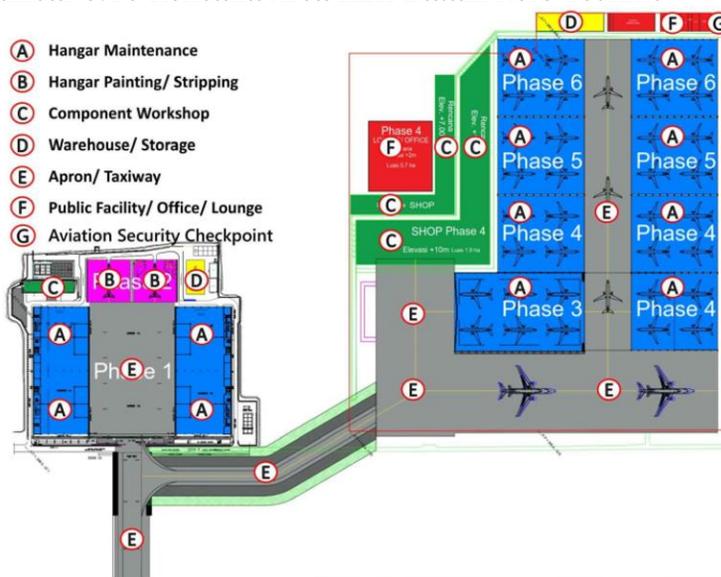
1. **KEK Batam Aero Technic**

KEK Batam Aero Technic (BAT) memiliki luas lahan ± 30 hektare dengan rencana investasi sekitar 10,25 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan akan mencapai 9.976 tenaga kerja.

KEK BAT memiliki target pasar antara lain perusahaan penerbangan nasional, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan di sebagian Timur Tengah. KEK BAT akan menangkap potensi Asia Pasifik sebagai pasar industri MRO terbesar di dunia dengan perkiraan jumlah pesawat 11.687 unit dan nilai sebesar USD 100 miliar pada tahun 2025. Ditambah lagi dengan kondisi pasar MRO Nasional sebesar 26 triliun rupiah (2020) dan hanya mampu diserap oleh penyedia MRO dalam negeri sebesar 30-35%. Jumlah penumpang udara nasional diproyeksikan akan mencapai 270 juta penumpang pada tahun 2034.

Aktivitas bisnis di KEK BAT ialah industri MRO, dengan fungsinya antara lain (1) kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat; (2) penjualan komponen pesawat dan peralatan kerja; (3) pembuatan fasilitas pesawat seperti karpet, tirai, sarung kursi, sandaran kepala, dan lainnya; (4) penelitian dan pengembangan, (5) pelatihan dan pendidikan untuk tenaga ahli mekanik atau tenaga pendukung aviasi; dan (6) logistik pergudangan untuk bahan baku, suku cadang, dan peralatan pendukung lainnya.

Gambar 3.15 Rencana Area KEK Batam Aero Technic



Sumber: KEK Batam Aero Technic, 2021



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

2. **KEK Nongsa Digital Park**

KEK Nongsa Digital Park (NDP) memiliki luas lahan $\pm 166,45$ hektare dengan rencana investasi pembangunan kawasan mencapai 1,3 triliun rupiah dan rencana investasi penyewa mencapai 4,5 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja saat ini sudah mencapai 1.260 tenaga kerja dan diproyeksikan akan menyerap 9.360 tenaga kerja saat beroperasi maksimal.

KEK NDP memiliki potensi pasar yang baik di mana dapat menjadi destinasi wisata Asia Tenggara, khususnya Singapura yang berjarak hanya 40-60 menit dengan menggunakan feri. Potensi besar juga terdapat dalam pengembangan industri perfilman dan animasi di Indonesia dengan bekerja sama dengan industri perfilman internasional. Selain itu, KEK NDP juga dapat berperan sebagai kawasan IT Digital untuk mendukung industri 4.0. Hal ini didukung dengan telah dibangunnya pusat pendidikan IT yang bekerja sama dengan *Apple Academy*.

Gambar 3.16 Rencana Induk KEK NDP



Sumber: KEK Nongsa Digital Park, 2021

Berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di KEK NDP ialah terdiri dari kawasan digital yang mencakup IT dan taman kantor, pusat data, inkubator UMKM, serta industri perfilman dan animasi serta kegiatan pariwisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

3. Kawasan Jasa Kesehatan Internasional Sekupang

Suatu destinasi wisata disebut wisata kesehatan jika kesehatan sudah menjadi tujuan utama wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Kawasan Kesehatan Internasional Sekupang berada pada lokasi seluas $\pm 44,5$ hektare dengan kegiatan utama antara lain (1) Rumah Sakit Internasional dan Pusat Spesialis; (2) industri farmasi dan Alkes; (3) Sekolah Kesehatan Berstandar Internasional; (4) Taman Penyembuhan; dan (5) Pariwisata. Layanan unggulan bidang kesehatan di Batam antara lain pusat kardiovaskular, pusat geriatrik, pusat kesuburan perempuan, pusat kanker, operasi plastik dan kecantikan, dan pusat *stem cell*.

Manfaat ekonomi dari usulan pengembangan kawasan ini antara lain mendapatkan pasien internasional, menghemat devisa negara untuk keperluan medik, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan melalui transfer ilmu pengetahuan.

Gambar 3.17 Rencana Induk Kawasan Kesehatan Internasional Sekupang



Sumber: BP Batam, 2021



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

4. Kawasan Aerocity Hang Nadim

Badan Pengusahaan Batam merencanakan kargo Bandara Hang Nadim menjadi *Logistics Aerocity*. Lokasi Bandara Internasional Hang Nadim berdampingan dengan pelabuhan kargo dan kawasan industri sehingga sangat cocok untuk dijadikan pusat logistik. Konsep *Logistics Aerocity* di Batam didefinisikan sebagai sistem perkotaan, di mana kota dibangun di sekitar bandara. Sistem *Logistics Aerocity* memiliki cakupan kegiatan meliputi pusat pemenuhan untuk mendukung perdagangan melalui sistem elektronik dan Pusat Konsolidasi dan Distribusi barang industri untuk mendukung industri domestik dan ASEAN. Lokasi *Aerocity* Hang Nadim memiliki aksesibilitas dengan pelabuhan kontainer Batu Ampar yang berjarak cukup dekat sekitar 21 km dan dua pelabuhan yang dapat digunakan untuk mendukung konsep logistik yakni pelabuhan Kabil Citra Nusa (KCN) dan Kabil yang berjarak sekitar 1 (satu) km.

Kawasan Aerocity Hang Nadim memiliki luas lahan ± 1.763 hektare yang berlokasi di Kawasan Bandara Internasional Hang Nadim. Kegiatan utama pada Kawasan ini ialah hub logistik, Pembangunan berorientasi Transit, dan pengembangan industri penerbangan.

Kawasan Aerocity Hang Nadim memiliki manfaat antara lain (1) menangkap peluang industri logistik pasar Asia Pasifik; (2) menghemat devisa negara untuk keperluan industri penerbangan; (3) meningkatkan kapasitas SDM di bidang industri penerbangan dan penyerapan tenaga kerja yang besar; (4) peningkatan lalu lintas manusia dan barang; dan (5) peningkatan intensitas kegiatan bisnis dan pendapatan sebagai efek multiplier yang dapat diperoleh oleh Kawasan BBK.

5. Potensi Kawasan Industri

Potensi Kawasan dengan kegiatan utama industri yang akan dikembangkan di Kawasan Batam dan sekitarnya di antaranya adalah Kawasan Industri di Tanjung Sauh dan Ngenang, Kawasan Industri Pulau Kepala Jeri, dan Kawasan Industri Pulau Ladi.

Salah satu kawasan industri yang dikembangkan menjadi kawasan industri bertaraf internasional adalah Kawasan Industri Tanjung Sauh. Untuk mendukung kawasan industri tersebut, juga akan dibangun pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Sauh akan dibangun menjadi pelabuhan kargo bertaraf internasional. Rencananya pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan peti kemas modern dan tempat penumpukan peti kemas yang terintegrasi dengan kawasan industri. Di samping itu, Tanjung Sauh juga akan dikembangkan menjadi tempat pengolahan dan penyimpanan gas, hub logistik, dan Pelabuhan Gerbang Jaringan (*port gateway*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pada tahun 2024 hingga 2033 akan dilakukan konstruksi dalam tiga tahap dan operasionalisasi sebagian, yang meliputi penyiapan infrastruktur dasar, pembangunan kawasan industri, pembangunan pelabuhan, dan operasionalisasi sebagian kawasan industri. Operasionalisasi penuh kawasan industri dan pelabuhan diharapkan dapat dilaksanakan tahun 2033.

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan dengan kegiatan utama pariwisata di Kawasan Batam dan sekitarnya adalah Kawasan Pariwisata Pulau Pengelap, Kawasan Pariwisata Pulau Ranoh, Kawasan Pariwisata Pulau Abang Besar.

Kawasan pariwisata Kepri Coral yang terdapat di Pulau Pengelap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Besar akan direncanakan sebagai Kawasan Pariwisata. Pengembangan kawasan Kepri Coral ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 7,3 triliun rupiah dan mampu menyerap hingga 1.000 orang tenaga kerja. Area Kepri Coral sudah dilengkapi dengan terminal penyeberangan, restoran apung, area untuk menyelam, dan area hutan bakau. Fasilitas dalam kawasan yang telah terbangun antara lain kolam renang air tawar, dome, villa, pusat kebugaran, tempat hiburan, tempat karaoke, kapal katamaran, helipad, dan akuarium bawah laut. Pengembangan jangka panjang nantinya akan ditambah dengan fasilitas lain berupa lapangan golf, dermaga internasional, *marina yacht*, kebun buah-buahan, lembaga konservasi, budidaya laut untuk edukasi, villa atas air, hotel berbintang, hotel apung, dan sebagainya.

III.1.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik

A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo sebagai Pusat Logistik

Dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas bisnisnya, di wilayah Batam akan terdapat lima aktivitas logistik, meliputi (1) *transport hub* pada Pelabuhan Sekupang, (2) *Port city hub* pada pelabuhan Batu Ampar, (3) *International Logistics Hub* pada Pelabuhan Tanjung Sauh, (4) *Supply Base Port* pada Pelabuhan Kabil dan (5) *Aerocity* Bandara Hang Nadiem.

1. Pengembangan Model dan Aktivitas Bisnis Pada Transport Hub

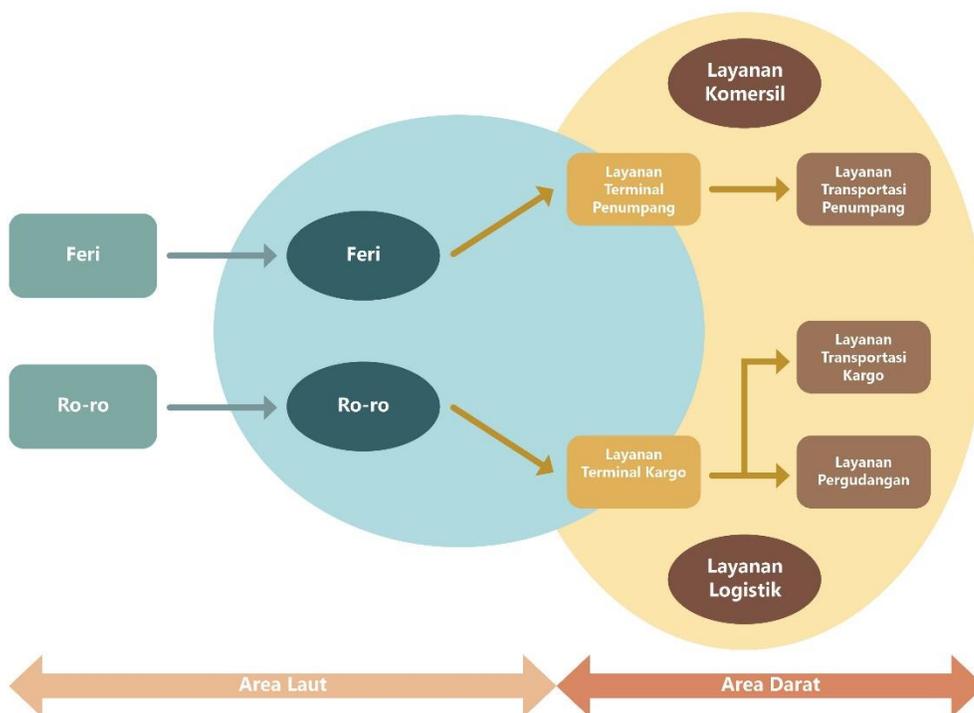
Aktivitas bisnis hub transportasi di Batam saat ini direpresentasikan oleh Pelabuhan Sekupang dengan 4 (empat) pelabuhan yang beroperasi, yaitu terminal penumpang domestik, terminal penumpang internasional, Pelabuhan Umum Sekupang (Pelabuhan Beton), dan Pelabuhan Kargo Umum Ro-ro. Ke depan, pengembangan pelabuhan Sekupang diarahkan menjadi hub transportasi untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata yang melayani domestik maupun internasional serta pergerakan barang maupun penumpang. Gambar 3.18 menyajikan secara skematis arah pengembangan pelabuhan Sekupang menjadi hub transportasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Gambar 3.18 Model Bisnis Transportasi



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

2. Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada Hub Kota Pelabuhan

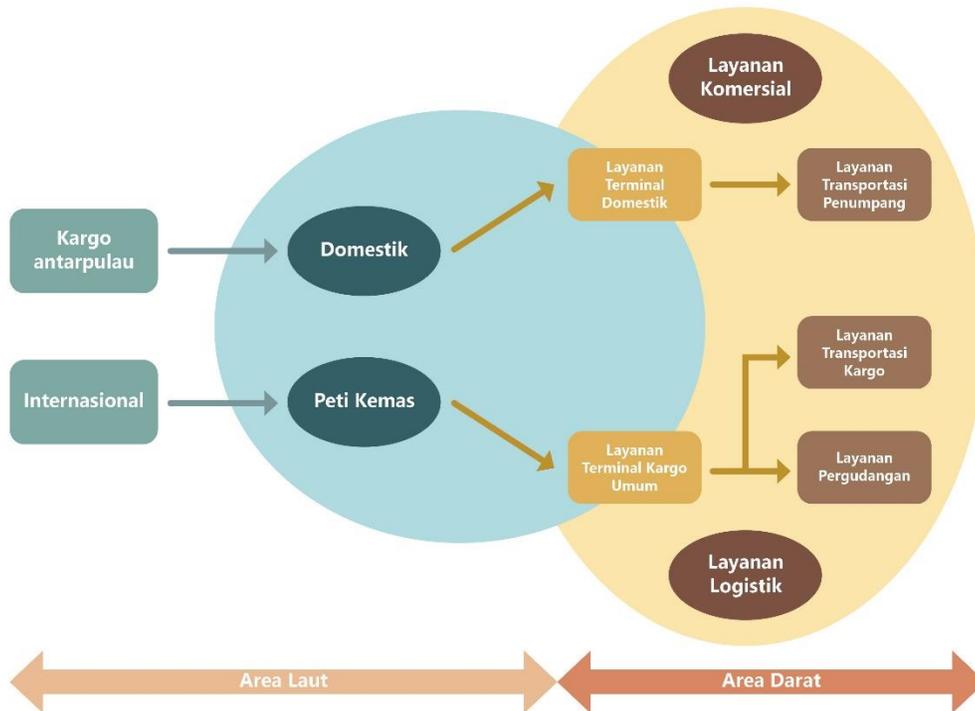
Pelabuhan Batu Ampar saat ini melayani kegiatan kargo nasional dan internasional, serta melayani kegiatan keberangkatan dan kedatangan penumpang internasional. Pelabuhan Batu Ampar terdiri dari dermaga beton, kegiatan kargo umum, konvensional kontainer, dermaga pelayaran rakyat, dan terminal feri penumpang internasional. Ke depannya, Pelabuhan Batu Ampar direncanakan sebagai Logistik Kota Pelabuhan (*Port City Logistics*) yang mengintegrasikan kegiatan industri, perdagangan, dan logistik sebagaimana disajikan pada Gambar 3.19. Adapun aliran barang disajikan pada Gambar 3.20.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

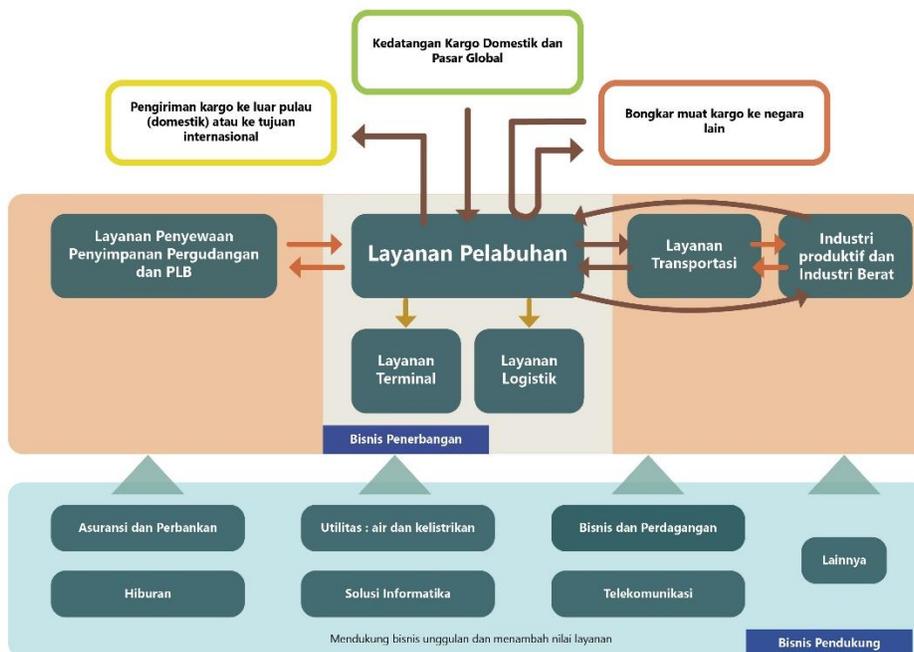
- 60 -

Gambar 3.19 Logistik Kota Pelabuhan Pelabuhan Batu Ampar



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.20 Aliran Barang Logistik Kota Pelabuhan Batu Ampar



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



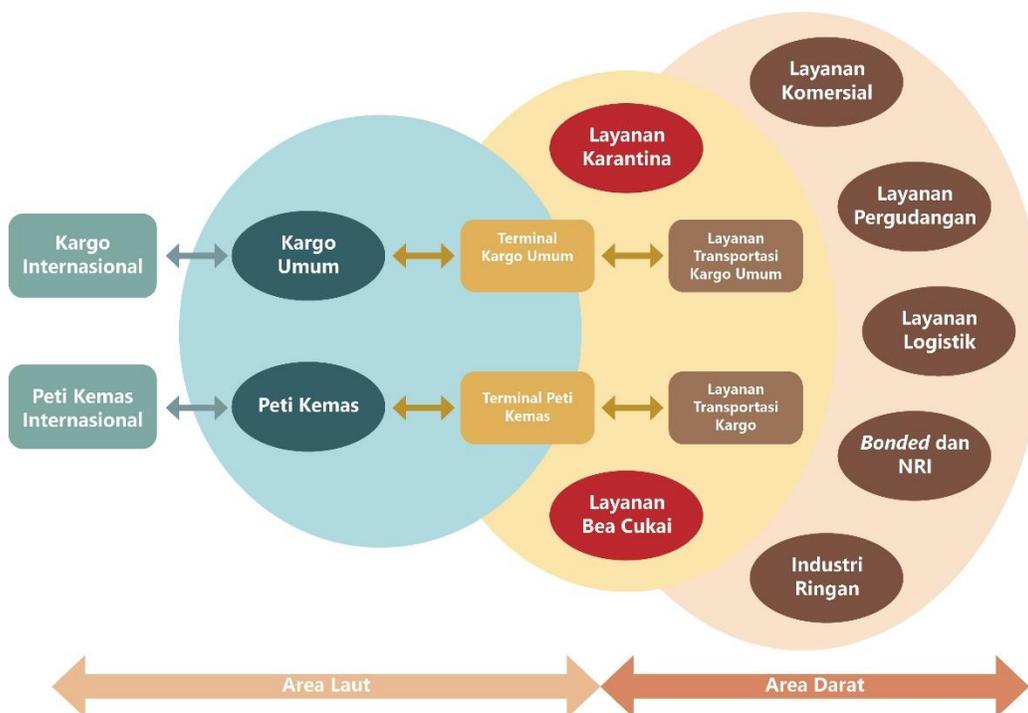
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

3. Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada Hub Logistik Internasional Tanjung Sauh

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada dalam wilayah segitiga pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Kepulauan Riau) dan didukung oleh kondisi fisik yang sesuai dalam pengembangan hub logistik skala besar. Pembangunan pelabuhan tersebut ditargetkan mampu menangani pengiriman melalui Selat Malaka tanpa transit di Singapura. Pelabuhan ini akan melengkapi pelabuhan Batu Ampar di Batam. Secara umum, arah pengembangan dan skema aliran barang Pelabuhan Tanjung Sauh sebagai Hub Logistik Internasional dapat dilihat pada Gambar 3.21 dan Gambar 3.22.

Gambar 3.21 Hub Logistik Internasional Tanjung Sauh



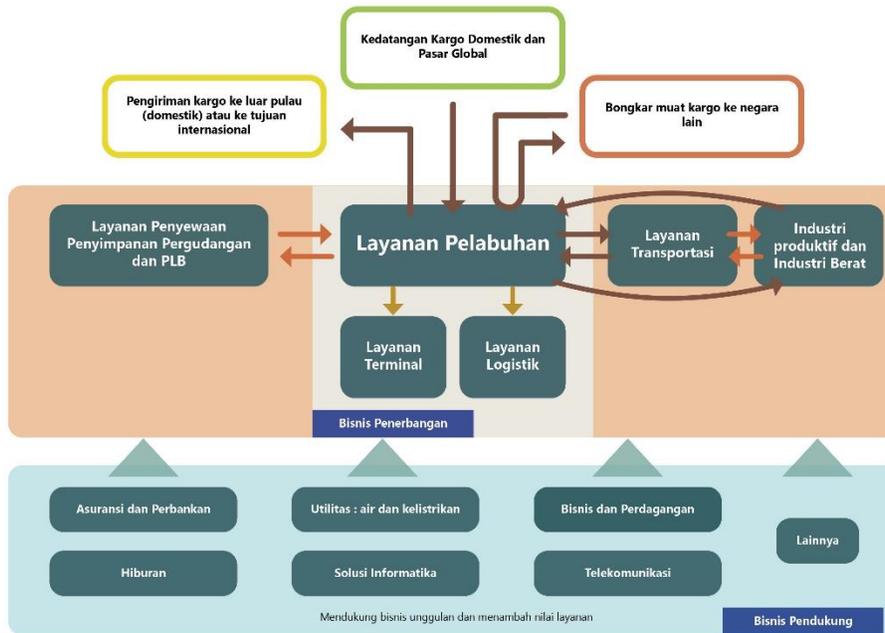
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Gambar 3.22 Aliran Barang Hub Logistik Internasional Tanjung Sauh

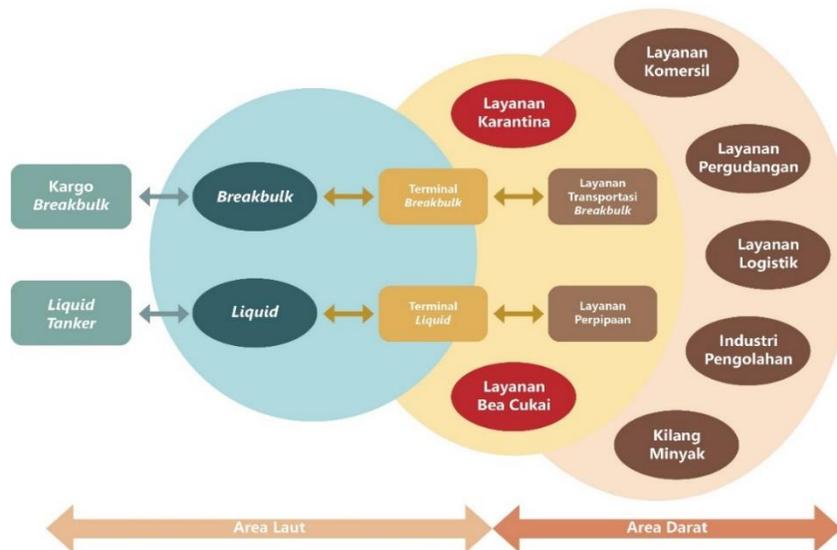


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

4. Pengembangan *International Supply Base Logistics* Kabil

Mengingat besarnya potensi yang tersedia di perlintasan Selat Malaka, maka pelabuhan Kabil memiliki peran untuk menampung berbagai kegiatan perkapalan meliputi *ship to ship*, *waiting order*, *tank cleaning*, *lay up*, *bunker*, perbaikan di perairan, singgah, ganti awak kapal, dan lain-lain. Gambar 3.23 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan Pelabuhan Kabil.

Gambar 3.23 *Supply Base Logistics* Kabil



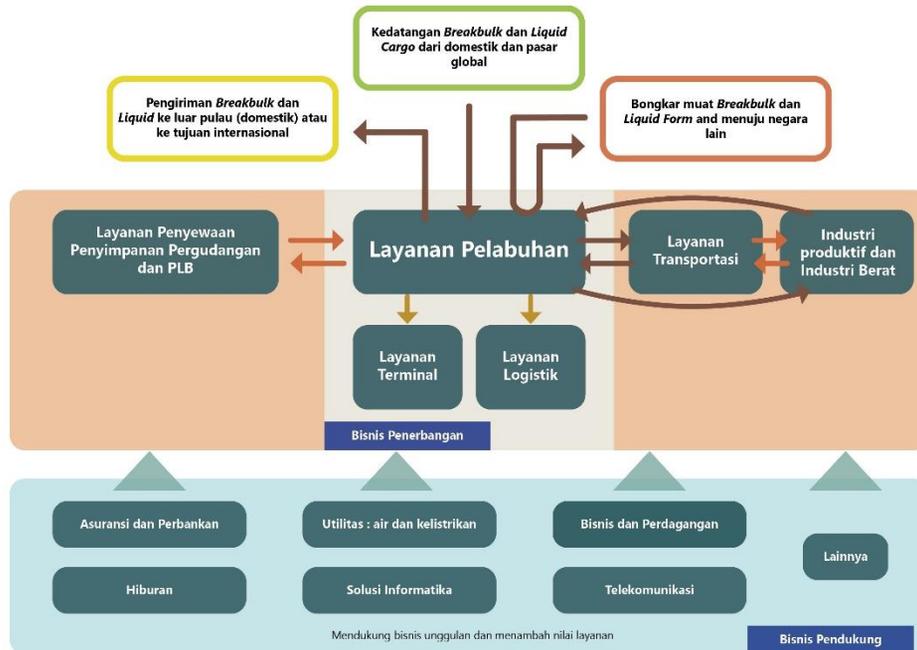
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Gambar 3.24 Aliran Barang Pelabuhan Kabil



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

5. Pengembangan dan Aktivitas Bisnis Aerocity Hang Nadim

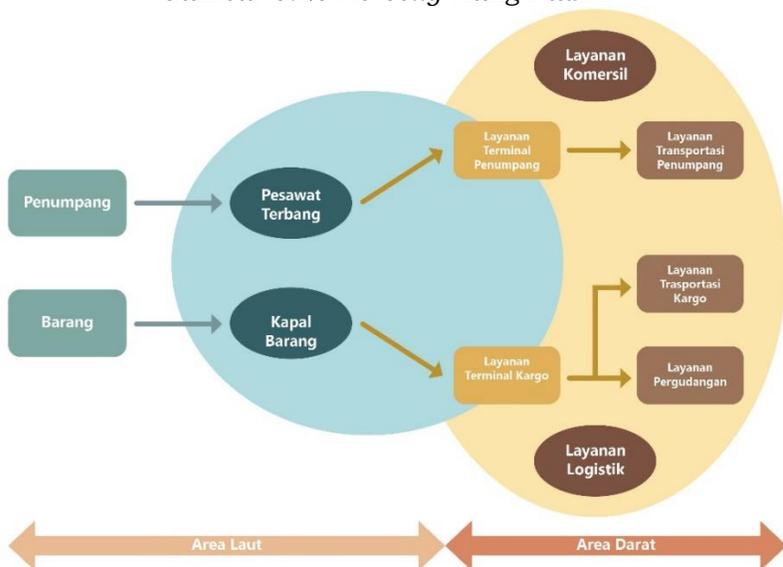
Rencana pengembangan *aerocity* menjadi salah satu prioritas dalam rangka pengembangan kawasan di sekitar Bandar Udara Hang Nadim. Pengembangan *aerocity* tersebut akan mendorong optimalisasi rencana pengoperasian *Light Rail Transit* (LRT) yang menghubungkan Bandar Udara Hang Nadim dengan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD). Pengembangan *aerocity* ditargetkan mampu meningkatkan daya tarik Bandar Udara Hang Nadim bagi investor untuk tujuan berusaha, sehingga menghasilkan rantai ekonomi tidak hanya ke pasar domestik tetapi juga ke pasar internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

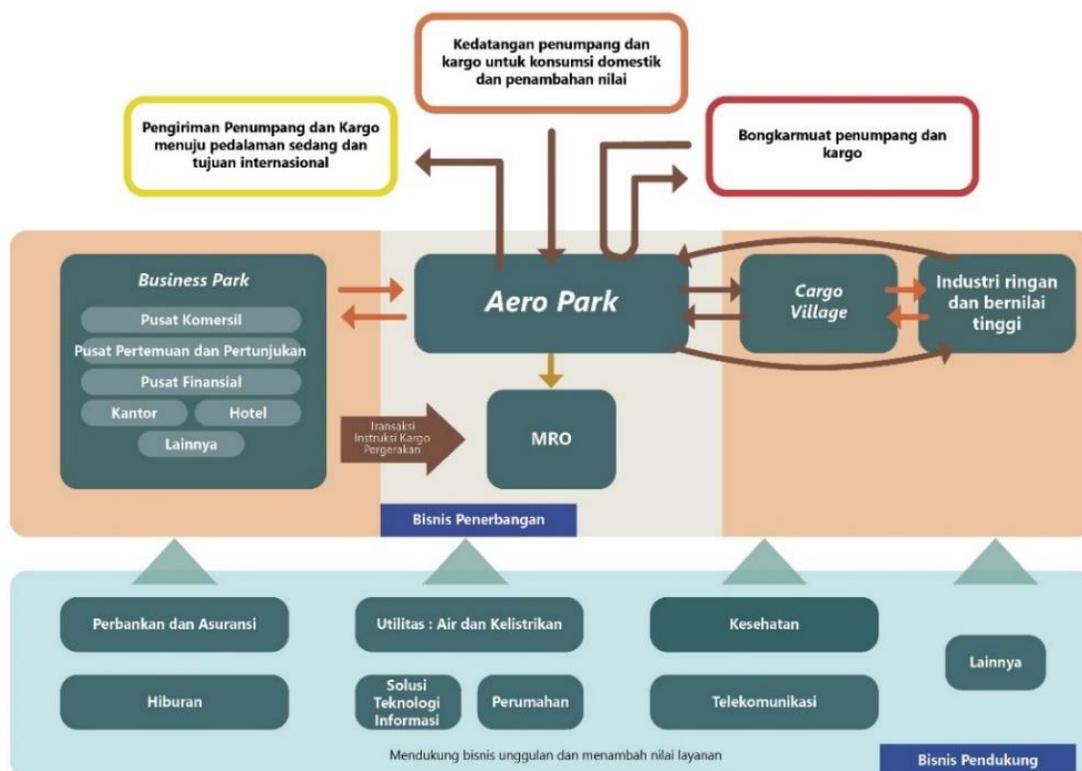
- 64 -

Gambar 3.25 Aerocity Hang Nadim



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.26 Aliran Bisnis Aerocity Hang Nadim



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Pembangunan yang terintegrasi antara Kawasan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Kabil menjadikan kawasan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kota logistik. Peran dan fungsi kawasan ini perlu didukung oleh pengembangan TIK yang mumpuni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan logistik yang akan dikembangkan. Pengembangan Bandara Hang Nadim sebagai titik pusat pengembangan Kawasan Barelang menjadi sangat strategis. Gambar 3.25 menjelaskan model pengembangan *Aerocity* Hang Nadim dan Gambar 3.26 menjelaskan Alur Bisnis *Aerocity* Hang Nadim.

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan Antar Pulau

Secara umum, pelabuhan yang akan dikembangkan di Batam yaitu: 1) Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan kontainer domestik internasional; 2) Pelabuhan Sekupang sebagai pelabuhan penumpang dan kontainer Ro-ro internasional; 3) Pelabuhan Kabil Curah dan Pelabuhan Kabil Kargo Umum; serta 4) Pelabuhan Tanjung Sauh sebagai pelabuhan kontainer yang akan memaksimalkan fasilitas dan operasi untuk aktivitas *transshipment* dan ekspor impor. Pembagian aktivitas bisnis pelabuhan dapat dilihat di Tabel 3.4. Adapun sebaran lokasi pelabuhan dapat dilihat pada Gambar 3.27.

Tabel 3.4 Aktivitas Bisnis Pelabuhan di Kawasan Batam

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Penumpang	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
Barelang (Batam – Rempang – Galang)								
1	Batu Ampar	Dom	-	V	-	-	-	Peralatan dan Kapal, Galangan Kapal
		Int	-	V	-	-	-	
2	Sekupang	Dom	V	V	-	-	V	Transportasi
		Int	V	V	-	-	V	
3	Kabil	Dom	-	-	V	V	V	<i>Oleochemical</i>
		Int	-	-	V	V	V	Kimia
4	Tanjung Sauh	Dom	-	-	-	-	-	Peralatan Rumah Tangga Optoelektronik
		Int	-	V	-	-	-	

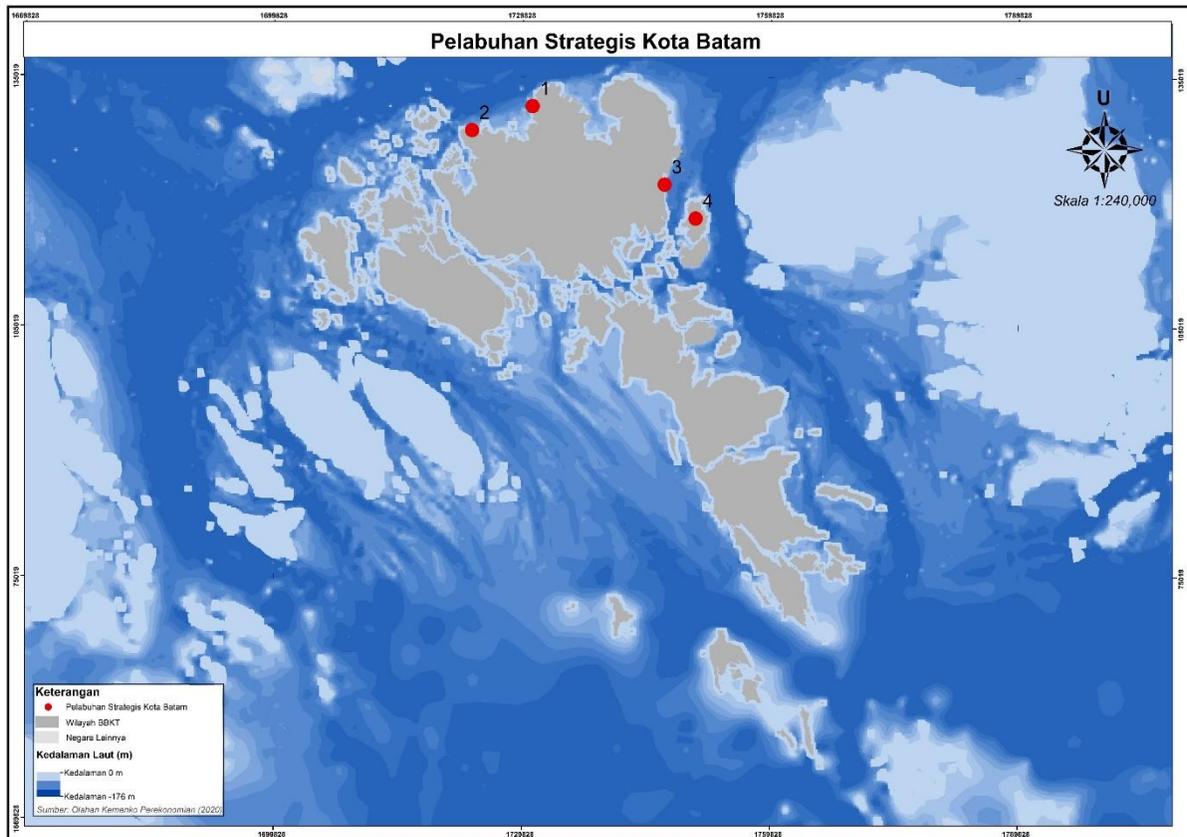
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Gambar 3.27 Pelabuhan Strategis Kota Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

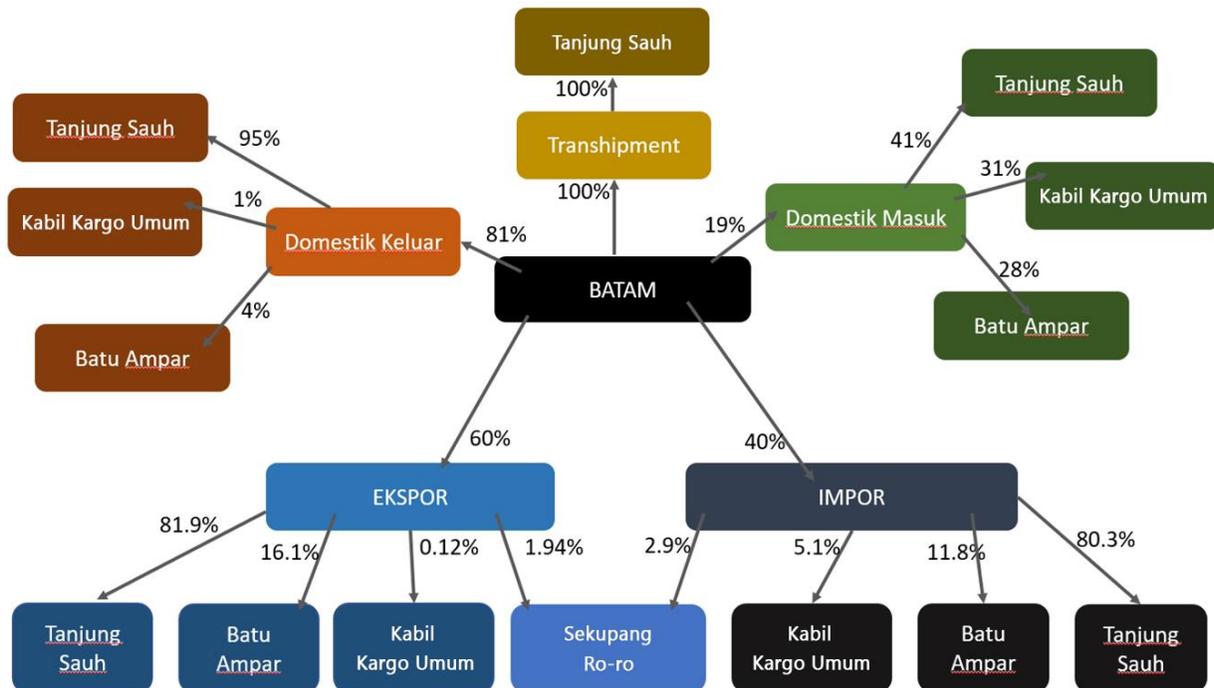
Distribusi aliran pergerakan barang untuk setiap pelabuhan ditentukan oleh jenis komoditas yang keluar dan masuk Batam. Besaran pergerakan komoditas tersebut terdiri atas rasio volume ekspor dan impor, serta volume domestik masuk dan domestik keluar. Berdasarkan besaran pergerakan komoditas tersebut, maka dapat digambarkan bagaimana distribusi pergerakan barang pada masing-masing pelabuhan di Batam pada setiap komoditas. Gambar 3.28 menjelaskan alur distribusi pergerakan barang di Kota Batam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Gambar 3.28 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

C. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan, Jembatan dan Jalan Bebas Hambatan

Kota Batam diproyeksikan mengalami perkembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang sangat pesat. Hal ini belum sejalan dengan kondisi beberapa ruas jalan di Kota Batam yang terindikasi tidak mampu menampung beban laju perpindahan manusia maupun barang di masa mendatang. Diprediksi hingga tahun 2047, setidaknya 5 (lima) ruas jalan utama yang tidak mampu menampung peningkatan pergerakan kendaraan yaitu jalan S. Parman, Jalan Tengku Sulung, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Hang Jebat, dan Jalan Hang Lekiu. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang.

Berikut ini beberapa rencana pengembangan jalan di Kawasan Bareleng, yaitu:

1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Batu Ampar - Bandara Hang Nadim yang terintegrasi dengan Jembatan Batam – Bintan;
2. Pembangunan Jalan Lingkar Luar (Tanjung Pinggir – Jodoh);
3. Pengembangan Jalan Trans Bareleng;
4. Pengembangan Jalan S. Parman;
5. Pengembangan Jalan Hang Lekiu dan Jalan Hang Jebat; dan
6. Pengembangan Jalan Tengku Sulung.



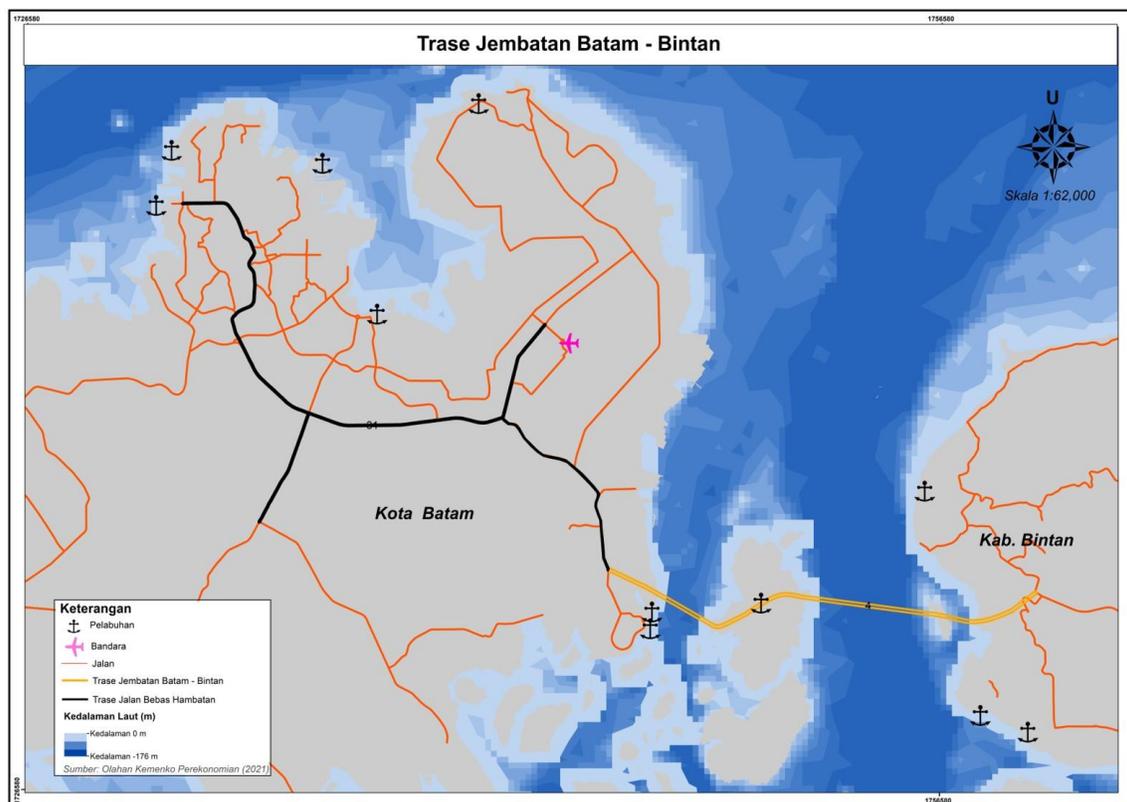
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

D. Rencana Pembangunan Jembatan Batam – Bintan

Kedekatan posisi Batam dan Bintan dengan Singapura memberikan dampak yang menguntungkan, sehingga menciptakan berbagai peluang yang perlu untuk dimanfaatkan. Beberapa peluang tersebut antara lain menjadi lokasi manufaktur berorientasi ekspor, menjadi limpahan (*spill-over*) industri dan wisata dari Singapura sekaligus menjadi gerbang arus wisatawan asing ke wilayah Indonesia lainnya, dan peluang menjadi tempat bagi penanaman modal asing langsung. Untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi internasional terhadap Pulau Batam dan Pulau Bintan, maka perlu ditunjang infrastruktur penting, salah satunya Jembatan Batam – Bintan (Jembatan Babin). Jembatan Babin tersebut direncanakan terintegrasi dengan rencana jalan bebas hambatan Batu Ampar – Muka Kuning - Bandara Hang Nadim. Trase Jembatan Batam – Bintan dapat dilihat di Gambar 3.29.

Gambar 3.29 Trase Rencana Jembatan Batam – Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

III.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman akan dikembangkan di sekitar kawasan pesisir Pulau Batam seperti area Batu Ampar, Batam Center, Nongsa, Pulau Bulan, area sekitar jembatan Barelang, dan Pulau Galang. Diproyeksikan pada tahun 2033-2047, ± 7.558 hektare di Kota Batam diperuntukan menjadi kawasan permukiman.

B. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

1. Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa

Dalam rangka mendukung Batam sebagai kawasan perdagangan dan jasa, diperlukan sarana perdagangan dan jasa sebagai berikut:

- a. pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. toko swalayan;
- d. gudang;
- e. perkulakan;
- f. pasar lelang komoditas;
- g. pasar berjangka komoditi; atau
- h. sarana perdagangan lainnya seperti pusat distribusi regional, pusat distribusi provinsi, terminal agribisnis, dan toko kelontong/warung.

Sinergi antar-sarana perdagangan dan jasa penting dilakukan untuk menjamin pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa di Kawasan Batam. Selain itu diperlukan pengembangan koridor perdagangan dan jasa di Batam, seperti penjualan produk-produk yang mampu meningkatkan nilai tambah maupun produk-produk khas Batam. Hal ini memperlihatkan karakteristik Kota Batam sebagai kawasan industri maupun perdagangan dan jasa, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan sekitarnya.

C. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Air

Revitalisasi dan optimalisasi reservoir/waduk diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di Batam. Pelaksanaan revitalisasi dan optimalisasi reservoir/waduk tersebut dilakukan dengan mekanisme:

1. Rehabilitasi lahan dilaksanakan di daerah tangkapan dan resapan air untuk mengurangi limpasan permukaan pembawa material tanah.
2. Pengerukan sedimen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

3. Peningkatan fasilitas pengolahan air bersih berupa pengadaan *Water Treatment Plant* pada Waduk Tembesi untuk mendukung kebutuhan air bersih di Batam.

Gambar 3.30 Rencana Pengembangan Sumber Air Baku di Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Rencana pemanfaatan sumber daya air telah tertuang dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau hingga tahun 2039. Dalam rencana tersebut terdapat beberapa arahan pemanfaatannya, yaitu:

1. Pembangunan tampungan air guna pemenuhan kebutuhan air di Kota Batam.

Tabel 3.5 Kapasitas Pengembangan Waduk

Tampungan Air	Kapasitas (liter/detik)
2023-2024	
Waduk Tembesi	600
Waduk Rempang	232
Embung Air Raja	10
Embung Pulau Pecung	5
Waduk Duriangkang (peningkatan)	200
Embung Pulau Setokok	10
2025-2029	
Embung Pulau Kasu	10
Embung Pulau Bulang Lintang (peningkatan)	10
Embung Sei Galang Timur	239
Embung Sei Cia	500
Embung Sei Raya	44



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Tampungan Air	Kapasitas (liter/detik)
Embung Sembulang	25
Embung Sei Temiang	25
Embung Pulau Terung	5
Embung Lapangan dan PAH	270
2030-2034	
Embung Sei Tatas	30
Waduk Sei Galang	250
Embung Sei Galang Utara	170
Embung Sei Curus	7
Embung Sei Batas	7
Embung Galang Baru	53
Embung Pulau Karas	5
Embung Lapangan dan PAH	730
2035-2039	
Waduk Duriangkang (peningkatan)	300
Waduk Rempang 2	750
Embung Pulau Lumba	20
Waduk Rempang Utara	260
Embung Pulau Pemping	25
Embung Lapangan dan PAH	508

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019

2. Pengaliran Sumber Air Baku dari Wilayah Lain

Pemanfaatan sumber air di Pulau Lingga dan Waduk Sei Busung di Pulau Batam diperkirakan mampu mewujudkan waduk dengan kapasitas 4.000 liter/detik. Pembangunan Waduk Sei Busung ditargetkan selesai pada tahun 2030. Pengaliran air baku Waduk Sei Busung ke Pulau Batam dengan pemasangan pipa direncanakan terlaksana pada periode 2029-2047 yang akan terintegrasi dengan Jembatan Batam-Bintan.

D. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih

Kondisi terkini ketersediaan air dari delapan waduk dan lima embung yang sudah beroperasi di Batam hanya mencapai kapasitas total 3.825 liter/detik sedangkan kebutuhan air di tahun 2023 mencapai sekitar 5.646 liter/detik. Oleh sebab itu, perlu segera dilaksanakan pembangunan sumber air baku lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

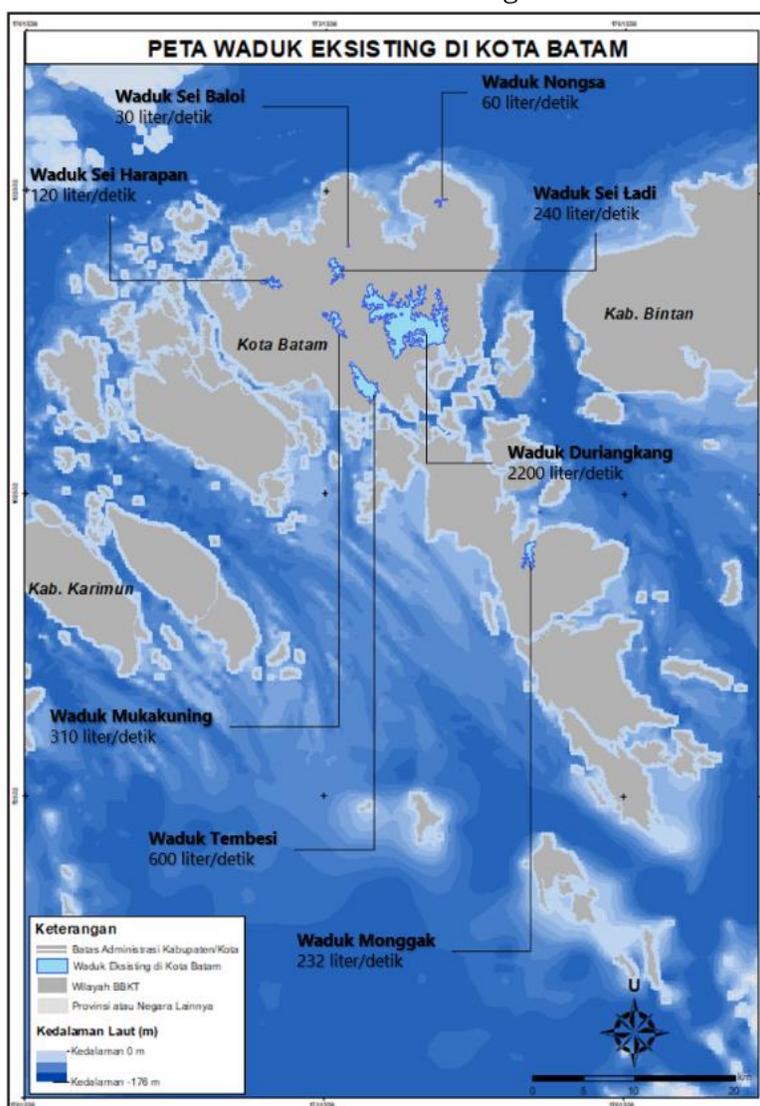
- 72 -

Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Air (liter/detik) Kota Batam

BATAM	2023	2027	2032	2037	2042	2047
Domestik	3.909	4.653	5.326	6.038	6.782	7.568
Non Domestik	1.737	2.068	2.367	2.684	3.014	3.364
TOTAL	5.646	6.721	7.693	8.722	9.796	10.932

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.31 Peta Waduk Eksisting di Kota Batam



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

E. Rencana Pengelolaan Limbah Cair

Perencanaan terhadap produksi air limbah diperlukan untukantisipasi jika terjadi peningkatan yang signifikan dan berdampak pada ketidakmampuan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menampung air limbah domestik. Pada tahun 2023, IPAL memiliki beban untuk menampung air limbah domestik sebesar 4.691,14 liter/detik. Hingga tahun 2047, IPAL di Kota Batam memiliki beban penampungan sebesar 9.082,76 liter/detik. Pengembangan jaringan air limbah di Kota Batam sudah dimulai dengan pembangunan IPAL Batam Center dan IPLT Punggur. IPAL Batam Center memiliki kapasitas sebesar 33 liter/detik. Lebih lanjut, terdapat rencana pengembangan IPAL dengan kapasitas 20.000 m³/hari atau sekitar 230 liter/detik. Dengan demikian, Kota Batam masih membutuhkan perencanaan dan pengembangan pengolahan limbah untuk memenuhi kebutuhan tampungan air limbah sampai pada tahun 2047. Pengembangan IPAL dapat dilakukan secara bertahap, dengan target sebesar 5.583,70 liter/detik pada tahun 2027, 6.391,73 liter/detik pada tahun 2032, 7.246,37 liter/detik pada tahun 2037, 8.139,28 liter/detik pada tahun 2042, dan 9.082,76 liter/detik pada tahun 2047.

Berdasarkan kategori kota yang diperhitungkan dari jumlah penduduk, maka Kota Batam termasuk kota besar/ kota metropolitan dengan kepadatan penduduk mencapai 166 jiwa/hektare pada tahun 2047. Dengan demikian, perencanaan yang dapat dilakukan adalah pengembangan SPALD-T (IPAL) dengan sistem *offsite* di Kota Batam. Namun, pengembangan SPALD-T skala permukiman (IPLT) juga dapat menjadi alternatif perencanaan di kawasan permukiman di Kota Batam.

F. Rencana Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan

Penambahan persebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penggantian TPS eksisting dengan ukuran lebih besar sehingga jumlah TPS yang perlu ditambahkan di lokasi baru tidak terlalu banyak mengingat keterbatasan lahan yang ada. Selain itu, rencana pengembangan pengelolaan sampah juga dapat diarahkan dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kota Batam sudah mengalokasikan pembangunan TPA di Pulau Galang untuk mengantisipasi timbulnya sampah di masa mendatang.

G. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Rencana pengembangan jaringan drainase dan pengendalian banjir akan dilakukan secara hierarki sebagai berikut:

1. mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

2. mengembangkan sistem drainase yang berkelanjutan dengan cara melengkapi fasilitas drainase dengan daerah resapan sehingga dapat berfungsi untuk menambah cadangan air tanah. Fasilitas resapan dapat berupa parit resapan, sumur resapan, kolam resapan dan perkerasan resapan. Selain fasilitas resapan juga dapat digunakan fasilitas penyimpan seperti kolam retensi, lahan basah dan kolam regulasi, taman, pekarangan dan ruang terbuka hijau.
3. memelihara dan melindungi waduk-waduk yang ada agar tetap berfungsi seperti semula yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan ulang termasuk di dalamnya pengukuran dan penggambaran;
 - b. mematok batas-batas waduk;
 - c. merencanakan perbaikan waduk dengan pengerukan, perbaikan, dan memberikan bangunan pelengkap;
 - d. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sekitar waduk; dan
 - e. menghidupkan kembali tali-tali air yang terputus.

Selain mekanisme di atas, beberapa target penanggulangan banjir dan penanggulangan abrasi telah tertuang dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. Penanggulangan abrasi pantai
 - a. 2023-2024 = 29,35 Km
 - b. 2025-2029 = 13.5 Km
 - c. 2030-2034 = 3,36 Km
 - d. 2034-2039 = 0 Km
2. Penanggulangan banjir pada 21 lokasi
 - a. 2023-2024 = 600 Km
 - b. 2025-2029 = 400 Km
 - c. 2030-2034 = 0 Km

H. Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Energi

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan permukiman, kebutuhan daya listrik di Batam adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2023 sebesar 1.671.213.054 VA;
2. Tahun 2027 sebesar 2.073.024.764 VA;
3. Tahun 2032 sebesar 2.659.755.430 VA;
4. Tahun 2037 sebesar 3.124.813.030 VA;
5. Tahun 2042 sebesar 3.520.111.990 VA; dan
6. Tahun 2047 sebesar 3.875.881.053 VA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik di Kota Batam, dengan pengembangan kegiatan industri pada 10 tahun pertama seluas 7.241,24 hektare dibutuhkan listrik 1.448 MVA. Selanjutnya pada 15 tahun berikutnya dengan tambahan pengembangan kegiatan industri seluas 3.708,72 hektare dibutuhkan listrik 742 MVA. Batam diproyeksikan membutuhkan lahan seluas 9.601,18 hektare untuk kebutuhan pengembangan kawasan pariwisata dibutuhkan tambahan listrik 10 MVA. Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi listrik di Kota Batam, maka diperlukan pembangunan suplai energi baru dan terbarukan.

I. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi

Kebutuhan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri pada tahun 2023 hingga 2030 sebesar 289.650 SST, dan pada tahun 2031 hingga 2045 dibutuhkan penambahan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri sebesar 148.349 SST. Pada kawasan pariwisata dibutuhkan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh destinasi pariwisata dengan penyediaan jaringan sinyal operator yang baik dan kemudahan dalam menjangkau sinyal internet yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi yang mempertimbangkan infrastruktur telekomunikasi yang saling melengkapi antara sistem kabel, sistem nirkabel, sistem mobile maupun satelit untuk kebutuhan baik permukiman, industri maupun pariwisata.

Tabel 3.7 Kebutuhan Telekomunikasi untuk Kawasan Industri di Kota Batam

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Ruang Luas Lahan (Ha) Industri	Kapasitas (40 SST/ha)
2021- 2030	7.241,24	289.650
2031- 2045	3.708,72	148.349

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Selain itu, Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar Pusat Data terbesar di Asia Tenggara yaitu 21,8% (dua puluh satu koma delapan persen). Rencana pengembangan Pusat Data di kawasan BBK berada di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Keunggulan Kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagai lokasi Pusat Data di antaranya adalah kawasan ini terhubung dengan 11 kabel Serat optik bawah laut dan merupakan kawasan dengan kategori kerawanan bencana gempa bumi yang rendah sehingga aman untuk Pusat Data.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di bidang Pusat Data di Indonesia, pemerintah perlu membuka Kawasan Khusus Pusat Data Hijau Terpadu dengan dukungan ekosistem pendukung hidup Pusat Data terbaik di Kawasan Batam dan Bintan, sehingga menarik bagi investor. Pengembangan Pusat Data di Kota Batam direncanakan berada di lokasi sekitar Jembatan Balerang atau Nongsa *Digital Park* dengan kapasitas listrik yang dibutuhkan sekitar 150 MW untuk Nongsa *Digital Park*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

J. Konservasi Hutan, Perairan, Mangrove, Wilayah Pesisir, dan Laut

Rencana kegiatan konservasi hutan, perairan, mangrove, wilayah pesisir, dan laut merupakan agenda prioritas untuk dilakukan di Kawasan BBK khususnya Batam sebagai bagian dari wilayah pesisir dan kepulauan. Terdapat hutan mangrove dengan luasan sekitar 12.944,7 hektare yang dapat menjadi kekhasan ekosistem alami. Pengembangan kawasan mangrove, pesisir, dan laut dalam mendorong pengembangan wilayah berkelanjutan di Kawasan Batam perlu didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menjaga ekosistem. Selain itu, ekosistem di sepanjang pesisir di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru juga harus dapat dijaga bersama untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata dan maritim berbasis lingkungan.

Konservasi Kawasan Hutan termasuk wilayah perairan di sekitarnya perlu diselaraskan dengan rencana pengembangan di darat khususnya dengan pembangunan industri, permukiman, sarana, dan prasarana infrastruktur kawasan. Perkembangan industri di sekitar Sei Tembesi dan Sei Duriangkang serta adanya indikasi penggunaan ruang secara liar di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru perlu didorong penyelesaiannya dengan memastikan adanya zona penyangga di sekitar area lindung maupun Kawasan Hutan. Kegiatan konservasi secara paralel akan mendorong Kawasan Batam tetap memiliki daya dukung penyediaan air yang lebih baik dengan terjaganya area resapan air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku di Kawasan Batam.

III.1.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan

Dalam rangka mencapai salah satu Tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan di Tahun 2030, yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK mendorong terwujudnya prinsip Perancangan Perkotaan dalam beberapa tipologi kawasan dan konsep. Melalui pertimbangan fungsi, karakter dan isu kawasan, tipologi Perancangan Perkotaan memvisualisasikan prinsip yang minimal harus ada dalam sebuah kawasan dalam pengembangan Kawasan Batam.

A. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa dan Pusat Kota

Arahan membuat kawasan bisnis terpadu yang terdiri dari area perdagangan jasa dan hunian ini divisualisasikan dalam tipologi Pusat Perdagangan dan Jasa. Tipologi ini mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu:

1. Mempunyai pusat kegiatan;
2. Kawasan campuran; dan
3. Mempunyai karakter kawasan.



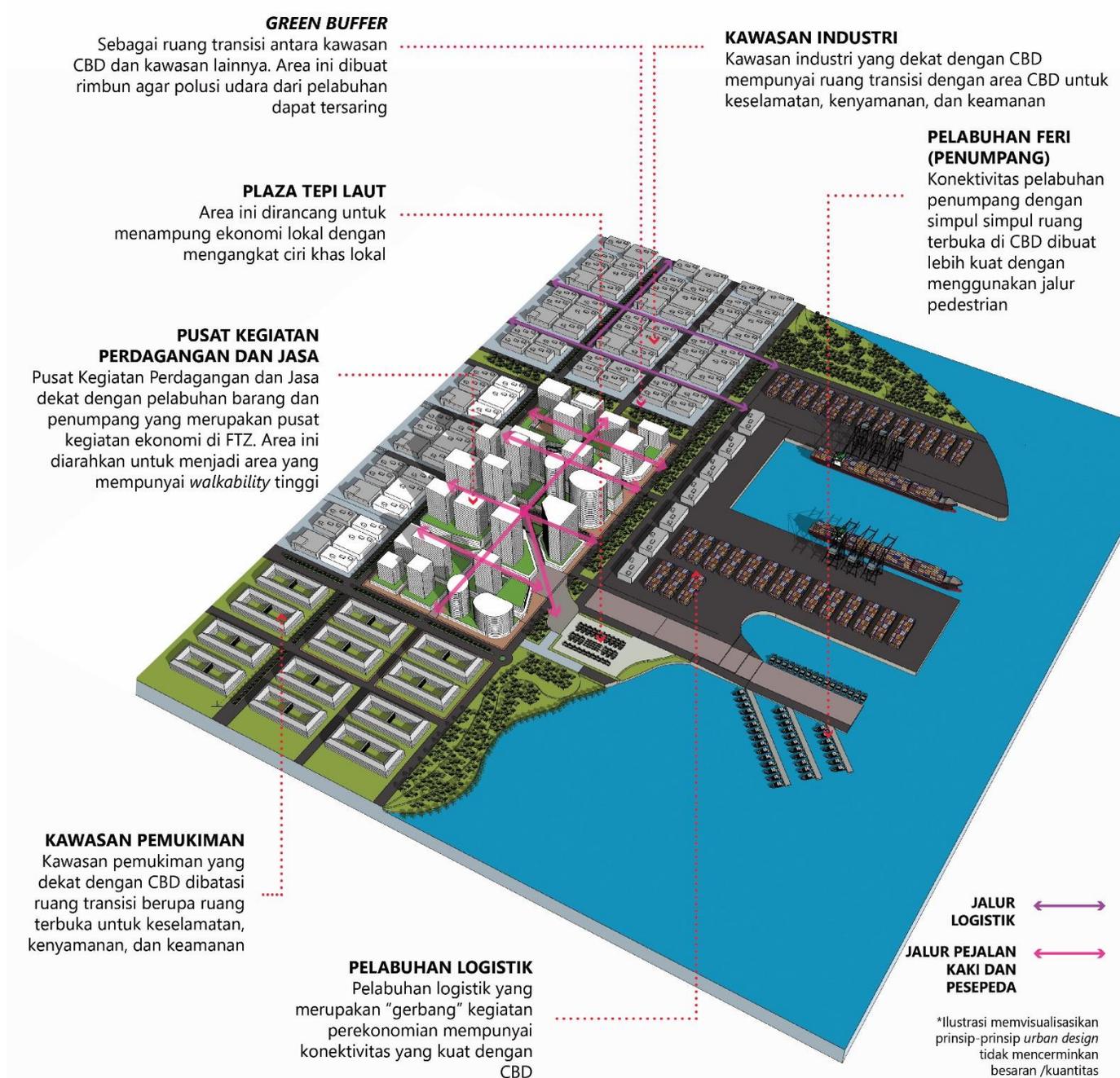
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

B. Kawasan Permukiman dan Penataan Kampung Tua

Penataan permukiman dan kampung tua di Kawasan Batam diarahkan dengan beberapa prinsip desain, di antaranya: a) Memastikan adanya jalur sirkulasi yang aman dan nyaman dan drainase yang tertutup; b) Penyediaan ruang komunitas yang menstimulasi aktivitas sosial; dan c) Keberadaan tengaran yang memberikan karakter dan menjadi penciri kawasan.

Gambar 3.32 Aksonometri Tipologi Pusat Perdagangan dan Jasa



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

C. Kawasan Distrik Digital Nongsa

Arahan memperluas ekosistem digital dengan memanfaatkan potensi dari Nongsa *Digital Park* divisualisasikan dalam tipologi distrik digital. Tipologi ini mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu: a) Menempel dengan perusahaan digital besar; b) Kawasan yang ramah pejalan kaki; c) Dimensi kavling yang bervariasi; dan d) Mendirikan bangunan tanpa tangga berjalan.

D. Kawasan Industri

Kawasan industri di Batam belum mempunyai ruang terbuka publik yang memadai. Setiap industri dibatasi oleh batas fisik yang jelas dan mengakibatkan ruang jalan di kawasan ini cenderung tidak termanfaatkan secara optimal. Untuk itu ada beberapa prinsip desain untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di Kawasan Industri, di antaranya:

1. Adanya ruang terbuka publik yang nyaman untuk ruang bersosialisasi karyawan;
2. Sistem transit transportasi publik dan sistem pejalan kaki perlu diintegrasikan agar pegawai bisa memakai transportasi publik ke tempat kerja dengan aman dan nyaman; dan
3. Pemisahan pintu keluar/masuk antara logistik dan pejalan kaki menuju setiap persil industri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Gambar 3.33 Aksonometri Tipologi Kawasan Industri



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

E. Pembangunan Kawasan Pariwisata Bahari

Kawasan Batam sebagai wilayah kepulauan perlu arahan untuk memperbaiki kualitas pesisir pantai untuk kepentingan wisata pesisir dan pantai. Arahan tersebut divisualisasikan dalam tipologi pariwisata pantai dengan prinsip desain sebagai berikut:

1. Kontinuitas fasilitas seperti jalur pejalan kaki dan pejalan kaki tepi air;
2. Mempunyai rangkaian pengalaman ruang yang menarik berupa simpul seperti dek pemandangan atau plaza dalam jalur pejalan kaki untuk menghindari kebosanan;
3. Varietas aktivitas; dan
4. Konektivitas dengan transportasi publik dan tempat strategis lain.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

F. Kawasan Wisata Kawasan Ex Pengungsi Vietnam Galang

Kawasan Ex Pengungsi Vietnam merupakan kawasan bangunan bekas penampungan warga kebangsaan Vietnam yang melarikan diri dari perang. Sebagai kawasan dengan nilai historis tinggi, kawasan ini perlu ditingkatkan daya tariknya dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu: a) Membuat oposisi yang variatif; b) Fasilitas pariwisata yang lengkap (plaza, parkir, papan informasi dan tengaran); dan c) Mengoptimalkan vegetasi lokal dengan membuat jalur pedestrian di hutan atau *arboretum*.

G. Penataan Ruang Jalan

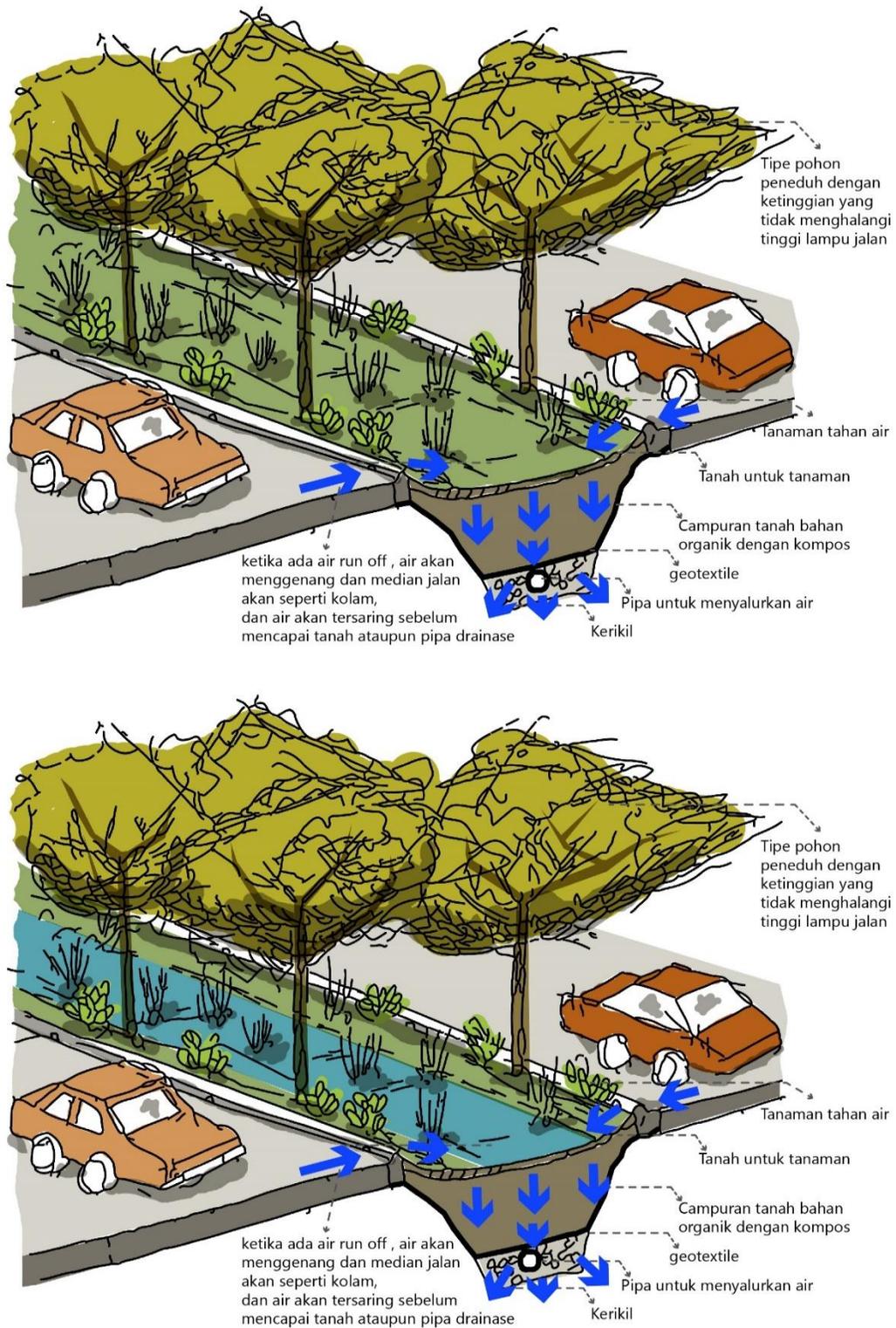
Penataan vegetasi di median jalan maupun di tepi jalan menjadi sangat penting dalam terciptanya citra yang baik pada kawasan perkotaan di Batam. Selain standar Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan yang harus dipenuhi, penataan vegetasi juga penting untuk diarahkan agar bisa membentuk karakter Kawasan Batam. Penataan vegetasi yang ada pada median jalan dapat berupa infrastruktur hijau dan penataan pola lanskap dan trotoar.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Gambar 3.34 Median Jalan dengan Sistem Infrastruktur Hijau Ketika Tidak Ada Air (kiri)
Median Jalan dengan Sistem Infrastruktur Hijau Ketika Ada (kanan)



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

H. Pola Lanskap dan Trotoar

Penataan vegetasi pada median jalan diarahkan dengan meletakkan tanaman yang paling tinggi di tengah dan tanaman yang lebih rendah diarahkan di tepi jalan di Kawasan Batam. Hal ini ditujukan agar pengguna jalan bisa menikmati keindahan tanaman dan ruang jalan sebagai parade visual hijau yang menarik. Pola trotoar diarahkan bervariasi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tata letak tanaman pada median jalan harus mempunyai ritme yang konsisten dan varietas yang beragam. Jarak antar semak atau pohon perlu diatur secara konsisten, termasuk ketinggian pohon dan semak yang diatur sesuai konsep. Konsistensi ritme pada tata letak dan keberagaman merupakan prinsip dasar terciptanya daya tarik visual pada lanskap jalan dan trotoar untuk mewujudkan ruang kota yang hijau dan berkelanjutan.

Gambar 3.35 Tata Letak Tanaman dengan Ritme yang Konsisten



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

III.1.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK

A. Pengembangan SDM

Penetapan Batam sebagai KPBPB menjadi daya tarik bagi para tenaga kerja di Indonesia. Tantangan yang dihadapi salah satunya adalah adanya persaingan kerja internasional yang terjadi di Batam maupun Kawasan BBK pada umumnya. Perlu adanya dorong potensi SDM di Batam agar memiliki standar kompetensi bertaraf internasional, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja dari berbagai negara yang mulai masuk ke Kawasan BBK.

Untuk itu perlu dilakukan beberapa strategi, di antaranya:

1. Memanfaatkan peluang implementasi *Mutual Recognition Agreement* (MRA) khususnya di Kawasan ASEAN dalam peningkatan SDM lokal dalam beberapa bidang kerja yang didorong dalam penerapan MRA, di antaranya Layanan Teknis, Profesional Kepariwisata, Layanan Akuntansi, Layanan Keperawatan, Praktisi Dental, Praktisi Medis, hingga Bidang Riset dan Pengembangan;
2. Mengembangkan pendidikan vokasi lokal Batam diarahkan memiliki kesesuaian dengan sektor industri di Batam serta adanya jaminan penempatan kerja dapat mendorong percepatan serapan tenaga kerja;
3. Mendorong Batam menjadi pusat pendidikan teknis dan vokasi yang berperan sebagai bagian dari sistem pendukung bagi industri-industri di Batam dan sekitarnya;
4. Mempersiapkan penyelenggaraan SDM tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan proyek/program dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang berada di Batam, seperti:
 - a) CBD Teluk Tering yang membutuhkan institusi pendidikan baik universitas maupun institut dengan program studi di sektor bisnis dan keuangan yang meliputi bidang akuntansi, bisnis dan manajemen, ekonomi;
 - b) Kawasan Jasa Kesehatan Internasional Sekupang yang membutuhkan tenaga kerja profesional bidang medis dan industri Alkes, sehingga penyelenggara SDM di bidang kesehatan berskala internasional;
 - c) KEK MRO Batam Aero Technic yang membutuhkan tenaga kerja terkait industri kedirgantaraan; dan
 - d) KEK Nongsa Digital Park yang membutuhkan tenaga kerja di bidang industri digital, kreatif dan pariwisata internasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

5. Menyiapkan kebutuhan tenaga profesional dengan kemampuan riset dan pengembangan sebagai produk akademis dari universitas maupun institut khususnya institusi pendidikan berskala internasional;
6. Mendorong Batam dalam jangka pendek hingga menengah dapat mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Diklat Industri (BDI) untuk tenaga kerja tidak terampil sebagai sarana pengembangan SDM masyarakat lokal yang diharapkan eksis hingga masa mendatang;
7. Menyelenggarakan program pelatihan kepada masyarakat sekitar industri melalui perusahaan swasta terkait bidang-bidang yang dibutuhkan perusahaan guna mendorong terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan didukung dengan sertifikasi dan penjaminan kerja di perusahaan tersebut; dan
8. Melakukan pendampingan maupun pelatihan pelaku UMKM guna peningkatan kinerja sektor UMKM.

B. Batam Menuju *Data Center*

Selain aspek geostrategis, ketersediaan infrastruktur pendukung yang lengkap baik bandara, pelabuhan, jaringan listrik dan kabel serta optik, serta riset dan inovasi melalui perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan mewujudkan ekonomi digital yang unggul. Batam diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi digital nasional dan global dengan menjadi salah satu Kawasan Pusat investasi Pusat Data berstandar internasional dengan pangsa pasar global, sebagai partner strategis Singapura dengan kota-kota besar di Indonesia. Batam dituntut mampu bersinergi dengan Singapura menjadi jembatan industri teknologi, manufaktur, dan pariwisata berbasis digital.

Konsep Pusat Data menjadi salah satu beberapa fasilitas teknologi informasi dan komunikasi ditargetkan dikembangkan di Nongsa, Batam melalui fasilitas KEK Nongsa Digital Park. Pusat Data tergabung pada layanan BP *Batam Information and Technology* (BIT) yang direncanakan dilengkapi fasilitas terbaik berupa keterhubungan *Backbone Network* dengan jaringan Serat Optik Palapa Ring serta dilengkapi jaringan telepon jaringan tetap dan *Voice Over Internet Protocol* (VOIP). Guna mendukung pengembangan maka Keperluan Jasa Kolokasi, *Server Pribadi Virtual*, *Layanan Host Web*, dan lain sebagainya harus terpenuhi dalam mengoptimalkan peran Pusat Data di Batam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Keberadaan Pusat Data ini diarahkan dapat dimanfaatkan secara optimal baik khususnya oleh BP Batam, Pemerintah, hingga perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia, hingga layanan global. Klien dapat menyewa fasilitas rak penyimpanan data langsung di *Server* Pusat Data yang sudah dilengkapi dengan Fasilitas *Server* Penunjang. Pusat Data di Batam digagas untuk menjadi bagian dari Pusat Data Nasional yang direkomendasikan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) dan kementerian yang membidangi urusan di bidang komunikasi dan informasi yang salah satu keunggulannya dapat digunakan untuk kepentingan lintas sektor.

Terobosan terkini yang terus perlu didukung yakni pembangunan jembatan digital antara Indonesia dan Singapura. Keberadaan jembatan digital ini diharapkan dapat terwujud dengan keberadaan Batam sebagai pusat pengembangan Pusat Data dan pusat pengembangan industri digital nasional. KEK Nongsa Digital Park sebagai pelopor industri digital diharapkan menjadi pintu masuk bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara. Jembatan digital juga memberi harapan besar bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kawasan BBK. Adanya inisiasi antara Singapura dan Indonesia yang mengutamakan kerja sama pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM berbasis teknologi informasi menjadi jaminan meningkatnya kualitas SDM di Batam, terlebih di Kawasan BBK.

III.1.7 Rencana Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Pemerintah Indonesia telah merancang kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF). Kota Batam yang merupakan salah satu kota di perbatasan Indonesia yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mendukung tercapainya MEF yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia. Kawasan perbatasan negara di laut di Kota Batam terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Nongsa. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, fungsi yang ada di Kota Batam adalah PKSN Batam sebagai pusat pelayanan utama.

Rencana pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Batam, dimulai dengan mendorong sinkronisasi kebijakan terkait kebijakan wilayah pertahanan dan keamanan akan dilakukan dengan cara mensinkronkan antara pengaturan kawasan perbatasan negara dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Kota Batam, yaitu: Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batuberantai (Pulau Batu Berhanti) di Kecamatan Belakang Padang dan Pulau Putri (Pulau Nongsa) di Kecamatan Nongsa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Dukungan pengembangan dilanjutkan dengan pembangunan prasarana dan sarana pendukung wilayah pertahanan dan keamanan negara dilakukan sesuai dengan program yang bersifat regulasi maupun operasional. Pengembangan dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertahanan dan keamanan yang meliputi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yaitu Lanal Kota Batam, Pos Angkatan Laut (Posal) Pulau Nipa, Posal Tolop, hingga Posal Sambu. Pengembangan riset dan penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbarukan untuk menjaga kedaulatan negara perlu didorong melalui pembangunan sistem C4ISR (*Command-Control-Communication-Computer-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance*) dan pengembangan teknologi lainnya. Selain itu diperlukan juga peningkatan hubungan kerja sama antara pihak terkait perlu terus diperkuat untuk saling bersinergi dalam mendorong kedaulatan pertahanan dan keamanan di Kawasan BBK khususnya di Kawasan Batam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

III.2 Kawasan Bintang dan Tanjungpinang

III.2.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Bintang - Tanjungpinang

Untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Bintang lebih difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, industri perawatan dan perbaikan pesawat, industri pengolahan logam dasar (alumina), pengolahan makanan, pertahanan maritim, dan olahraga. Kemudian untuk Kawasan Tanjungpinang diarahkan pada sektor wisata warisan budaya, industri halal, perikanan, dan pusat perdagangan dan jasa.

III.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan Bintang dan Tanjungpinang memiliki potensi sektor unggulan berupa industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi, makan dan minum, perdagangan, dan jasa pendidikan.

Tabel 3.1 Kuadran Sektor Basis dan Non-Basis Kawasan Bintang

	Sektor Non-Basis	Sektor Basis
High Growth	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan• Pengadaan Listrik dan Gas• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah Daur Ulang• Perdagangan• Transportasi dan Pergudangan• Jasa Keuangan dan Asuransi• <i>Real Estate</i>• Administrasi Pemerintahan• Jasa Pendidikan• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Industri Pengolahan• Konstruksi• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Low Growth	<ul style="list-style-type: none">• Pertambangan dan Penggalian• Informasi dan Komunikasi• Jasa Perusahaan• Jasa Lainnya	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

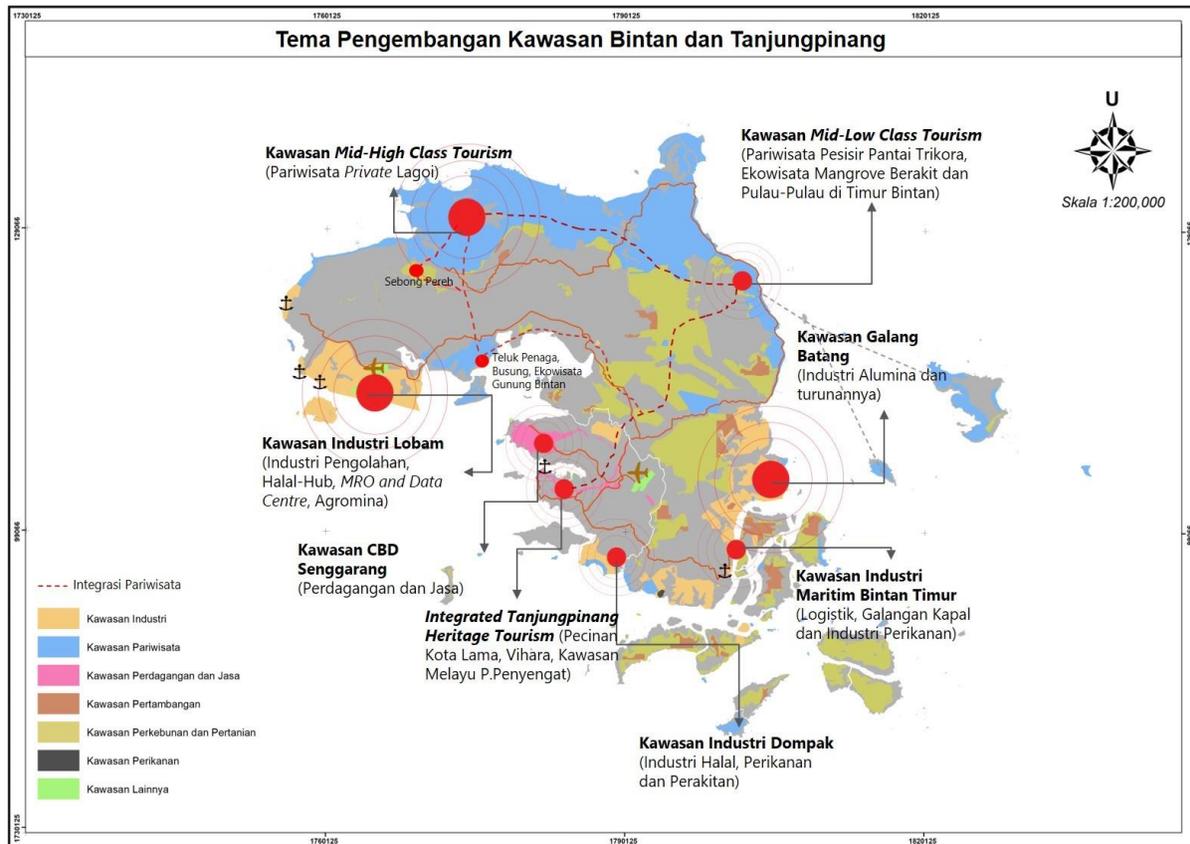
- 88 -

Tabel 3.2 Kuadran Sektor Basis dan Non-Basis Kawasan Tanjungpinang

	Sektor Non-Basis	Sektor Basis
High Growth	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan • Jasa Pendidikan
Low Growth	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Pengalihan • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan • Jasa Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi • Transportasi dan Pergudangan • Real Estate • Administrasi Pemerintahan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.1 Tema Pengembangan Kawasan Bintang dan Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

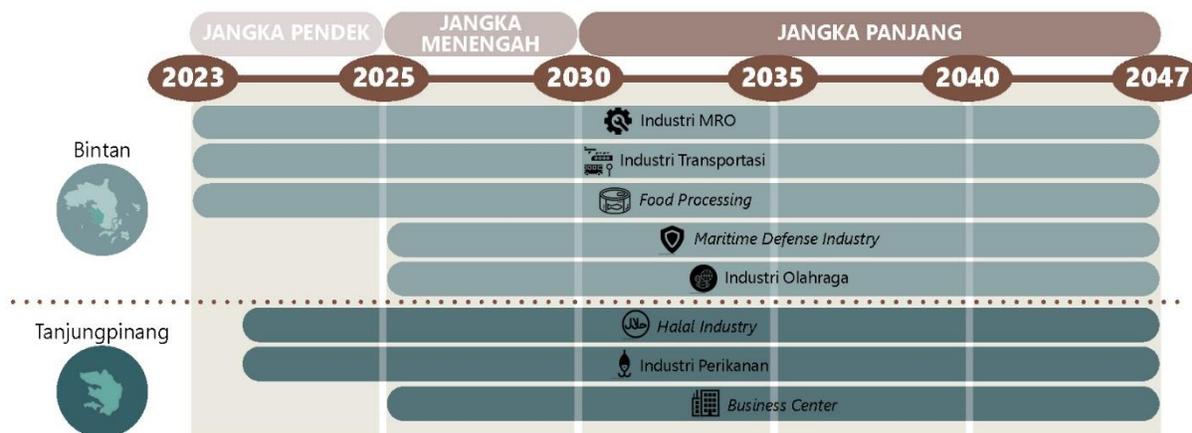


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Berdasarkan bisnis unggulan di atas, maka perlu dilakukan pentahapan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi di Kabupaten Bintan. Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sektor kegiatan ekonomi yang masuk dalam tahap jangka pendek di Kawasan Bintan yaitu pariwisata internasional, industri perawatan dan perbaikan pesawat, industri pengolahan logam dasar (alumina), industri pengolahan makanan-minuman. Kedua, tahap jangka menengah akan dikembangkan industri pertahanan maritim. Ketiga, tahap jangka panjang akan dikembangkan industri olahraga. Sementara itu, di Kawasan Tanjungpinang sektor industri dalam tahap jangka pendek yaitu industri halal, industri perikanan dan tahap jangka menengah yaitu pusat perdagangan dan jasa.

Gambar 3.2 Rencana Pengembangan Bisnis Unggulan di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

A. Rencana Pengembangan Industri

Pengembangan industri di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang terdiri dari pengembangan industri perawatan dan perbaikan pesawat, alumina, industri pengolahan makanan-minuman, industri perikanan, dan industri halal.

1. Pengembangan Industri MRO (Industri Kedirgantaraan)

Pengembangan Industri perawatan dan perbaikan pesawat di Kawasan Bintan memiliki potensi pengembangan di Indonesia. Sektor tersebut ditargetkan akan memiliki peningkatan yang signifikan. Saat ini, Industri perawatan dan perbaikan pesawat di Indonesia hanya mampu melayani 30-40% perawatan pesawat, sehingga bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat di Indonesia berpotensi untuk tumbuh pesat. Industri perawatan dan perbaikan pesawat merupakan salah satu pengembangan industri kedirgantaraan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035. Pengembangan industri perawatan dan perbaikan pesawat di Kawasan Bintan didukung melalui *major project* KI Bintan Aerospace dalam RPJMN 2020–2024.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Potensi bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat di Indonesia mencapai 2,2 miliar USD pada tahun 2025, bahkan diperkirakan Asia Pasifik menjadi episentrum pertumbuhan industri perawatan dan perbaikan pesawat. Pengembangan industri perawatan dan perbaikan pesawat di Bintan akan berlokasi di Kawasan Industri Lobam seluas ± 4.000 hektare yang tidak hanya untuk pengembangan industri perawatan dan perbaikan pesawat, tapi juga termasuk pengembangan industri campuran (termasuk Halal Hub), maritim dan penunjangnya, serta industri kedirgantaraan termasuk fasilitas bandara dan perawatan dan perbaikan pesawat (Tabel 3.10).

Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE)

No	Sektor	Lahan (hektare) 2021–2025	Lahan (hektare) 2025–2030	Investasi (Juta USD)	Tenaga Kerja (Orang)
1.	Mix Industry dan Halal Hub	640	1.433,4	1.500	5.000-8.000
2.	Maritim dan Penunjangnya	158	397,4	1.000	2.000-4.000
3.	Bandara, Aerospace, Perawatan dan Perbaikan Pesawat (MRO)	306,85	306,65	1.850	4.000-6.000
4.	Perikanan	200	300	100	200-500
5.	Pertanian	200	300	100	300-500

Sumber: BIIE, 2020

Kawasan Bintan sebagai pasar yang strategis untuk pengembangan perawatan dan perbaikan pesawat. Pengembangan Industri perawatan dan perbaikan pesawat di Bintan melalui Kawasan Industri Bintan Aerospace akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembangunan Bandara Bintan dan Pengembangan Kawasan Kedirgantaraan. Nilai investasi pengembangan Bandara Fase 1 sebesar ± 150 juta USD dan Pengembangan Kawasan dengan nilai investasi sebesar ± 700 juta USD. Pengembangan kawasan ditargetkan untuk dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pengembangan industri perawatan dan perbaikan pesawat di Bandara Internasional Bintan Baru juga perlu mempertimbangkan adanya pembagian target pasar dengan kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat yang sudah dikembangkan di Batam, yaitu di KEK Batam Aero Technic (BAT). Perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai prasyarat pembangunan perawatan dan perbaikan pesawat harus memasukkan pembagian peran dan segmen pasar yang jelas agar supaya kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat di Kawasan BBK dapat saling bersinergi.

Aktivitas bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat yang dapat dilakukan di Kawasan Bintan meliputi pengelolaan aset, pengelolaan inventori perawatan dan perbaikan pesawat, serta pengadaan pesawat. Pembangunan perawatan dan perbaikan pesawat Bintan tahap awal dilakukan pada rentang waktu 2023–2030. Pembangunan dilakukan dengan membangun pusat perawatan dan perbaikan pesawat, pembangunan bandara, gedung terminal penumpang, landasan pesawat dan sistem roda pendaratan, pusat logistik dan pusat teknologi avionik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Gambar 3.3 Rencana Pengembangan Industri Industri Perawatan dan Perbaikan Pesawat di Kawasan Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

2. Pengembangan Industri Alumina

Pentingnya hilirisasi minerba khususnya pengolahan produk turunan dari bauksit menjadi pendorong diperlukannya pengembangan industri alumina. Pengembangan Industri Alumina di Kawasan Bintan dikembangkan di KEK Galang Batang. KEK Galang Batang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017. KEK Galang Batang dikembangkan sebagai sentra pengolahan mineral bauksit dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses smelter untuk hilirisasi industri minerba di Indonesia.

Saat ini, mata rantai dan nilai tambah produk aluminium di Indonesia masih terputus untuk mengolah bauksit menjadi alumina. Industri Alumina melalui KEK Galang Batang memperkuat komitmen hilirisasi bauksit Indonesia dengan target pasar-pasar Asia, Eropa hingga Amerika, sehingga ke depan terus didorong melalui pengembangan fasilitas industri, insentif, dukungan regulasi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam penyelenggaraan industri alumina di Bintan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Gambar 3.4 Rencana Pengembangan Hilirisasi Bauksit (Industri Alumina) KEK Galang Batang



Sumber: KEK Galang Batang, 2021

KEK Galang Batang seluas 2.333,6 hektare memiliki zonasi kegiatan berupa industri pengolahan bauksit, penyediaan energi dan logistik, serta pengolahan ekspor dengan target mampu menyerap tenaga kerja \pm 21.000 orang. Nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar \pm 36,25 Triliun rupiah hingga tahun 2027. KEK Galang Batang melakukan ekspor perdana produk smelter grid alumina (alumina bubuk) kadar 90% (sembilan puluh persen) ke Malaysia pada tahun 2021 yang menunjukkan prospek hilirisasi industri bauksit. Pengembangan didukung pelabuhan ekspor-impor, PLTU 6 x 25 MW serta rangkaian Kilang Alumina.

Pengembangan ke depan adalah tercapainya target ekspor aluminium batang (*aluminium ingot*) sehingga diperlukan percepatan pembangunan smelter-refinery yang dimulai pada tahun 2023 dan ditargetkan selesai tahun 2027 dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun. Setelah tahun 2027 diharapkan Indonesia dapat melakukan ekspor aluminium batang ke market global. Pengembangan jangka panjang KEK Galang Batang hingga 2034 juga mencakup area perluasannya seluas 2.653 hektare yakni di wilayah (a) Toapaya untuk Aneka Industri, Industri Daur Ulang dan Industri Senjata & Amunisi, (b) Kampung Masiran untuk Area Hunian dan Pelabuhan, serta (c) Pulau Poto, Bintan untuk Aneka Industri, Industri Minyak (*Refinery*), Pembuatan Baja, Ferrosilicon dan Logistik.

Selain itu dalam mendukung KEK Galang Batang sebagai pusat hilirisasi bauksit dan aneka industri lainnya, maka akan didukung dengan pengembangan beberapa pelabuhan, Waduk Reservoir 5 juta m³, PLTU, Refinery Alumina, *Coal Gas Plant*, serta Akomodasi Perumahan. Pengembangan

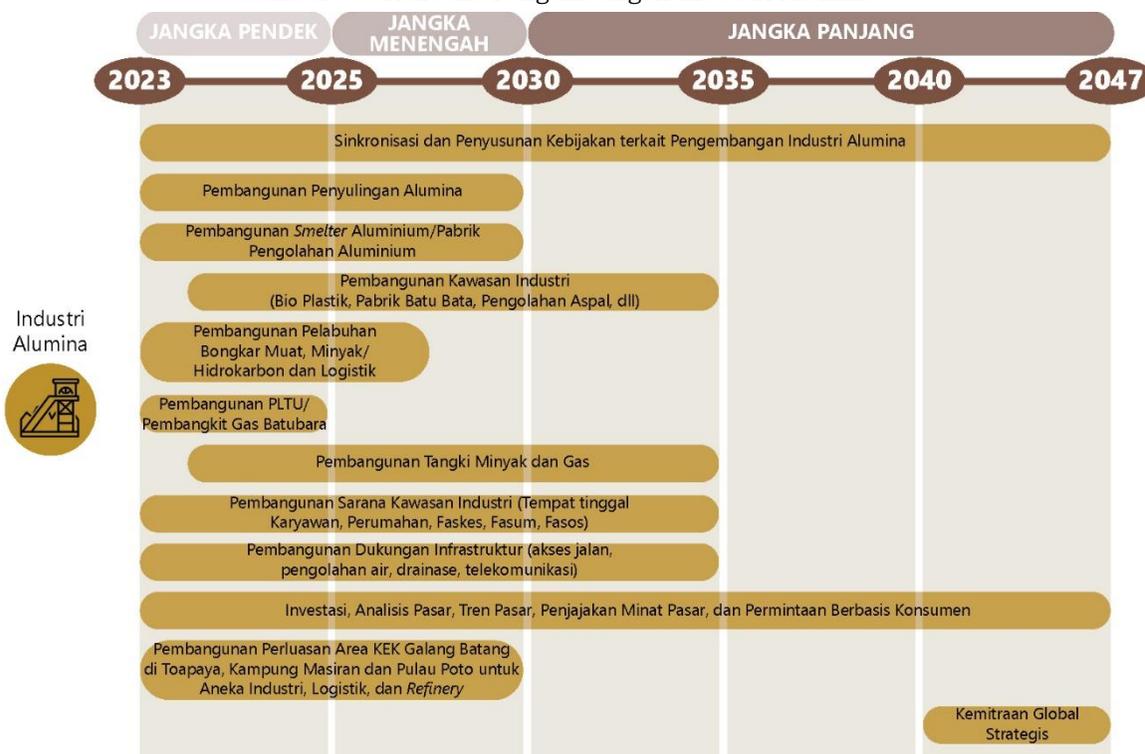


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Pelabuhan KEK Galang Batang yang didorong, meliputi (a) Pelabuhan Bongkar Muat di Galang Batang; (b) Pelabuhan Minyak Mentah, Hidrokarbon dan Logistik di Pulau Poto; (c) Pelabuhan Barang (Kargo) dan Batu Bara di Pulau Poto; serta (d) Pelabuhan Barang dan Penumpang di Kampung Masiran, Bintan.

Gambar 3.5 Rencana Pengembangan Industri Alumina



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

3. Pengembangan Industri Pengolahan Makanan-Minuman (Industri Halal)

Indikator *Global Islamic Economy (GIE)* menjelaskan bahwa berdasarkan kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun 2019/2020 khususnya sektor Makanan Halal, Media dan Rekreasi, Farmasi dan Kosmetik. Industri makanan dan minuman memegang pangsa terbesar industri halal global dengan nilai $\pm 1,303$ triliun USD dan diproyeksikan mencapai ± 1.863 miliar USD pada tahun 2023. Peluang perluasan pasar halal dan industri halal terus ditargetkan Indonesia dalam jangka panjang sehingga perbaikan iklim investasi di Pulau Bintan sangat diperlukan.

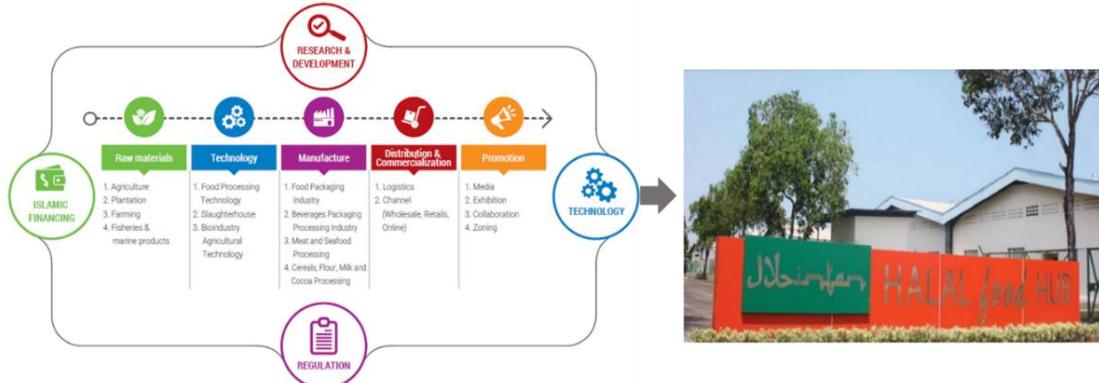
Aktivitas bisnis industri halal ditargetkan dikembangkan melalui Bintan Inti Halal Hub dalam Kawasan Industri Lobam dengan rantai pasok yang tidak terlepas dari konten lokal. Pengembangan industri halal perlu terus menjaga nilai kehalalan produk. Penerapan manajemen rantai nilai halal diperlukan untuk menjamin kualitas layanan suatu produk halal dari hulu ke hilir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

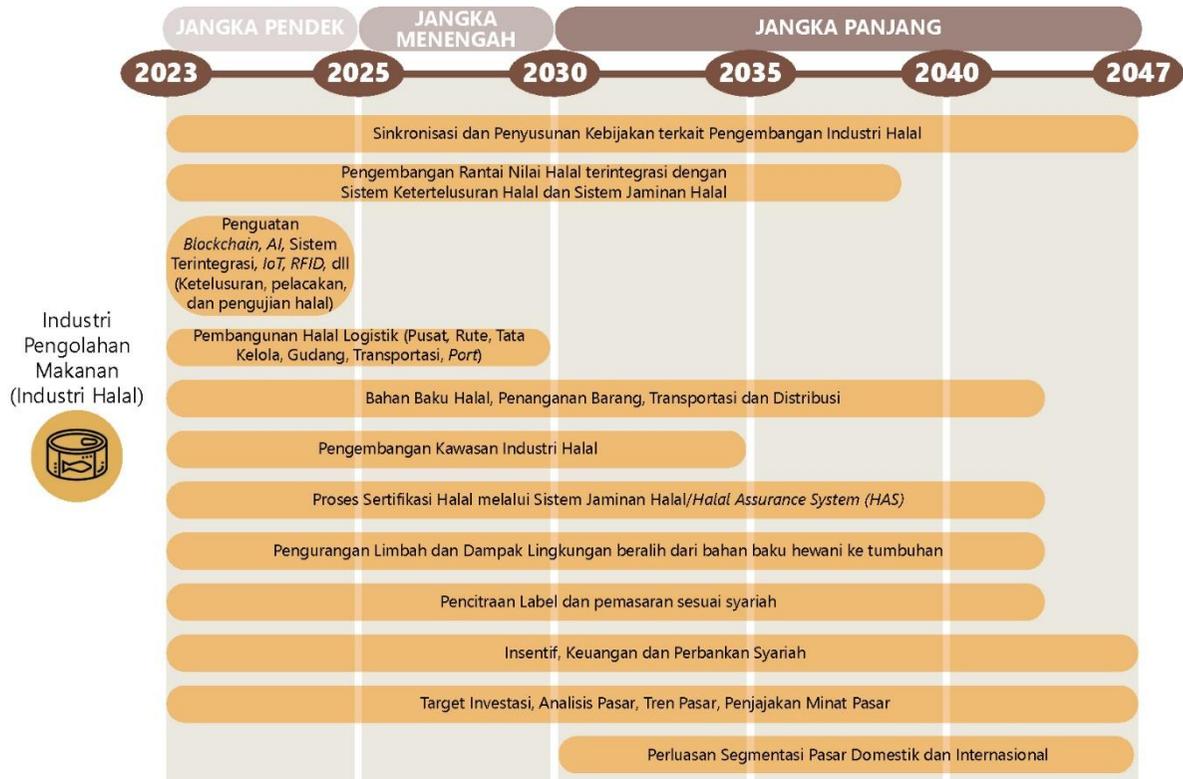
Gambar 3.6 Industri Pengolahan Makanan Halal dan Kawasan Bintang Inti Halal Hub



Sumber: Masterplan IIE 2019-2024

Pengembangan industri perlu didukung dengan pengembangan rantai nilai halal jangka pendek hingga panjang yang diintegrasikan dengan *halal traceability system* dan *halal assurance system*. Fase berikutnya adalah pembangunan logistik halal hub, dan peningkatan teknologi berbasis *artificial intelligence* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Gambar 3.7 Rencana Pengembangan Industri Pengolahan Makanan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

4. Pengembangan Industri Kosmetik dan Herbal (Industri Halal)

State of Global Islamic Report melaporkan bahwa konsumsi Muslim terhadap produk farmasi dan kimia dari tahun 2013–2017 menunjukkan tren peningkatan. Indonesia menempati peringkat ke-4 produk farmasi yang paling banyak dikonsumsi dan peringkat ke-2 untuk bidang kosmetik. Pada tahun 2023 diperkirakan pasar farmasi meningkat 7% (tujuh persen) menjadi ± 131 juta USD dan pasar kosmetik akan meningkat 6,9% (enam koma sembilan persen) menjadi ± 90 juta USD. Potensi ini perlu ditangkap oleh Kawasan Bintan dan Tanjungpinang dalam menangkap tren, pengusaha multinasional serta pasar muslim dengan minat produk halal.

Industri farmasi dan kosmetik telah masuk dalam daftar sektor industri andalan Kementerian Perindustrian. Pada Kawasan Bintan dan Tanjungpinang, industri ini perlu didorong untuk menarik investor industri farmasi dan kosmetik berbasis halal. Pengembangan riset pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar khususnya dalam menangkap konsumen Indonesia ataupun luar negeri perlu dilakukan. Adanya permintaan industri yang tinggi terhadap bahan baku impor perlu ditangkap oleh KPBPB Bintan untuk dapat mengolah produk jadi dari industri farmasi dan kosmetik halal.

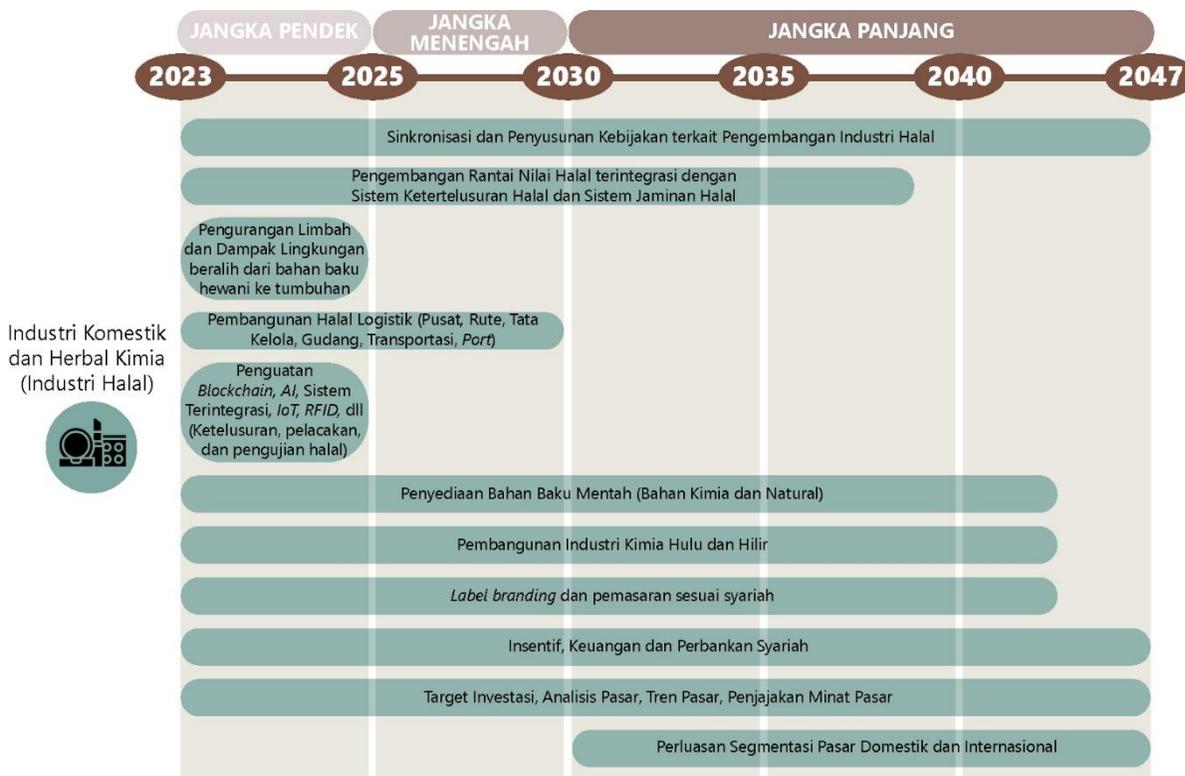
Saat ini sebanyak empat Kawasan Industri masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di dalam negeri termasuk KI Lobam, Bintan. Selain itu diharapkan ekosistem industri halal juga berkembang di Kawasan Dompok, Tanjungpinang. Rencana pengembangan dalam jangka pendek hingga jangka panjang harus memenuhi kriteria manajemen kawasan industri halal, memiliki laboratorium pemeriksaan dan pengujian halal, sertifikasi halal dan tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Gambar 3.8 Rencana Pengembangan Industri Kosmetik dan Herbal Kimia Halal



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

5. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Wilayah perairan di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi besar menjadi sentra industri perikanan nasional. Potensi sumber daya industri perikanan di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang khususnya komoditas unggulan berupa ikan kerapu, lele, ikan hias, dan udang. Komoditas prioritas dalam pengembangan industri perikanan adalah komoditas udang khususnya udang windu dan vaname. Saat ini industri udang vaname telah berproduksi di Kawasan Dompok, Kawasan Tanjungpinang yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang untuk komoditas ekspor.

Industri perikanan di Kawasan Dompok perlu dilengkapi penyimpanan pendingin, sarana pengangkut kapal, pabrik pakan dan pabrik pendukung lainnya sehingga akan terbentuk industri dari sektor hulu hingga sektor hilir. Selain itu diharapkan pengembangan bisnis dapat merambah industri pengolahan ikan kaleng maupun industri pengolahan rumput laut penghasil. Ke depan diperlukan pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan modern supaya menghasilkan produk yang lebih berdaya saing global, efisien, dan berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Gambar 3.9 Rencana Pengembangan Industri Perikanan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

6. Pengembangan Industri Pertahanan Maritim (*Maritime Defence*)

Industri pertahanan ditargetkan untuk mendorong produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) serta jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Pengembangan industri pertahanan di Bintan berdampak langsung untuk mendukung ketahanan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Posisi KPBPB Bintan yang berada di garda terdepan Indonesia merupakan prospek sangat baik untuk mendorong pengembangan industri pertahanan maritim jangka panjang. Rencana pengembangan Industri Senjata dan Amunisi di area Toapaya yang merupakan perluasan KEK Galang Batang merupakan potensi untuk mendorong keterhubungan rantai industri pengolahan bauksit (alumina) serta industri logistik di Kawasan Bintan.

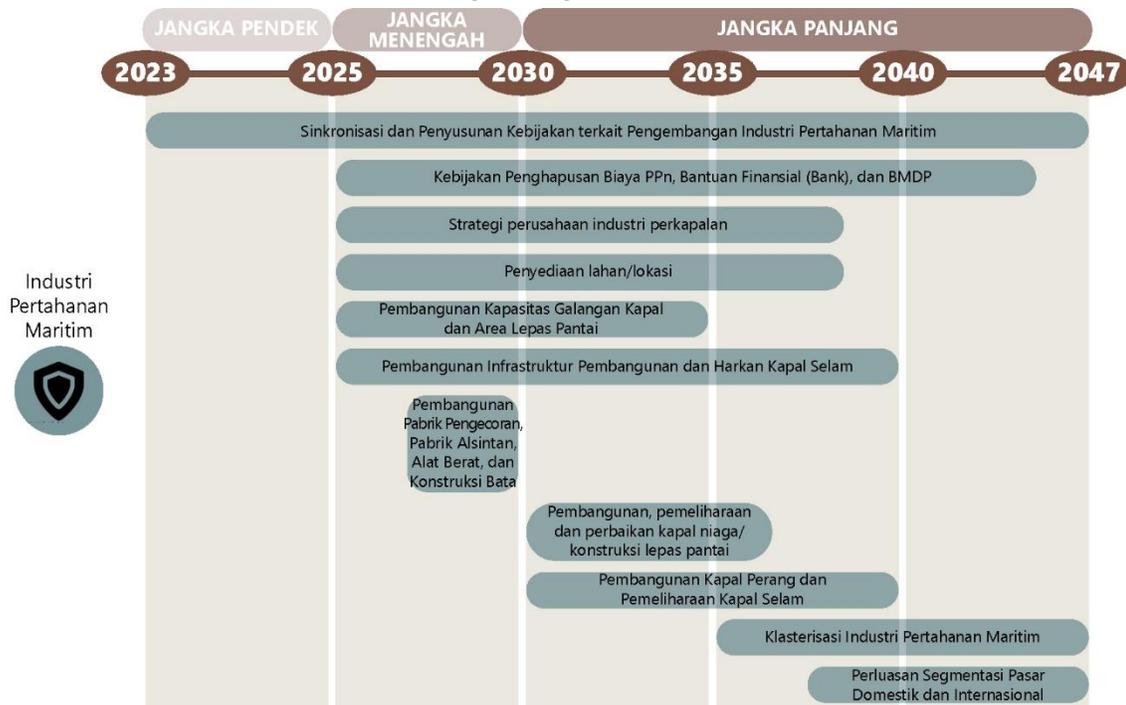
Program prioritas kemandirian industri pertahanan nasional yang dapat dikembangkan untuk industri pertahanan maritim termasuk pengembangan kapal selam, kapal perang dan industri propelan serta pengembangan roket, rudal, radar nasional, *medium tank*, dan pesawat tempur. Pembangunan industri pertahanan maritim melibatkan pihak pengguna, produsen, dan pemerintah yang dikoordinasikan dan disinergikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sinergi dilakukan untuk kekuatan persenjataan dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pengadaan Alutsista.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Gambar 3.10 Rencana Pengembangan Industri Pertahanan Maritim



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

7. Pengembangan Industri Olahraga

Pembangunan industri olahraga di Bintan dan Tanjungpinang meliputi industri jasa olahraga, pembuatan dan penjualan produk atletik. Pengembangan industri olahraga diharapkan memberikan dampak terhadap kemajuan pariwisata dan *event-event* olahraga yang telah berkembang di Bintan selama ini. Bintan telah menjadi destinasi wisata olahraga terdepan di Indonesia dengan berbagai penyelenggaraan *sport event* seperti Tour de Bintan, Bintan Triathlon, Bintan MoonRun Bintan Golf Championship, Bintan Kiteboard Tour Asia, dan sebagainya.

Pengembangan industri olahraga di Bintan dan Tanjungpinang ditargetkan diarahkan untuk Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Dompok dalam kawasan aneka industri. Industri olahraga diharapkan berfokus pada tiga segmen yaitu; a. Penampilan Olahraga; b. Produksi Olahraga; dan c. Promosi Olahraga. Dalam memenuhi kebutuhan sarana-prasarana, maupun alat khusus olahraga, maka perluasan jenis target bidang olahraga diperlukan, misalnya (a) industri cabang olahraga adu tubuh seperti produksi pelindung tubuh, sarung tangan, pelindung genitalia; (b) industri cabang olahraga permainan seperti produksi bola, sarung tangan, sepatu, kok, pakaian olahraga; (c) industri cabang olahraga atletik seperti produksi sepatu, *stopwatch*, deker; dan (d) industri cabang senam meliputi pakaian senam, aksesoris senam, dan lain-lain.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Pengembangan industri olahraga di Kawasan Bintan dikembangkan dalam tahap jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan dasar dan perlunya restrukturisasi dan reformasi peran pemerintah dalam pembangunan industri olahraga. Hal tersebut juga perlu diperkuat dengan membangun promosi, pemasaran, dan integrasi acara olahraga yang telah berkembang di Bintan serta penguatan ilmu olahraga dan inovasi teknologi.

Gambar 3.11 Rencana Pengembangan Industri Olahraga



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

B. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Untuk mendukung Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional yang mendukung kegiatan perdagangan jasa, industri, maritim dan pariwisata, dibutuhkan pusat kegiatan terintegrasi sebagai titik simpul kegiatan di bidang perdagangan dan jasa sebagai pemenuhan fasilitas kegiatan ekonomi. Bintan telah memiliki pusat kegiatan pemerintahan di area Bandar Seri Bentan dan Tanjungpinang memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Tua Tanjungpinang. Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Kawasan Senggarang dapat menjadi pusat bisnis dan perkantoran dengan adanya integrasi kelembagaan Badan Pengusahaan di Kawasan KPBPB BBK.

Tahapan Pengembangan kawasan di Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Kawasan Senggarang berada dalam tiga periode pelaksanaan, yaitu jangka pendek (2023-2025), jangka menengah (2025-2030) dan jangka panjang (2031-2047).

1. Jangka Pendek (2023-2025)

Kegiatan difokuskan pada penguatan kelembagaan KPBPB yang akan mempengaruhi seluruh kegiatan di Kawasan BBK. Pada tahapan ini, pengembangan Kawasan CBD di Kawasan Senggarang berfokus menyiapkan perencanaan dan merumuskan teknis insentif serta fasilitasi modal pada investor yang akan mempunyai kegiatan ekonomi di kawasan CBD.

2. Jangka Menengah (2025-2030)

Kegiatan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur Pusat Perdagangan dan Jasa yang merupakan pusat ekonomi, bisnis dan perdagangan di KPBPB BBK. Proses mengenai insentif dan fasilitas modal pelaku kegiatan usaha akan terus berlanjut agar Pusat Perdagangan dan Jasa mempunyai *attractiveness* untuk pemilik modal.

3. Jangka Panjang (2030-2047)

Pada tahapan ini semua kegiatan yang sedang berlangsung di jangka menengah dilanjutkan sampai dengan tahun 2047 disertai dengan peningkatan kapasitas serta memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan CBD yang berlokasi di Kawasan Senggarang.

C. Kawasan Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang yang Terintegrasi

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ditargetkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional yang terintegrasi sebagai Hub Pariwisata Global di Indonesia bagian barat. Perkembangan pariwisata di Bintan dan Tanjungpinang terus menunjukkan tren positif, dengan kenaikan kunjungan lebih 30 persen (hingga 2019). Bintan sebagai destinasi utama Kepulauan Riau telah memiliki segmen pasar spesifik, yakni 89,29 persen adalah turis mancanegara. Diversifikasi pariwisata dan rencana integrasi (Gambar 3.47) diharapkan dapat memperluas segmen pasar untuk meningkatkan lebih banyak kunjungan turis mancanegara dan memperluas pasar domestik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Gambar 3.12 Tema Pariwisata Bintan-Tanjungpinang



Gambar 3.13 Integrasi Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Dalam perencanaan pariwisata di Bintan dan Tanjungpinang penciptaan destinasi baru dari atraksi potensial perlu dikembangkan, khususnya ekowisata, olahraga, warisan budaya, kuliner, *event* hingga *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE). Integrasi pariwisata di Pulau Bintan harus didukung dengan pengembangan infrastruktur konektivitas pariwisata seperti dalam Gambar 3.49, baik bandara, pelabuhan, dan jalan lintas kawasan. Program integrasi pariwisata Bintan dan Tanjungpinang menghubungkan klaster pariwisata yang terbagi ke dalam tiga zona dengan target segmen pasar, atraksi dan target pengelola berbeda sebagaimana Tabel 3.12. Pembagian klaster dengan spesialisasi tema ditargetkan untuk meningkatkan durasi kunjungan wisatawan karena data BPS Bintan (2019) menunjukkan rata-rata durasi cenderung rendah yakni 2,05 hari di akhir pekan sehingga pembelanjaan wisatawan kurang optimal. Diversifikasi produk dan paket wisata diharapkan memberikan pengalaman menyeluruh bagi wisatawan untuk mencapai visi pengalaman berwisata dengan kualitas tinggi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

Tabel 3.4 Klasterisasi Kegiatan Pariwisata Bintang dan Tanjungpinang

Klaster	Segmen Pasar	Atraksi Utama	Target Pengelola
Resort dan MICE (Lagoi)	Wisatawan Kelas Premium	Resort dan Hotel, Taman Tematik, Pantai, Arena Golf, Olahraga, MICE, <i>Event</i>	Investasi Swasta
Ekowisata dan Pantai (Mangrove-Gunung Bintang-Trikora-Pulau- Pulau Timur Bintang)	Wisatawan Kelas Menengah Atas	Jelajah Mangrove, Hutan, Air Terjun, Pantai, Desa Budaya, <i>Resort Privat</i> , Menyelam	Investasi Swasta, Pemerintah dan Masyarakat (Desa Wisata)
Warisan Budaya dan Kuliner (Tanjungpinang)	Wisatawan Kelas Menengah Bawah	Warisan Budaya Melayu & Tiongkok, Vihara, Kuliner, Belanja	Pemerintah dan Masyarakat (Kampung Wisata)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Klaster *resort*, pantai, olahraga dan MICE di koridor Lagoi difungsikan sebagai hub utama pariwisata Pulau Bintang yang didukung oleh Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di klaster lain sebagai area pendukung baik koridor Trikora-Gunung Bintang-Pulau Pulau Timur Bintang serta koridor Tanjungpinang. Rencana kegiatan utama pariwisata yang dikembangkan secara keseluruhan, di antaranya:

1. **Klaster Resort dan MICE di Koridor Lagoi**

Kegiatan berfokus pada daya tarik wisata alam dan buatan dengan bentuk *resort* pesisir terintegrasi. Klaster *resort* dan MICE di Lagoi dikembangkan oleh swasta. Pengembangan awal Lagoi sejak 1990 melalui Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Singapura hingga saat ini telah berkembang pesat. Hingga tahun 2020 telah beroperasi 15 hotel dan *resort* bertaraf internasional dengan total 2.081 kamar yang dilengkapi lapangan golf, pelabuhan feri dan persinggahan *cruise* internasional.

Pada tahun 2023 ditargetkan wisatawan meningkat mencapai 2 juta kunjungan. Guna mencapai target tersebut diperlukan percepatan pengembangan *resort* dan destinasi baru di tahap jangka pendek (2023-2025) serta promosi & insentif aktif sektor pariwisata. Strategi lain untuk Lagoi melalui percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata dan implementasi *Travel Corridor Arrangement* (TCA) atau *Travel Bubble* dengan negara lain.

Rencana pengembangan klaster *resort* dan MICE di Kawasan Lagoi, Bintang berdasarkan Rencana Induk pembangunan Lagoi tahap dua (2020-2050) difokuskan pada pengembangan kawasan pariwisata dan pusat bisnis baru disertai infrastruktur penunjang. Data realisasi investasi periode pertama (1990-2020) untuk pengembangan kawasan mencapai 2,035 triliun Rupiah. Pengembangan pada tahap dua (2021-2050) diestimasikan meningkat hingga 8,694 triliun Rupiah dengan alokasi pendanaan oleh swasta.



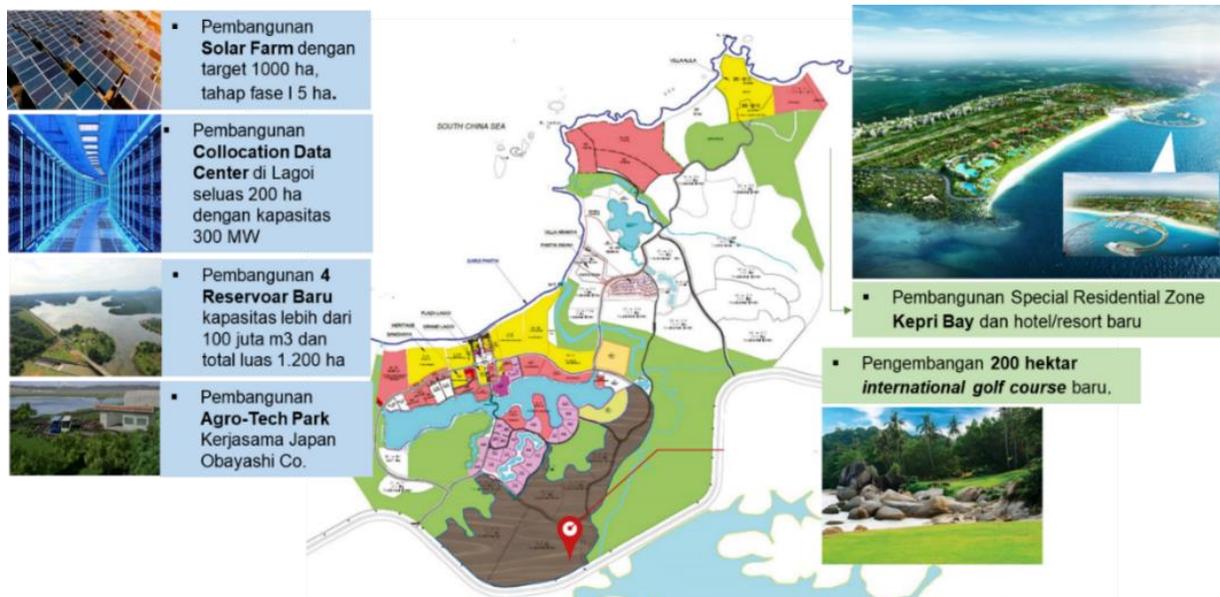
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

Pengembangan Lagoi hingga jangka panjang terdiri atas program utama, yakni:

- 1) Penambahan kawasan arena golf dan *resort* internasional guna menambah ketersediaan kamar, akomodasi dan atraksi. Pada periode jangka pendek terdapat 16 (enam belas) *resort* baru yang dipastikan beroperasi. Pengembangan Lagoi juga dipersiapkan sebagai penyedia layanan MICE untuk menangkap segmen pasar pebisnis, ekspatriat maupun investor. Pengembangan ini memerlukan strategi paket wisata dengan atraksi di Lagoi, Trikora-Gunung Bintang-Pulau Timur dan Tanjungpinang.
- 2) Pembangunan pusat bisnis & hunian Kepri Bay berkonsep *waterfront*.
- 3) Pembangunan infrastruktur penunjang di Lagoi baik pembangunan panel surya suplai energi, pusat data, penambahan *reservoir* (waduk) suplai air baku dan pembangunan *New Bintang Air Port*.

Gambar 3.14 Rencana Kepri Bay dan Infrastruktur Kawasan Lagoi Tahap 2



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Dalam rangka diversifikasi pariwisata diperlukan atraksi dan kegiatan pendukung lainnya di Kawasan Lagoi untuk wisatawan premium, di antaranya:

- 1) Wisata olahraga dan *event* (*sport tourism and event*), difokuskan melalui pengembangan *event* olahraga seperti gelaran Tour de Bintang, Bintang Triathlon, Bintang MoonRun Bintang Golf Championship dan Bintang Kiteboard Tour Asia. Selain *event*, wisata olahraga juga bisa diintegrasikan dengan pengembangan area olahraga yang mengundang profesional, amatir maupun turis pada umumnya. Rencana pengembangan termasuk arena golf, olahraga adrenalin, dan olahraga air di lepas pantai, waduk Lagoi maupun kolam renang *Treasure Bay*;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- 2) Wisata taman tematik (*thematic park*), dikembangkan untuk taman keluarga, anak-anak atau generasi milenial dengan tema berbeda, yakni agrowisata, safari (*zoo*), *marine life discovery park* dan *plaza*;
- 3) Wisata edukasi tematik (*thematic education*), dikembangkan dalam bentuk area edukasi atau museum tematik yang mengangkat tema berupa museum bahari, olahraga, budaya melayu maupun tema lain yang mendukung museum sebagai etalase Kawasan BBK.

2. Klaster Ekowisata dan Pantai di Koridor Mangrove – Gunung Bintang – Trikora – Pulau-Pulau Timur Bintang

Kegiatan berfokus pada daya tarik wisata alam dan buatan dengan ekowisata terintegrasi darat dan laut yang meliputi mangrove di Bintang, Gunung Bintang, pesisir Trikora, serta pulau-pulau lepas pantai timur Bintang. Ekowisata terintegrasi antara wilayah daratan (gunung dan hutan) serta wilayah pesisir (pantai dan pulau) direncanakan untuk mendorong kepariwisataan yang ramah lingkungan (*responsible tourism*), inklusif dan berkontribusi terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal.

a. Ekowisata Mangrove Terintegrasi

Pengembangan ekowisata mangrove dilaksanakan secara terintegrasi dengan rencana konservasi mangrove. Kegiatan ekowisata mangrove terintegrasi dengan paket wisata Kawasan Lagoi untuk tiga lokasi di Bintang, yakni (a) Tanjung Berakit, (b) Teluk Bintang yang meliputi Teluk Sebong, Teluk Busung dan Teluk Penaga serta (c) Sei Kecil. Ekowisata memfokuskan pada pariwisata berwawasan lingkungan untuk edukasi lingkungan, pengenalan keanekaragaman hayati, dan jelajah alam di ekosistem mangrove. Strategi ekowisata mangrove dilakukan melalui program:

- 1) Pengembangan atraksi yang berfokus pada aktivitas jelajah (*tracking*) yang dipandu *guide* lokal, susur mangrove dengan kayak atau kano, serta jelajah fauna di ekosistem mangrove;
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata mangrove, termasuk jalur jelajah, spot fotografi, fasilitas umum, dan sebagainya;
- 3) Pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati ekosistem mangrove yang ditampilkan melalui aplikasi maupun papan informasi;
- 4) Pengembangan produk kerajinan, pelatihan pemandu lokal dan promosi paket wisata yang melibatkan masyarakat lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

b. Ekowisata Gunung Bintan

Ekowisata Gunung Bintan memfokuskan wisata alam dan jelajah dengan target wisatawan spesifik pegiat *outdoor*, olahraga alam dan tantangan. Ekowisata mempromosikan olahraga alam *Tracking*, *Hiking* dan *Camping* (THC) yang dipadukan dengan aktivitas pelestarian alam dan satwa. Ekowisata perlu menerapkan strategi *branding*, promosi paket wisata, dan keterlibatan masyarakat lokal desa untuk pengembangan program berupa:

- 1) pengembangan jalur jelajah dan pendakian multilevel (pemula hingga mahir) untuk berbagai kelas minat wisatawan;
- 2) penentuan lokasi jelajah hutan, air terjun, dan spot satwa (kera, tupai, burung hutan) dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) pengembangan lokasi perkemahan serta sarana *outbond* di Desa Wisata Sebong Perekh dan Desa Wisata Sri Bintan, maupun Waduk Sekuning/Poyotomo dan Waduk Anculai di kaki Gunung Bintan;
- 4) pembangunan atraksi pariwisata baru *Penaga Bay* yang terkoneksi dengan koridor Ekowisata Gunung Bintan.

c. Pesisir Trikora dan Pulau-Pulau Timur Bintan

Pengembangan Trikora dengan konsep wisata bahari dan budaya tradisi melaut untuk menghindari kejenuhan tipe atraksi pantai kelas premium di Lagoi. Posisi Trikora yang strategis sepanjang Lintas Timur juga dikembangkan sebagai simpul transportasi laut yang menghubungkan Bintan dengan pulau di sisi timur. Ekowisata pesisir Trikora diarahkan untuk tidak berkembang secara sporadik namun harus terintegrasi dalam pengelolaan kawasan yang dikerjasamakan secara strategis dengan badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun investasi swasta. Pengembangan pulau-pulau timur Bintan ditargetkan untuk Pulau Maphur, Pulau Nikol, Pulau Pangkil dan Pulau Beralas Pasir yang dikelola swasta. Pengembangan diarahkan sebagai destinasi pantai dan pulau yang dilengkapi *private resort* bernuansa tropis, fasilitas olahraga pantai, memancing dan menyelam (*diving*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Tabel 3.5 Pengembangan Pesisir Trikora dan Desa Budaya Suku Laut

Pengembangan Pesisir Trikora dan Desa Budaya Suku Laut		
 <p>Pesisir Trikora diarahkan untuk atraksi pantai yang dilengkapi <i>resort</i> dan <i>cottage</i>, <i>sunrise spot</i> dan olahraga pantai</p>	 <p>Budaya Kelong sebagai rumah penangkapan ikan oleh nelayan diarahkan sebagai atraksi melaut, memancing dan kuliner khas pesisir laut</p>	 <p>Budaya Suku Laut di Desa Berakit menjadi fokus pengembangan CBT dalam memperkenalkan kehidupan melaut</p>

Sumber: Rencana Induk KSPN Lagoi dan sekitarnya

3. Klaster Warisan Budaya dan Kuliner di Koridor Tanjungpinang

Kegiatan berfokus pada kunjungan sejarah dan budaya di Tanjungpinang dengan mengintegrasikan ODTW warisan budaya berupa bangunan cagar budaya, bangunan peribadatan vihara/klenteng, pasar kuliner (akau) serta ragam budaya Melayu dan Tionghoa dengan tema berupa:

a. Wisata Heritage dan Budaya Melayu Tanjungpinang

Budaya di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang memiliki sejarah sangat kuat dengan kebudayaan melayu zaman Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Pulau Penyengat sebagai pusatnya. Perencanaan wisata Tanjungpinang dikembangkan sebagai 'imperium kebudayaan melayu'. Pulau Penyengat tidak hanya menjadi Cagar Budaya Nasional, namun harus menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Pengembangan Tanjungpinang melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal sebagai pelaku utama pariwisata dilakukan dengan rencana program utama, di antaranya:

- 1) penetapan Pulau Penyengat sebagai warisan dunia oleh UNESCO;
- 2) revitalisasi dan penataan kawasan di Pulau Penyengat khususnya cagar budaya prioritas Masjid Raya Sultan Riau, Istana Kantor, Balai Adat Indera Perkasa, kompleks pemakaman serta benteng;
- 3) ekskavasi, revitalisasi dan penataan situs *heritage* lain, yakni Istana Lama Sungai Carang dan Situs Kota Rebah;
- 4) Gedung Gonggong dan Taman Laman Boenda sebagai *branding* Tanjungpinang, museum melayu dan pertunjukan seni (*Opera House*);
- 5) identifikasi kawasan pusat sejarah melayu nonbangunan maupun tak benda, seperti manuskrip, sastra, syair, tarian dan tradisi lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

- 6) pembentukan paket wisata warisan budaya Tanjungpinang yang terintegrasi dengan Jalur Wisata Budaya Melayu Sumatera; dan
- 7) pengembangan infrastruktur dasar di Pulau Penyengat, termasuk revitalisasi Pelabuhan Penyengat.

b. Wisata Warisan Budaya Tionghoa Tanjungpinang

Kebudayaan Tanjungpinang tidak terlepas dari hubungannya dengan kebudayaan Tionghoa. Tanjungpinang terkenal dengan dominasi etnis Tionghoa (58,86 persen) pada 1906–1910. Wisata warisan budaya tionghoa merupakan potensi besar mengingat adanya pergerakan wisatawan asal Tiongkok yang memiliki kedekatan kultural. Pengembangan difokuskan di Senggarang dan Kota Lama Tanjungpinang dalam bentuk penyelenggaraan paket wisata warisan budaya dengan program utama, di antaranya:

- 1) revitalisasi dan peremajaan Kampung Tionghoa Teochiu Senggarang dan kawasan Kampung Bugis;
- 2) revitalisasi dan penataan kawasan Kota Lama Tanjungpinang dengan konsep pecinan (*china-town*) melalui konservasi fasad dan ornamen bangunan, pemugaran bangunan tua dan penciptaan destinasi sejarah, belanja dan kuliner di kawasan Kota Lama;
- 3) pengembangan objek vihara/klenteng di Tanjungpinang, di antaranya Vihara Avalokitesvara, Dharma Sasana Senggarang, Ksitigarbha Bodhisatvva, Klenteng Chong Ye Bio, dan klenteng potensial lainnya;
- 4) pengembangan objek wisata kuliner (*akau*) di kawasan pecinan Kota Lama, Kampung Tionghoa dan Kampung Bugis; dan
- 5) Penyelenggaraan perayaan tionghoa seperti bazar imlek, perayaan cap go meh, pawai budaya, dan festival perahu naga.

III.2.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik

A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo sebagai *Transshipment Point* dan *Logistic Center*

1. Pengembangan Model dan Aktivitas Bisnis Pada Hub Transportasi

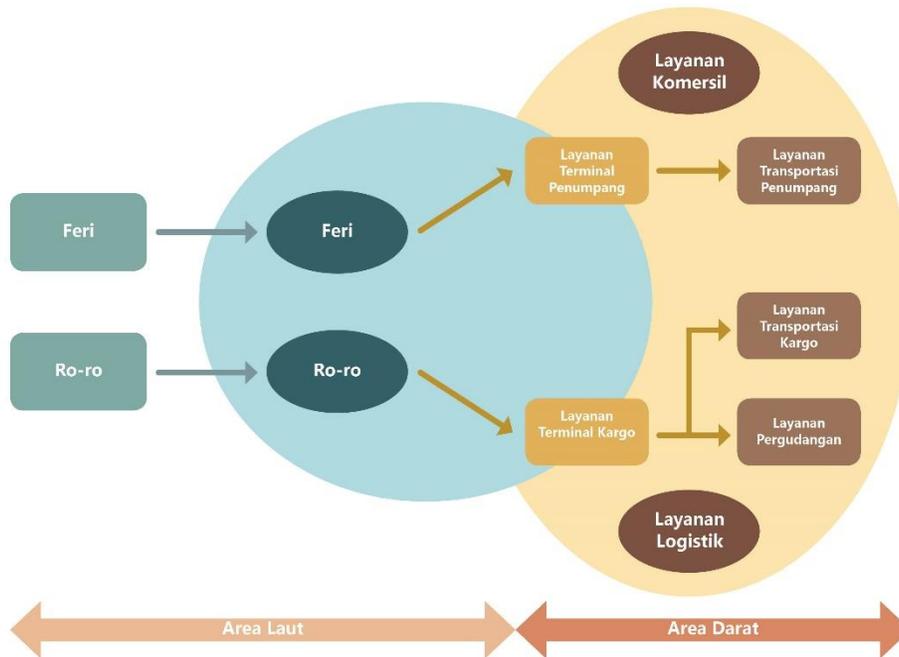
Aktivitas bisnis hub transportasi di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Sri Bintan Pura. Ke depan pengembangan Pelabuhan Sri Bintan Pura diarahkan menjadi Hub Transportasi Penumpang untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata baik untuk domestik maupun internasional serta baik untuk barang maupun penumpang. Pada prinsipnya pengembangan ke depan adalah penataan dari kondisi yang ada mampu untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Gambar 3.15 Model Bisnis Hub Transportasi Penumpang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

2. Pengembangan Aktivitas Bisnis Sebagai Basis Suplai

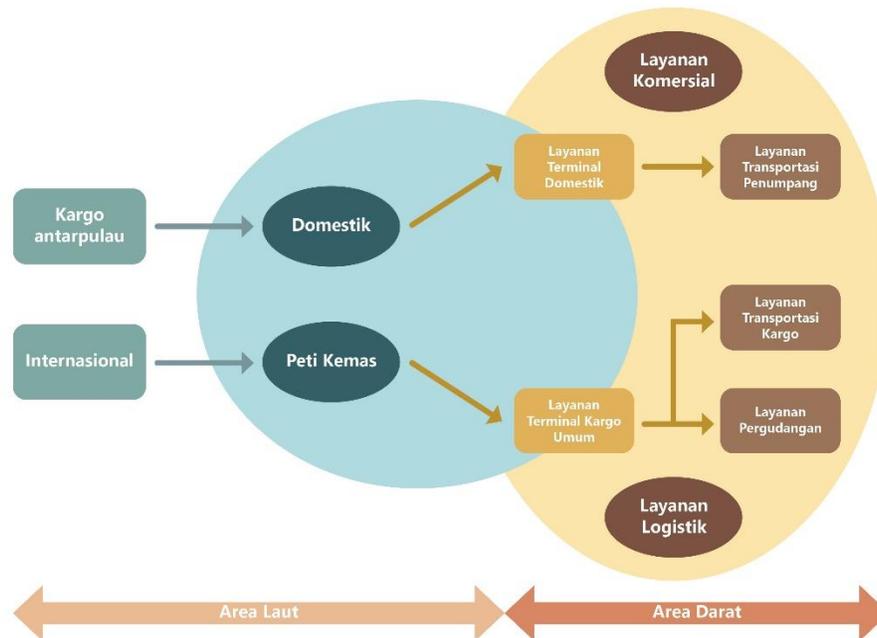
Pelabuhan dengan model bisnis sebagai basis suplai di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Seri Udana, di mana pelabuhan tersebut akan berperan menjadi pelabuhan domestik yang akan menjadi pintu datangnya bahan baku dari Indonesia yang kemudian diolah di kawasan industri di wilayah BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Gambar 3.16 Model Bisnis sebagai Basis Suplai untuk Teluk Sasah dan Bandar Seri Udana



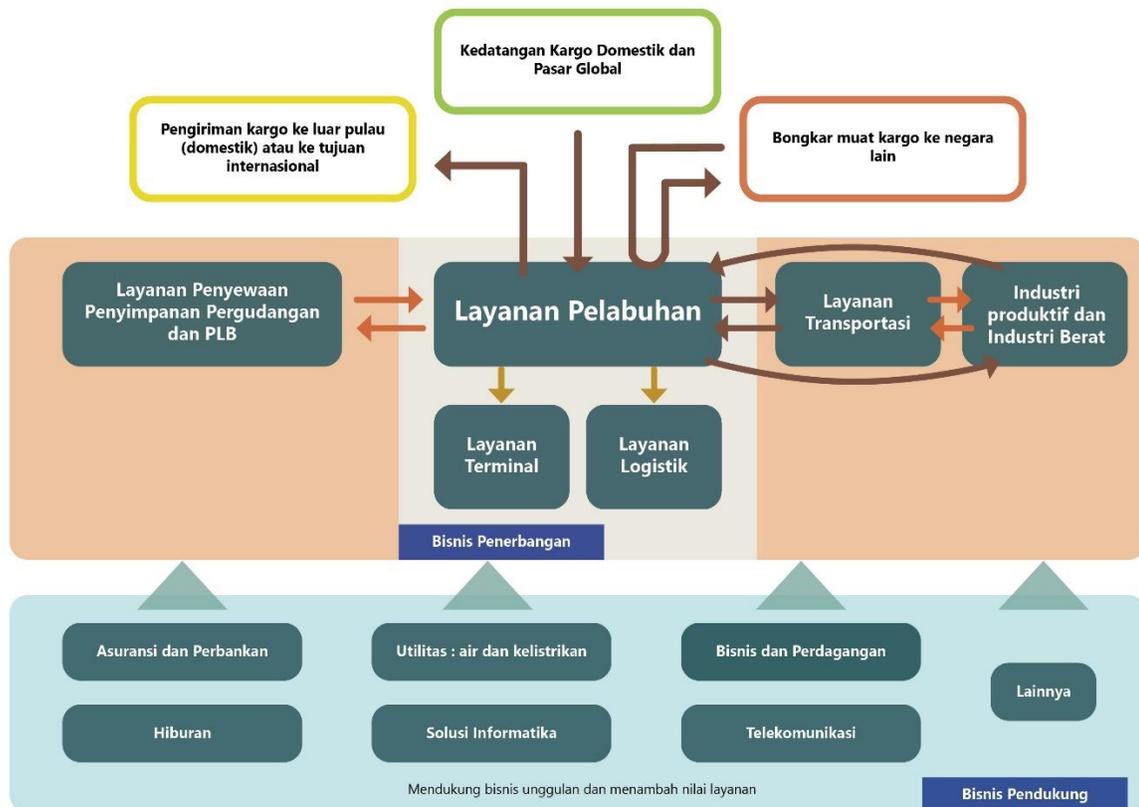
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Gambar 3.17 Aliran Barang di Basis Suplai di Teluk Sasah dan Seri Udana



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



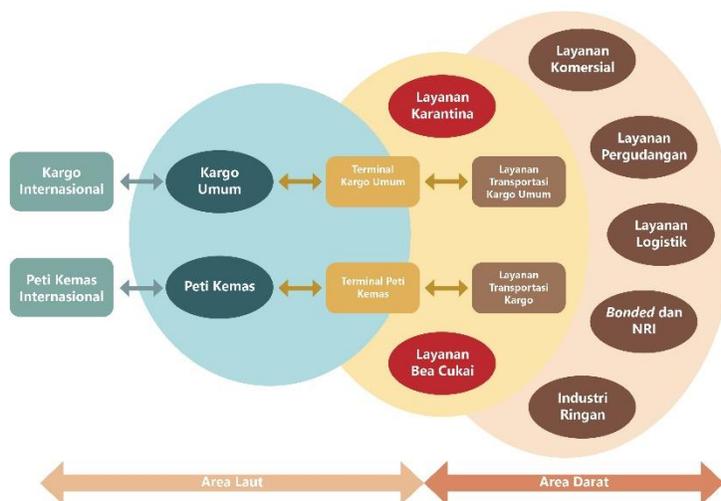
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

3. Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada Pelabuhan Logistik Internasional

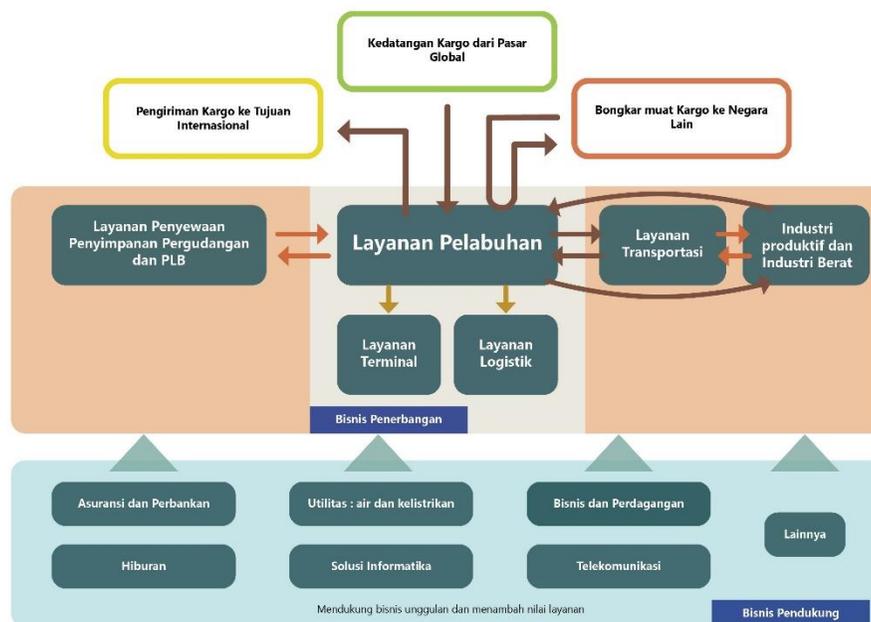
Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Pelabuhan ini diarahkan menjadi Hub Logistik Internasional untuk aktivitas perdagangan internasional yang didukung dengan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumber daya alam nasional. Secara skematis arah pengembangan Sei Kolak Kijang menjadi Hub Logistik Internasional dan aliran barang pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.18 Hub Logistik Internasional Sei Kolak Kijang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.19 Aliran Barang Hub Logistik Internasional Sei Kolak Kijang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

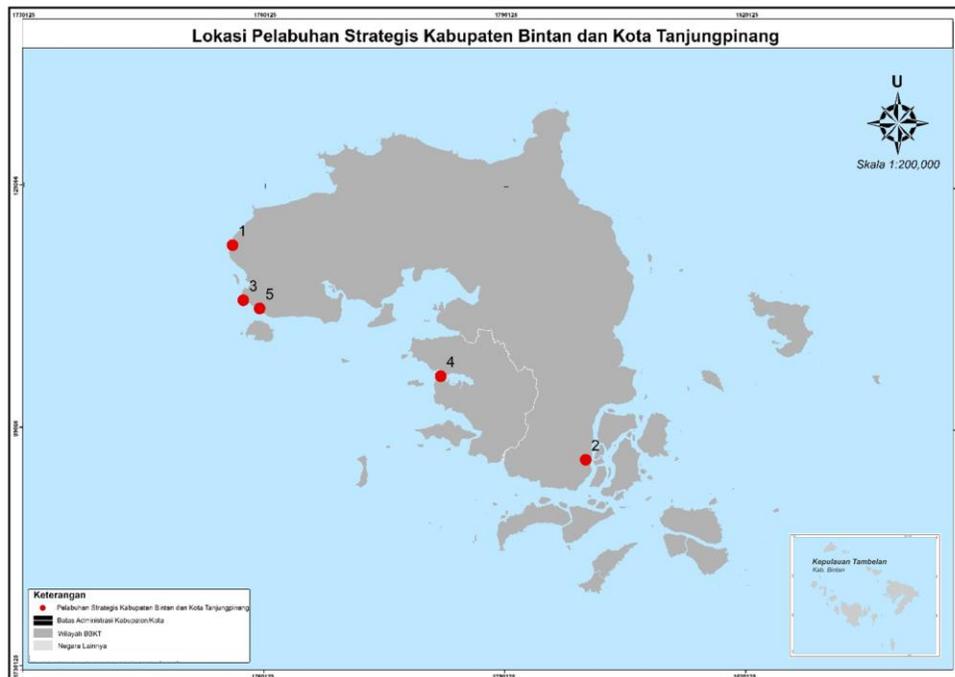
- 112 -

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan antar Pulau

1. Arah Pengembangan Pelabuhan di Bintan dan Tanjungpinang

Pada bagian ini ditunjukkan pelabuhan-pelabuhan yang akan dikembangkan untuk mendukung perkembangan aktivitas industri di Kawasan Bintan dan sekitarnya. Ditunjukkan pula tipe industri di sekitar yang akan dilayani.

Gambar 3.20 Letak Pelabuhan Strategis di Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Tabel 3.6 Layanan Pelabuhan Strategis di Bintan

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Penumpang	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
Bintan – Tanjungpinang								
1	Tanjung Uban	Dom	V	-	-	-	-	
		Int	V	-	-	-	-	
2	Sei Kolak Kijang	Dom	-	V	-	-	-	Defense, Home and Office
		Int	-	V*	-	-	-	
3	Teluk Sasah**	Dom	-	V	V	V	V	Health, Sport, Food Processing, Transport
		Int	-	V	V	V	V	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Penumpang	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
4	Sri Bintang Pura	Dom	V	-	V	-	-	Halal, Fish, Food, dan Agriculture
		Int	V	-	V	-	-	
5	Seri Udana**	Dom	-	V	V	-	V	Health, Sport, Food Processing, Transport
		Int	-	V	-	-	-	

*Sei Kolak Kijang diperuntukkan sebagai pelabuhan domestik saja apabila KPBPB Bintang tidak *enclave*

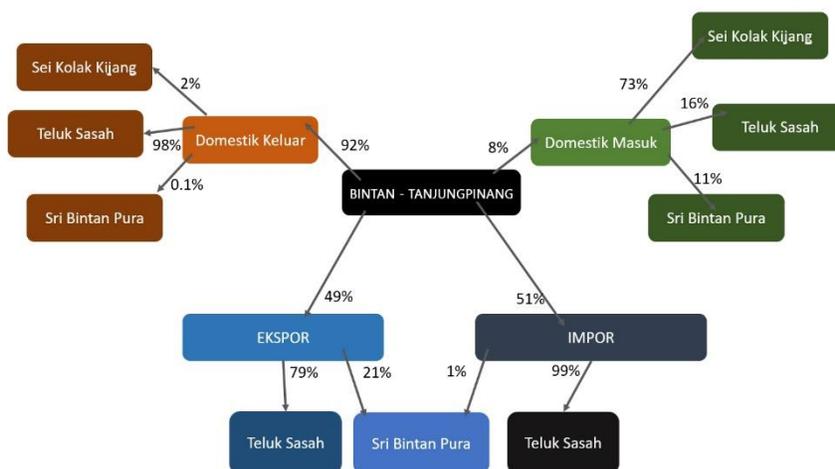
**Seri Udana dapat dipilih apabila dapat menjadi pelabuhan umum internasional sebagai substitusi Teluk Sasah

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

2. Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Bintang dan Tanjungpinang

Aliran barang ekspor pada wilayah Bintang-Tanjungpinang dijelaskan pada Gambar 3.56.

Gambar 3.21 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Bintang-Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

C. Sistem Pergerakan di Kabupaten Bintang dan Kota Tanjungpinang

Prioritas rencana pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Bintang, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Lingkar yang meliputi ruas Simpang Tembeling – Kampung Mansur, Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Simpang Tembeling, Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban), Jalan Nusantara (KM 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat, Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23, Jalan Nusantara – Kolong Enam, dan Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

- b. Jalan Arteri Primer yang meliputi ruas Simpang Wacopek – Kijang (Sei Enam), Jalan Berdikari, Jalan Kebun Nenas, Jalan Tanah Kuning, Jalan Berek Betawi, Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Tuah, Jalan Sri Bayintan – Pelabuhan, Simpang Gesek (Km 16) – Simpang Busung, Simpang Busung – Simpang Lobam, dan Simpang Lobam – Tj Uban.
- c. Jaringan Jalan Strategis Nasional yang meliputi Jalan Lingkar di Pengujan, Pulau Mantang, Pulau Kelong; dan Pulau Tambelan.

Untuk Kota Tanjungpinang, setelah dilakukan proses pemodelan gravitasi, didapati prioritas rencana pembangunan jalan di antaranya sebagai berikut:

- a. Jalan Lingkar Tanjungpinang – Bintan, yang meliputi Sungai Nyirih – Madong, Madong – Sungai Ladi, Sungai Ladi – Pinang Marina, Pinang Marinang – Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana), Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana) – Mesjid Raya Pulau Dompok, Mesjid Raya Pulau Dompok – Jembatan 2 Pulau Dompok, Jembatan 2 Pulau Dompok – Kelam Pagi, dan Kelam Pagi – Lintas Barat Lanjutan.
- b. Jalan Arteri Primer yang meliputi ruas Jalan Tanjung Moch, Jalan Kelam Pagi – Sp. Wacopek – Sp. Km. 13 Jalan Nusantara, Jalan Sp. Km. 13 Jalan Nusantara – Sp. Km. 14 Jalan Tanjung Uban (Sp. Senggarang), Jalan Daeng Kamboja (Jalan Sp. Km. 14 Jalan Tanjung Uban (Sp. Senggarang) – Sp. Madong), Jalan Sp. Madong – Tanjung Geliga, dan Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah.
- c. Jalan Arteri Sekunder yang meliputi ruas Jalan Hang Tuah, Jalan H. Agus Salim, Jalan Usman Harun, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wiratno, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ahmad Yani (Simpang Jalan Basuki Rahmat – Simpang Jalan RH. Fisabilillah), Jalan R.H. Fisabilillah, Jalan D.I. Panjaitan Km 8 – Km 10, Jalan SP. Adi Sucipto Km 10 – Batas Kota (Tg. Uban), Jalan Aisyah Sulaiman (Jl. RH. Fisabilillah – Kampung Haji – Simpang Dompok Lama), dan Jl. Jalan Simpang Dompok Lama – Simpang Wacopek.

D. Rencana Pengembangan Bandar Udara

Rencana Bandar Udara yang akan dibangun/dikembangkan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang di antaranya adalah:

1. Pengembangan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah untuk penumpang domestik dan internasional di Tanjungpinang;
2. Pembangunan Bandar Udara Internasional Bintan (*New Bintan International Airport*) untuk turis pariwisata dan *charter flight* yang terintegrasi dengan rencana industri MRO Bintan Aerospace dan kawasan pariwisata Lagoi; dan
3. Pengembangan Bandar Udara Tambelan untuk penumpang domestik di Pulau Tambelan, Bintan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

III.2.4 Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2047, penduduk Kabupaten Bintan sebesar ±328 ribu penduduk, sedangkan di Kota Tanjungpinang sebesar ±445 ribu penduduk. Dengan pertimbangan proyeksi kepadatan penduduk Bintan ±15,6 jiwa/hektare dan Tanjungpinang adalah ±59,3 jiwa/hektare, maka kebutuhan ruang permukiman minimum Bintan akan dikembangkan secara bertahap, pada tahun 2023–2027 seluas ±811 hektare, pada tahun 2028–2032 seluas ±929 hektare, pada tahun 2033–2037 seluas ±1.053 hektare, pada tahun 2038–2042 seluas ±1.183 hektare, dan pada tahun 2043–2047 seluas ±1.320 hektare. Sementara kebutuhan ruang permukiman minimum Tanjungpinang pada tahun 2023–2027 seluas ±1.103 hektare, pada tahun 2028–2032 seluas ±1.263 hektare, pada tahun 2033–2037 seluas ±1.431 hektare, pada tahun 2038–2042 seluas ±1.607 hektare, dan pada tahun 2043–2047 seluas ±1.794 hektare.

Melalui perhitungan kebutuhan ruang permukiman maksimum, maka rencana pengembangan di Bintan untuk tahun 2023–2032 perlu menambahkan area pemukiman sebesar ±6.231 hektare di kawasan Lagoi, Bintan Timur dan area Gunung Kijang, sedangkan pada 2033–2047 penambahan sebesar ±13.622 hektare di area Bintan utara seperti area Lagoi dan area Tanjung Berakit. Sementara untuk Tanjungpinang, pada tahun 2023–2032 dapat menambah area sebesar ±6.019 hektare di area Senggarang, area Kampung Bugis dan area Batu Sembilan, sementara pada 2033–2047 terdapat potensi perkembangan ±2.035 hektare di Senggarang, Kampung Bugis dan Batu Sembilan.

B. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2047 yang terus meningkat, Kabupaten Bintan masih kekurangan sarana pendidikan hingga tahun 2047 khususnya TK, SD, SMP dan SMU, sementara Kota Tanjungpinang masih kekurangan sarana pendidikan hingga tahun 2047 kecuali di tingkat universitas. Kekurangan tersebut tidak berarti harus melakukan penambahan fasilitas namun dapat dengan peningkatan kapasitas sarana pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Sementara, rencana sarana kesehatan berupa posyandu, balai pengobatan warga, puskesmas pembantu, apotek, puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta sarana peribadatan meliputi musala dan masjid di Bintan dan Tanjungpinang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

Tabel 3.7 Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bintan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	2027	2032	2037	2042	2047
1	Sarana Peribadatan					
a	Musala/Langgar	808	920	1,048	1,176	1,312
b	Masjid Warga	81	92	105	118	131
2	Sarana Pendidikan					
a	TK	162	184	210	235	262
b	SD	126	144	164	184	205
c	SMP	42	48	55	61	68
d	SMA/SMK	42	48	55	61	68
e	Universitas	3	3	4	4	5
3	Sarana Kesehatan					
a	Posyandu	162	184	210	235	262
b	Balai Pengobatan Warga	81	92	105	118	131
c	Puskesmas Pembantu	7	8	9	10	11
d	Apotik	7	8	9	10	11
e	Puskesmas	2	2	2	2	3
f	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
g	Rumah Sakit Bersalin	7	8	9	10	11

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Tabel 3.8 Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kota Tanjungpinang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	2027	2032	2037	2042	2047
1	Sarana Peribadatan					
a	Mushalla/Langgar	1,096	1,252	1,420	1,600	1,784
b	Masjid Warga	110	125	142	160	178
2	Sarana Pendidikan					
a	TK	219	250	284	320	357
b	SD	171	196	222	250	279
c	SMP	57	65	74	83	93
d	SMA/SMK	57	65	74	83	93
e	Universitas	4	4	5	6	6
3	Sarana Kesehatan					
a	Posyandu	219	250	284	320	357
b	Balai Pengobatan Warga	110	125	142	160	178
c	Puskesmas Pembantu	9	10	12	13	15
d	Apotik	9	10	12	13	15
e	Puskesmas	2	3	3	3	4
f	Rumah Sakit	1	1	1	2	2
g	Rumah Sakit Bersalin	9	10	12	13	15

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

C. Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Tangkapan Air

Pertumbuhan penduduk serta perkembangan kawasan di Bintan dan Tanjungpinang hingga tahun 2047 berpotensi menyebabkan tekanan lingkungan. Guna menjaga keberlangsungan ekologi, perencanaan rehabilitasi dan konservasi perlu dilakukan untuk menjaga Kawasan Hutan dan melestarikan Daerah Tangkapan Air (DTA) maupun Daerah Resapan Air (DRA). Hutan di Pulau Bintan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di Kawasan BBK. Secara kuantitatif luas Kawasan Hutan hingga ±55.285,43 hektare atau sebesar 42,2% (empat puluh dua koma dua persen).

Wilayah Bintan bagian utara masih terdapat luasan cukup tinggi areal Kawasan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi. Permasalahan erosi dan alih fungsi lahan terjadi justru di sekitar waduk utama seperti di sekitar Waduk Sei Pulai yang menyuplai air ke Kota Tanjungpinang sehingga menyebabkan pendangkalan waduk. Rehabilitasi dan konservasi Daerah Resapan Air (DRA) dan Daerah Tangkapan Air (DTA) dilakukan melalui penentuan arahan ruang untuk melihat prioritas lokasi. Rehabilitasi Daerah Resapan Air (DRA) diarahkan pada daerah tangkapan air dari waduk maupun embung khususnya wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penentuan Daerah Tangkapan Air dilakukan dengan arahan ruang pada wilayah yang mampu menampung dan menyimpan air hujan menuju tampungan air waduk/embung. Rehabilitasi dan konservasi disusun dengan pertimbangan sipil teknis dan ekologis dengan rekomendasi utama: (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Daerah Tangkapan Air dan Daerah Resapan Air kritis melalui Reboisasi Vegetatif, (2) Pemasangan Kolam Tangkapan Sedimen, dan (3) Penataan kawasan sekitar Daerah Tangkapan Air Waduk/Embung berbasis tata ruang. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau, rencana rehabilitasi dan konservasi pada daerah tangkapan air di Kawasan Bintan di antaranya.

Tabel 3.9 Rencana Lokasi Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Bintan

2023-2027	2028-2032
Waduk Sei Pulani	Danau Tembeling
Waduk Sei Lapan/Tj Uban	Embung Pulau Tambalan
Kolong Enam	Embung Pulau Dendun
Waduk Lagoi	Kolong Beloreng
Waduk Sei Jago	Embung Dompok
Waduk Sei Gesek	Bendungan Busung
Danau SBP	Danau Sei Timun
	Kolong Katen
	Kolong Nyirih
	Embung Desa Numbing



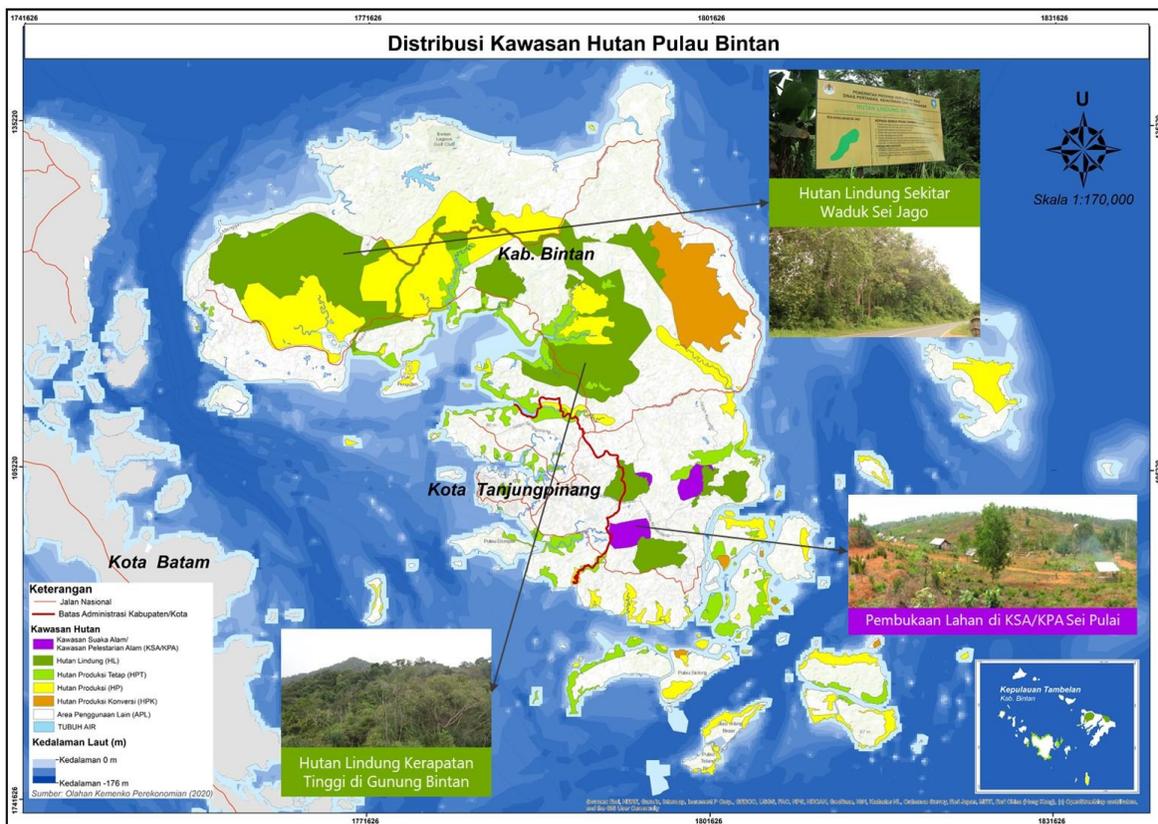
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

2033-2037	2038-2047
Embung Senggarang	Waduk Sekuning
Embung Sei Jeram	Embung Malang Rapat
Embung Teluk Sebong	Waduk Lower Gesek (Sebauk)
Waduk Anculai	Embung Penaga
Waduk Kangboi	Waduk Ekang Anculai
Waduk Galang Batang	Waduk Lower Kawal
Kolong Keter	Embung Kelong
Embung Pulau Pengudang	Kolong Sei Tocang
Waduk Dompok	Embung Taman Buah
Embung Pulau Pangkil	Embung Pulau Mapur

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.22 Distribusi Kawasan Hutan di Pulau Bintan



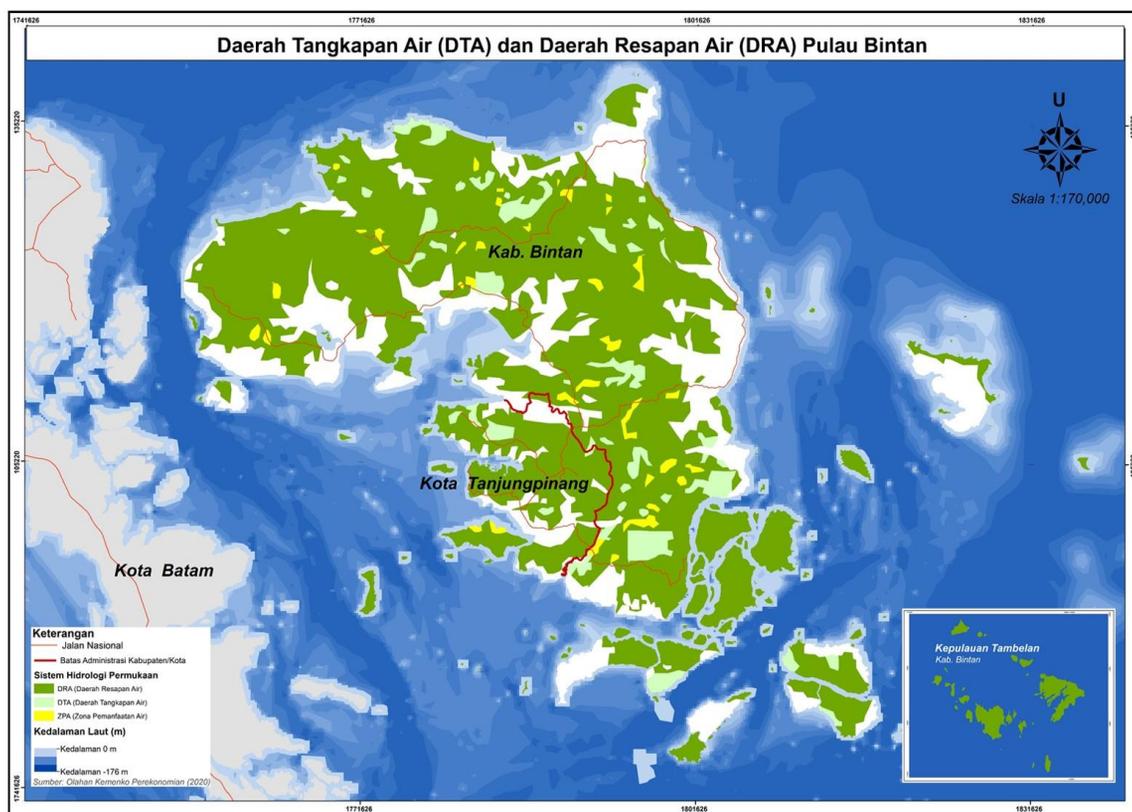
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

Gambar 3.23 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Pulau Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



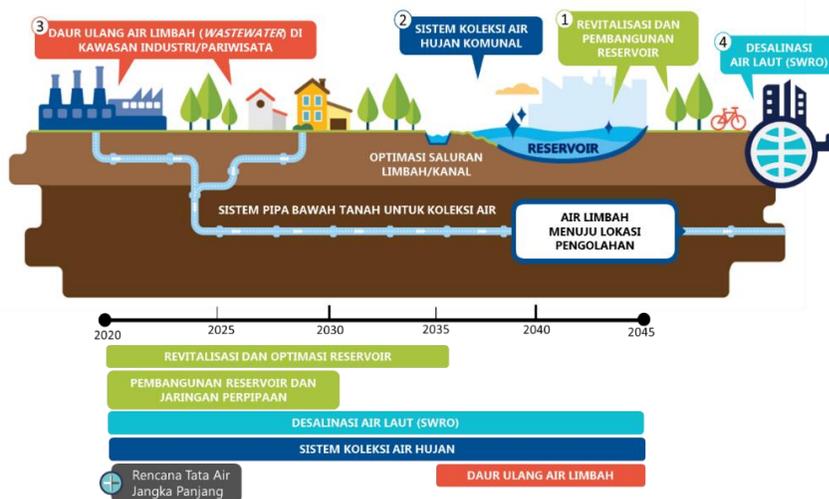
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

D. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan sumber air baku di Bintan dan Tanjungpinang dilakukan melalui *Integrated Total Water Management* (ITWM) dengan mengkombinasikan berbagai sumber penyedia air, di antaranya: (1) Air bersih melalui revitalisasi reservoir serta pembangunan reservoir baru; (2) Air limbah melalui daur ulang limbah cair khususnya di Kawasan Industri atau Kawasan Pariwisata; (3) Drainase Perkotaan dari koleksi air hujan komunal di permukiman; serta (4) Desalinasi melalui pengolahan air laut menjadi air tawar melalui *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). Manajemen air baku dilakukan dengan (a) Penatagunaan Waduk/Embung/Kolong; (b) Penyediaan Air; hingga (c) Manajemen penggunaan air di Waduk/Embung/Kolong (bekas tambang).

Gambar 3.24 Konsep ITWM dalam Manajemen Air di Pulau Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.25 Kerangka Revitalisasi dan Optimasi Reservoir di Pulau Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Kegiatan revitalisasi reservoir eksisting difokuskan pada waduk/embung untuk suplai air baku hingga tahun 2047 melalui Operasi dan Pemeliharaan 9 (sembilan) waduk eksisting. Sementara pembangunan waduk baru hingga 2047, yakni rencana (a) Estuari Dam Busung (luas genangan ±4.721 hektare dan debit 4000 liter/detik) yang nantinya juga mensuplai air ke Batam melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang tersambung Trase Jembatan Batam-Bintan; (b) Estuari Dam Dompok (debit 1.777 liter/detik); serta (c) Embung di Kawasan Dompok.

Gambar 3.26 Sebaran Rencana Pengembangan Air Baku Pulau Bintan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau, kegiatan revitalisasi reservoir eksisting difokuskan pada waduk/embung untuk suplai air baku hingga tahun 2047 melalui operasi dan pemeliharaan seluruh waduk eksisting dan waduk yang telah selesai dibangun.

E. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air domestik untuk Kabupaten Bintan sebesar 958 liter/detik hingga tahun 2047. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Bintan memiliki 12 Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas produksi 670 liter/detik. Dari kapasitas produksi tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk Kabupaten Bintan melainkan juga untuk melayani Kota Tanjungpinang yaitu IPA Waduk Sei Pulai, IPA Sei Gesek dan IPA Kolong Enam. Dua belas IPA yang dimiliki Kabupaten Bintan memiliki kapasitas terpasang 1.615 liter/detik, dengan demikian jika IPA eksisting dioptimalkan maka dapat memenuhi kebutuhan air bersih domestik Kabupaten Bintan terlebih dengan adanya rencana pembangunan Estuari Dam Busung sampai dengan tahun 2047. Pengoptimalan IPA dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pengendalian sedimen.

Proyeksi kebutuhan air domestik untuk Tanjungpinang sebesar 1.303,35 liter/detik hingga tahun 2047. Saat ini kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang dipenuhi dengan PDAM yang bersumber dari IPA Kabupaten Bintan, air tanah, dan sebagian kecil *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang direncanakan pembangunan Estuari Dam Dompok dengan kapasitas 1.777 liter/detik. Dengan kapasitas Estuari Dam dan didukung dengan pasokan air bersih dari IPA Kabupaten Bintan maka dapat memenuhi kebutuhan air bersih domestik Tanjungpinang sampai dengan tahun 2047. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air hingga jangka panjang di Kawasan bintan maka direncanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Pulau Bintan sebagai bagian dari Jaringan Perpipaan Bintan-Batam.

F. Rencana Pengelolaan Limbah Cair

Berdasarkan proyeksi produksi limbah cair Kabupaten Bintan mencapai sebesar 767 liter/detik hingga tahun 2047. Selain limbah domestik, Bintan juga akan menghasilkan air limbah dari kegiatan industri dan pariwisata. Ditinjau dari kepadatan penduduk hingga tahun 2047 yang kurang dari 150.000 jiwa/km², maka Kabupaten Bintan belum memerlukan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan. Selain itu dengan letak permukiman penduduk yang tersebar jauh, maka pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Berdasarkan proyeksi produksi limbah cair Kota Tanjungpinang hingga tahun 2047 mencapai 1.043 liter/detik. Sebagai daerah dengan kepadatan rendah, maka Kota Tanjungpinang belum memerlukan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala perkotaan. Tanjungpinang saat ini memiliki satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Ganet yang berfungsi baik namun kapasitasnya cenderung akan penuh jika menampung air limbah hingga 2047. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diarahkan di Kelurahan Dompok dan Kelurahan Air Raja. Lokasi tersebut merupakan lokasi terpusatnya permukiman dan juga ke depan direncanakan akan dikembangkan kegiatan industri.

G. Rencana Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan

Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Bintan hingga tahun 2047 adalah sebesar 779.002 liter/hari. Mengacu pada SNI 19-2454-2002, kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bintan sampai dengan 2047 Kabupaten Bintan memerlukan 3 TPA dengan kapasitas masing-masing 25.000 liter. Jika dilihat dari proyeksi timbulan sampah yang sangat besar maka kapasitas TPA yang dibutuhkan akan selalu kurang, oleh karenanya perlu strategi penurunan produksi sampah pada tingkat Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Bank Sampah. Dari 3 TPA yang dibutuhkan pada tahun 2047, satu TPA adalah pengoptimalan TPA eksisting yaitu TPA Sei Enam dan dua TPA direncanakan disatukan menjadi satu TPA Regional di Kecamatan Toapaya sebagai TPA utama Bintan. TPA Regional tersebut dilengkapi dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis teknologi tinggi. Selain timbulan domestik, pengembangan industri dan pariwisata juga perlu dipertimbangkan potensi timbulannya agar setiap pengembang kawasan wajib menyediakan TPS di kawasannya.

Proyeksi timbulan sampah Kota Tanjungpinang hingga tahun 2047 sebesar 1.113.977 liter/hari. Saat ini Tanjungpinang hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Ganet dengan luas 14 hektare berkapasitas 90 ton/hari dengan kondisi sudah kelebihan muatan. Ke depannya, dikarenakan lahan yang terbatas maka pembuangan sampah Kota Tanjungpinang diarahkan untuk menggunakan TPA Regional Toapaya yang berada di Kabupaten Bintan. Selain timbulan sampah domestik, timbulan dari kegiatan industri dan bisnis di Kawasan Dompok maupun Kawasan Senggarang juga perlu disediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dapat menampung timbulan sampah di dalam kawasan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

H. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir di Bintan dilakukan melalui normalisasi sungai, sempadan sungai dan penataan drainase. Bahaya banjir umumnya terjadi dengan luas dapat mencapai 43,2 hektare dengan tinggi genangan rata-rata lebih dari 30 cm, penanganan dititikberatkan pada saluran primer atau drainase makro. Penanganan drainase makro dilakukan pada sungai-sungai di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Sri Kuala Lobam. Penanganan jaringan makro juga berhubungan dengan rencana rehabilitasi dan konservasi daerah Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Daerah Resapan Air (DRA) serta pengurangan risiko bencana banjir di Bintan. Penanganan jaringan makro melalui (a) pengerukan titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan dan (b) normalisasi sungai dan pengamanan bantaran dari pembangunan fisik pada sungai drainase primer.

Berbeda dengan Bintan, sistem pengendalian banjir di Kota Tanjungpinang dititikberatkan pada penanganan drainase mikro karena luasan genangan kurang dari 10 hektare dan tinggi genangan rata-rata lebih dari 30 cm. Penanganan drainase mikro direncanakan melalui (a) rehabilitasi dan pelebaran drainase sekunder di jalan-jalan utama; (b) Pembangunan tampungan air terintegrasi dengan drainase sekunder atau kolam resapan sebagai sarana pengendali banjir, sumber air tadah hujan maupun cadangan muka air tanah saat kemarau; (c) pembangunan drainase pada ruas-ruas jalan yang belum terlayani drainase sekunder; dan (d) pemeliharaan saluran drainase dengan pengerukan rutin pada musim kemarau dan memasang filtrasi sampah.

I. Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Energi

Pengembangan Kawasan Bintan dan Tanjungpinang diperlukan dukungan pasokan tenaga listrik yang cukup dan handal khususnya dengan berkembangnya berbagai kawasan industri dan pariwisata serta kebutuhan domestik. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan permukiman kebutuhan daya listrik di Bintan tahun 2047 mencapai $\pm 147.420.363$ VA. Sementara kebutuhan daya listrik di Kota Tanjungpinang tahun 2047 mencapai $\pm 200.515.844$ VA. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2028, kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dipenuhi dengan kabel laut Batam-Bintan, sehingga ke depan dibutuhkan pengembangan energi tambahan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

Pengembangan sistem energi untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang diarahkan untuk terus berinovasi pada pemenuhan kebutuhan dengan EBT (Energi Baru dan Terbarukan), terutama dari PLTS dan PLTG. Tidak tertutup kemungkinan jika dalam RUPTL selanjutnya akan diterapkan kebijakan penghentian PLTU (*coal retirement*) sebagai komitmen *Paris Agreement* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) serta target pemenuhan bauran EBT 23% (dua puluh tiga persen) pada tahun 2025, maka rencana pengembangan PLTU 2 x 100 MW akan digantikan dengan proyek pembangkit berbasis Energi Terbarukan *baseload*. Berikut perencanaan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik, yaitu:

Tabel 3.10 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik

No.	Sistem	Jenis	Lokasi	Kapasitas (MW)
1.	Tanjungpinang	PLTG	MPP Tanjungpinang	33
2.	Kepri	PLTBio	PLTBio Kepri Tersebar	6
3.	Kepri	PLTS	Surya Kepri Tersebar	1,75
4.	Tanjungpinang	PLT Berbasis EBT <i>baseload</i>	Bintan	2 x 100

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019

J. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi

Sebagai kawasan strategis dan pusat-pusat kegiatan perekonomian, Bintan dan Tanjungpinang membutuhkan pengembangan rencana jaringan telekomunikasi khususnya dalam menunjang kegiatan industri maupun pariwisata. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi diupayakan untuk meningkatkan jangkauan, pemerataan, serta efisiensi pelayanan.

a. Jangkauan Rencana *Base Transceiver Station* (BTS) di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang

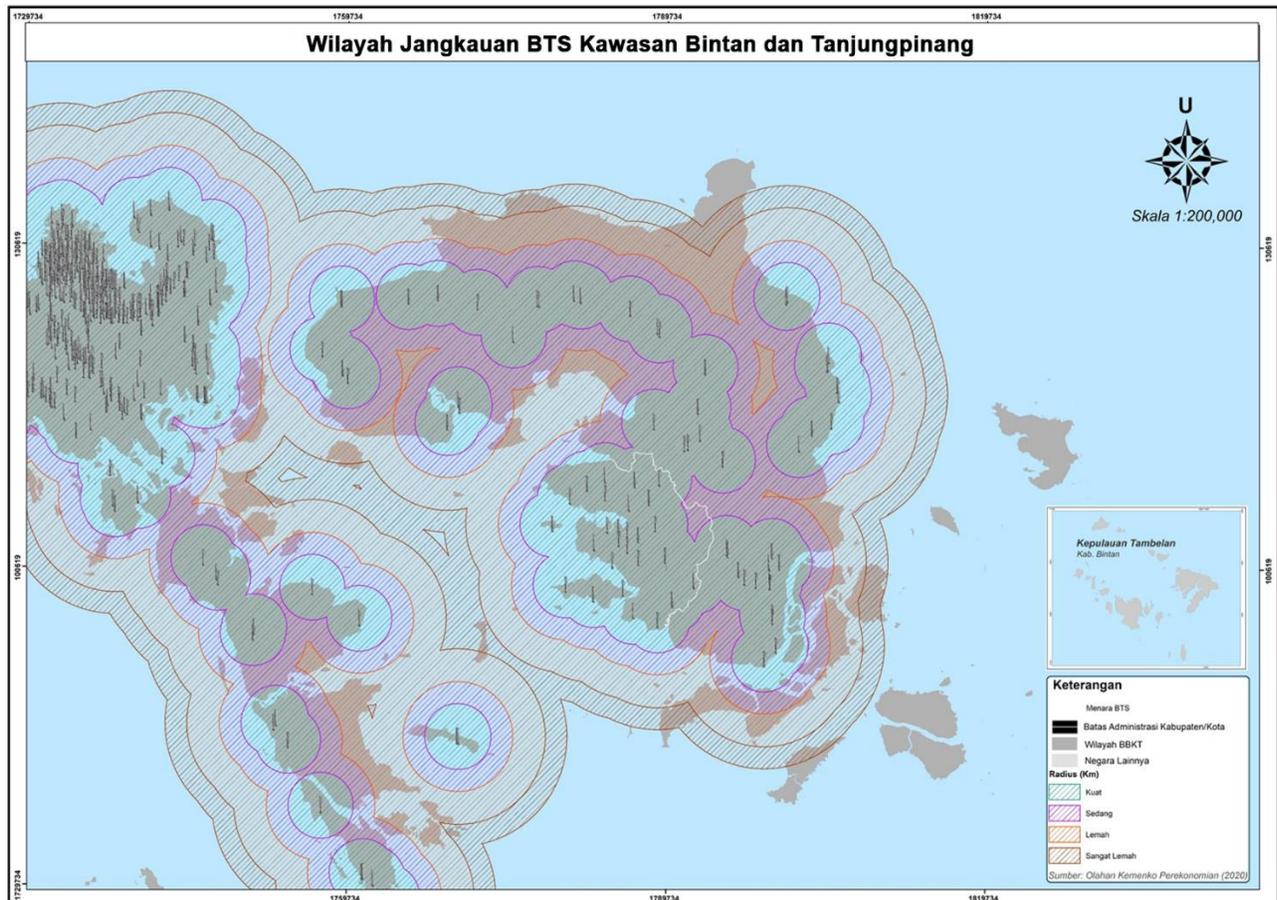
Multiple ring buffer terhadap 54 menara *Base Transceiver Station* (BTS) hanya terdapat 41% (empat puluh satu persen) dari area Bintan memiliki sinyal kuat. Guna pengembangan ke depan diharapkan agar melakukan penguatan sistem telekomunikasi dengan penambahan BTS, khususnya sepanjang koridor Kawasan Pariwisata Trikora-Lagoi. Sementara untuk Kota Tanjungpinang, terhadap 27 menara BTS terdapat 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen) area Tanjungpinang memiliki sinyal kuat dan tidak dijumpai area dengan sinyal sangat lemah. Penentuan lokasi menara yang optimal merupakan langkah yang harus dilakukan selanjutnya dengan memperhatikan cakupan para pengguna seluler dengan tetap memperhatikan aspek estetika ruang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Gambar 3.27 Wilayah Jangkauan BTS Kawasan Bintan dan Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

b. Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi untuk Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata

Pada tahun 2023 hingga 2032 dibutuhkan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri sebesar 252.998 SST (Sambungan Selular Telekomunikasi) dan pada tahun 2033 hingga tahun 2047 dibutuhkan penambahan sebesar 87.544 SST (Sambungan Selular Telekomunikasi) Sementara untuk Tanjungpinang pada tahun 2023 hingga 2032 dibutuhkan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri sebesar 34.738 SST (Sambungan Selular Telekomunikasi) dan pada tahun 2033 hingga 2047 dibutuhkan penambahan sebesar 1.317 SST (Sambungan Selular Telekomunikasi). Pada kawasan pariwisata dibutuhkan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh destinasi pariwisata di Pulau Bintan dengan jaringan sinyal operator yang baik dan kemudahan jangkauan sinyal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

c. Pengembangan *Data Center* di Kawasan Bintan

Pengembangan *data center* sebagai lokasi penyimpanan data berpotensi menarik pelaku bisnis untuk berinvestasi. Keunggulan Bintan sebagai lokasi *data center* didasarkan pada kawasan ini terhubung dengan 11 kabel fiber optik bawah laut dan memiliki kerawanan rendah terhadap bencana gempa bumi. Pengembangan *data center* atau *collocation server* di Bintan direncanakan di Kawasan Lagoi dengan rencana total area sekitar 200 hektar, kapasitas listrik 300 MW dan investasi sebesar 400 juta SGD atau setara 4 triliun Rupiah. *Data center* membutuhkan dukungan regulasi yang tepat terkait perlindungan data dan pengaturan arus lalu lintas data, ketenagalistrikan berkualitas pasokan listrik yang dapat diandalkan melalui diversifikasi sumber listrik dan jalur listrik, penyiapan SDM IPTEK, serta pemilihan lokasi yang memenuhi kriteria, utilitas dasar dan pertahanan.

K. Konservasi Hutan, Mangrove, Wilayah Pesisir, Perairan dan Laut

Rencana konservasi hutan mangrove dan wilayah pesisir di wilayah Bintan dan Tanjungpinang memegang peranan penting menjaga ekosistem kepesisiran. Ekosistem hutan mangroves Pulau Bintan memiliki luas ±5.174,48 hektare dan sebagian besar difungsikan sebagai area lindung pesisir. Rencana konservasi difokuskan pada lima area dengan sebaran hutan mangrove luas untuk dipertahankan, yakni (1) Tanjung Berakit, (2) Teluk Bintan, (3) Dompok, (4) Bintan Pesisir dan (5) Mantang. Konservasi perlu mempertimbangkan prinsip pengelolaan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa strategi konservasi memuat keterpaduan:

1. Identifikasi kondisi faktual hutan mangrove yang diintegrasikan ke Rencana Tata Ruang menjadi area lindung atau pemanfaatan ekowisata;
2. Pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Bintan sebagai bagian integral dari program pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. Penataan ekowisata hutan mangrove mengacu Rencana Penataan Kawasan Mangrove dalam Rencana Induk BBK; dan
4. Pengelolaan dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan akademisi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

Gambar 3.28 Rencana Konservasi Mangrove Kawasan Bintan dan Tanjungpinang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

III.2.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang mempunyai banyak potensi alam dan budaya yang perlu ditonjolkan dalam perencanaan dan perancangan kawasan. Untuk itu, tipologi urban desain dan konsep kawasan *heritage* ini memvisualisasikan prinsip-prinsip universal dengan mempertimbangkan fungsi, karakter, dan isu kawasan. Selain itu, prinsip penataan ruang publik seperti koridor ruang jalan juga divisualisasikan.

A. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Senggarang dan Pusat Kota Tanjungpinang dan Tanjung Uban

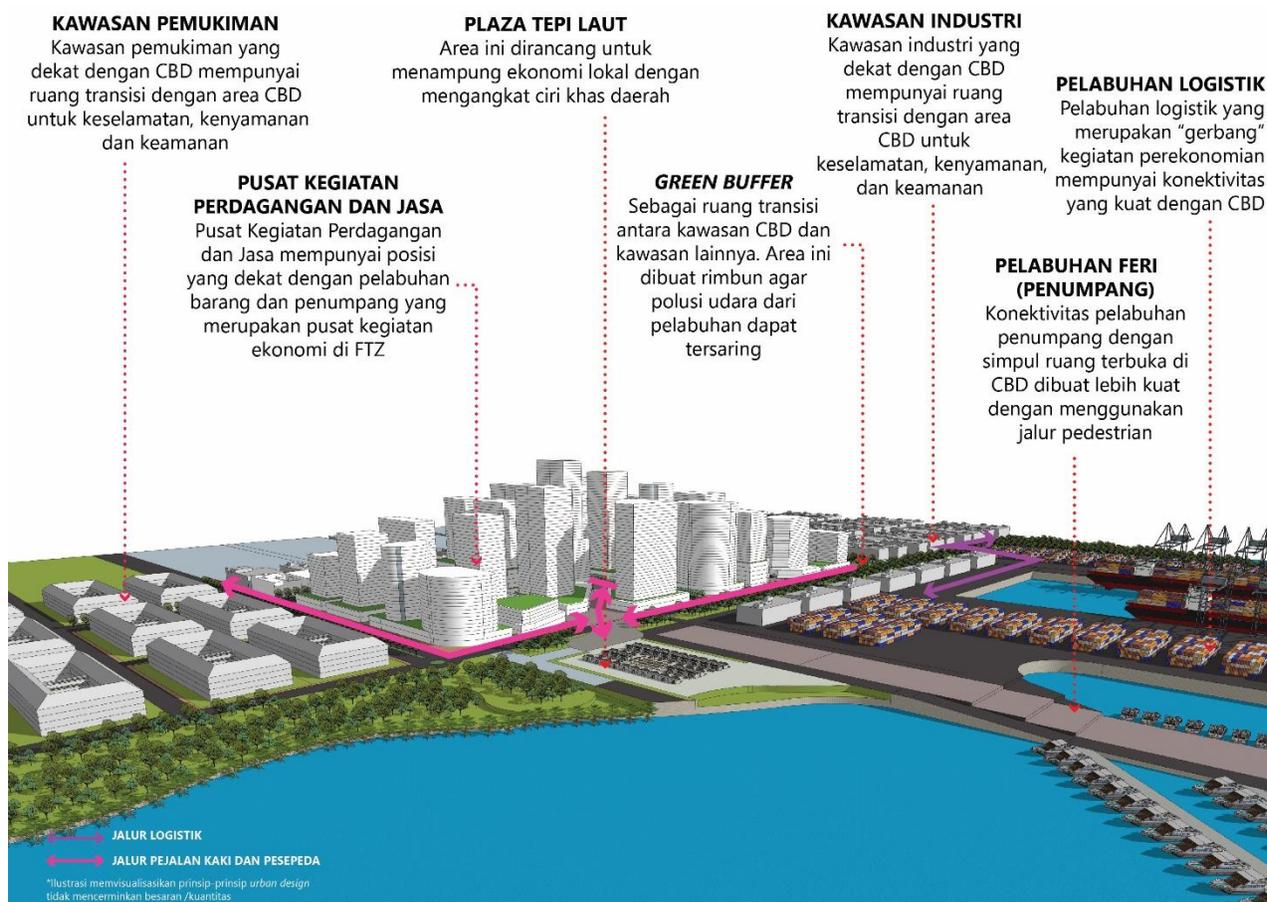
Berdasarkan isu dan fungsi kawasan, Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa di Pulau Bintan khususnya di Kawasan Perdagangan Bebas Senggarang, Pusat Kota Tanjungpinang dan Tanjung Uban diarahkan untuk mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu (a) Mempunyai pusat kegiatan; (b) Kawasan campuran yang mempersingkat jarak tempuh; serta (c) Mempunyai karakter kawasan yang mewakili konsep kawasan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Gambar 3.29 Aksonometri Tipologi Pusat Perdagangan dan Jasa



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

B. Pengembangan Kawasan Bintang Aerospace, Kawasan Industri Lobam, Industri Perawatan dan Perbaikan Pesawat, Pusat Data, Industri Halal), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Galang Batang, Kawasan Industri Bintang Timur, Kawasan Industri Dompok dan Kawasan Industri Air Raja

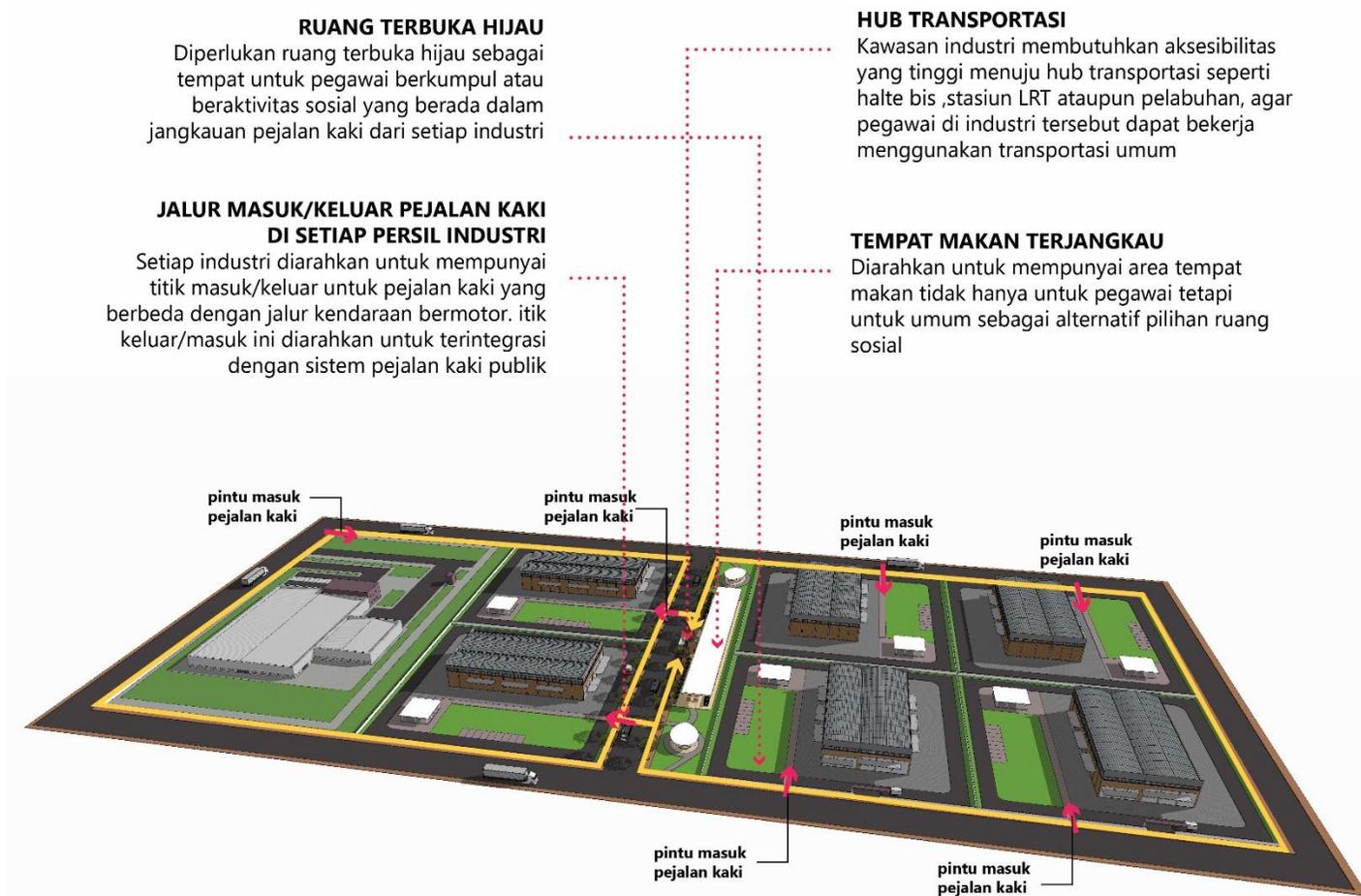
Penataan kawasan industri dianggap perlu karena bukan hanya sirkulasi barang yang harus diperhatikan tapi manusia sebagai penggunaannya. Oleh karena itu, kawasan industri di Bintang diarahkan untuk memperhatikan beberapa prinsip desain penataan ruang terbuka publik dan kawasan ramah pejalan kaki.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

Gambar 3.30 Tipologi Kawasan Industri Memperkuat Sistem Pejalan Kaki dengan Transit Transportasi Umum dan Ruang Terbuka Publik



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

C. Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bintan

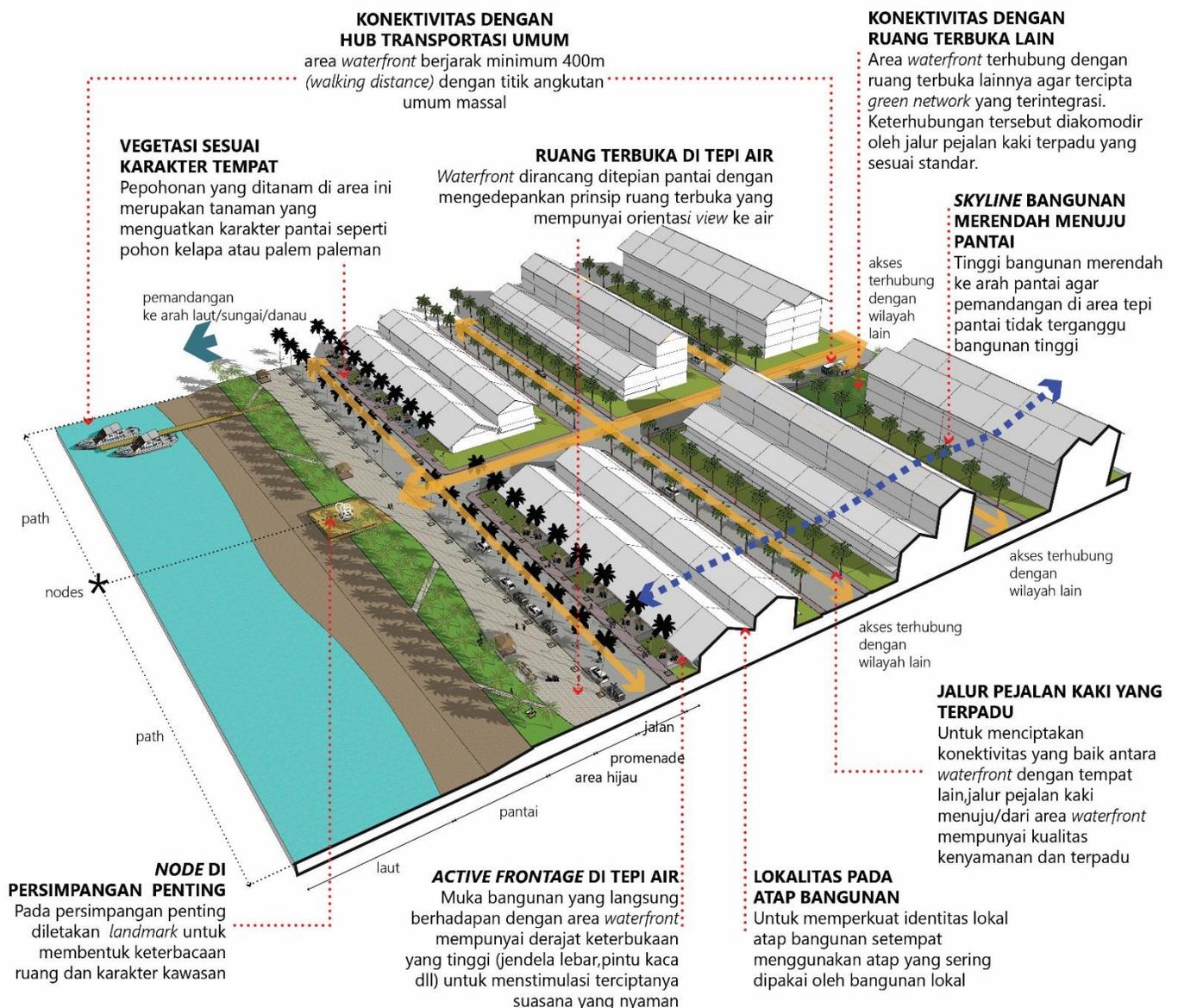
Beberapa prinsip desain yang dapat diterapkan untuk membantu pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi yang ada di Pulau Bintan meliputi kontinuitas, urutan, varietas dan konektivitas. Adanya sistem sirkulasi menerus dalam bentuk promenade di sepanjang bibir pantai yang mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda dengan pemandangan yang berorientasi langsung ke laut perlu diterapkan pada wilayah pesisir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Gambar 3.31 Aksonometri Tipologi Wisata Pantai



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

D. Pengembangan Kawasan Warisan Budaya Melayu-Tionghoa Tanjungpinang

Kawasan Budaya Melayu dan Tionghoa di Tanjungpinang terpusat di kawasan kota tua Tanjungpinang. Potensi wisata di kawasan ini masih belum teroptimalkan dengan baik. Beberapa strategi desain yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan budaya pecinan untuk meningkatkan daya tariknya sebaik kawasan wisata antara lain:

1. Penyediaan ruang pejalan kaki yang memadai;
2. Pemanfaatan bangunan-bangunan melalui konsep *adaptive reuse*; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

3. Penataan area terbuka publik.

Gambar 3.32 Kelengkapan Amenitas Pada Ruang Pejalan Kaki di Area Pertokoan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

E. Pengembangan Ekowisata Mangrove dan Hutan

Dengan karakteristik ekosistem alami di Pulau Bintan, diperlukan penerapan konsep pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove mengadopsi prinsip wawasan lingkungan *United Nations Environment Programme* (UNEP), terdapat beberapa strategi desain yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Pembagian zona kawasan konservasi mangrove dan kawasan penunjang;
2. Menambah fungsi edukasi pada zona ekosistem mangrove; dan
3. Mempertahankan kawasan hutan yang berada di area wisata.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

Gambar 3.33 Strategi Desain yang Dapat Diterapkan pada Kawasan Ekowisata Mangrove

KAWASAN KONSERVASI MANGROVE

Area konservasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dengan menyediakan fasilitas informasi mengenai keanekaragaman vegetasi mangrove di sepanjang *ecotrail*

AREA PROMENADE

Terdiri dari jalur hijau yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, jalur pejalan kaki dan *alfresco* di tepi laut

ECOTRAIL

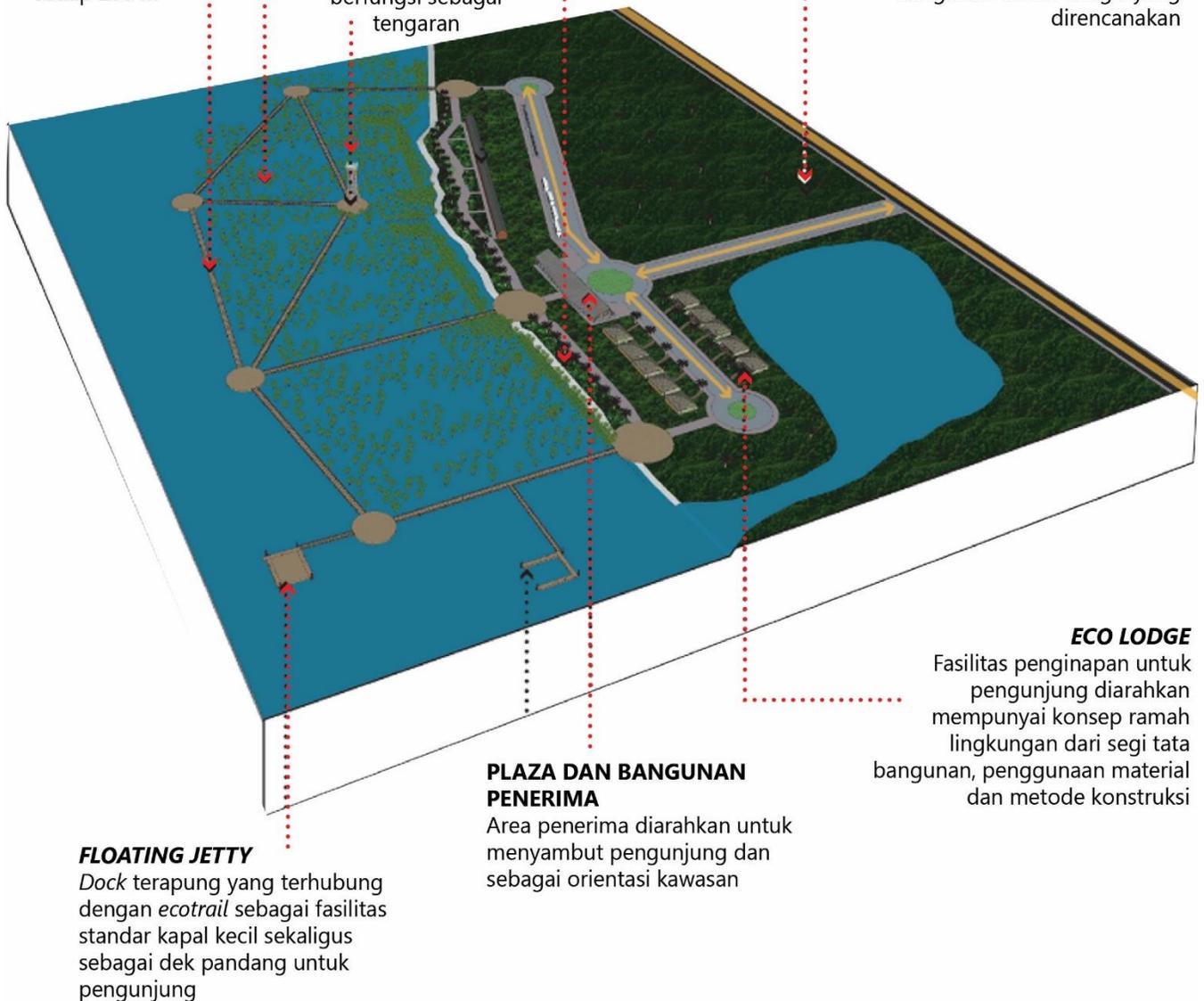
Jalur pejalan kaki yang dirancang di kawasan konservasi mangrove dengan menempatkan titik titik amenitas di setiap 200 m

**NODE DI
PERSIMPANGAN
PENTING DAN MENARA
PANDANG**

Di persimpangan *ecotrail* dirancang platform untuk menara pandang di titik titik tertentu dan juga berfungsi sebagai tengaran

**AREA HIJAU DI SEKELILING
KAWASAN WISATA**

Pada perimeter kawasan wisata, area hijau dipertahankan sebagai *green buffer* yang meminimalisir bangunan di luar fungsi yang direncanakan



FLOATING JETTY

Dock terapung yang terhubung dengan *ecotrail* sebagai fasilitas standar kapal kecil sekaligus sebagai dek pandang untuk pengunjung

**PLAZA DAN BANGUNAN
PENERIMA**

Area penerima diarahkan untuk menyambut pengunjung dan sebagai orientasi kawasan

ECO LODGE

Fasilitas penginapan untuk pengunjung diarahkan mempunyai konsep ramah lingkungan dari segi tata bangunan, penggunaan material dan metode konstruksi

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



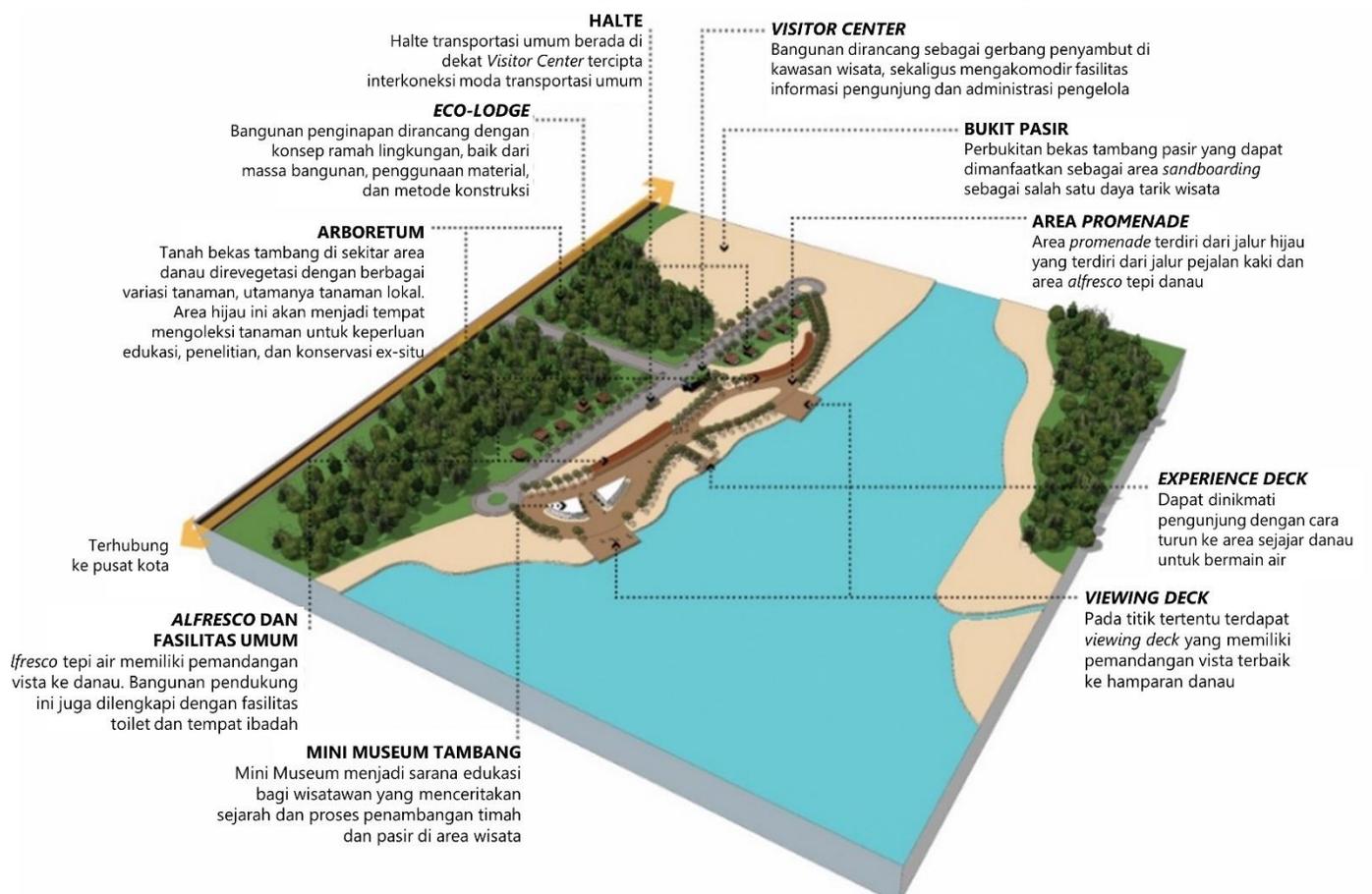
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

F. Penataan Reklamasi Kawasan Pascatambang

Strategi desain yang diaplikasikan untuk penataan reklamasi kawasan pascatambang di Bintan meliputi (a) Revegetasi tanaman lokal; (b) Penciptaan objek wisata edukatif; serta (c) Penambahan varietas kegiatan.

Gambar 3.34 Aksonometri Tipologi Reklamasi Kawasan Pascatambang



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

G. Penataan Ruang Koridor Jalan

Strategi desain yang dapat diaplikasikan untuk penataan area ruang terbuka hijau pasif di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang melalui prinsip *Landscape Pattern Pavement* dan *Street Furniture* yang memberi kenyamanan, informasi, ataupun keamanan pedestrian dan mencerminkan budaya setempat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

Gambar 3.35 Tata Letak Tanaman Dengan Ritme Yang Konsisten



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

III.2.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK

Tantangan pengembangan kegiatan ekonomi di Bintan dan Tanjungpinang salah satunya adalah penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal untuk mendorong transformasi ekonomi sebagai pusat pariwisata internasional, aneka industri dan pusat bisnis melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pengembangan SDM dan IPTEK di Bintan dan Tanjungpinang difokuskan untuk mendorong *link and match* ketersediaan SDM dengan kebutuhan kegiatan pariwisata dan/atau industri. Kesiapan SDM saat ini banyak terkendala kesiapan pendidikan yang rendah dan masih didominasi sekolah menengah tanpa latar belakang kepariwisataan atau industri serta sertifikasi tenaga kerja.

Rencana pengembangan SDM harus memastikan bahwa terdapat kesempatan kerja yang sama antara warga asli Bintan dan Tanjungpinang dengan warga dari luar Kawasan BBK untuk menangkap peluang perkembangan ekonomi kawasan, sehingga dibutuhkan pula upaya pemerataan kapasitas tenaga kerja. Rencana pengembangan SDM diharapkan dapat terus mendorong penurunan angka pengangguran yang diperkuat dengan rencana pengembangan IPTEK secara holistik, meliputi:

1. Memastikan strategi pengembangan SDM dan IPTEK terintegrasi dengan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen SDM dan *Center of Excellence* (CoE) Manajemen Sumber Daya Manusia oleh unit khusus untuk melakukan transformasi SDM di BBK.
2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan berdaya saing tinggi untuk menyediakan SDM andal dan profesional multi tingkat dalam mendukung pariwisata internasional, melalui:
 - a. Pengembangan pendidikan tinggi berorientasi pariwisata internasional. Saat ini telah didirikan Sahid Bintan *Tourism Institute* untuk pelatihan *hospitality* dan Politeknik Bintan Cakrawala sebagai pusat pendidikan sarjana di bidang *hospitality management* dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

- diploma di bidang *travel management* dan *culinary art*. Pengembangan institusi pendidikan tinggi tersebut perlu terus didukung sebagai *Centre for Tourism Education* di Bintan. Pengembangan kurikulum pendidikan harus selaras dengan kebutuhan pariwisata serta ASEAN *Common Competency Standard for Tourism Professionals* (ACCSTP).
- b. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan mandiri atau Balai Diklat Pariwisata (BDP) yang dapat melibatkan masyarakat lokal, pelaku UMKM maupun pelaku usaha pariwisata. Pengembangan BDP maupun BLK berfokus di bidang pariwisata harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan investasi pariwisata dengan melibatkan peran kementerian yang membidangi urusan pariwisata, kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan kementerian yang membidangi urusan ekonomi kreatif untuk menetapkan standar dan melakukan kerja sama dengan institut lokal.
 - c. Pengembangan sistem vokasi kepariwisataan *3 in 1* yakni memastikan tersedianya (1) pelatihan berbasis kompetensi, (2) sertifikasi kompetensi hingga, (3) penempatan kerja ke Objek Daerah Tujuan Wisata. Proses sertifikasi kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi, sementara penempatan kerja menyesuaikan kebutuhan industri dan pariwisata dengan memastikan adanya jaminan penempatan kerja bagi lulusan diklat maupun perjanjian atau kesepakatan BLK, BDP atau Institusi Pendidikan dengan Perusahaan Industri dan Kepariwisata.

III.2.7 Rencana Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kota yang memiliki arahan penataan ruang diprioritaskan untuk pertahanan dan keamanan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi. Kawasan perbatasan negara di laut wilayah Kabupaten Bintan terdiri atas 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, Tanjung Uban sebagai pusat pelayanan pintu gerbang di Bintan.

Rencana pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Bintan, pada tahap awal akan dilakukan sinkronisasi kebijakan pertahanan dan keamanan dengan kebijakan tata ruang yang berkaitan dengan pengaturan Kabupaten Bintan dengan kebijakan terkait Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) untuk menjaga stabilitas konflik antarkepentingan dan kebijakan sehingga perencanaan, pembangunan/pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan menjadi lebih optimal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Setelah adanya sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan, salah satunya adalah pengaturan kawasan perbatasan negara pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Kabupaten Bintan, meliputi; Tanjung Sading (Pulau Bintan); Pulau Malangberdaun; Pulau Berakit di Kecamatan Telok Sebong; dan Pulau Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir.

Dukungan pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana pendukung wilayah pertahanan dan keamanan negara dilakukan sesuai program yang bersifat regulasi maupun operasional. Pengembangan pelabuhan yang dikembangkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, meliputi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yaitu Pos Angkatan Laut (Posal) Lagoi dan Posal Berakit, serta Pos Pengamatan (Posmat) Mapor dan Posal Kawal di Bintan. Selain itu, pengembangan pertahanan dan keamanan di Kawasan Bintan juga perlu diperkuat dengan pembentukan Gudmulap, Korem dan Relokasi Koarmada I di Tanjungpinang.

Dalam rangka peningkatan perencanaan lebih lanjut dilakukan penelitian dan pengembangan atau penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbaru untuk menjaga kedaulatan negara, seperti pengembangan pada sistem Komando-Kontrol-Komunikasi-Komputer-Intelijen-Pengawasan dan Pengintaian (*Command-Control-Communications-Computers-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance/C4ISR*), dan pengembangan teknologi lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

III.3 Kawasan Karimun

III.3.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Karimun

Untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Karimun dan sekitarnya dikembangkan dengan bisnis unggulan Industri Maritim, Industri Penampungan Minyak, Industri Teknologi Pertanian, Industri Perikanan, dan Pariwisata.

III.3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Rencana pengembangan kawasan prioritas di Karimun dibagi dalam beberapa klaster wilayah pengembangan yang akan dikembangkan. Kabupaten Karimun ditargetkan memiliki sektor unggulan pertambangan dan penggalian, Konstruksi, dan dorongan pengeluaran pemerintah (jasa administrasi pemerintahan). Dengan adanya sektor basis yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan mempercepat pengembangan kawasan Karimun.

Tabel 3.1 Kuadran Sektor Basis dan Non-Basis Kawasan Karimun

	Sektor Non-Basis	Sektor Basis
High Growth	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan Listrik dan Gas• Jasa Keuangan dan Asuransi	<ul style="list-style-type: none">• Pertambangan dan Penggalian• Konstruksi• Administrasi Pemerintahan• Jasa Pendidikan
Low Growth	<ul style="list-style-type: none">• Industri Pengolahan• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang• Transportasi dan Pergudangan• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum• Informasi dan Komunikasi• Jasa Perusahaan• Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan• Perdagangan• Real Estat• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

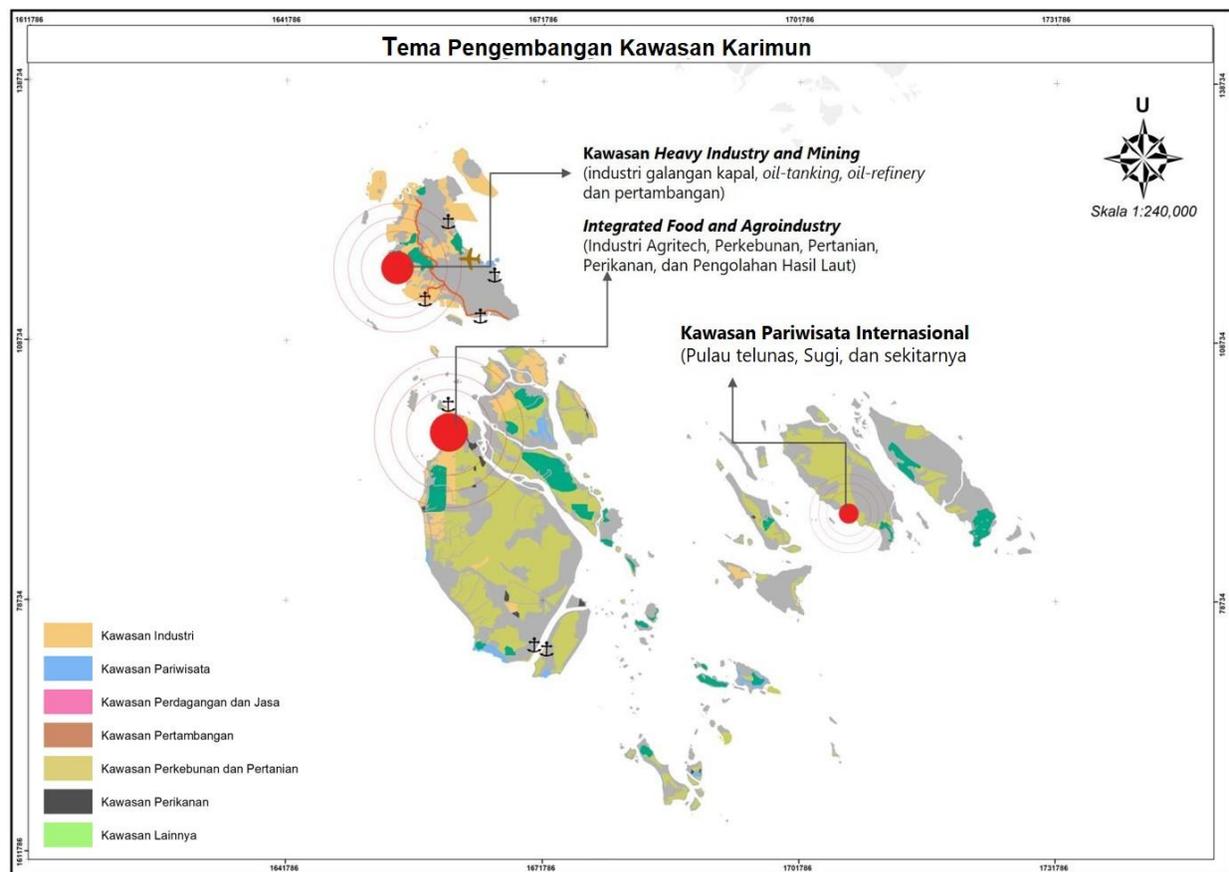


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Pengembangan kawasan industri maritim yang dikembangkan di Pulau Karimun Besar difokuskan pada industri berat yaitu galangan kapal dan penampungan minyak. Sementara wilayah Pulau Kundur dan Pulau Moro dikembangkan sebagai Kawasan Industri Pertanian dan Makanan yang Terintegrasi yang terdiri dari industri teknologi pertanian, perkebunan, pertanian, perikanan, serta pengolahan hasil laut. Wilayah Pulau Telunas, Pulau Sugi dan kepulauan di sekitarnya dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional.

Gambar 3.1 Tema Pengembangan Kawasan Karimun



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Setelah dilakukan identifikasi potensi pengembangan kawasan dan bisnis unggulan Kawasan Karimun, pengembangan bisnis unggulan di Kawasan Karimun dibagi menjadi 3 tahap pengembangan yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta ditargetkan setiap tahap akan selesai dalam jangka waktu setiap 5 tahun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Gambar 3.2 Rencana Pengembangan Bisnis Unggulan Kawasan Karimun



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Untuk mewujudkan strategi pengembangan industri di Karimun, ditargetkan arah pengembangan di setiap wilayah, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2 Arah Pengembangan Setiap Wilayah di Kawasan Karimun

No	Wilayah	Arah Pengembangan
1	Pulau Karimun	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Galangan Kapal • Industri Penampungan Minyak • Wisata Budaya
2	Pulau Kundur	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pertanian • Industri Teknologi Pertanian
3	Pulau Moro dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perikanan • Industri Pengolahan Hasil laut
4	Pulau Sugi dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pariwisata Pantai dan Resort

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

A. Rencana Pengembangan Industri

1. Industri Galangan Kapal

Kawasan Karimun saat ini telah berkembang menjadi pusat industri galangan kapal di Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena faktor lokasi yang berupa kepulauan dan berada dekat dengan Singapura serta Samudera Hindia dan Selat Malaka. Industri Galangan Kapal di Pulau Karimun terletak di bagian pantai bagian barat Pulau Karimun.

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan galangan kapal termasuk perusahaan fabrikasi struktur lepas pantai, fabrikasi bahan, mesin dan peralatan kapal, serta perusahaan jasa desain, teknik, survei, inspeksi dan konsultasi kemaritiman. Sebanyak 43% (empat puluh tiga persen) dari total



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

perusahaan galangan kapal tersebut berada di Kepulauan Riau. Galangan kapal yang dimaksud adalah perusahaan berfokus pada layanan *docking*, pembuatan kapal baru, perbaikan kapal, perawatan kapal, dan penggantian kapal.

Namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pengembangan industri galangan kapal di Karimun, di antaranya:

1. Industri galangan kapal masih sangat bergantung pada komponen kapal impor seperti mesin, baling-baling, peralatan navigasi dan lainnya yang saat ini mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari biaya produksi.
2. Teknologi Industri Galangan kapal yang belum mumpuni menjadi hambatan dalam pengembangan industri galangan kapal modern.
3. Pendaan yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan industri galangan kapal.

Aktivitas bisnis industri galangan kapal yang terdapat di Kawasan Karimun terdiri dari aktivitas produksi, perakitan, pemasaran dan penjualan, serta layanan purna jual. Selain rantai nilai dan proses bisnis industri galangan kapal, strategi pentahapan industri menjadi perhatian dalam pengembangan industri galangan kapal. Pentahapan industri galangan kapal terbagi dalam 2 tahap yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Gambar 3.3 Rencana Pengembangan Industri Galangan Kapal



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

2. Industri Penampungan Minyak

Penampungan Minyak menjadi hal yang paling penting dalam rantai pasok minyak di dunia. Penampungan minyak menjadi jantung dalam perdagangan minyak dan gas di antar wilayah dan antara negara. Di sisi lain, industri pendukung migas juga berkembang pesat di Pulau Karimun. Industri pendukung migas terbagi atas dua yaitu industri bersifat standar (jaringan perpipaan, peralatan eksplorasi minyak, fabrikasi rig minyak, jaket lepas pantai *pipeline* dan bersifat teknologi tinggi yang banyak dibutuhkan dalam anjungan migas laut dalam. Baik investor asing maupun lokal memiliki minat yang besar untuk membangun fasilitas penyimpanan dan pengilangan di Karimun.

Saat ini masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam industri penampungan minyak, salah satunya adalah penggunaan energi baru dan terbarukan. Hal ini mengakibatkan penurunan penggunaan energi fosil termasuk minyak yang berdampak pada tidak diperlukannya pembangunan tempat penyimpanan minyak yang masif.

Pengembangan penampungan minyak sangat didukung oleh adanya kapasitas penyimpanan yang baik dan dapat menyuplai minyak yang dibutuhkan pasar. Produk yang dihasilkan penampungan minyak adalah sebagai berikut:

- 1) Nafta
- 2) Rafinasi
- 3) Minyak Tanah
- 4) Komponen Campuran
- 5) Minyak Gas
- 6) Bahan Bakar Minyak
- 7) Kondensat Gas
- 8) Bahan Bakar Jet
- 9) Minyak Mentah

Gambar 3.4 Rencana Pengembangan Industri Penampungan Minyak



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Pengembangan industri penampungan minyak di Kawasan Karimun dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahapan jangka pendek akan dilakukan penyusunan dasar kebijakan dan perizinan serta pembangunan infrastruktur pendukung industri penampungan minyak. Hingga di jangka menengah ke akhir akan dilakukan kemitraan global strategis untuk lebih memperkuat posisi industri penampungan minyak.

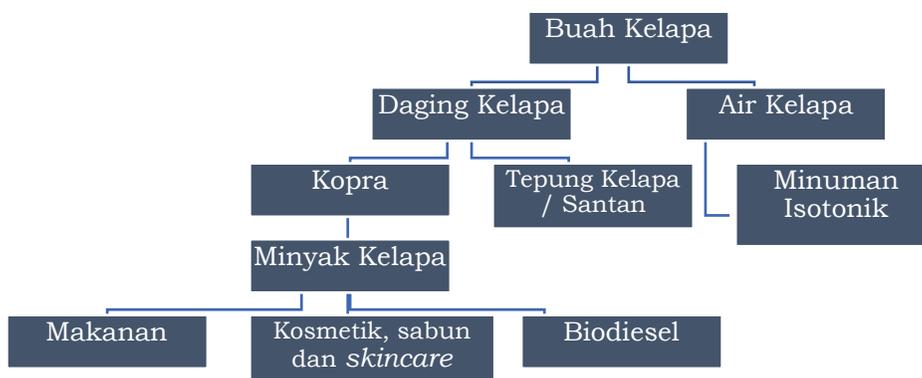
3. Industri Teknologi Pertanian

Untuk mendukung pengembangan industri teknologi pertanian di Kawasan BBK maka ditargetkan pada Kawasan Karimun sebagai pusat pengembangan industri teknologi pertanian yang berlokasi di Pulau Kundur. Pemilihan lokasi di Pulau Kundur ini karena potensi pertanian yang berada di pulau ini sangat tinggi. Potensi luasan lahan sebesar ±20.008 hektare (±54% dari total luasan Pulau Kundur) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kegiatan pertanian dan industri teknologi pertanian.

Untuk mengembangkan industri teknologi pertanian di Pulau Kundur diperlukan adanya strategi rantai pasok untuk setiap jenis industri yang dikembangkan. Penerapan konsep manajemen rantai pasok dalam industri pertanian tidak berbeda dengan sektor manufaktur pada umumnya. Pencirian khusus dari industri pertanian yakni besar, musiman, dan mudah rusak memberi pengaruh yang sangat berarti dalam pembangunan dan pengembangan berbagai konsep manajemen rantai pasok. Kunci keberhasilan dari rantai pasok industri pertanian adalah bahan baku. Industri pertanian membutuhkan pasokan bahan baku yang bermutu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tetapi dihadapkan pada kondisi musiman dan mudah rusak.

Industri pengolahan kelapa di Pulau Kundur sangat potensial untuk dikembangkan karena produksi buah kelapa di pulau ini menempati posisi ke-3 dari total produksi sektor perkebunan. Kelapa memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan untuk berbagai produk turunan dalam rantai pasoknya.

Gambar 3.5 Rantai Pasok Pohon Kelapa



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

Industri potensial lainnya untuk dikembangkan di pulau ini adalah pengolahan tanaman sagu. Hal ini dikarenakan produksi sagu di Karimun menempati posisi kedua dalam total produksi perkebunan. Terdapat banyak industri yang berasal dari sagu yang dapat dikembangkan.

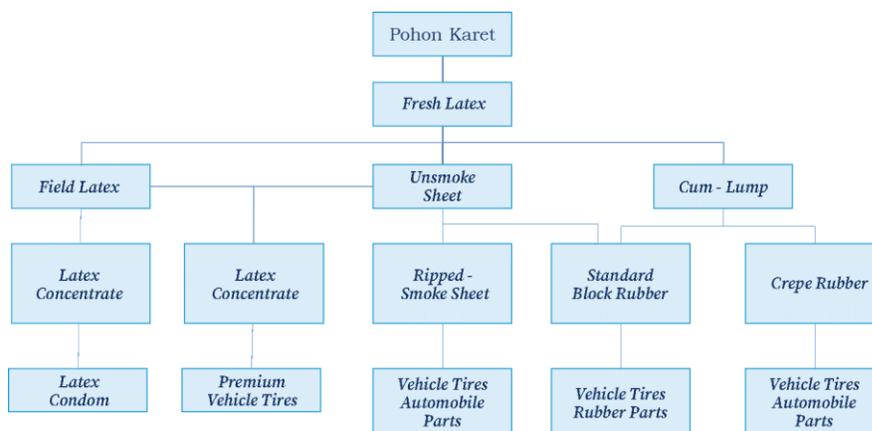
Gambar 3.6 Rantai Pasok Pohon Sagu



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Berdasarkan hasil perkebunan Karimun, komoditas yang paling unggul dikembangkan adalah pohon karet. Pohon karet sangat mendukung pengembangan teknologi pertanian di Pulau Kundur karena akan menghasilkan diversifikasi produk dan menjadi salah satu komponen bahan baku bagi industri lainnya.

Gambar 3.7 Rantai Pasok Pohon Karet



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

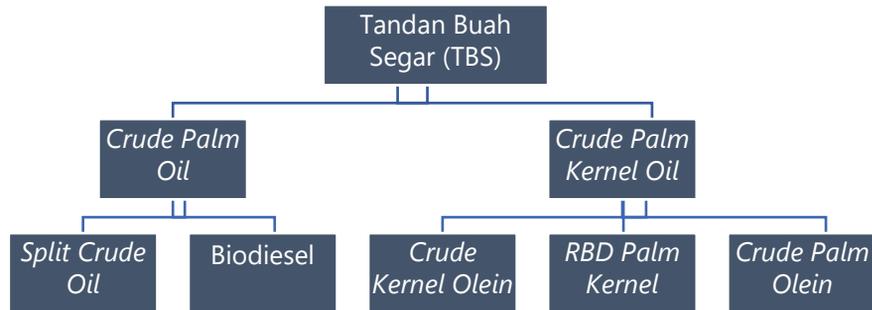
Selain potensi perkebunan yang diproduksi di Pulau Kundur, terdapat potensi pengembangan industri teknologi pertanian dengan memakai bahan baku yang berasal dari daratan Sumatera, seperti kelapa sawit yang memiliki rantai pasok yang beragam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

Gambar 3.8 Rantai Pasok Kelapa Sawit



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Gambar 3.9 Strategi Pentahapan Industri Teknologi Pertanian



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Pengembangan industri teknologi pertanian di Kabupaten Karimun dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan yang pertama adalah melakukan penyusunan dasar kebijakan dan perizinan serta pembangunan infrastruktur pendukung industri. Adapun rencana pengembangan pertanian dan industri pertanian di Kawasan Karimun ini akan dilakukan pada jangka menengah ke jangka panjang. Hingga di jangka menengah ke jangka panjang akan dilakukan kerja sama strategis global untuk lebih memperkuat posisi industri pertanian.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

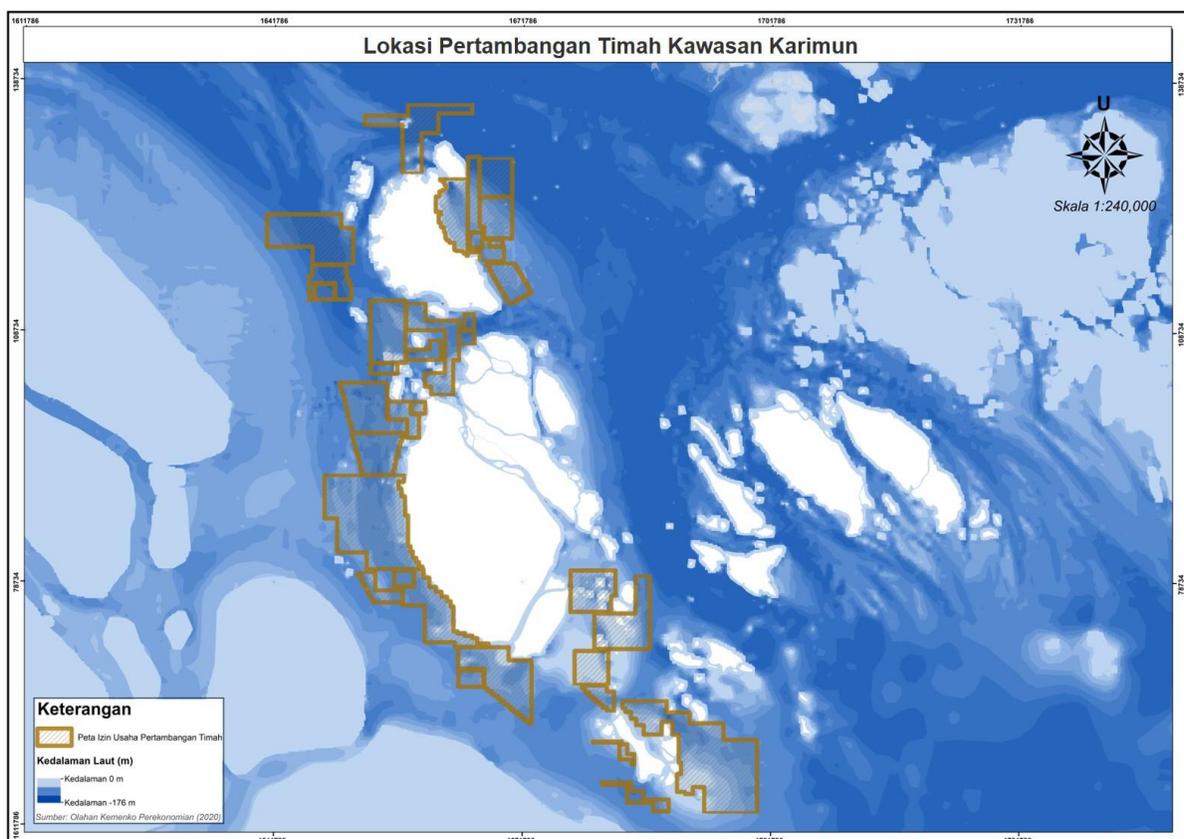
4. Industri Lainnya

Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan di Wilayah Karimun di atas, di wilayah ini juga terdapat beberapa kegiatan industri lainnya yang dinilai mempunyai potensi untuk dikembangkan, seperti industri berat dan industri pertambangan. Industri pertambangan berupa pertambangan Timah dan Bauksit, serta pertambangan galian C yang terdiri dari tambang granit dan tambang pasir alam.

1) Pertambangan Timah dan Bauksit

Pulau Karimun dan Pulau Kundur merupakan pulau yang memiliki beragam bahan galian antara lain timah, bauksit, granit, dan pasir yang telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan tambang. Kegiatan penambangan timah darat pernah dilakukan di daerah Kabupaten Karimun yaitu di Pulau Karimun dan Pulau Kundur sekitar tahun 1970-an sampai awal tahun 1990-an.

Gambar 3.10 Lokasi Pertambangan Timah Kawasan Karimun



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Gambar 3.11 Bagan Proses Penambangan Timah



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Hasil produksi bijih timah dari kapal keruk diproses di instalasi pencucian untuk mendapatkan kadar minimal 30% (tiga puluh persen) Sn dan diangkut dengan kapal tongkang untuk dibawa ke Pusat Pengolahan Bijih Timah (PPBT) untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya selain bijih timah dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai persyaratan peleburan yaitu minimal 70% (tujuh puluh persen) sampai 72% (tujuh puluh dua persen) Sn.

2) Pertambangan Galian Tipe C

Batu Granit beberapa dekade terakhir (sejak tahun 70-an) menjadi bahan galian yang ditambang di Pulau Karimun oleh beberapa perusahaan tambang. Batu granit dapat digunakan sebagai agregat, pemecah ombak di tepi pantai, abrasi, bahan cor beton dan masa dasar pembuatan jalan.

B. Kawasan Pariwisata

Kawasan Karimun memiliki sejumlah obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan tingkat pemanfaatan dan pola pengelolaannya.

Potensi Pariwisata Karimun didukung oleh kondisi geografis yang dapat dijadikan tujuan utama sebagai tujuan wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Karimun adalah obyek wisata alam, wisata sejarah, dan agrowisata yang tersebar di beberapa wilayah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, laju kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisman sebanyak 100.782 kunjungan, hingga pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Karimun meningkat sebanyak 112.753 kunjungan dalam setahun, atau sekitar 308 kunjungan per hari. Peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu potensi dalam pengembangan wisatawan di Pulau Karimun.

Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Karimun adalah kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata serta transportasi. Saat ini akses menuju pusat pariwisata di Kawasan Karimun masih sangat terbatas. Selain itu pengembangan pariwisata di Kawasan Karimun terdapat tiga tantangan utama yaitu:

1. Dependensi kunjungan wisman yang masih terpusat dari Singapura dan Malaysia;
2. Pengembangan pariwisata di Karimun berjalan secara individual dan tidak terintegrasi;
3. Tantangan pengembangan SDM dan Infrastruktur Pariwisata.

Untuk mewujudkan prinsip dasar dan prasyarat pengembangan pariwisata di Kawasan Karimun dikembangkan beberapa wisata dengan dua tema besar utama yaitu pariwisata pantai dan wisata budaya. Wisata pantai berada di sekitar Pulau Sugi, Pulau Moro, dan sekitarnya, sementara wisata budaya berada di Pulau Karimun Besar. Wisata budaya yang dikembangkan adalah perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa.

C. Kawasan Perikanan

Kawasan BBK memiliki letak yang strategis tidak hanya dari sudut pandang geostrategis di mana terletak pada jalur perlintasan dunia akan tetapi berada pada wilayah perairan yang kaya akan biodiversitas. Data menunjukkan bahwa potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 849.984 ton/tahun yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa Kabupaten Karimun penyumbang kontribusi kedua terbesar setelah Kabupaten Natuna di tahun 2018 untuk produksi perikanan tangkap dan menjadi penyumbang terbesar di tahun 2019 sebesar 61.174 ton.

Pada sektor perikanan budidaya, Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan terutama budidaya perikanan laut (marikultur). Dari potensi luasan perairan dan laut Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai ± 455.779 hektare sebesar 12,6% berada di Kawasan Karimun dan sekitarnya, di mana sebesar ± 10.211 hektare dapat dikembangkan untuk marikultur pesisir dan seluas ± 47.232 hektare dapat dikembangkan untuk marikultur lepas pantai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kawasan Karimun tergolong masih rendah. Oleh karena itu, dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK salah satu bisnis unggulan yang dikembangkan di Kawasan Karimun adalah Industri Perikanan. Adapun wilayah yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan Industri Perikanan di Kawasan Karimun adalah Pulau Moro.

Untuk mengoptimalkan potensi perikanan akan dilakukan beberapa strategi yakni sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyimpanan bersuhu rendah, dan pabrik es;
2. Penyediaan armada atau kapal penangkap ikan;
3. Pengembangan industri hilir perikanan (pengolahan ikan);
4. Penyediaan benih dan pakan untuk perikanan budidaya; dan
5. Pembentukan kelompok usaha bersama/koperasi nelayan.

D. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Kawasan Ekonomi dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kawasan ekonomi ditargetkan dapat mendorong percepatan perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah.

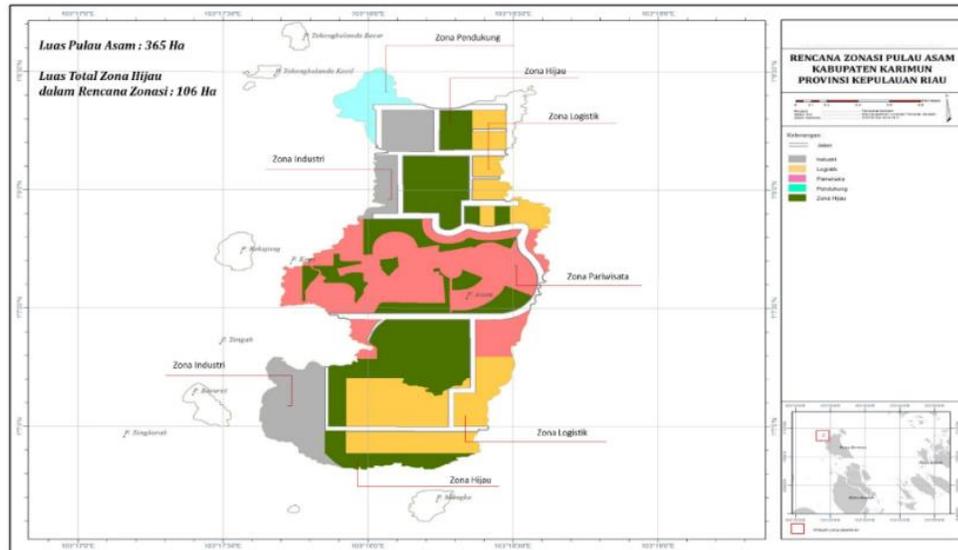
Salah satu kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kawasan Karimun ialah Kawasan Pulau Asam. Kawasan Pulau Asam memiliki luas ± 365 hektare yang dapat dikembangkan menjadi 3 zona utama, yaitu zona industri, zona logistik dan zona pariwisata. Selain memiliki zona yang akan dikembangkan, terdapat pula zona hijau seluas ± 106 hektare yang terdapat di dalam rencana pengembangan kawasan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

Gambar 3.12 Strategi Pentahapan Industri Teknologi Pertanian



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, 2020

Dalam pengembangan Kawasan Pulau Asam masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, salah satunya adalah terkait alokasi ruang Pulau Asam yang masih berstatus sebagai Kawasan Hutan.

Pengembangan Kawasan Pulau Asam akan difokuskan pada pengembangan industri galangan kapal, industri penampungan minyak serta industri fabrikasi. Rencana penggunaan lahan dari masing-masing industri terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Rencana Pengembangan Kawasan Pulau Asam

No	Sub Sektor Industri	Okupasi Lahan (hektare)
1	Kawasan Hutan	106.83
2	Areal Industri Galangan Kapal	30.00
3	Areal Industri Fabrikasi	52.00
4	Areal Industri Penampungan Minyak	61.30
5	Areal Kawasan Industri	93.15
6	Pembangunan area lahan campuran	22.00
Total Areal		365.28

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

III.3.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik

Rencana penguatan konektivitas dan sistem logistik di Karimun dilakukan secara bertahap. Tahap pengembangan dibagi menjadi tiga tahapan sebagaimana berikut:

- a. Jangka Pendek, pada tahapan ini dilakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan mempertimbangkan konektivitas serta fungsi dan spesifikasinya
- b. Jangka Menengah, pada tahapan ini dilakukan pengintegrasian antara simpul logistik dan konektivitas dengan bisnis unggulan
- c. Jangka Panjang, tahapan ini merupakan tahap stabilitasi sistem manajemen logistik dan pelayanan skala global di Karimun

Penguatan konektivitas dan sistem logistik dilakukan dengan mengintegrasikan transportasi darat, laut dan udara, antara lain pengembangan pelabuhan kargo dan penumpang, pengembangan transportasi laut, pengembangan jaringan jalan serta bandar udara.

A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo dan Penumpang

Aktivitas logistik di Kawasan Karimun meliputi Simpul Transportasi yang diarahkan pada Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Maqom serta basis pasokan diarahkan di Pelabuhan Parit Rempak dan Malarko. Adapun kegiatan aktivitas bisnis logistik sebagaimana tampak pada Tabel 3.21 berikut

Tabel 3.4 Aktivitas Bisnis Logistik di Pelabuhan Wilayah Karimun

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Penumpang	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
1	Tanjung Balai	Dom	V	-	V	-	-	
		Int	V	-	V	-	-	
2	Parit Rempak	Dom	-	-	V	V	V	Energi, <i>Oleochemical</i> , Kimia, Galangan Kapal
		Int	-	-	V	V	V	
3	Malarko	Dom	-	-	V	V	V	Energi, <i>Oleochemical</i> , Kimia, Galangan Kapal
		Int	-	-	V	V	V	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

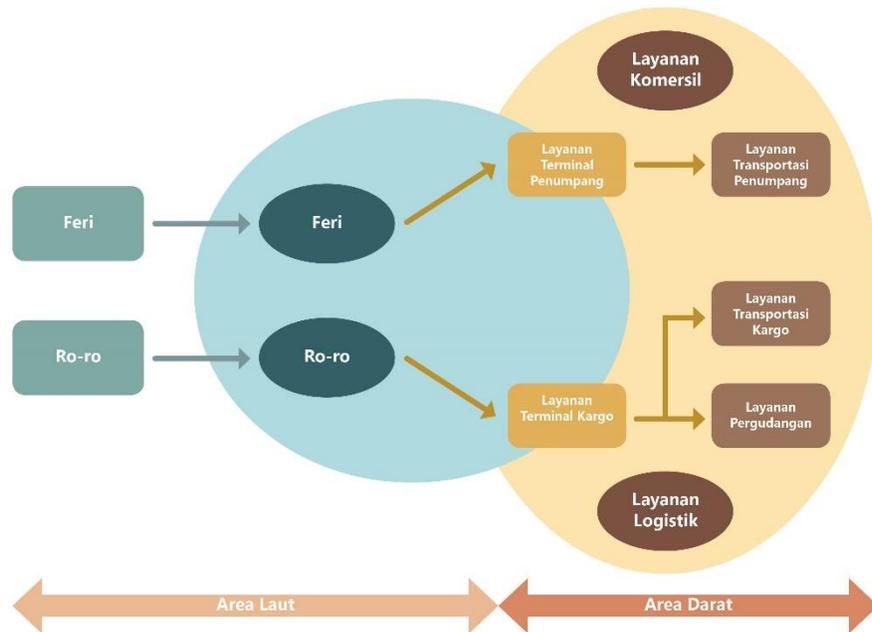
- 152 -

No	Pelabuhan	Skala Pelayanan	Penumpang	Kontainer	Kargo Umum	Cairan Khusus	Muatan Curah	Industri
4	Tanjung Maqom	Dom	V	-	V	-	-	Pengolahan Makanan, Agro
		Int	V	-	V	-	-	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Aktivitas bisnis simpel transportasi di Kawasan Karimun diarahkan di Pelabuhan Tanjung Balai dan Tanjung Maqom. Rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai dan Tanjung Maqom diarahkan menjadi simpel transportasi untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata baik untuk domestik maupun internasional. Berikut skema pengembangan simpel transportasi di Kawasan Karimun.

Gambar 3.13 Skema Model Bisnis Simpul Transportasi Karimun



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



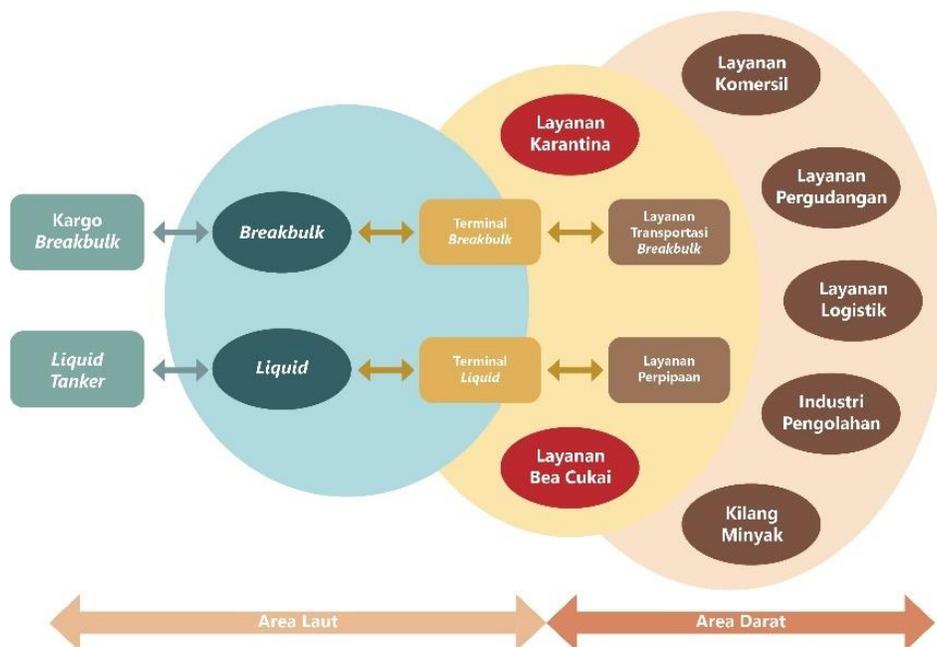
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

Selain pengembangan simpul transportasi, sistem logistik di Kawasan Karimun diarahkan untuk menunjang aktivitas perdagangan internasional yang didukung dengan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumber daya alam potensial. Adapun Pelabuhan yang diarahkan sebagai basis pemasok logistik internasional tersebut adalah Pelabuhan Parit Rempak dan Tanjung Maqom yang pengembangannya dilakukan pada tahap jangka menengah – panjang (2025-2045), serta Pelabuhan Malarko yang merupakan pelabuhan baru yang direncanakan akan diselesaikan pembangunannya pada tahap jangka pendek (2023-2025).

Adapun model pengembangan dan aktivitas bisnis dari pelabuhan basis pemasok logistik internasional tersebut adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14 Basis Pemasok Logistik di Pelabuhan Parit Rempak dan Malarko



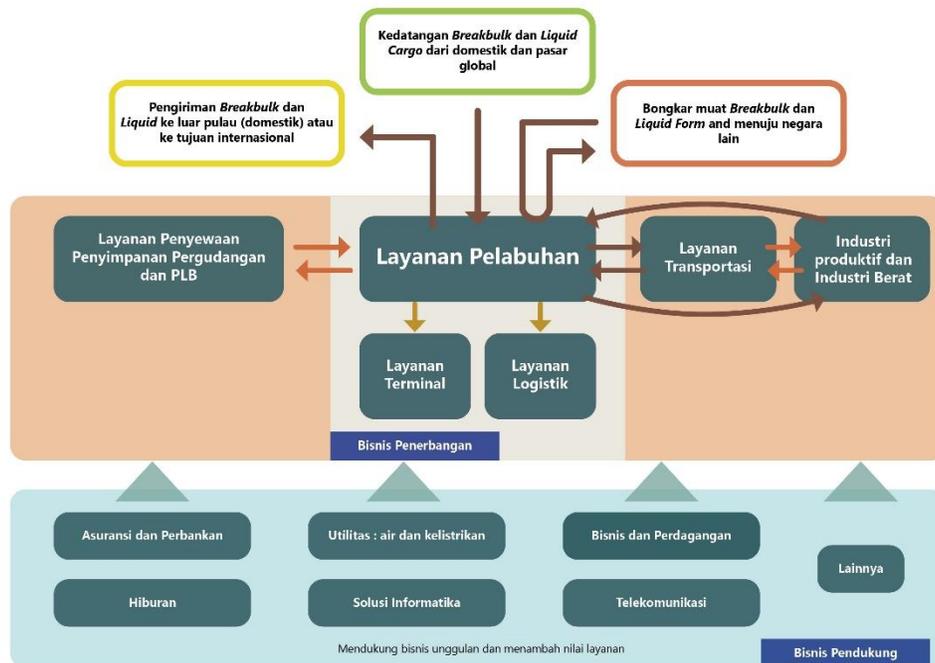
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Gambar 3.15 Aliran Barang di Pelabuhan Parit Rempak dan Malarko



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan Antar Pulau

Berdasarkan kondisi geografis Kawasan BBK, kawasan ini merupakan kawasan yang berbentuk kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau. Hal ini menjadikan transportasi laut sebagai penopang utama dari pergerakan orang serta barang dan jasa. Adapun pelabuhan utama yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut dan penyeberangan antarpulau di Kawasan Karimun dan sekitarnya meliputi:

1. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
2. Pelabuhan Parit Rempak;
3. Pelabuhan Tebing/Tanjung Penaga; dan
4. Pelabuhan Tanjung Maqom.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

C. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Pengembangan sistem jaringan jalan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan serta kawasan perdesaan. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dibangun dalam sistem hierarki.

Rencana pengembangan infrastruktur jalan di Kawasan Karimun untuk mendukung pengembangan bisnis unggulan diarahkan pada kegiatan pembangunan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten/kota, dan akses antar pusat-pusat kegiatan serta akses wilayah perkotaan dan perdesaan. Adapun pengembangan sistem jaringan jalan di Kawasan Karimun dan sekitarnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kawasan Karimun dan sekitarnya

No	Ruas Jalan
Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1)	
1	Jalan Tanjung Balai – Meral
2	Jalan Meral – Parit Rempak
3	Jalan Parit Rempak – Pelabuhan Ro-ro
4	Jalan Parit Rempak – Parit Benut
5	Jalan Parit Benut – Simpang Jeletung
6	Jalan Simpang Jeletung – Pasir Panjang
Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2)	
1	Jalan Nusantara – Setiabudi
2	Jalan Sp. Tugu Stadion – Malarko
3	Jalan Tg. Balai – Sei Bati
4	Jalan Sp. Sei Bati – Sp. Tugu Stadion - Jeletung
5	Jalan Pesisir Pantai Karimun
6	Jalan Sei Asam – Sebele – Penarah - Lebu
7	Jalan Sp. Perayun – Sp. Kempas – Pel. Tg. Berlian
8	Jalan Sp. Pelabuhan Tg. Berlian – Sp. Urung
9	Jalan Parit Tegak
10	Jalan Sei Buluh – Batu Limau – Alai
11	Jalan Sei. Buluh – Sp. Urung – Sp. Sawang – Sawang – Sp. Perayun – Tg. Maqom



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

No	Ruas Jalan
Jalan Kolektor Primer 3	
1	Jaringan Jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun – PPK Tebing – Bandara Raja Haji Abdullah

D. Rencana Pengembangan Bandar Udara

Transportasi udara merupakan alternatif sarana transportasi yang dapat mendukung pergerakan orang serta barang dan jasa. Saat ini transportasi udara di Kawasan Karimun dilayani dengan adanya Bandara Raja Haji Abdullah yang terletak di Kecamatan Tebing. Bandara Raja Haji Abdullah merupakan bandara pengumpan yang cakupan pelayanannya bersifat lokal. Bandara Raja Haji Abdullah memiliki panjang landas pacu 1600 meter dengan lebar 30 meter, dengan pesawat terbesar yang dapat dilayani tipe ATR72. Untuk ke depannya Bandara Raja Haji Abdullah akan ditingkatkan menjadi Bandara Domestik dengan panjang landas pacu 2.200 meter yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan jangka menengah (2026-2030).

Selain hal tersebut turut diperlukan arahan pengembangan transportasi udara pada Kawasan Karimun yaitu:

1. Peningkatan kelengkapan fasilitas umum yang menunjang operasional bandar udara;
2. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan pelayanan angkutan dari dan ke bandar udara; dan
3. Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 3.16 Bandara Raja Haji Abdullah



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

III.3.4 Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kampung Tua

Rencana pengembangan kawasan permukiman minimum akan dikembangkan secara bertahap, pada tahun 2023–2027 seluas ± 1.152 hektare, pada tahun 2028–2032 seluas ± 1.319 hektare, pada tahun 2033–2037 seluas ± 1.495 hektare, pada tahun 2038–2042 seluas ± 1.679 hektare, dan pada tahun 2043–2047 seluas ± 1.874 hektare. Sedangkan kebutuhan permukiman maksimum pada tahun 2023–2032 Kawasan Karimun dapat menambah pemukiman sebesar ± 9.162 hektare di area Pulau Kundur, Pulau Buru, Pulau Papan, Pulau Combol, dan Kepulauan Sanglar Besar. Untuk tahun 2033–2047 Kawasan Karimun menambah area pemukiman sebesar ± 9.853 hektare di area Pulau Sugi dan Pulau Sugi Bawah.

B. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Rencana Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Kebutuhan Prasarana dan Sarana

No	Jenis PSU	2027	2032	2037	2042	2047
1	Sarana Peribadatan					
a	Masjid	119	136	154	172	192
b	Musala	1,150	1,313	1,490	1,675	1,866
c	Gereja	6	7	7	8	9
d	Vihara	12	13	15	17	20
2	Sarana Pendidikan					
a	TK/ RA	233	266	303	339	378
b	SD/ MI	185	212	237	266	296
c	SMP/ MTs	65	75	82	94	103
d	SMA/ MA	65	75	82	94	103
e	SMK	65	75	82	94	103
3	Sarana Kesehatan					
a	Apotek	16	16	19	20	22
b	Puskesmas	12	12	12	12	12
c	Puskesmas Pembantu	16	16	19	20	22
d	Rumah Sakit	2	2	2	2	2



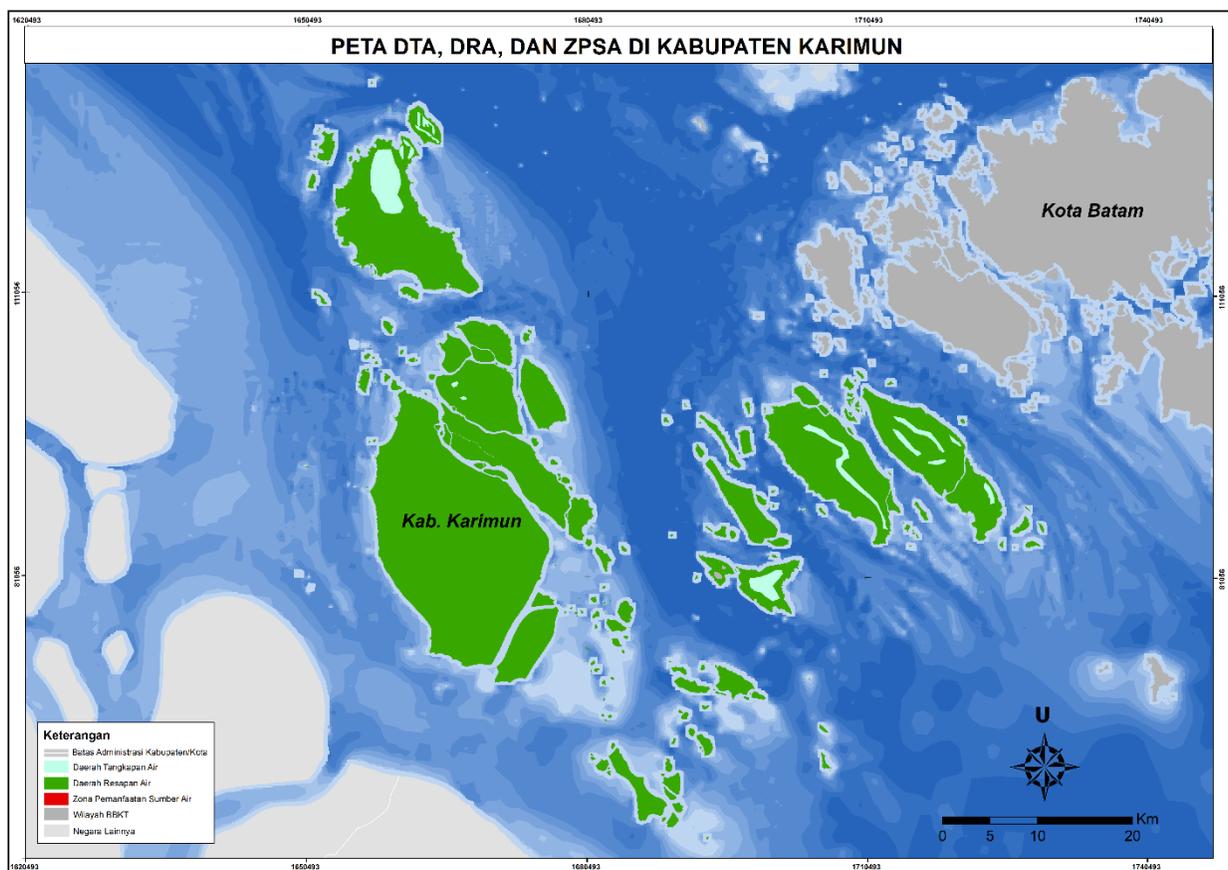
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

C. Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Tangkapan Air

Penentuan Daerah Rehabilitasi Air (DRA) dilakukan dengan melihat arahan ruang pada wilayah yang secara geofisik mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga menjadi lokasi pengisian cadangan air tanah. Rehabilitasi DRA diarahkan pada *catchment area* dari waduk maupun embung khususnya pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Penentuan Daerah Tangkapan Air (DTA) dilakukan dengan arahan ruang pada wilayah yang mampu menampung dan menyimpan air hujan untuk dapat mengalirkannya melalui aliran permukaan menuju tampungan air waduk/embung. Rehabilitasi DTA berfokus pada penataan kawasan melalui penerapan zonasi di sekitar waduk/embung.

Gambar 3.17 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Kawasan Karimun



Sumber: Sumber: Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

D. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Air

Dalam perencanaan Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada daerah-daerah yang berpotensi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Sistem sumber daya air nantinya akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penyediaan air bersih. Sehingga rencana pengembangan difokuskan pada lokasi dengan potensi sistem jaringan sumber daya air. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

1. Konservasi sumber daya air;
2. Pengelolaan kualitas air/pendayagunaan sumber daya air;
3. Pengembangan Danau/Waduk; dan
4. Pengembangan sistem jaringan irigasi.

Pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Karimun dilaksanakan dengan pembangunan tampungan-tampungan air baku dan pemanfaatan kolong-kolong eks tambang yang sudah ada, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh waduk eksisting dan waduk yang telah selesai dibangun. Pembangunan tampungan air guna pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Karimun, yaitu:

Tabel 3.7 Pembangunan Tampungan Air Kawasan Karimun

Tampungan Air	Kapasitas (liter/detik)
2023-2024	
Kolong Sei Bati, Dang Merdu, Kodim	60
Embung Gemuruh	21
Embung Sidomoro	10
Danau Sentani	150
Embung Pasir Ranjang	10
Embung Sanglang	42
Air Terjun Hitam	23
Embung Tebing	10
Embung Sungai Kundur	32
Embung Pulau Papan	17
Embung Pulau Parit	7
Embung Sawang	18



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

Tampungan Air	Kapasitas (liter/detik)
Embung Sungai Darussalam	115
Bendung Kundur	20
Embung Lapangan dan PAH (155 Embung/PAH)	162
2025–2029	
Bendung Kundur (Peningkatan)	10
Kolong Prayon	28
Embung Sungai Selangat	32
Embung Sungai Layang	11
Kolong Pongkar	20
Embung Pulau Asam	20
Embung Pulau Belat	40
Embung Paya Manggis	80
Embung Lapangan dan PAH (155 Embung/PAH)	200
2030–2034	
Bendung Kundur (Peningkatan)	10
Embung Pulau Ungar	20
Embung Pulau Karimun	20
Embung Pulau Buru	20
Embung Pulau Moro	5
Embung Lapangan dan PAH (155 Embung/PAH)	110
2035–2039	
Embung Pulau Sebele	5
Embung Lapangan dan PAH (155 Embung/PAH)	180

Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kepulauan Riau, 2019



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

E. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan total air bersih per hari adalah sebesar ± 154.088 liter/detik. Sehingga perlu strategi pemenuhan kebutuhan air bersih pada Kabupaten Karimun. Ada beberapa rencana yang dapat dilakukan dalam pemenuhan air bersih, di antaranya dengan pembangunan jaringan perpipaan yang terintegrasi, pembangunan instalasi pengolahan air bersih di beberapa titik, serta integrasi unit jaringan distribusi.

F. Rencana Pengelolaan Limbah Cair

Hasil proyeksi sanitasi di Kabupaten Karimun terdapat peningkatan timbulan limbah cair pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah timbulan limbah cair tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk Kabupaten Karimun. Proyeksi pembuangan limbah cair hingga akhir tahun 2047 berjumlah sebesar $\pm 48,825,000$ liter/hari dengan total buangan $\pm 97,650,000$ liter/hari.

G. Rencana Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan

Pengolahan persampahan di Kabupaten Karimun diarahkan pada pengolahan sampah dengan konsep Pengelolaan Sampah Terpadu menuju *zero waste*. Konsep ini merupakan kombinasi dari berbagai teknologi pengolahan sampah, antara lain teknologi pengkomposan, teknologi daur ulang sampah non-organik, teknologi pembakaran (*incinerator*), teknologi *sanitary landfill* yang sehat dan dapat di guna ulang (dapat dipakai secara terus menerus) teknologi pemanfaatan sisa pembakaran. Arahkan rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan metode *sanitary landfill* yaitu berada di TPA Sememal di Kecamatan Meral Barat. Sedangkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) diarahkan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun.

H. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Jaringan drainase yang terdapat di wilayah perencanaan berupa saluran primer (sungai dan anak sungai) arah aliran menuju laut; saluran sekunder berfungsi sebagai saluran pengumpul dengan arah aliran menuju saluran primer (sungai); dan saluran tersier berfungsi mengalirkan air dari rumah penduduk dengan arah aliran menuju saluran sekunder dan saluran primer. Rencana kegiatan perawatan saluran drainase di Kabupaten Karimun adalah optimalisasi jaringan sungai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

Limpasan air buangan rumah tangga hingga tahun 2047 yaitu sebesar $\pm 48.825.000$ liter/hari, limpasan air buangan sosial sebesar $\pm 41.850.000$ liter/hari dan limpasan air buangan komersial sebesar $\pm 41.850.000$ liter/hari.

Pengendalian bahaya yang diakibatkan oleh air dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase primer;
2. pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan;
3. membatasi kegiatan fisik dan/atau nonfisik pada hulu dan hilir wilayah sungai;
4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air; dan
5. pengembangan sistem pengamanan pantai berupa pengurangan laju sedimen sejajar pantai.

Jalur evakuasi bencana, meliputi Ruas Jalan Teluk Air – Jalan Lubuk Semut, Ruas Jalan Sungai Ayam – Jalan Kantor Camat Tebing, Ruas Jalan Tebing – Jalan Pamak, Ruas Jalan Sei. Bati – Jalan Jelutung, Ruas Jalan Sememal – Jalan Jelutung - Jalan Kantor Camat Meral Barat, Ruas Jalan Sungai Raya – Jalan Parit Rampak, Ruas Jalan Pongkar – Jalan Kantor Desa, Ruas Jalan Pulau Parit, Ruas Jalan Desa Tulang, Ruas Jalan Pulau Buru, Ruas Jalan Tanjung Batu Kecil, Ruas Jalan Sungai Asam – Penarah – Lebu, Ruas Jalan Perayun – Jalan Sawang, Ruas Jalan Urung – Jalan Kantor Camat, Ruas Jalan Sungai Ungar – Jalan Tanjung Batu, Ruas Jalan Desa Durai, Ruas Jalan Pulau Sanglar, Ruas Jalan Pelabuhan Moro, Ruas Jalan Keban – Jalan Desa Sugie, dan Ruas Jalan Pulau Combol. Selain jalur evakuasi, akan dikembangkan juga ruang evakuasi bencana, meliputi sarana prasarana umum berupa lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung perkantoran, dan rumah ibadah yang berada di seluruh kecamatan.

Selain strategi di atas, berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kepulauan Riau terdapat beberapa target penanggulangan banjir dan penanggulangan abrasi:

1. Penanggulangan abrasi Pantai
 - 2018–2023 = 4,66 km
 - 2024–2028 = 23,78 km
 - 2029–2033 = 0 km
 - 2033–2038 = 6,18 km



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

2. Penanggulangan banjir pada 5 lokasi

2018–2023 = 400 km

2024–2028 = 200 km

2029–2033 = 0 km

I. Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Energi

Berikut adalah kebutuhan daya listrik Kawasan Karimun pada tahun 2047.

Tabel 3.8 Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2047

No	Jenis Penggunaan Lahan	Daya dan Konsumsi Listrik	Besar Energi Tahun 2047 (KWH/900m ²)		
			Minimal	Rata-rata	Maksimal
1	Zona Permukiman	Daya Listrik	89,912,812	1,159,503,606	7,307,199,974
2		Konsumsi Listrik	11,083,926	256,519,451	2,912,877,280
3	Zona Industri	Daya Listrik	130,996,547	8,039,003,650	44,808,174,125
4		Konsumsi Listrik	7,127,251	650,047,741	6,348,099,332
TOTAL			239,120,537	10,105,074,449	61,376,350,712

J. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi

Berikut rencana pengembangan sistem telekomunikasi Kawasan Karimun.

Tabel 3.9 Kebutuhan Stasiun Telepon Otomatis dan Agen Pelayanan Gangguan Telepon

Tahun	2023	2027	2032	2037	2042	2047
Jumlah Penduduk Non Migrasi (jiwa)	234.417	278.985	319.425	362.102	406.692	453.915
Jumlah Penduduk Migrasi (jiwa)	5.860	6.975	7.986	9.052	10.167	11.348
Total (jiwa)	240.277	285.960	327.411	371.154	416.859	465.263
SNI 03-1733-2004 (per/jiwa)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah Proyeksi Kebutuhan	2	2	3	3	3	4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

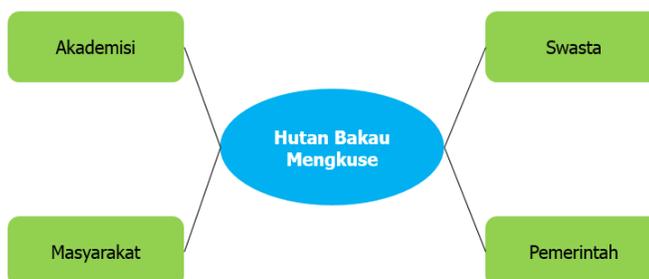
Tabel 3.10 Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi untuk Kawasan Industri

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Ruang Industri (Ha)	Kapasitas (40 SST/Ha)
2023–2032	4.365,41	174.616,61
2033–2047	3.783,17	151.327,07

K. Konservasi Hutan, Mangrove, Pesisir, Perairan, dan Laut

Konservasi dilakukan dengan Konsep *Quadruple Helix Collaboration*. Konsep *Quadruple Helix Collaboration* memberikan kontribusi terhadap proses inovasi di industri, universitas, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan empat sektor tersebut akan terjadi interaksi satu sama lain untuk mempercepat transfer inovasi. Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pemerintah, universitas, dan pelaku industri yang berinteraksi satu sama lain secara cerdas, efektif, dan efisien merupakan hal terpenting dalam konsep *Quadruple Helix Collaboration*.

Gambar 3.18 Konsep *Quadruple Helix Collaboration*



L. Konservasi Perairan dan Laut

Potensi pengembangan kawasan perairan dan laut di Kabupaten Karimun tentu berperan dalam menjaga biodiversitas di tengah tekanan eksploitasi wilayah perairan dan laut yang tengah mencapai angka kritis. Dalam hal ini tentunya diperlukan kajian khusus lingkungan hidup strategis untuk menjaga ekosistem perairan dan laut. Diperlukan peran aktif dari pihak terkait seperti Badan Pengusahaan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah dalam menjaga kawasan perairan.

Terdapat tiga aspek yang dapat dikembangkan melalui strategi dan program kegiatan di dalam kawasan konservasi perairan antara lain terlampir pada Tabel di bawah ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

Tabel 3.11 Strategi dan Program Kegiatan dalam Kawasan Konservasi Perairan

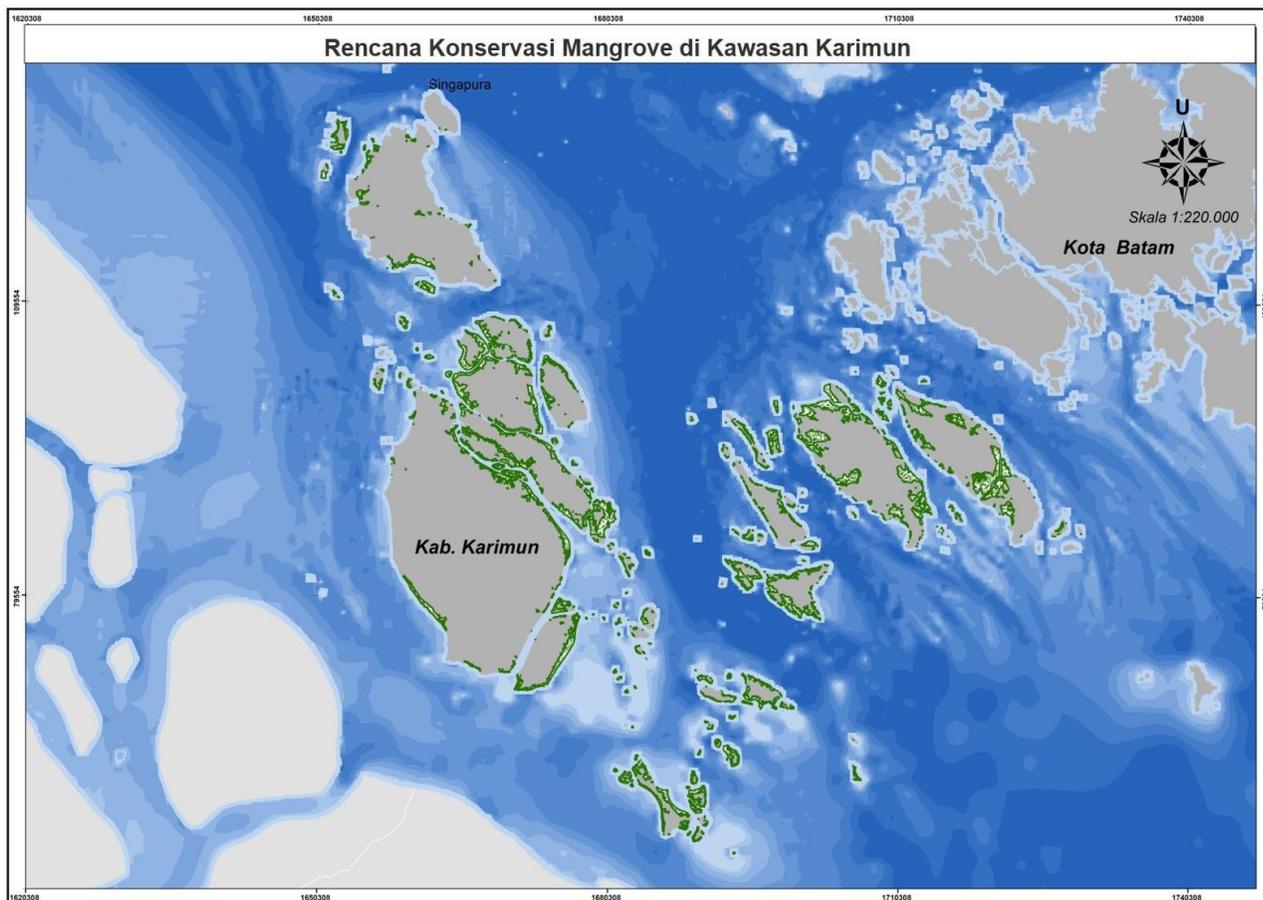
Aspek	Strategi dan Program Kegiatan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);• Penatakelolaan Kelembagaan;• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur;• Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan;• Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat;• Pengembangan Kemitraan;• Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi;• Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan• Monitoring dan Evaluasi.
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan;• Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan;• Penelitian dan Pengembangan;• Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;• Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;• Pengawasan dan Pengendalian; dan• Monitoring dan Evaluasi.
Sosial – Ekonomi – Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat;• Pemberdayaan Masyarakat;• Pelestarian Adat dan Budaya; dan• Monitoring dan Evaluasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

Gambar 3.19 Rencana Konservasi Mangrove di Kawasan Karimun



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, 2022

III.3.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan

Kabupaten Karimun yang belum terlalu terlihat pola pengembangan kawasannya perlu mempunyai arahan pengembangan. Untuk itu, tipologi urban desain dan konsep kawasan *heritage* ini memvisualisasikan prinsip-prinsip universal dengan mempertimbangkan fungsi, karakter, dan isu kawasan. Selain itu, prinsip penataan ruang publik seperti koridor ruang jalan juga divisualisasikan.

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kampung Tua

Rencana pengembangan Kawasan Permukiman di Karimun diarahkan untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti jalur sirkulasi, ruang komunitas, IPAL komunal dan tengaran.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

B. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa

Dengan tujuan pembangunan Kawasan Karimun yang diarahkan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri penampungan minyak, pemurnian minyak, industri teknologi pertanian, pengolahan hasil laut dan pariwisata, perlu didukung oleh adanya kawasan pusat perdagangan dan jasa yang tipologinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Beberapa prinsip desain yang diarahkan adalah:

1. Menjadi pusat kegiatan yang mencerminkan citra pembangunan modern yang mendukung arah pengembangan pusat industri maritim;
2. Mempunyai fungsi kawasan campuran sebagai penerjemahan dari prinsip *compact city*, yang merupakan strategi pembangunan berkelanjutan; dan
3. Mempunyai garis langit dan bentuk bangunan yang sesuai konsep kawasan.

C. Kawasan Warisan Budaya Kota Tanjung Balai

Kawasan warisan budaya yang ada di Kabupaten Karimun salah satunya adalah Kota Tanjung Balai. Untuk pengembangan Kawasan warisan budaya, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengembangannya di antaranya adalah a) Tata karakter bangunan/lingkungan; b) Tata penanda identitas bangunan; dan c) *Skyline* yang sesuai konsep kawasan.

D. Penataan Pelabuhan Penyeberangan

Penataan pelabuhan diarahkan agar terintegrasi dengan jalan dan jaringan konektivitas utama di Kabupaten Karimun, yaitu koneksi dengan jalur bus, jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) dan/atau *Light Rail Transit* (LRT) serta transportasi publik lainnya. Parkir komunal juga disediakan pada pelabuhan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

Gambar 3.20 Ilustrasi Arahana Penataan Pelabuhan Penyebrangan



E. Pengembangan Kawasan Pertanian dan Agroindustri di Pulau Kundur

Penataan kawasan pertanian dan agroindustri di Pulau Kundur dapat mengadopsi pengelompokan jenis tanaman sesuai dengan jenis tanaman dan warnanya (sistem *grid*). Pengelompokan tanaman dapat diatur sebagai miniatur untuk penataan Kawasan pertanian yang lebih luas. Selain itu kawasan pertanian perlu untuk dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi umum.

F. Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Perikanan Pulau Moro

Untuk Kawasan Pariwisata dan Perikanan Pulau Moro, rencana tata letak dan arah orientasi bangunan diarahkan untuk a) terintegrasi dengan kondisi geografi, lingkungan, visual dan fungsi bangunan yang ada (penataan kawasan yang berorientasi terhadap pantai); b) menghindari dominasi massa bangunan terhadap lingkungan dengan memperhatikan skala dan proporsi manusia; dan c) mengembangkan orientasi bangunan yang berpedoman pada konsep bangunan tradisional di Kabupaten Karimun dan Pulau Moro khususnya.

G. Penataan Ruang Jalan

Ruang jalan di Kabupaten Karimun yang masih lebar diarahkan untuk ditata agar mempunyai jalur hijau yang lebih lebar daripada jalur pejalan kakinya dan ditanami tanaman dengan banyak varietas. Sehingga karakter agrikultur di Kawasan Karimun dapat direpresentasikan melalui ruang jalan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Gambar 3.21 Ilustrasi Arahkan Penataan Ruang Jalan dengan Jalur Hijau yang Lebih Lebar dari Jalur Pejalan Kaki



Jalur Hijau bisa ditanami jenis tanaman produktif maupun tanaman hias. Meskipun kawasan tersebut belum padat penduduk, akan tetapi jalur hijau tersebut diarahkan untuk menjadi cadangan area hijau ketika Kawasan Karimun berkembang.

III.3.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK

Total penduduk usia kerja di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 165.892 orang dengan jumlah angkatan kerja sebesar 96.539 orang dan bukan angkatan kerja sebesar 69.533 orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 58,09 persen.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 5,46 persen. Berdasarkan sektor penyerapan tenaga kerja, maka sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (55,78 persen), yang disusul oleh sektor manufaktur (24,55 persen) dan sektor pertanian (19,67 persen).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pengembangan Kawasan Karimun dan sekitarnya diarahkan sebagian besar pada sektor industri di bidang *oil tanking*, industri kemaritiman, dan agroindustri. Maka untuk memaksimalkan penyerapan SDM yang ada di Kawasan Karimun dan sekitarnya diperlukan strategi peningkatan kualitas SDM. Adapun strategi penguatan SDM yang dapat dilakukan sebagaimana berikut.

1. Pengadaan sertifikasi dengan institusi/lembaga pelatihan sebagai fasilitator.
2. Penyediaan pendidikan sesuai standar kebutuhan industri.
3. Pembinaan institusi pendidikan industri sebagai fasilitator dalam pengembangan produk industri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

4. Penyesuaian sistem dan prosedur organisasi sebagai antisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal.

III.3.7 Rencana Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Kabupaten Karimun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi. Kawasan perbatasan negara di laut Kabupaten Karimun terdiri atas Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, fungsi yang ada di Kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai sebagai pusat pelayanan pintu gerbang.

Beberapa strategi dalam pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Karimun dan sekitarnya adalah sebagai berikut.

1. Mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP).
2. Penegasan dan penetapan batas wilayah negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Karimun yakni di Pulau Tokonghiu Kecil dan Pulau Karimun Anak.
3. Pengembangan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yaitu Lanal Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun, Posal Takong Hiyu dan Posal Leho di Kecamatan Tebing, Posmat Buru di Kecamatan Buru, Posal Moro, Posal Pulau Sugi di Kecamatan Moro, pembentukan Subdenzibang di Karimun, dan pembentukan Korem di Karimun.
4. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak Pemerintah dengan daerah serta *stakeholder* yang terkait wilayah pertahanan dan keamanan.
5. Pengembangan penelitian dan pengembangan atau penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbaru untuk menjaga kedaulatan negara, seperti pengembangan pada sistem *Command-Control-Communication-Computer-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance*, dan pengembangan teknologi lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

**BAB IV
PROGRAM/PROYEK PRIORITAS KAWASAN BBK**

Berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, BP Bintan, dan BP Karimun serta, terdapat 180 Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK yang terdiri atas 83 Program/Proyek di Kawasan Batam, 34 Program/Proyek di Kawasan Bintan, 30 Program/Proyek di Karimun, 22 Program/Proyek di Tanjungpinang, dan 11 Program/Proyek Prioritas dengan cakupan antar Kawasan BBK. Dalam pelaksanaan, Program/Proyek tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

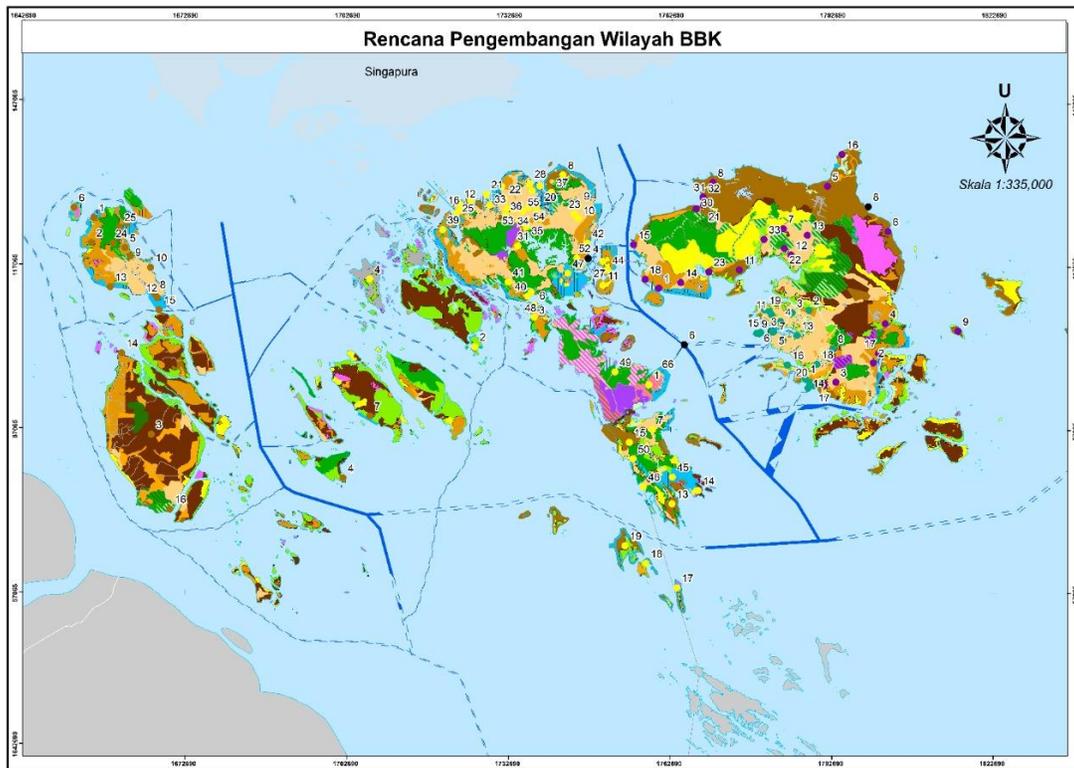
Program/Proyek Prioritas yang akan dikembangkan di Kawasan BBK tersebut telah diintegrasikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah maupun rencana tata ruang laut. Namun, apabila terdapat lokasi Program/Proyek tersebut masih berada dalam kawasan hutan, maka terlebih dahulu harus dilakukan proses perubahan fungsi, penggunaan kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula terhadap Program/Proyek yang akan memanfaatkan ruang di wilayah perairan/laut dan/atau kebutuhan reklamasi, maka harus dilakukan proses perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di laut dan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan reklamasi melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Rencana Pengembangan Kawasan BBK dapat dilihat pada Gambar 4.1.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Adapun Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK pada Kawasan Batam, Kawasan Bintan, Kawasan Karimun, dan Kawasan Tanjungpinang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Batam

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan								Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031-2047
1	Pengembangan Kawasan Pulau Rempang	APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau (Prov), APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Pemprov Kepulauan Riau (Pemprov), Pemkot Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan/atau Swasta
2	Pengembangan Kawasan Industri Pulau Ladi	Swasta										Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
3	Pengembangan Kawasan Industri Pulau Setokok	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam dan/atau Swasta
4	Pengembangan Kawasan Pulau Kepala Jeri	Swasta											Swasta
5	Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Piayu	Swasta											Swasta
6	Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3 Pulau Nipah, Bulang	Swasta											Swasta
7	Pengembangan Kawasan Maritim City Pulau Galang	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam dan/atau Swasta
8	KEK Nongsa	Swasta											Swasta
9	KEK Batam Aero Technic	Swasta											Swasta
10	Pengembangan Kawasan Aerocity Hang Nadim	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
11	Pengembangan Kawasan Tanjung Sauh dan Ngenang	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Kementerian Perindustrian, Pemprov, Pemkot Batam dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
12	Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pinggir Sekupang	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkot Batam dan/atau Swasta
13	Pengembangan Pariwisata Maritim Pulau Galang Baru	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkot Batam dan/atau Swasta
14	Pengembangan Pariwisata <i>Theme Park</i> Galang Baru	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkot Batam dan/atau Swasta
15	Revitalisasi Situs Bersejarah <i>Ex-Camp</i> Vietnam di Pulau Galang	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkot Batam dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
16	Pengembangan Kawasan Jasa Kesehatan Sekupang	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
17	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Pengelap	Swasta											Swasta
18	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Ranoh	Swasta											Swasta
19	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Abang Besar	Swasta											Swasta
20	Pengembangan Kawasan CBD Teluk Tering Batam Center	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam, dan/atau Swasta
21	Pengembangan CBD Pantai Barat-Batam	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
22	Pembangunan Pasar Induk Jodoh	APBN dan/atau APBD Kota Batam											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan/atau Pemkot Batam
23	Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
24	Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar (Pelabuhan Utama)	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
25	Pengembangan Pelabuhan Penumpang Internasional Sekupang (Terminal Umum Bagian dari Pelabuhan Utama)	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
26	Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Kabil (Terminal Umum Bagian dari Pelabuhan Utama)	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2047		
27	Pengembangan Pelabuhan <i>Transshipment</i> Internasional Tanjung Sauh	APBN dan/atau Swasta											Kementerian Perhubungan dan/atau Swasta
28	Pembangunan Pelabuhan Bengkong	APBN, APBD Prov, dan/atau Swasta											Pemprov, BP Batam, dan/atau Swasta
29	Pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center <i>(Terminal Umum Bagian dari Pelabuhan Utama)</i>	APBN											BP Batam
30	Pembangunan <i>Tunnel Laut</i> Berdasarkan Rel dari Batam-Singapore	APBN dan/atau Swasta											Kementerian Perhubungan dan/atau Swasta
31	Pembangunan Jalan Tol Bandara Hang Nadim-Muka Kuning-Batu Ampar	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, Pemkot Batam, dan/atau Swasta
32	Pembangunan BRT, LRT dan/atau MRT Batam	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta											Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam dan/atau Swasta
33	Pembangunan Jalan <i>Outer Ring Road</i> Tanjung Pinggir-Jodoh	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
34	Pembangunan Jembatan Layang di Baloi	APBN											BP Batam
35	Pembangunan Jembatan <i>Fly Over</i> di Kabil	APBN dan/atau APBD Kota Batam											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BP Batam, dan/atau Pemkot Batam
36	Pembangunan Jembatan <i>Fly Over</i> Sei Ladi	APBN											BP Batam
37	Pembangunan <i>Ring Road</i> Batam Center-Nongsa	APBN											BP Batam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
38	Pengembangan Kapasitas Ruas Jalan Hang Jebat dan Hang Lekiu (Nongsa)	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau BP Batam
39	Pembangunan Jaringan Pipa Gas Natuna-Batam	APBN										Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
40	Pembangunan Suplai Energi Baru dan Terbarukan di Batam	APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), APBD Prov, APBD Kota Batam, dan/atau Swasta										Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam, dan/atau Swasta
41	Pengembangan Suplai Energi PLTGU Batam	APBN dan/atau Swasta										BP Batam dan/atau Swasta
42	Pengembangan Depo Minyak Kabil	APBN dan/atau Swasta										BP Batam dan/atau Swasta
43	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam dan/atau Swasta										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam, dan/atau Swasta
44	Pembangunan Rumah Baru	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam dan/atau Swasta										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, Pemkot Batam, BP Batam, dan/atau Swasta
45	Pembangunan Fasilitas Penyediaan Air Baku Sei Busung, Bintan-Batam	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, APBD Kab. Bintan, dan/atau Swasta										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, Pemkot Batam, Pemkab Bintan, BP Batam, BP Bintan, dan/atau Swasta
46	Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru	APBN dan/atau Swasta										BP Batam dan/atau Swasta
47	Pembangunan Fasilitas Penyediaan Air Baku Lingga-Batam	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, APBD Kab. Lingga, dan/atau Swasta										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemkot Batam, Pemkab Lingga, BP Batam, dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
48	Pembangunan <i>Closing Dam</i> Piayu	APBN dan/atau Swasta											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BP Batam, dan/atau Swasta
49	Pembangunan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) Bendungan Estuari Sei Tembesi	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
50	Pembangunan Pengelolaan Limbah Terpadu Batam	APBN											BP Batam
51	Pengolahan <i>Waste to Energy</i> Kabil	APBD Kota Batam dan/atau Swasta											Pemkot Batam dan/atau Swasta
52	Pembangunan <i>Utility Box</i>	APBN dan/atau Swasta											BP Batam dan/atau Swasta
53	Pengembangan <i>Sewerage System</i> Pulau Batam	APBN											BP Batam
54	Pembangunan Drainase Utama Batam	APBN											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau BP Batam
55	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Pulau Nipa	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
56	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Tolop	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
57	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Sambu	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
58	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Sengkuang (Radar IMSS)	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
59	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Telaga Punggur	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
60	Pusat Pelatihan Vokasi Industri dan Logistik Kabil	Swasta											Swasta
61	Pengembangan Balai Diklat Industri di Batam	APBN dan/atau Swasta											Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Batam, dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
62	Pengembangan Politeknik Negeri Batam	APBN dan/atau Swasta										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Swasta
63	Pengembangan Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional di Batam	APBN dan/atau Swasta										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Swasta
64	Pembangunan Industri Petrochemical di Pulau Rempang	Swasta										Swasta
65	Pembangunan Politeknik Bidang Perindustrian	APBN dan/atau Swasta										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Swasta
66	Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Piayu Tahap 2	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
67	Pembangunan Drainase Marina	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
68	Pembangunan Drainase Hilir Bengkong	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
69	Pembangunan Drainase Hilir Sei Tering	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
70	Pembangunan Drainase Ocarina	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71	Pembangunan Embung Tanjung Kertang Pulau Galang Baru	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
72	Pembangunan Embung Pulau Kasam	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
73	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas untuk Perumahan MBR	APBN										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
74	Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Galang	APBN dan/atau Swasta										BP Batam dan/atau Swasta
75	Pengembangan Fasilitas Energi dan Avtur di Kabil	APBN dan/atau Swasta										BP Batam dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

No.	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
76	Jalan Tol Simpang Kabil, Muka-Kuning-Galang Baru	APBN											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
77	Pembentukan Kodam Kepri-Babel di Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
78	Pembentukan Korem di Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
79	Pembentukan Kompi Yonif 136, Denpal, Benglap di Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
80	Pembentukan Subdenzibang di Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
81	Relokasi Lantamal IV Tanjung Pinang di Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
82	Pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kota Batam	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
83	Peningkatan Lanud Hang Nadim tipe C menjadi tipe B	APBN											Kementerian Pertahanan dan/atau TNI

Ket: Tahap Persiapan Tahap Kontruksi/Pelaksanaan

Tabel 4.2 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Bintan

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
1	Pengembangan Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) dan Pelabuhan Sri Udana	Swasta											Swasta
2	Pengembangan Industri di Kawasan Maritim Bintan Timur	APBN dan/atau Swasta											BP Bintan dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
3	Pengembangan Kawasan Bentan Eja Industrial Park	Swasta											Swasta
4	KEK Galang Batang	Swasta											Swasta
5	Pengembangan Kawasan Pariwisata Ekowisata Mangrove	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, dan/atau Swasta											Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov, Pemkab Bintan, BP Bintan, dan/atau Swasta
6	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Trikora	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan dan/atau Swasta											Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemkab Bintan, dan/atau Swasta
7	Pengembangan Kawasan Ekowisata Gunung Bintan	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, dan/atau Swasta											Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, KLHK, Pemprov, Pemkab Bintan, dan/atau Swasta
8	Pengembangan Kawasan Pariwisata Lagoi	Swasta											Swasta
9	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Mangkil dan Sekitarnya	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, dan/atau Swasta											Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemkab Bintan, dan/atau Swasta
10	Pengembangan Kawasan Indonesia Street City	Swasta											Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
11	Pengembangan Kawasan Penaga Bay	APBN dan/atau Swasta											BP Bintang dan/atau Swasta
12	Pembangunan Kawasan CBD Bandar Seri Bentan di Bintang	APBN, APBD Kab. Bintang, dan/atau Swasta											BP Bintang, Pemkab Bintang, dan/atau Swasta
13	Pembangunan Pusat Pemerintahan Bintang di Bandar Seri Bentan	APBN dan/atau APBD Kab. Bintang											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Pemkab Bintang
14	Pembangunan Bandara New Bintang International Airport dan Industri MRO Bintang Aerospace	Swasta											Swasta
15	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban Bulan Linggi (Pelabuhan Pengumpulan Regional)	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kab. Bintang											Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkab Bintang, dan/atau BP Bintang
16	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Berakit (Pelabuhan Pengumpul)	APBN											Kementerian Perhubungan
17	Pengembangan Pelabuhan Sei Kolak Kijang (Pelabuhan Pengumpul)	BUMN											PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
18	Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah (Pelabuhan Pengumpul)	APBN											Kementerian Perhubungan
19	Pembangunan Akses Jalan Bandara New Bintang International Airport	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kab. Bintang											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BP Bintang, Pemprov, dan/atau Pemkab Bintang
20	Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Logistik Domestik Teluk Sasah	APBN dan/atau APBD Prov											Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, dan/atau BP Bintang
21	Rute Transportasi Laut Bintang-Johor (via Bandar Bentan Telani)	APBN dan/atau Swasta											Kementerian Perhubungan dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
22	Pembangunan Suplai Energi Baru dan Terbarukan di Bintan	APBN, BUMN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, dan/atau Swasta										Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pemprov, Pemkab Bintan, dan/atau Swasta
23	Pembangunan Dam Estuari Sei Busung	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kab. Bintan										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, dan/atau Pemkab Bintan
24	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Lagoi	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
25	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Berakit	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
26	Pengembangan Pos Pengamatan (Posmat) Mapor	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
27	Pengembangan Pos Pengamatan (Posmat) Kawal	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
28	Pembangunan Pusat <i>Big Data Colocation Server</i> di Bintan	Swasta										Swasta
29	Pembangunan Balai Diklat Pariwisata di Bintan	APBN dan/atau Swasta										Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan/atau Swasta
30	Pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala	Swasta										Swasta
31	Pembangunan Fasilitas Pembudidayaan <i>Crustacea</i> Skala Besar	Swasta										Swasta
32	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Batu Duyung	APBN dan/atau APBD Prov										Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Pemprov
33	Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Bintan	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kab. Bintan										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, dan/atau Pemkab Bintan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
34	Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan sebagai Bagian dari Jaringan Perpipaan Bintan-Batam	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kab. Bintan										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, dan/atau Pemkab Bintan

Ket: Tahap Persiapan Tahap Kontruksi/Pelaksanaan

Tabel 4.3 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Tanjungpinang

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
1	Pengembangan Industri di Kawasan FTZ Dompok	APBN, APBD Kota Tanjungpinang, dan/atau Swasta										Pemkot Tanjungpinang, BP Tanjungpinang dan/atau Swasta
2	Pengembangan <i>Eco-Industrial Park</i> Air Raja di Tanjungpinang	APBD Kota Tanjungpinang dan/atau Swasta										Pemkot Tanjungpinang, dan/atau Swasta
3	Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Manuk	APBD Kota Tanjungpinang, dan/atau Swasta										Pemkot Tanjungpinang dan/atau Swasta
4	Revitalisasi Kawasan Kampung Bugis di Tanjungpinang	APBN dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Pemkot Tanjungpinang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan								Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031- 2047
5	Revitalisasi Kawasan Kota Lama di Tanjungpinang	APBN dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Pemkot Tanjungpinang
6	Revitalisasi Kawasan Pulau Penyengat di Tanjungpinang	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
7	Revitalisasi Kawasan Tionghoa Senggarang di Tanjungpinang	APBN dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
8	Pengembangan Kawasan Vihara dan Klenteng di Tanjungpinang	APBN dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan/atau Pemkot Tanjungpinang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
9	Penetapan Pulau Penyengat Sebagai UNESCO World Heritage Sites	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemprov, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
10	Pengembangan CBD Kawasan FTZ Senggarang	APBN dan/atau Swasta										BP Tanjungpinang dan/atau Swasta
11	Pengembangan Pelabuhan Sri Bintang Pura (Pelabuhan Pengumpul)	BUMN										PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
12	Pengembangan Pelabuhan Sri Payung Batu Anam	BUMN										PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
13	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moco (Pelabuhan Pengumpul)	APBN, APBD Prov, APBD Kota Tanjungpinang, dan/atau Swasta										Kementerian Perhubungan, BP Tanjungpinang, Pemprov, Pemkot Tanjungpinang, dan/atau Swasta
14	Revitalisasi Pelabuhan Penumpang Penyengat (Pelabuhan Pengumpulan Lokal)	APBN, APBD Prov, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Perhubungan, Pemprov, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
15	Pembangunan Jalan Lingkar antar FTZ di Tanjungpinang-Bintan	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, Pemkab Bintan, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
16	Pembangunan Estuari DAM Dompok	APBN dan/atau APBD Prov										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Pemprov
17	Pembangunan Center of Excellence (CoE) Human Resources Management di KPBPB Bintan Wilayah Tanjungpinang	APBN dan/atau Swasta										Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, BP Tanjungpinang, dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

NO	Program/Proyek Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
18	Pusat Pelatihan Vokasi sektor Industri, Logistik dan Pariwisata Kawasan BBK di KPBPB Bintang Wilayah Tanjungpinang	APBN, APBD Prov dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Pemprov, dan/atau Pemkot Tanjungpinang
19	Pengembangan Pelabuhan Pulau Dompok (Pelabuhan Pengumpan Regional)	APBD Prov										Pemprov
20	Pembentukan Gudmulap di Tanjung Pinang	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
21	Pembentukan Korem di Tanjung Pinang	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
22	Relokasi Koarmada I di Tanjung Pinang	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI

Ket: Tahap Persiapan Tahap Kontruksi/Pelaksanaan

Tabel 4.4 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Karimun

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
1	Pengembangan Industri Galangan Kapal di Karimun	Swasta										Swasta
2	Pengembangan Industri Oil Tanking, Refinery Oil, dan Industri Berat di Karimun	Swasta										Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047		
3	Pusat Agribisnis, Industri Agri-tech, dan Agrowisata di Pulau Kundur	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Karimun, dan/atau Swasta											Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Pemprov, Pemkab Karimun dan/atau Swasta
4	Pembangunan Industri Perikanan di Pulau Moro	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Karimun, dan/atau Swasta											Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Pemprov, Pemkab Karimun dan/atau Swasta
5	Pengembangan Industri Pertambangan Granit di Karimun	Swasta											Swasta
6	Pengembangan Kawasan Pulau Asam	Swasta											Swasta
7	Pengembangan Kawasan Pariwisata Telunas di Pulau Sugi dan Pulau Sugi Besar	Swasta											Swasta
8	Pengembangan Wisata Religi dan Budaya di Tanjung Balai Karimun	APBN dan/atau APBD Kab. Karimun											Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan/atau Pemkab Karimun
9	Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah	APBN											Kementerian Perhubungan
10	Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Tebing	Swasta											Swasta
11	Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik-Internasional Malarko (Pelabuhan Pengumpul)	APBN											Kementerian Perhubungan
12	Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik-Internasional Tanjung Balai (Pelabuhan Pengumpul)	BUMN											PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
13	Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Roro Parit Rempak (Pelabuhan Pengumpulan Lokal)	APBN, BUMD, dan/atau Swasta										Kementerian Perhubungan, BP Karimun, PT. Karya Karimun Mandiri, dan/atau Swasta
14	Pengembangan Pelabuhan Logistik dan Penumpang Tanjung Maqom	APBN, APBD Prov, BUMD, dan/atau Swasta										Kementerian Perhubungan, Pemprov, PT. Karya Karimun Mandiri, dan/atau Swasta
15	Pembangunan Jembatan Antar-Pulau di Karimun	APBD Kab. Karimun dan/atau Swasta										Pemkab Karimun dan/atau Swasta
16	Pembangunan Suplai Energi Baru dan Terbarukan di Karimun	APBN, BUMN, APBD Prov, APBD Kab. Karimun, dan/atau Swasta										Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pemprov, Pemkab Karimun, dan/atau Swasta
17	Pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
18	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Takong Hiyu	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
19	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Leho	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
20	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Moro	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
21	Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Pulau Sugi	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
22	Pengembangan Pos Pengamatan (Posmat) Buru	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
23	Pembangunan Politeknik Bidang Kemaritiman di Karimun	APBN, APBD Prov, dan/atau Swasta										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemprov, dan/atau Swasta
24	Pembangunan Jalan Sememal-Pongkar	APBN										BP Karimun
25	Pembangunan Fasilitas Penyediaan Air Baku di KPBPB Karimun	APBN dan/atau Swasta										BP Karimun dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
26	Pengembangan CBD Kawasan Industri BP Karimun	APBN dan/atau Swasta										BP Karimun dan/atau Swasta
27	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Pelawan dan Air Terjun Pongkar di Karimun	APBN, APBD Kab dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemkab Karimun, BP Karimun dan/atau Swasta
28	Pengembangan Kawasan Industri Desa Pelambung ke Pulau Karimun Anak	APBN dan/atau Swasta										BP Karimun dan/atau Swasta
29	Pembentukan Subdenzibang di Karimun	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI
30	Pembentukan Korem di Karimun	APBN										Kementerian Pertahanan dan/atau TNI

Ket: Tahap Persiapan Tahap Kontruksi/Pelaksanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Tabel 4.5 Program/Proyek Prioritas Dengan Cakupan Antar Kawasan Batam, Bintan, Karimun

NO	Program/Kegiatan	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan									Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2047	
1	Integrasi Pengembangan Koridor Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Bintan, APBD Kota Tanjungpinang, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemkab Bintan, Pemkot Tanjungpinang, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau Swasta
2	Integrasi Pengembangan Pariwisata, <i>Branding</i> , <i>E-Portal</i> , dan Sinkronisasi <i>Event</i> Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BBK	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, APBD Kab. Karimun, APBD Kab. Bintan, APBD Kota Tanjungpinang, dan/atau Swasta										Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemkot Batam, Pemkab Bintan, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, BP Karimun dan/atau Swasta
3	Pembangunan Jalan/Jembatan Batam-Bintan	APBN, APBD Prov, dan/atau Swasta										Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov, dan/atau Swasta
4	Penetapan Rute Tol Laut BBK	APBN dan/atau APBD Prov										Kementerian Perhubungan dan/atau Pemprov
5	Penyusunan Rencana Induk Pengintegrasian Pelabuhan di Batam - Bintan - Karimun - Tanjungpinang	APBN										BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau BP Karimun
6	Pengembangan Alur Pelayaran Internasional di Kawasan BBK	APBN										Kementerian Perhubungan, dan/atau Pushidrosal
7	Penyusunan Satu Data Logistik BBK (<i>BBK One Data Logistic</i>)	APBN										BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau BP Karimun
8	Pembangunan Jaringan Pipa Gas Network Natuna - Bintan- Tanjungpinang	APBN, BUMN, dan/atau Swasta										Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Swasta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 192 -

NO	Program/Kegiatan	Indikasi Pendanaan	Tahun Pelaksanaan								Penanggung Jawab	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031-2047
9	Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan BBK	APBN										BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau BP Karimun
10	Rehabilitasi dan Konservasi Resapan Air di Kawasan BBK	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, APBD Kab. Karimun, APBD Kab. Bintan, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov, Pemkot Batam, Pemkab Bintan, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau BP Karimun
11	Rehabilitasi dan Konservasi Area Mangrove di Kawasan BBK	APBN, APBD Prov, APBD Kota Batam, APBD Kab. Karimun, APBD Kab. Bintan, dan/atau APBD Kota Tanjungpinang										Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov, Pemkot Batam, Pemkab Bintan, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, BP Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan/atau BP Karimun

Ket: Tahap Persiapan Tahap Kontruksi/Pelaksanaan

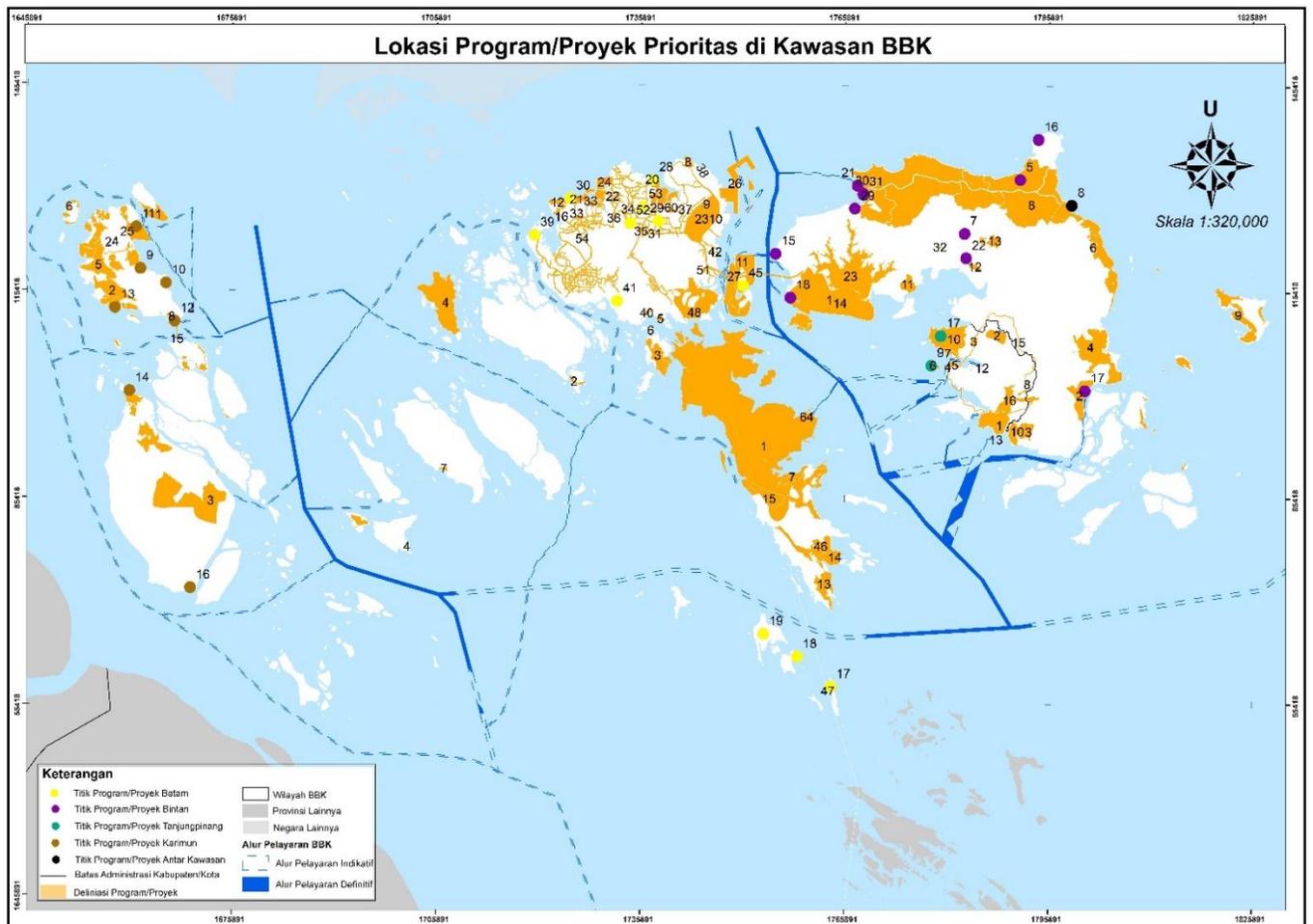
Lokasi Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK sebagaimana dijelaskan pada beberapa tabel di atas, dapat dilihat pada Gambar 4.2.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

Gambar 4.2 Lokasi Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan Kawasan BBK. Kriteria penentuan pengembangan Kawasan Strategis di Kawasan BBK:

1. Kesesuaian dengan visi pengembangan Kawasan BBK

Visi pengembangan Kawasan BBK adalah menjadikan Kawasan BBK sebagai hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan/jasa, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Oleh karena itu, penetapan Kawasan Strategis mendukung pencapaian visi pengembangan Kawasan BBK.

2. Kesesuaian dengan bisnis unggulan Kawasan BBK

Visi pengembangan Kawasan BBK diuraikan menjadi beberapa Bisnis Unggulan untuk masing-masing kawasan. Penetapan Kawasan Strategis ditujukan untuk mendukung pengembangan Bisnis Unggulan di masing-masing kawasan.

3. Memiliki potensi nilai investasi tinggi

Investasi tinggi menjadi salah satu kriteria penilaian yang penting dalam penentuan Kawasan Strategis karena dalam pengembangan Kawasan BBK, salah satu indikator ketercapaian adalah meningkatnya nilai investasi. Penetapan Kawasan Strategis mempertimbangkan lokasi program/proyek yang memiliki nilai investasi tinggi.

4. Memiliki potensi ekspor

Pertumbuhan nilai ekspor menjadi indikator dan target capaian dalam pengembangan Kawasan BBK. Pengembangan Kawasan Strategis dapat mendorong ketercapaian target nilai ekspor pada Kawasan BBK. Penentuan Kawasan Strategis didasarkan pada lokasi yang mendukung kegiatan dengan potensi komoditas ekspor tinggi.

5. Memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dan target capaian dalam pengembangan Kawasan BBK. Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara lokal dan regional di Kawasan BBK dan menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai dengan pengembangan Kawasan Strategis pada program/proyek yang memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan Kawasan BBK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

6. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keunggulan kawasan
Seperti halnya dengan peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi, daya saing kawasan menjadi salah satu indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan Kawasan Strategis.

Setelah dilakukan proses identifikasi Kawasan Strategis berdasarkan kriteria dan indikator diatas, berikut adalah daftar Kawasan Strategis pengembangan Kawasan BBK:

Tabel 5.1 Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan BBK

NO	KAWASAN STRATEGIS
Kota Batam	
1	Kawasan Digital, Kreatif, dan Pariwisata Nongsa
2	Kawasan Pariwisata Pesisir Nongsa
3	Kawasan Industri dan Simpul Logistik Terintegrasi Hang Nadim-Kabil
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa Marina Bay
5	Kawasan Pelabuhan Internasional Penumpang Bengkong
6	Kawasan Pusat Hub Logistik dan Pelabuhan Batu Ampar
7	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata Pantai Barat
8	Kawasan Industri, Jasa, dan Pariwisata Pulau Rempang
9	Kawasan Maritim Pulau Galang
10	Kawasan Jasa dan Pariwisata Pulau Galang Baru
11	Kawasan Pariwisata, Jasa, dan Industri Tanjung Uncang-Tanjung Gundap
12	Kawasan Industri, Permukiman, dan Pariwisata Piayu
13	Kawasan Industri, Jasa dan Pertahanan Keamanan Pulau Tonton, Pulau Nipah dan Pulau Setokok
14	Kawasan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Batam
15	Kawasan Pariwisata, Industri, dan Jasa Tanjung Riau-Batu Aji-Sagulung-Muka Kuning
16	Kawasan Industri Gugusan Pulau Janda Berhias
17	Kawasan Perdagangan dan Jasa Dam Baloi
Kabupaten Bintan	
18	Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi dan sekitarnya
19	Kawasan CBD dan Eko-Wisata Bandar Seri Bentan
20	Kawasan Pusat Industri Terintegrasi Lobam dan Pusat Logistik Teluk Sasah

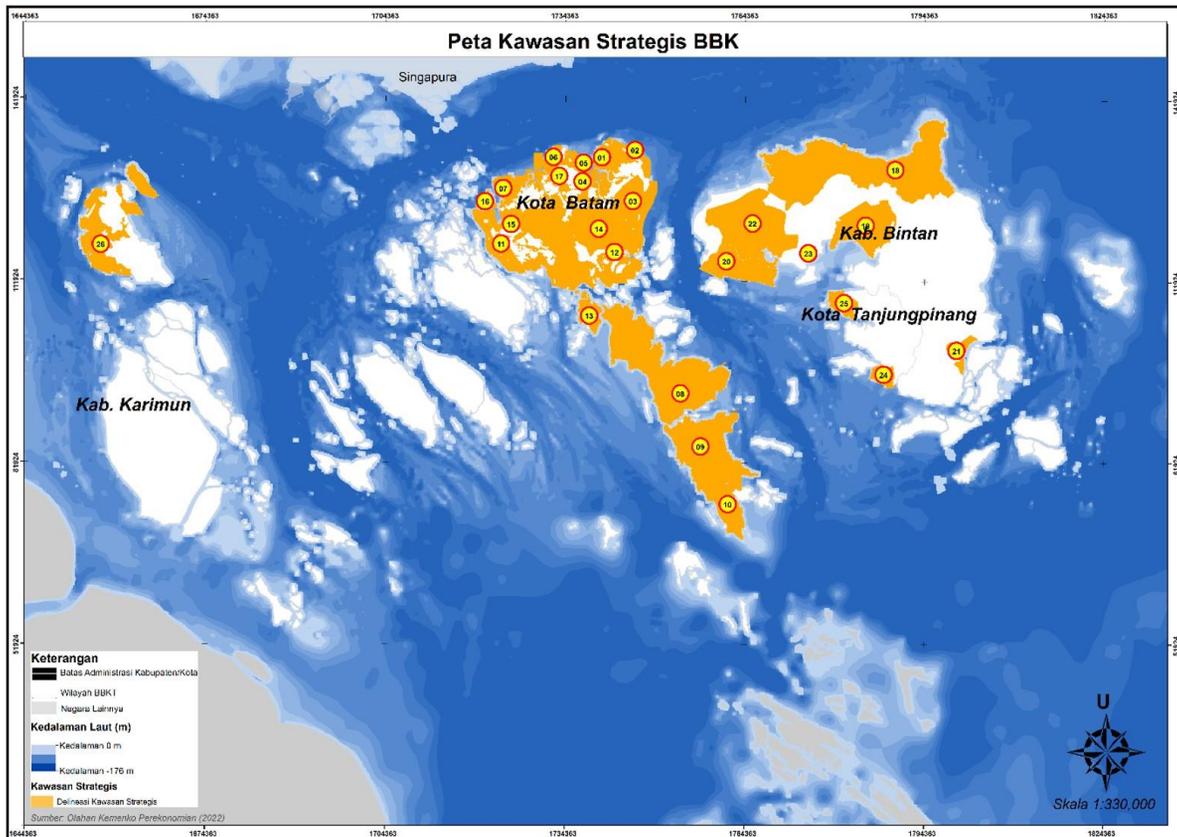


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 196 -

NO	KAWASAN STRATEGIS
21	Kawasan Industri Maritim Bintan Timur
22	Kawasan Konservasi Resapan Air sekitar Dam Sei Busung
23	Kawasan Pariwisata Penaga Bay
Kota Tanjungpinang	
24	Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa Dompok
25	Kawasan Pusat Zona Integrasi BBK Senggarang
Kawasan Karimun	
26	Kawasan Industri Maritim Karimun

Gambar 5.1 Kawasan Strategis Kawasan BBK



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

Dalam pengembangan Kawasan Strategis pada KPBPB BBK, maka disusun Rencana Rinci Pembangunan. Rencana Rinci Pembangunan adalah rencana pembangunan yang disusun pada Kawasan Strategis sebagai operasionalisasi Rencana Induk untuk menetapkan peruntukan ruang dan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan potensi dan kegiatan investasi yang diperlukan. Rencana Rinci Pembangunan berfungsi sebagai:

- a. pedoman pembangunan dan pengembangan investasi di Kawasan Strategis;
- b. pendetailan untuk operasionalisasi Rencana Induk;
- c. acuan Badan Pengusahaan dalam perolehan Hak Pengelolaan;
- d. acuan dalam alokasi ruang dan pemanfaatan lahan;
- e. bahan evaluasi pemanfaatan ruang dan lahan;
- f. acuan Badan Pengusahaan dalam menerbitkan penetapan alokasi lahan dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- g. panduan rancang bangun dan lingkungan.

Rencana Rinci Pembangunan disusun pada Kawasan Strategis yang berada pada delineasi KPBPB dan/atau wilayah perairan yang terintegrasi dengan delineasi KPBPB. Rencana Rinci Pembangunan menjadi acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis, mencakup wilayah darat dan wilayah perairan, dan dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN BBK**

Dewan KPBPB BBK yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kawasan BBK dengan tujuan agar tahap pelaksanaan pengembangan Kawasan BBK dapat berjalan secara optimal. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan, kebijakan, program, ataupun kegiatan serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam tahapan implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja di dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja Badan Pengusahaan di KPBPB dan pemangku kepentingan terkait, serta masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kawasan BBK. Pelaksanaan evaluasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dilakukan selama kurun waktu 2023–2047.

Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi kemudian dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan KPBPB BBK kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sebagai bentuk akuntabilitas dan digunakan sebagai masukan dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Tabel 6.1 Target dan Indikator Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

No.	Target	Indikator
Sektor Ekonomi		
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan	Capaian pertumbuhan ekonomi sesuai target dalam Rencana Induk.
2	Peningkatan peluang investasi kawasan	1. Capaian realisasi investasi sesuai target dalam Rencana Induk; dan 2. Capaian nilai <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) sesuai dengan target dalam Rencana Induk.
3	Peningkatan ekspor produk industri pengolahan dan manufaktur	Capaian realisasi ekspor sesuai target ekspor dalam Rencana Induk.
4	Peningkatan lapangan pekerjaan	Capaian realisasi pertumbuhan lapangan kerja sesuai target dalam Rencana Induk.
5	Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Peningkatan pemanfaatan produk UMKM dalam kegiatan ekonomi; dan 2. Tersedianya etalase produk UMKM di pusat perdagangan dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

No.	Target	Indikator
Sektor Logistik		
6	Efektivitas dan efisiensi sistem logistik	<ol style="list-style-type: none">1. Penurunan biaya transportasi logistik;2. Peningkatan tonase aktivitas bongkar muat;3. Pengurangan masa tunggu barang (<i>dwelling time</i>); dan4. Percepatan durasi waktu pelayanan administrasi.
Sektor Transportasi		
7	Pelayanan sistem transportasi yang terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan tingkat kemacetan; dan2. Pemerataan cakupan jaringan infrastruktur transportasi.
8	Kemudahan akses transportasi umum	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya lebih dari dua jenis moda transportasi publik dalam satu simpul transportasi;2. Biaya transportasi yang kompetitif;3. Peningkatan jaminan waktu tempuh;4. Peningkatan jumlah, kapasitas, dan frekuensi pelayanan moda transportasi;5. Peningkatan cakupan pelayanan moda transportasi umum; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

No.	Target	Indikator
		6. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum (aman, nyaman, dan inklusif).
Sektor Industri		
9	Terlaksananya pembangunan kegiatan industri dalam bisnis unggulan	Persentase progres pelaksanaan pembangunan industri yang sesuai dengan bisnis unggulan.
10	Peningkatan pertumbuhan industri	1. Peningkatan nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri; 2. Pertumbuhan ekspor produk industri; dan 3. Peningkatan nilai investasi untuk pembangunan industri.
11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri	1. Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri; dan 2. Peningkatan penyerapan persentase tenaga kerja lokal di sektor industri.
Sektor Pariwisata		
12	Peningkatan investasi dan nilai tambah ekonomi pariwisata	1. Peningkatan nilai pertumbuhan PDRB sektor pariwisata secara positif 6% (enam persen)/tahun; dan 2. Peningkatan realisasi investasi sektor pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

No.	Target	Indikator
13	Peningkatan jumlah dan kualitas wisatawan	1. Peningkatan persentase kunjungan wisatawan mancanegara dengan rata-rata kenaikan 3% (tiga persen) per 5 (lima) tahun terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia; 2. Peningkatan nilai belanja wisatawan; dan 3. Peningkatan lama tinggal (<i>length of stay</i>) dengan rata-rata 1 (satu) hari per 5 (lima) tahun.
14	Peningkatan daya saing destinasi kawasan pariwisata	1. Peningkatan realisasi pengembangan destinasi 10 (sepuluh) atraksi utama di setiap Kawasan BBK; dan 2. Peningkatan jumlah kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
Sektor Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
15	Peningkatan rata-rata kompetensi tenaga kerja	1. Peningkatan jumlah partisipasi dewasa dalam pelatihan formal dan non-formal; dan 2. Peningkatan rasio tenaga kerja tersertifikasi.
16	Peningkatan rata-rata tingkat pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi.
17	Peningkatan iklim riset dan inovasi	Peningkatan jumlah kolaborasi dan pemanfaatan riset dan inovasi lembaga penelitian dan pengembangan dengan sektor bisnis/industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

No.	Target	Indikator
Sektor Pertahanan dan Keamanan		
18	Pembangunan, peningkatan dan/atau pementapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	1. Terpenuhi skala Kekuatan Pokok Minimum/ <i>Minimum Essential Force</i> (sebagai garda terdepan/terluar Indonesia); dan 2. Terbangunnya pos pengamanan dengan fasilitas yang memadai.
19	Pembangunan ekonomi pulau terluar berbasis pertahanan di Kawasan BBK	Peningkatan pendapatan penduduk per rumah tangga.
Sektor Infrastruktur Pendukung		
20	Peningkatan pemerataan akses air bersih	1. Peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih; dan 2. Peningkatan persentase kawasan non-domestik yang mendapatkan pelayanan air bersih.
21	Peningkatan ketersediaan gas untuk industri	Peningkatan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

No.	Target	Indikator
22	Peningkatan proporsi limbah cair rumah tangga dan industri yang diolah secara aman	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan limbah cair dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPAL/IPLT);2. Peningkatan jumlah dan kapasitas IPAL/IPLT; dan3. Peningkatan jumlah industri yang memiliki sistem pengolahan limbah terpadu.
23	Peningkatan pemerataan pelayanan listrik	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan listrik; dan2. Peningkatan kualitas pelayanan listrik di kawasan non-domestik.
24	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan internet	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan cakupan pelayanan jaringan internet yang merata; dan2. Peningkatan kualitas jaringan internet.
25	Peningkatan proporsi limbah padat rumah tangga dan nondomestik yang diolah secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan jumlah limbah padat rumah tangga yang diolah secara berkelanjutan;2. Peningkatan jumlah limbah padat non-domestik yang diolah secara berkelanjutan;3. Peningkatan cakupan daerah pelayanan; dan4. Peningkatan jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Akhir/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPS) sesuai dengan kebutuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

No.	Target	Indikator
Sektor Lingkungan		
27	Penurunan tingkat pencemaran udara	Pencapaian indeks kualitas udara sesuai standar.
28	Peningkatan kualitas air permukaan	Pencapaian indeks kualitas air permukaan sebagai sumber air baku.
Sektor Penataan Kawasan		
29	Penyediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dan sanitasi)	1. Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat; dan 2. Perwujudan sistem sanitasi lingkungan sesuai standar kelayakan.
30	Penyediaan fasilitas publik (antara lain transportasi, taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)	1. Penyediaan lebih dari satu alternatif transportasi umum di pusat kegiatan dan pemukiman; dan 2. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 206 -

No.	Target	Indikator
		3. Penyediaan infrastruktur pejalan kaki yang aman, lengkap, inklusif, dan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di pusat kegiatan kota/kabupaten; dan 4. Penyediaan tempat perdagangan jasa dan ruang publik berada pada jarak berjalan kaki yang pendek dari permukiman dan perkantoran.
31	Penyediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk beraktivitas sosial di setiap area pemukiman atau paling jauh 400 (empat ratus) meter dari area pemukiman.
32	Penurunan angka kriminalitas	Penurunan kasus tindak kriminal di kabupaten/kota.
33	Peningkatan dukungan fungsi ekonomi skala mikro, kecil, dan menengah	Penyediaan tempat untuk UMKM pada pusat kegiatan tingkat kecamatan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman